PEMERINTAH
KAB. TAKALAR

P-RKPD 2024

Perubahan

RKPD KAB. TAKALAR

Tahun 2024

Peraturan Bupati Takalar
No. 15 Tahun 2024
Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu diubah dan ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Takalar Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 15 (lima belas) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak berakhirnya periode RPJMD sebelumnya

sampai dengan terpilihnya kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang emndasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah ptogram prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Takalar.
15. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Periode Tahun 2024.

2. Ketentuan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PERUBAHAN RKPD

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
    a. rancangan kerangka ekonomi daerah sampai akhir Desember 2024;
    b. prioritas pembangunan daerah sampai akhir Desember 2024; dan
    c. rencana kerja dan pendanaan sampai akhir Desember 2024.
(3) Selain muatan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perubahan RKPD 2024 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada hasil Evaluasi Triwulan 1 (satu) dan Triwulan 2 (dua) RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai :
    b. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
    c. acuan bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Takalar dalam mendukung capaian target dan sasaran Pembangunan Daerah; dan
    d. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2024 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2024 serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2024.

5. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

6. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII : PENUTUP
(2) Sistematika uraian Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan Rencana Perubahan APBD Tahun 2023:
a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana

Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitan dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian antara Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 29 Juli 2024

Pj. BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR **15**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen 7
1.4 Maksud dan Tujuan 8
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 8
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024 10
2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro 10
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 10
2.1.2 PDRB Perkapita 16
2.1.3 Indeks Gini 18
2.1.4 Angka Kemiskinan 19
2.1.5 Tingkat Pengangguran terbuka 22
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia 24
2.1.7 Nilai SAKIP Kabupaten Takalar 28
2.1.8 Aspek Kesejahteraan Sosial 30
2.1.9 Aspek Daya Saing 49
2.1.10 Aspek Pelayanan Umum 60
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Sampai Triwulan Ke II 97
2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 97
2.2.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024 99
2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2024 118
2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2024 sampai dengan Triwulan ke II 118
2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2024 sampai dengan Triwulan ke II 118

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2024 Triwulan selanjutnya 119
2.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 132
2.4 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024 136
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 137
3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah 137
3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro 137
3.2 Tantangan Perekonomian Daerah 145
3.2.1 Aspek Eksternal 145
3.2.2 Aspek Internal 146
3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah 146
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 148
3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah 148
3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah 153
3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah 160
BAB IV SASARAN DAN PRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 163
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 164
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 172
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 172
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 182
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 186
4.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 192
4.2.5 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Sasaran RPD 236
4.2.6 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 237
4.2.7 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar dan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 262
4.2.8 Pokok-Pokok Pikiran DPRD 275
BAB V RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 276
5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 276
5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 278

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 325
5.3.1 Dinas Pendidikan 326
5.3.2 Dinas Kesehatan 384
5.3.3 Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle 482
5.3.4 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 489
5.3.5 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 520
5.3.6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 537
5.3.7 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 544
5.3.8 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 563
5.3.9 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 575
5.3.10 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 594
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1035
6.1 Indikator Makro Pembangunan 1035
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 1037
6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1040
6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1139
6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 1148
BAB VII PENUTUP 1192
7.1 Kaidah Pelaksanaan 1192
7.2 Kesimpulan 1193

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023 11

Tabel II-2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Takalar (milyar rupiah) Tahun 2018 – 2022 13

Tabel II-3 Kontribusi Sektor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Per Sektor Lapangan Usaha di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 15

Tabel II-4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi antara Kabupaten Takalar Dengan Kabupaten/ Kota Se Kawasan Periode 2019 – 2023 16

Tabel II-5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 17

Tabel II-6 Perbandingan PDRB Perkapita antara Kabupaten Takalar Dengan Kabupaten/ Kota Se Kawasan Periode 2019 – 2023 18

Tabel II-7 Indeks Gini Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2023 18

Tabel II-8 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Kawasan Ekonomi Makassar Tahun 2019-2023 19

Tabel II-9 Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 20

Tabel II-10 Angka Kemiskinan (P0) Periode Maret Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018– 2023 20

Tabel II-11 Perbandingan Angka Kemiskinan antara Kabupaten Takalar Dengan Kabupaten/ Kota Se Kawasan Periode 2019 – 2023 21

Tabel II-12 Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Kabupaten Takalar Tahun 2016 – 2023 22

Tabel II-13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 23

Tabel II-14 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kawasan Ekonomi Makassar Tahun 2019-2023 24

Tabel II-15 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 24
Tabel II-16 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 25
Tabel II-17 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 26
Tabel II-18 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 26
Tabel II-19 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 27
Tabel II-20 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kawasan Ekonomi Makassar Tahun 2019-2023 28
Tabel II-21 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Kabupaten Takalar Tahun 202 dan 2022 28
Tabel II-22 Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 30
Tabel II-23 Data Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan di Kabupaten Takalar Tahun 2023 34
Tabel II-24 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 36
Tabel II-25 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kawasan Ekonomi Makassar Tahun 2019-2023 36
Tabel II-26 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Takalar Tahun 2020-2023 40
Tabel II-27 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 41
Tabel II-28 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 42
Tabel II-29 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023 43
Tabel II-30 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2023 43
Tabel II-31 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Kabupaten Takalar Tahun 2019 dan 2022 44
Tabel II-32 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar Tahun 2021 - 2023 46

Tabel II-33 Capaian Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Takalar Tahun 2018-2022 48
Tabel II-34 Skor IDSD Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2022 51
Tabel II-35 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional pada Tahun 2019 – 2022 53
Tabel II-36 Kapasitas Tampungan Air di Kabupaten Takalar pada Tahun 2019 – 2023 55
Tabel II-37 Angka Ketergantungan Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 56
Tabel II-38 Angka Kriminalitas di Kabupaten Takalar Tahun 2018-2022 57
Tabel II-39 Kasus Terlapor Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Takalar Tahun 2014-2022 58
Tabel II-40 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023 61
Tabel II-41 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar Kabupaten Takalar Tahun 2018 - 2023 62
Tabel II-42 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13- 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Takalar Tahun 2018 - 2023 63
Tabel II-43 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Takalar Tahun 2018 - 2022 64
Tabel II-44 Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 65
Tabel II-45 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 66
Tabel II-46 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023 67
Tabel II-47 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 68

Tabel II-48 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023 69
Tabel II-49 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 70
Tabel II-50 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 71
Tabel II-51 Persentase Warga Negara Usia Produktif (Usia 15-59 Tahun) Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 72
Tabel II-52 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 73
Tabel II-53 Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 74
Tabel II-54 Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 75
Tabel II-55 Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 75
Tabel II-56 Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 77
Tabel II-57 Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 78
Tabel II-58 Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2019 – 2023 79
Tabel II-59 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023 79
Tabel II-60 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023 80
Tabel II-61 Proporsi panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023 81

Tabel II-62 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023.....82
Tabel II-63 Jumlah Rumah Tangga Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2023 83
Tabel II-64 Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2019 – 2023.....83
Tabel II-65 Rasio kepatuhan IMB kab/kota domestik Tahun 2019 – 2023.....84
Tabel II-66 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota Tahun 2019 – 2023 85
Tabel II-67 Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Tahun 2019 – 2023 85
Tabel II-68 Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi Tahun 2019 – 2023.....86
Tabel II-69 Tabel Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan 86
Tabel II-70 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2023 86
Tabel II-71 Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021.....87
Tabel II-72 Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/Kota Yang Ditangani Tahun 2017 – 2021.....88
Tabel II-73 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Tahun 2017 – 2021.....89
Tabel II-74 Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Tahun 2017 – 2021.....89
Tabel II-75 Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Tahun 2019 – 2023.....90
Tabel II-76 Perda dan Perkada Yang Ditegakkan Tahun 2019 – 2023.....90
Tabel II-77 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2019 – 2023 91

Tabel II-78 Jumlah Warga Negara Yang Layanan Pencegahan dan Terhadap Bencana Memperoleh Pencegahan Kesiapsiagaan Tahun 2019 – 2023 92
Tabel II-79 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelematan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2017 – 2021 93
Tabel II-80 Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Terdampak Tahun 2023 93
Tabel II-81 Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2019 – 2023 94
Tabel II-82 Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM) Tahun 2019 – 2023 95
Tabel II-83 Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2023 96
Tabel II-84 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024 97
Tabel II-85 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 Hingga Triwulan II 100
Tabel II-86 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan II Tahun 2024 105
Tabel II-87 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan II Tahun 2024 110
Tabel II-88 Capaian kinerja RKPD berdasarkan urusan Pemerintahan 114
Tabel II-89 Visi, Misi, Tujuan. Sasaran dan Strategi Kabupaten Takalar 2023 – 2026 130
Tabel II-90 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 sesuai RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 133
Tabel II-91 Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 sesuai RPD kabupaten Takalar 2023 – 2026 136
Tabel III-1 Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2022–2024 (Persen, YoY) 139

Tabel III-2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 (Persen) 141
Tabel III-3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 (Persen) 142
Tabel III-4 Inflasi Kabupaten Takalar Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 (Persen) 143
Tabel III-5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 (Persen) 144
Tabel III-6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Takalar Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 (Persen) 145
Tabel III-7 Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Takalar Tahun 2024 146
Tabel III-8 Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 151
Tabel III-9 Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 159
Tabel III-10 Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 162
Tabel IV-1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Takalar dan Target Kinerja Tahun 2024 168
Tabel IV-2 Sandingan Sasaran Pembangunan Makro Kabupaten Takalar dan Arahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Capaian 2023 dan Target Kinerja Tahun 2024 170
Tabel IV-3 Target Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2024 182
Tabel IV-4 Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 184
Tabel IV-5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 187

Tabel IV-6 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2024 190
Tabel IV-7 Prioritas dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024 193
Tabel IV-8 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 195
Tabel IV-9 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 (Pagu Indikatif) 196
Tabel IV-10 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Sasaran RPD untuk Tahun 2024 236
Tabel IV-11 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabuaten Takalar dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 237
Tabel IV-12 Keselarasan Sasaran pembangunan Daerah terhadap Sasaran Prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024 239
Tabel IV-13 Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2024 244
Tabel IV-14 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabuaten Takalar Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2024 262
Tabel IV-15 Keselarasan Sasaran pembangunan Daerah terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 263
Tabel IV-16 Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 266
Tabel V-1 Rincian Kerangka Pendanaan Tahun 2024 277
Tabel V-2 Sandingan Prioritas Pembangunan RKPD 2024 Dengan Perubahan RKPD 2024 280
Tabel VI-1 Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Takalar Tahun 2023-2025 1036
Tabel VI-2 Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Takalar Tahun 2025 1038
Tabel VI-3 Asumsi Capaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Takalar 1041
Tabel VI-4 Realisasi SPM Kabupaten Takalar Tahun 2023 dan Target 2024 (Permendagri No 59 Tahun 2021) 1140

Tabel VI-5 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Takalar Tahun 2024 1149

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen 8
Gambar IV-1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah 166
Gambar IV-2 Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 174
Gambar IV-3 Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024 175
Gambar IV-4 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 176
Gambar IV-5 Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 177
Gambar IV-6 Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi 180

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR ....
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 13
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan dan/atau perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pada Pasal 343 ayat (1) mengamanahkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan :

a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. Target sasaran pembangunan Daerah;
c. Prioritas pembangunan Daerah;
d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Proses pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 mengalami dinamika yang disebabkan antara lain oleh adanya kebijakan nasional yang berimplikasi pada ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan kerangka keuangan daerah, serta kondisi lain yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan Tahun 2024 melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 345, Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan Tahun 2023 sampai dengan tahun berjalan (semester I) dan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Data capaian indikator makro Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan II belum tersedia sampai dengan dilakukannya penyusunan perubahan RKPD 2024 sehingga gambaran capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Takalar masih menggunakan realisasi Tahun 2023 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 3,58; Tingkat Kemiskinan 8,29; Tingkat

Pengangguran Terbuka 3,58; Gini Rasio 0,386; Indeks Pembangunan Manusia 71,46; dan PDRB Perkapita (ADHB) 41,14 Juta/Rp.

Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke II (Kedua) pelaksanaan RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD Takalar Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah, serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024, serta memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Takalar pada RKPD Pokok Tahun 2024, maupun untuk menampung perubahan belanja prioritas dalam APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024.

Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 7);
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor ...);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 309);
34. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3);
35. Peraturan Bupati Takalar Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor 13).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan sinergitas terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan.
2. Keterkaitan Perubahan RKPD Kabupaten Takalar dan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Takalar dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Pembangunan Nasional;
3. Perubahan RKPD Kabupaten Takalar dan dokumen RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur, dan merupakan pelaksanaan Tahun Pertama RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.
4. Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah satu kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap PD. Sebagai bagian dari langkah pembaharuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RENJA-PD Tahun 2024.

Gambar I-1
Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 dari penyusunan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah serta rencana program/kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan 2.

Tujuan dari penyusunan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2024 ini adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja PD, serta menjadi dasar Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan RKPD**.**

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024
Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2024 serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini memaparkan rancangan tentang Arah kebijakan ekonomi Daerah dan Arah kebijakan keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan tentang Sasaran Pembangunan Daerah serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rincian perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai pagu indikatifnya.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2023 dan sebagian telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Visi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam RPJPD Kabupaten Takalar 2005-2025 adalah "**Masyarakat Mandiri, Demokratis, Berkeadilan Sosial Dan Sejahtera Lahir Bathin**". Visi tersebut diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 melalui Tiga Tujuan, dan Delapan Sasaran Pembangunan dengan 14 Indikator Kinerja. Memasuki pertengahan Tahun Anggaran 2024 dalam tahun berjalan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar memandang perlu melakukan perubahan RKPD Tahun 2024. Hal ini didasarkan pada adanya kondisi social dan ekonomi yang sudah tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKPD Tahun 2024.

Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024, untuk menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2024. Sehubungan dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024.

2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu cara untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu daerah yakni dengan mencermati nilai dan pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dihitung menurut harga berlaku dan

harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Kondisi PDRB ADHK dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	PDRB ADHK (milyar Rp.)	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
1	2019	6.616,25	6,87
2	2020	6.575,76	-0,61
3	2021	6 908,05	5,05
4	2022	7 228,40	4,64
5	2023	7.507,06	3,86
Rata-rata		***4.139,81***	***3,96***

Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka 2024 (BPS)

Pada periode 2019-2023, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni 6,87 persen. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup besar dan mengalami perlambatan sebesar -0,61 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan sebesar 5,05 persen, kemudian kembali menurun di Tahun 2022 menjadi 4,64 persen dan 3,86 persen pada tahun 2023.

Kontraksi ekonomi yang besar di Tahun 2020 merupakan dampak dari Pandemic Covid-19, dimana pada kondisi tersebut terjadi pembatasan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 yang tumbuh sangat signifikan dari kondisi Tahun 2020 merupakan *factor low base effect*, dimana kondisi awal yang sangat rendah, sehingga kenaikan yang sangat kecil sekalipun akan diterjemahkan ke dalam bentuk perubahan persentase yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Tahun 2021 belum dapat diasumsikan bahwa indikator ekonomi telah pulih sepenuhnya.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel dan Nasional pada Tahun 2023, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar berada lebih rendah 0,65 poin dari pertumbuhan ekonomi Sulsel dan

1,19 poin dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2023 juga belum mencapai target pertumbuhan ekonomi untuk Tahun 2023 yang telah ditetapkan berada pada range 5,04%-6,52%.

Secara spesifik, Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 baik berdasarkan harga konstan 2010 maupun harga berlaku disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Takalar (milyar rupiah) Tahun 2018 – 2022

NO	SEKTOR	TAHUN									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	5.033,40	3.121,40	5.019,28	3.027,89	5.699,39	3.297,61	6.320,33	3.413,74	6.530,13	3.543,31
2	Pertambangan Dan Penggalian	178,39	103,54	185,98	106,41	194,26	109,76	208,08	112,54	229,29	120,58
3	Industri Pengolahan	527,48	366,37	518,24	358,77	534,69	366,41	604,13	398,09	639,11	409,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,52	11,49	11,49	11,77	12,26	12,00	12,86	12,22	13,83	12,76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	4,08	3,36	4,52	3,65	4,82	3,86	5,29	4,19	5,54	4,35
6	Konstruksi	755,31	458,05	749,41	453,33	776,83	465,14	865,43	488,56	939,05	513,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	1.260,83	949,19	1.264,65	935,77	1.340,95	975,04	1.475,83	1.029,75	1.601,04	1.075,53
8	Transportasi dan Pergudangan	271,98	206,02	265,67	197,97	279,50	204,25	314,71	219,22	357,45	230,35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	33,56	23,23	31,99	21,58	33,52	22,36	37,08	24,06	40,96	25,87
10	Informasi Dan Komunikasi	369,24	274,31	410,77	302,93	426,28	313,53	455,91	330,52	490,50	351,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	165,68	84,45	177,11	90,10	198,32	96,58	214,10	97,03	212,76	95,02
12	Real Estate	538,85	386,11	540,02	383,44	546,61	387,56	595,75	410,21	639,89	434,56
13	Jasa Perusahaan	0,59	0,45	0,58	0,43	0,59	0,43	0,67	0,47	0,77	0,51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	724,10	446,85	734,49	445,52	748,12	450,18	788,53	472,03	776,95	458,92
15	Jasa Pendidikan	134,24	92,03	141,35	96,13	147,85	100,69	152,71	102,75	164,37	108,02
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123,53	72,55	142,38	79,84	159,04	87,17	180,00	96,51	197,62	103,87
17	Jasa Lainnya	24,56	16,86	22,38	15,22	23,06	15,47	25,64	16,50	29,12	18,22
PDRB		***10.157,35***	***6.616,25***	***10.220,31***	***6.575,76***	***11.126,11***	***6.908,05***	***12.257,05***	***7.228,40***	***12.868,38***	***7.507,06***

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2024

Penurunan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 (5,05), Tahun 2022 (4,64) dan Tahun 2023 (3,86) terjadi karena pertumbuhan dua lapangan usaha utama Kabupaten Takalar melambat. Laju pertumbuhan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor dengan distribusi terbesar terhadap PDRB mengalami penurunan yang signifikan (3,79 poin) dari 7,31 di Tahun 2021 menjadi 3,52 di Tahun 2022. Meskipun laju pertumbuhan di Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 3,80, namun peningkatannya tidak cukup signifikan yang hanya 0,28 poin.

Sektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB juga mengalami penurunan yang cukup signifikan pada laju pertumbuhannya dari 5,61 pada Tahun 2022 turun 1,16 poin menjadi 4,45 di Tahun 2023. Kontribusi Sektor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Per Sektor Lapangan Usaha di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-3
Kontribusi Sektor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Per Sektor Lapangan Usaha di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

No	SEKTOR	Kontribusi terhadap PDRB ADHB					Laju Pertumbuhan per Sektor				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	49,55	49,11	51,23	51,56	50,75	5,58	-1,55	3,52	7,31	3,80
2	Pertambangan Dan Penggalian	1,76	1,82	1,75	1,70	1,78	6,42	2,77	2,53	3,14	7,15
3	Industri Pengolahan	5,19	5,07	4,81	4,93	4,97	10,17	-2,07	8,64	2,13	2,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,10	0,11	14,27	2,52	1,86	1,91	4,37
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	3,80	8,61	8,76	5,61	3,80
6	Konstruksi	7,44	7,33	6,98	7,06	7,30	5,48	-1,03	5,03	2,61	5,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	12,41	12,37	12,05	12,04	12,44	8,69	-1,41	5,61	4,20	4,45
8	Transportasi dan Pergudangan	2,68	2,60	2,51	2,57	2,78	8,59	-1,91	7,33	3,18	5,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,33	0,31	0,30	0,30	0,32	8,49	-7,10	7,59	3,63	7,52
10	Informasi Dan Komunikasi	3,64	4,02	3,83	3,72	3,81	8,52	10,43	5,24	3,50	6,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,63	1,73	1,78	1,75	1,65	5,35	6,70	0,47	7,19	-2,08
12	Real Estate	5,31	5,28	4,91	4,86	4,97	5,77	-0,69	5,84	1,07	5,94
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	9,74	-4,91	8,96	1,32	9,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,13	7,19	6,72	6,43	6,04	11,06	-0,30	4,85	1,05	-2,78
15	Jasa Pendidikan	1,32	1,38	1,33	1,25	1,28	6,04	4.45	2,04	4,75	5,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,22	1,39	1,43	1,47	1,54	5,24	10,05	10,72	9,17	7,62
17	Jasa Lainnya	0,24	0,22	0,21	0,21	0,23	6,42	-9,72	6,66	1,66	10,37
PDRB		***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***6,87***	***-0,61***	***5,05***	***4,64***	***3,86***

Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2024 (BPS)

Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yakni Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2023 sebesar 3,86 persen lebih rendah dari Kabupaten Gowa dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen dan lebih tinggi dari Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto yang sebesar 1,90 persen. Jika dibandingkan dengan daerah se kawasan, Kabupaten Takalar yang tergabung dalam Kawasan Ekonomi Makassar bersama Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2023 merupakan yang terendah. Sedangkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan ini adalah Kabupaten Gowa. Perbandingan pertumbuhan ekonomi antara kabupaten/kota dalam Kawasan Ekonomi Makassar pada periode 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi antara Kabupaten Takalar Dengan Kabupaten/ Kota Se Kawasan Periode 2019 – 2023

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Takalar	6,87	-0,61	5,05	4,64	3,86
Gowa	7,46	1,76	7,26	4,59	5,82
Makassar	8,79	-1,27	4,47	5,40	5,31
Maros	1,24	-10,87	1,36	9,13	5,00
Pangkep	6,41	-1,69	3,46	4,93	4,75

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan

2.1.2 PDRB Perkapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah PDRB per kapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Nilai PDRB perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pada periode pertengahan tahun berkenaan. Nilai ini menunjukkan rata-rata banyaknya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk.

PDRB Per Kapita Kabupaten Takalar mengalami tren peningkatan di tiga tahun terakhir, dimana pada Tahun 2021 PDRB Per Kapita Kabupaten Takalar sebesar Rp. 36,58 juta meningkat Rp. 3,15 juta (8,6 persen) menjadi Rp. 39,73 juta di Tahun 2022. Kemudian meningkat lagi sebesar Rp. 1,41 Juta (3,55 persen) menjadi Rp. 41,14 juta di Tahun 2023. Capaian PDRB Per

Kapita Tahun 2023 sendiri telah melewati target yang telah ditetapkan. Target PDRB Per Kapita Kabupaten Takalar Tahun 2023 ditetapkan di angka Rp. 34,03 juta. Dengan capaian pada Tahun 2023 sebesar Rp. 41,14 juta, maka capaian tersebut telah melampaui target sebesar Rp. 7,11 juta atau 20,89%.

Pada Tahun 2023, Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Takalar dengan kontribusi mencapai 50,75 persen. Hal ini menandakan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Takalar berpenghasilan dari sektor tersebut. Namun demikian, laju pertumbuhan sektor ini cenderung melambat, sehingga membutuhkan upaya baru untuk memacunya misalnya dengan hilirisasi komoditi lokal untuk meningkatkan nilai jualnya. Hal ini sejalan dengan pengembangan Proyek Startegis Nasional Kawasan Industri Kecamatan Laikang yang mana sebagai langkah awal akan dikembangkan industri pengolahan jagung kuning dan rumput laut. Beberapa sektor usaha juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih rendah. Sektor yang tumbuh diatas 7 persen antara lain pertambangan dan penggalian, penyediaan akomodasi dan makanan, kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa lainnya. Bahkan untuk sektor jasa lainnya yang didalamnya mencakup jasa editor, fotografi, videografi, desain grafis dan sektor ekonomi kretif lainnya, pertumbuhannya mencapai 10,37 persen. Pertumbuhan sektor usaha yang mayoritas digeluti oleh kaum Millenial dan Gen Z ini menandakan tingkat kreativitas dan motivasi berusaha masyarakat Takalar cukup tinggi serta perlahan-lahan mulai memiliki paradigma baru pada sektor usaha.

Jika dibandingkan dengan PDRB perkapita provinsi dan nasional, PDRB perkapita Kabupaten Takalar Tahun 2023 masih jauh lebih rendah dari PDRB perkapita Provinsi Sulsel (69,7 juta) dan PDRB perkapita nasional (75 juta). Data PDRB Perkapita Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2019 – 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-5
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2023 dan BPS Provinsi Sulsel, 2023

Sedangkan bila dibandingkan dengan PDRB Perkapita Kabupaten/ Kota sekawasan, Kabupaten Takalar yang merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Makassar memiliki PDRB perkapita yang sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Gowa namun jauh di bawah empat wilayah lainnya.

Perbandingan PDRB Perkapita antar kabupaten/kota dalam Kawasan Ekonomi Makassar disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-6
Perbandingan PDRB Perkapita antara Kabupaten Takalar Dengan Kabupaten/ Kota Se Kawasan Periode 2019 – 2023

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Takalar	34,42	34,03	36,58	39,73	41,14
Gowa	27,50	28,20	30,36	32,50	35,52
Makassar	117,30	125,32	132,68	144,60	155,95
Maros	64,60	47,73	47,96	58,55	64,69
Pangkep	77,68	74,38	79,12	86,58	91,86

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan

2.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini Kabupaten Takalar pada Tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Dari 0,356 di Tahun 2020 terus meningkat hingga mencapai 0,386 di Tahun 2023. Capaian indeks gini Tahun 2023 tersebut juga melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahun berkenaan yakni 0,35 dengan kelebihan sebesar 0,03 poin (8,57%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tinggi yang disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan (didekati dengan pengeluaran) di beberapa lapisan masyarakat relatif belum stabil. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sulsel dan nasional Tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Takalar lebih tinggi 0,01 poin dibanding provinsi dan setara dengan indeks gini nasional. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional pada Tahun 2019 s.d. 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-7
Indeks Gini Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2023

No	Indeks Gini	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Takalar	0,482	0,356	0,368	0,375	0,386

2.	Sulsel	0,389	0,389	0,382	0,377	0,377
3.	Nasional	0,382	0,381	0,384	0,384	0,388

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2024

Sedangkan bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Kawasan Ekonomi Makassar, pada Tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Takalar bersama Kota Makassar yang berada diangka 0,38 menjadi yang tertinggi di kawasan tersebut. Sedangkan Indeks Gini yang terendah adalah Kabupaten Pangkep dengan nilai 0,35. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/ Kota dalam Kawasan Ekonomi Makassar pada Tahun 2019 s.d. 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-8
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota
di Kawasan Ekonomi Makassar Tahun 2019-2023

No	Indeks Gini	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Takalar	0,482	0,356	0,368	0,375	0,386
2.	Gowa	0,354	0,345	0,358	0,364	0,376
3.	Makassar	0,390	0,400	0,400	0,395	0,387
4.	Maros	0,382	0,368	0,365	0,362	0,372
5.	Pangkep	0,328	0,345	0,363	0,334	0,354

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2024

2.1.4 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin dari keseluruhan jumlah penduduk di suatu wilayah. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan di bawah garis kemiskinan. Trend perubahan jumlah penduduk miskin Kabupaten Takalar dari Tahun 2018 s.d. 2022 cenderung menurun. Namun pada Tahun 2023, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 8,25 persen di Tahun 2022 menjadi 8,29 persen. Angka kemiskinan Tahun 2023 ini juga jauh melampaui target yang telah ditetapkan di tahun berkenaan yang sebesar 7,09 persen dengan kelebihan sebesar 1,2 persen.

Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga yang cukup signifikan pada sebagian besar indeks kelompok pengeluaran pada Bulan Maret 2023, dimana kenaikan terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,22 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,51 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,58 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,10 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,89

persen; kelompok transportasi sebesar 13,63 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,89 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,06 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,53 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,91 persen.

Kenaikan harga ini juga berimbas pada meningkatanya garis kemiskinan di Kabupaten Takalar. Meskipun garis kemiskinan pada sepuluh tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Namun, Kenaikan Garis Kemiskinan secara signifikan terjadi pada Tahun 2023, dimana kenaikannya mencapai Rp. 29.879,- (7,49persen) dari Rp. 399.062,- perkapita/bulan di Tahun 2022 menjadi Rp. 428.941,- perkapita/bulan di Tahun 2023. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Takalar pada periode Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-9
Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/capital/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Angka Kemiskinan
2019	356.973	25,93	8,70
2020	364.378	25,38	8,44
2021	380.564	24,60	8,25
2022	399.062	24,75	8,25
2023	428.941	25,01	8,29

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Kenaikan tingkat kemiskinan pada Tahun 2023 juga terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dimana tingkat kemiskinan pada Maret Tahun 2022 sebesar 8,63 persen naik menjadi 8,70 persen di Maret Tahun 2023. Sedangkan secara nasional, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 9,54 persen di Maret 2022 menjadi 9,36 persen di Maret 2023. Perbandingan angka kemiskinan antara Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional untuk periode 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-10
Angka Kemiskinan (P_0) Periode Maret
Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018– 2023

Tahun	Wilayah

	Takalar	Sulawesi Selatan	Nasional
2019	8,70	8,69	9,41
2020	8,44	8,72	9,78
2021	8,25	8,78	10,14
2022	8,25	8,63	9,54
2023	8,29	8,70	9,36

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Sedangkan jika dibandingkan dengan wilayah sekawasan seperti Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, angka kemiskinan Kabupaten Takalar Tahun 2023 lebih rendah 1,36 poin jika dibandingkan dengan Kabupaten Maros dan lebih rendah 5,11 poin jika dibandingkan dengan Kabupaten Pangkep. Namun jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, angka kemiskinan Kabupaten Takalar lebih tinggi. Perbandingan angka kemiskinan antara Kabupaten Takalar dengan kabupaten/ kota se kawasan periode 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-11
Perbandingan Angka Kemiskinan antara Kabupaten Takalar Dengan Kabupaten/ Kota Se Kawasan Periode 2019 – 2023

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Takalar	8,70	8,44	8,25	8,25	8,29
Gowa	7,53	7,38	7,54	7,36	7,42
Makassar	4,28	4,54	4,82	4,58	5,07
Maros	9,89	9,74	9,57	9,43	9,65
Pangkep	14,06	13,96	14,28	13,92	13,40

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan, terjadi penurunan dari 0,88 di Tahun 2022 menjadi 0,81 di Tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Kondisi ini berbanding lurus dengan

ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang juga semakin menyempit. Ini ditunjukkan dengan kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan, dimana terjadi penurunan dari 0,15 di Tahun 2022 menjadi 0,11 di Tahun 2023. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Takalar untuk Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-12
Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Kabupaten Takalar
Tahun 2016 – 2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
2018	1,61	0,39
2019	1,08	0,19
2020	1,09	0,21
2021	1,03	0,17
2022	0,88	0,15
2023	0,81	0,11

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar

Peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sampai ke Pemerintah Desa sangat diharapkan dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Berbagai program dan kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat menekan peningkatan angka kemiskinan. Diantaranya Dana desa yang dialokasikan sejak tahun 2015 dan berbagai program social lainnya, dan Alokasi anggaran penanganan Covid 19 Tahun 2020 dalam bentuk Bantuan Sosial dan Pemulihan Ekonomi masyarakat.

2.1.5 Tingkat Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok sebagai berikut:

1. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan
2. Penduduk yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
3. Penduduk yang tidak memiliki usaha dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan
4. penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/ pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Capaian tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Takalar pada tahun 2023 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar

diperoleh hasil sebesar 3,58 persen meningkat 0,95 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ini juga melebihi target TPT yang ditetapkan untuk Tahun 2023 yakni sebanyak 3,32 persen dengan kelebihan 0,26 poin. Namun jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulsel dan Nasional, capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Takalar tahun 2023 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 4,33 persen dan Nasional yaitu sebesar 5,32 persen. Pada Bulan Agustus 2023, Jumlah pengangguran laki-laki sebanyak 2.957 Jiwa sedangkan pengangguran perempuan sebanyak 2.584 jiwa, sehingga total pengangguran terbuka sebanyak 5.541 jiwa. Hal ini menginterpretasikan bahwa persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran di Kabupaten Takalar masih cukup tinggi.

Indikator ini juga menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap supply tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan, indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut. Data TPT Kabupaten Takalar di atas menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 3,58 orang merupakan pengangguran. Perbandingan tingkat pengangguran terbuka antara Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional untuk Tahun 2019 – 2023 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel II-13
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka		
		Takalar	Provinsi	Nasional
1	2019	3,78	4,62	5,23
2	2020	4,16	6,31	7,07
3	2021	3,93	5,72	6,49
4	2022	2,63	4,51	5,86
5	2023	3,58	4,33	5,32

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2023 dan BPS Provinsi Sulsel, 2023

Bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota yang berada di Kawasan Ekonomi Makassar, TPT Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 sedikit lebih tinggi dari TPT Kabupaten

Gowa yang merupakan kabupaten dengan TPT terendah di kawasan tersebut. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan TPT tertinggi adalah Kota Makassar dengan nilai TPT sebesar 10,60. Perbandingan TPT kabupaten/kota yang berada di Kawasan Ekonomi Makassar untuk Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-14
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten/Kota di Kawasan Ekonomi Makassar Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Takalar	3,78	4,16	3,93	2,63	3,58
2.	Gowa	4,35	6,44	4,30	3,26	3,43
3.	Makassar	9,83	15,92	13,18	11,82	10,60
4.	Maros	4,42	6,28	6,30	5,04	3,64
5.	Pangkep	4,99	5,18	5,86	5,23	5,05

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2024

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Takalar merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk Kabupaten Takalar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Usia Harapan Hidup (UHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah).

2.1.6.1 Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. UHH Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2019-2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-15
Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Tahun	Usia Harapan Hidup		
		Takalar	Provinsi	Nasional
1	2019	67,01	70,43	71,34

2	2020	67,18	70,57	71,47
3	2021	67,30	70,66	71,57
4	2022	67,64	70,97	71,85
5	2023	71,46	71,22	73,93

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2023 dan BPS Provinsi Sulsel, 2023

Pada Tahun 2023, Badan Pusat Statistik melakukan pemutakhiran sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2010 dengan menggunakan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang memberikan gambaran lebih terkini. Dengan penggunaan sistem baru ini, UHH Kabupaten Takalar Tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan, dimana UHH Kabupaten Takalar pada Tahun 2022 67,64 tahun meningkat 3,82 poin di Tahun 2023 menjadi 71,46 tahun. UHH Kabupaten Takalar Tahun 2023 lebih tinggi dari UHH Sulsel, namun lebih rendah dari UHH nasional. Hal ini tentu saja juga akan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.1.6.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 tahun ke atas di masa yang akan datang. Harapan lama sekolah memberikan gambaran tentang perkembangan sistem pendidikan di berbagai tingkatan, yang diukur melalui jumlah tahun pendidikan yang diperkirakan bisa diselesaikan oleh anak-anak di wilayah tersebut. Harapan lama sekolah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2019-2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-16
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah		
		Takalar	Provinsi	Nasional
1	2019	12,25	13,36	12,95
2	2020	12,41	13,45	12,98
3	2021	12,42	13,52	13,08
4	2022	12,48	13,53	13,1
5	2023	12,49	13,54	13,15

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2023 dan BPS Provinsi Sulsel, 2023

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 adalah 12,49 tahun, yang berarti anak berusia 7 tahun pada 2023 diharapkan dapat bersekolah selama 12,49 tahun atau sampai dengan jenjang sekolah menengah atas tahun terakhir. Harapan lama sekolah mengalami peningkatan 0,01 tahun dari Tahun 2022 (HLS 2022 selama 12,48 tahun).

Namun demikian, Harapan lama sekolah Kabupaten Takalar tetap masih lebih rendah dari HLS Provinsi dan HLS Nasional.

2.1.6.3 Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS dijadikan indikator untuk mengukur kualitas pendidikan yang dimiliki oleh penduduk di suatu daerah. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2019-2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-17
Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah		
		Takalar	Provinsi	Nasional
1	2019	7,18	8,26	8,34
2	2020	7,29	8,38	8,48
3	2021	7,49	8,46	8,54
4	2022	7,64	8,63	8,69
5	2023	7,66	8,76	8,77

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2023 dan BPS Provinsi Sulsel, 2023

Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 adalah 7,66 tahun, yang berarti bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas menyelesaikan pendidikannya hingga kelas VII SMP. Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan 0,02 tahun dari Tahun 2022 (RLS 2022 selama 7,64tahun). Namun demikian, Rata-rata lama sekolah Kabupaten Takalar tetap masih lebih rendah dari RLS Provinsi dan HLS Nasional.

2.1.6.4 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Pengeluaran perkapita disesuaikan menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2019-2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-18
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Tahun	Pengeluaran Kapita Disesuaikan (Ribu/orang/tahun)		
		Takalar	Provinsi	Nasional

1	2019	10.474	11.118	11.299
2	2020	10.454	11.079	11.013
3	2021	10.543	11.184	11.156
4	2022	10.746	11.430	11.479
5	2023	11.239	11.841	11.899

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2023 dan BPS Provinsi Sulsel, 2023

Pengeluaran Perkapita disesuaikan Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 adalah Rp. 11.239.000 per orang per tahun naik Rp. 493.000,-. Dibandingkan Tahun 2022 (4,59persen). Pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten Takalar masih lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Berdasarkan data komposit IPM di atas, maka capaian IPM Kabupaten Takalat, Provinsi Sulsel dan Nasional tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-19
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia		
		Takalar	Provinsi	Nasional
1	2019	66,94	71,66	71,92
2	2020	67,31	71,93	71,94
3	2021	67,72	72,24	72,29
4	2022	68,31	72,82	72,91
5	2023	71,46	74,6	73,39

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2023 dan BPS Provinsi Sulsel, 2023

Penggunaan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang oleh Badan Pusat Statistik dalam melakukan pemutakhiran sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2010 berdampak pada perubahan nilai IPM yang cukup signifikan di hampir seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Takalar, dimana capaian IPM Kabupaten Takalar berubah 3,15 poin dari 68,31 pada Tahun 2022 menjadi 71,46 pada Tahun 2023. Capaian IPM Tahun 2023 ini juga telah melampaui target yang telah ditetapkan di tahun berkenaan yang sebesar 68,83 dengan kelebihan sebesar 2,63 poin atau sebesar 3,8 persen. Namun demikian, IPM Kabupaten Takalar masih lebih rendah dari IPM Provinsi Sulsel dan IPM Nasional. Apabila melihat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023, Kabupaten Takalar menempati urutan 18 di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari tahun ke tahun, nilai IPM Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Takalar .

Bila dibandingkan dengan tingkat IPM kabupaten/kota yang berada di Kawasan Ekonomi Makassar, IPM Kabupaten Takalar pada Tahun

2023 merupakan IPM yang terendah. Sementara Kota Makassar menjadi wilayah dengan nilai IPM tertinggi dengan nilai capaian sebesar 84,85. Perbandingan IPM kabupaten/kota yang berada di Kawasan Ekonomi Makassar untuk Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-20
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kawasan Ekonomi Makassar Tahun 2019-2023

No	IPM	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Takalar	66,94	67,31	67,72	68,31	71,46
2.	Gowa	69,66	70,14	70,29	70,99	73,01
3.	Makassar	82,25	82,25	82,66	83,12	84,85
4.	Maros	69,50	69,86	70,41	71,00	73,56
5.	Pangkep	68,29	68,72	69,21	69,79	73,23

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2024

2.1.7 Nilai SAKIP Kabupaten Takalar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI akan melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) yang merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dengan tujuan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government) pada setiap lembaga pemerintahan. Hasil evaluasi AKIP Kabupaten Takalar pada Tahun 2019 s.d. 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-21
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) Kabupaten Takalar Tahun 202 dan 2022

Komponen Yang Dinilai	Nilai				
	2018	2019	2020	2022	2023
Perencanaan Kinerja	20,67	20,65	21,08	21,41	21,59
Pengukuran Kinerja	12,32	12,14	13,07	17,78	18,30
Pelaporan Kinerja	10,19	10,16	10,29	10,31	10,33
Evaluasi Kinerja	3,70	3,70	4,01	11,95	13,15
Capaian Kinerja	11,16	10,93	10,93		

Nilai Hasil Evaluasi	**58,04**	**57,58**	**59,38**	**61,45**	**63,37**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	**CC**	**CC**	**CC**	**B**	**B**

Sumber : Kementerian PAN RB RI

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 terjadi perubahan pembobotan komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian SAKIP sehingga hasil evaluasi tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2023, Nilai SAKIP Kabupaten Takalar mengalami peningkatan sebesar 1,92 poin dari 61,45 di Tahun 2022 menjadi 63,37 dan tetap dengan predikat B. meskipun mengalami peningkatan, masih terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilaksanakan yaitu :

a. Memastikan keselarasan pada dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah antara renstra, perjanjian kinerja dan IKU
b. Memastikan dalam melakukan penjabaran kinerja harus dimulai dengan menyusun pohon kinerja berdasarkan logical framework yang menggambarkan hubungan "sebab-akibat" dan berdasarkan Critical Success Factor (CSF) antar level kondisi kinerja yang dijabarkan sehingga dapat dipastikan pencapaian kinerja level bawah berpengaruh pada pencapaian kinerja level diatasnya;
c. Mereviu kembali perencanaan kinerja pada seluruh unit kerja untuk dapat merumuskan sasaran strategisnya lebih berorientasi outcome pada level kinerjanya dan juga memastikan indikator kinerja yang dimiliki dapat relevan;
d. Mereviu dan memperbaiki formulasi indikator kinerja yang belum tepat agar data kinerja yang dihasilkan dapat lebih handal dan mencerminkan kinerja yang diharapkan;
e. Mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja baik tingkat unit kerja dan individu pegawai sehingga akan terjaga kesesuaian antara kinerja unit kerja dan kinerja individu pegawai;
f. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit/satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling pimpinan unit/satuan kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;
g. Menyelaraskan data target yang dilaporkan pada laporan kinerja dengan dokumen PK yang diperjanjikan pada awal tahun. Kemudian

meningkatkan kualitas data yang disajikan pada laporan kinerja agar dapat menyampaikan kinerja sesuai yang diharapkan;

h. Merumuskan mekanisme monitoring tindak lanjut unit kerja terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi yang diberikan oleh pengawas internal sudah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
i. Mendorong adanya kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga akan mendorong percepatan peningkatan implementasi AKIP di unit/satuan kerja.

2.1.8 Aspek Kesejahteraan Sosial

2.1.8.1 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan berdasarkan metode baru yang digunakan oleh BPS memperhitungkan 2 faktor yakni Harapan Lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS), merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan didapatkan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. HLS dihitung pada rentang usia 7 tahun ke atas sesuai kebijakan program wajib belajar yang dijalankan oleh pemerintah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pemilihan rentang umur 25 tahun ke atas pada penghitungan RLS diasumsikan bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Berdasarkan standar internasional yang digunakan UNDP batas maksimum Harapan Lama Sekolah 18 tahun sedangkan batas maksimum Rata-rata Lama Sekolah 15 tahun.

Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya. Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 sebesar 60,23, meningkat 0,1 poin dari capaian Tahun 2022. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Takalar. Meskipun demikian, Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar masih jauh di bawah Indeks Pendidikan Provinsi Sulsel dengan selisih 6 poin hampir di setiap tahunnya. Perbandigan antara Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulsel untuk Tahun 2013 – 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-22
Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

No	Tahun	Indeks Pendidikan	
		Takalar	Provinsi
1	2013	51,17	59,61
2	2014	53,32	60,80
3	2015	54,17	61,55
4	2016	55,47	62,38
5	2017	56,48	63,38
6	2018	56,98	63,79
7	2019	57,96	64,64
8	2020	58,77	65,29
9	2021	59,47	65,76
10	2022	60,13	66,34
11	2023	60,23	

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

2.1.8.2 *Angka literasi dan Numerasi*

Program Penilaian Pelajar Internasional (*Program for International Student Assessment*, disingkat PISA) adalah studi penilaian tingkat internasional yang diselenggarakan oleh OECD untuk mengevaluasi sistem pendidikan di dunia dengan mengukur performa akademik pelajar sekolah berusia 15 tahun pada bidang matematika, sains, dan literasi membaca. PISA pertama kali dilaksanakan pada tahun 2000, dan diselenggarakan setiap tiga tahun. Tujuannya adalah untuk mendorong negara-negara saling belajar satu sama lain mengenai sistem pendidikan sehingga mampu membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif secara efektif. Program penilaian ini mengukur kemampuan kognisi dan pemecahan masalah. PISA merupakan bentuk penilaian internasional yang mengukur tiga aspek yaitu literasi membaca (literasi), matematika (numerasi), dan sains. Penilaian ini dilakukan untuk siswa berusia 15 tahun yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Waktu tiga tahun bisa dijadikan titik tujuan jangka pendek, memperbaiki sistem pendidikan secara perlahan.

Di Kabupaten Takalar, pengukuran PISA baru mencakup dua aspek yakni literasi dan numerasi, dan untuk aspek sains belum dilakukan pengukuran. Untuk tingkat sekolah dasar, angka literasi dan numerasi meningkat cukup pesat pada dua tahun terkahir ini. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, Angka literasi sekolah dasar pada tahun 2024 sebesar 47,71 poin meningkat 5,54 poin dari Tahun 2023 yang capaiannya sebesar 42,17 poin. Sedangkan angka numerasi sekolah dasar peningkatannya lebih signifikan lagi dimana angka numerasi pada Tahun 2024 mencapai 44,31 poin, meningkat 10,71 poin dari capaian tahun 2023 yang capaiannya sebesar 33,60 poin. Untuk tingkat sekolah menengah

pertama, juga mengalami peningkatan yang cukup pesat pada dua tahun terakhir ini. Angka literasi SMP pada tahun 2024 mencapai 50,65 meningkat sangat signifikan dengan 18,23 poin dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 32,42 poin. Sedangkan untuk angka numerasi SMP juga mengalami peningkatan Dimana pada Tahun 2024 mencapai 48,39 atau meningkat 15,97 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 32,42. Hal ini menunjukkan kualitas system pendidikan di Kabupaten Takalar semakin baik dan diharapkan mampu menciptakan SDM yang lebih berkualitas lagi.

2.1.8.3 *Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat*

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi, Anggota perpustakaan. Capaian IPLM Kabupaten Takalar untuk Tahun 2023 adalah sebesar 67,61 dengan interpretasi sedang. Capaian ini mengalami penurunan 9,18 poin dari capaian Tahun 2022 yang sebesar 76,79. Untuk tahun 2024, Perpustakaan Nasional akan melakukan perubahan sistem pengukuran dimana jika sebelumnya Pengukuran IPLM dilakukan oleh konsultan/pihak ketiga, maka Tahun 2024 pengukuran IPLM akan dilakukan melalui Aplikasi Perpusnas sendiri.

2.1.8.4 *Indeks Literasi Digital*

Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2022 mengacu kepada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024 (Kominfo, 2020) yang dilaksanakan melalui survey dengan jumlah responden sejumlah 345 orang di Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis untuk merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024. Ada empat pilar yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital, yaitu Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture. Saat ini Indeks Literasi Digital belum diukur di tingkat kabupaten/kota, hanya diukur di tingkat provinsi dan nasional. Tahun 2022 nilai Indeks Literasi Digital Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dari 3,47 di tahun 2021 menjadi 3,50 di Tahun 2022, namun masih berada di bawah nilai Indeks Nasional Tahun 2022 yang sebesar 3,54.

Aksesibilitas penduduk terhadap teknologi informasi dan komunikasi dapat juga dilihat dari tingkat kepemilikan telepon seluler dan komputer/laptop. Berdasarkan data BPS Kabupaten Takalar, pada Tahun 2022, tingkat kepemilikan telepon seluler di Kabupaten Takalar mencapai 65,36persen dari total penduduk. Angka ini mengalami peningkatan dari Tahun 2021 yang hanya sebesar 60,68persen. Sedangkan untuk tingkat rumah tangga yag memiliki komputer/laptop di Kabupaten Takalar mengalami penurunan dari 23,93persen di Tahun 2021 menjadi 13,36 5 di Tahun 2023. Artinya, dalam 100 rumah tangga, hanya terdapat 13 sampai 14 rumah tangga yang memiliki komputer/laptop. Angka ini masih tergolong cukup rendah apabila dibandingkan dengan tingkat kepemilikan komputer/laptop Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 20,61 persen. Selain itu, tingkat literasi penduduk terhadap teknologi juga dapat diukur dari tingkat penggunaan internet. Internet sebagai salah satu jendela ilmu pengetahuan, merupakan teknologi yang berkembang sangat pesat. Berbagai sektor ekonomi pun telah banyak memanfaatkan teknologi tersebut. Media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Pada Tahun 2022, penduduk Kabupaten Takalar yang mengakses internet sebesar 59,96persen meningkat 8,35persen dari Tahun 2021 yag capaiannya hanya sebesar 51,61persen. Adanya peningkatan kepemilikan telepon seluler (HP) serta peningkatan dalam mengakses internet dapat mencerminkan bahwa akses teknologi dan informasi penduduk Kabupaten Takalar pada tahun 2022 semakin baik. Banyak hal positif yang bisa dilakukan dengan teknologi ini, khususnya internet. Pengetahuan, penghasilan, informasi lainnya bisa didapat melalui internet. Perkembangan teknologi dan informasi bergerak sangat cepat, bagi masyarakat yang mengikuti, secara tidak langsung ikut berkembang dalam hal pengetahuan, kemampuan, dan kreatifitas. Namun efek negatif internet pun tetap harus diwaspadai. Banyak hal seperti norma sosial serta budaya yang telah tergerus oleh perkembangan internet, disamping itu secara individu, juga turut mempengaruhi aspek fisik dan psikologis masyarakat. Untuk itu perlu pembekalan literasi pemanfaatan teknologi terhadap masyarakat terkait keterampilan, etika, keamanan dan budaya. Keempat hal inilah yang menjadi indikator komposit tingkat literasi digital. Untuk itu, menjadi penting dilakukan pengukuran tingkat literasi digital di tingkat kabupaten/ kota untuk menjadi referensi kebijakan dan bahan evaluasi bagi pemerinta dalam hal pengelolaan dan literasi digital di wilayahnya.

2.1.8.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Pada tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Takalar sebesar 65,86 persen. Artinya, sekitar 65,86 persen penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) merupakan angkatan kerja (bekerja dan pengangguran). Sedangkan 34,14 persen dari penduduk usia kerja tergolong bukan angkatan kerja karena sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Data Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan di Kabupaten Takalar Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-23
Data Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan di Kabupaten Takalar Tahun 2023

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	**Penduduk Usia Kerja (orang)**	**113,393**	**121,593**	**234,986**
2	**Angkatan Kerja (orang)**	**95,205**	**59,555**	**154,760**
	- Bekerja	92,248	56,971	149,219
	- Pengangguran Terbuka	2,957	2,584	5,541
3	**Bukan Angkatan Kerja**	**18,188**	**62,038**	**80,226**
	- Sekolah	9,048	6,996	16,044
	- Mengurus Rumah Tangga	4,453	51,458	55,911
	- Lainnya	4,687	3,584	8,271
4	**TPAK (%)**	**83.96**	**48.98**	**65.86**
5	**TPT (%)**	**3.11**	**4.34**	**3.58**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar

Terdapat perbedaan antara tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Sebanyak 95.205 jiwa penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas tergolong angkatan kerja dengan TPAK sebesar 83,96 persen. Dari 83,96 persen tersebut, terdapat 96,89 persen yang bekerja dan 3,1 persen merupakan pengangguran terbuka. Sedangkan untuk penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas, sebanyak 59.555 jiwa yang termasuk angkatan kerja dengan TPAK sebesar 48,98 persen. Dari 48,98 persen tersebut, terdapat 95,66 persen yang bekerja dan 4,34 persen sisanya merupakan pengangguran terbuka. Terdapat 62.038 jiwa (51,02 persen) penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak termasuk angkatan kerja dan mayoritas merupakan ibu rumah tangga. Perbedaan partisipasi angkatan kerja antar gender dapat disebabkan karena paradigma bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih besar dibandingkan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbadingan antara jumlah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan dengan jumlah keseluruhan angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT merupakan indikator besaran angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Tingkat kesempatan Kerja (TKK) merupakan perbadingan antara jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dengan jumlah keseluruhan angkatan kerja.

2.1.8.6 *Tingkat Pengangguran Terbuka*

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok sebagai berikut:

1. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan
2. Penduduk yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
3. Penduduk yang tidak memiliki usaha dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan
4. penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/ pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Capaian tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Takalar pada tahun 2023 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar diperoleh hasil sebesar 3,58 persen meningkat 0,95 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Takalar tahun 2023 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 4,33 persen dan Nasional yaitu sebesar 5,32 persen. Pada Bulan Agustus 2023, Jumlah pengangguran

laki-laki sebanyak 2.957 Jiwa sedangkan pengangguran perempuan sebanyak 2.584 jiwa, sehingga total pengangguran terbuka sebanyak 5.541 jiwa. Hal ini menginterpretasikan bahwa persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran di Kabupaten Takalar masih cukup tinggi.

Indikator ini juga menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap supply tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan, indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut. Data TPT Kabupaten Takalar di atas menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 3,58 orang merupakan pengangguran. Perbandingan tingkat pengangguran terbuka antara Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional untuk Tahun 2019 – 2023 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel II-24
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka		
		Takalar	Provinsi	Nasional
1	2019	3,78	4,62	5,23
2	2020	4,16	6,31	7,07
3	2021	3,93	5,72	6,49
4	2022	2,63	4,51	5,86
5	2023	3,58	4,33	5,32

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2023 dan BPS Provinsi Sulsel, 2023

Bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota yang berada di Kawasan Ekonomi Makassar, TPT Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 sedikit lebih tinggi dari TPT Kabupaten Gowa yang merupakan kabupaten dengan TPT terendah di kawasan tersebut. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan TPT tertinggi adalah Kota Makassar dengan nilai TPT sebesar 10,60. Perbandingan TPT kabupaten/kota yang berada di Kawasan Ekonomi Makassar untuk Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-25
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten/Kota di Kawasan Ekonomi Makassar Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Takalar	3,78	4,16	3,93	2,63	3,58
2.	Gowa	4,35	6,44	4,30	3,26	3,43
3.	Makassar	9,83	15,92	13,18	11,82	10,60
4.	Maros	4,42	6,28	6,30	5,04	3,64
5.	Pangkep	4,99	5,18	5,86	5,23	5,05

Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2024

2.1.8.7 Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik perlu dilakukan evaluasi sebagai bentuk pengukuran kinerja terhadap lembaga peneyedia layanan publik. Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Pada Tahun 2023, KEMENPANRB RI melakukan pengukuran Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Takalar dimana mengukur tiga jenis layanan pemerintah daerah yang diberikan ke masyarakat yakni pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Takalar Tahun 2023 untuk layanan administrasi adalah sebesar 3,19 dengan kategori B- (Baik Dengan Catatan). Sedangkan untuk layanan barang, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Takalar Tahun 2023 sebesar 2,94 dengan kategori C (Cukup). Dan untuk jenis layanan jasa, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Takalar Tahun 2023 sebesar 3,68 dengan kategori baik. Berdasarkan Kertas Kerja Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang disampaikan oleh KEMENPANRB RI, terdapat beberapa aspek pelayanan publik di Kabupaten Takalar yang perlu ditingkatkan yakni penyusunan standar operasional pada setiap jenis layanan, budaya pelayanan di lingkungan instansi, pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, sarana dan prasasrana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana konsultasi dan pengaduan serta penciptaan inovasi pelayanan publik.

2.1.8.8 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik.

Pada tahun 2023 telah dilakukan Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Kabupaten Takalar terhadap seluruh perangkat daerah, kecamatan, rumah sakit dan puskesmas dengan jumlah keseluruhan 55 unit kerja sampel. Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Takalar, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai Berikut :

1. Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dari 55 instansi Unit layanan rata-rata memperoleh predikat rata-rata nilai interval sekitar 3,0644 - 3,532 dan Nilai Interval Konversi 76,61 - 88,30 atau kategori B (BAIK).
2. Dari 55 Unit kerja yang menjadi lokasi survey, 7 Unit kerja memperoleh predikat rata-rata memperoleh nilai interval sekitar 3,5324 - 4,00 dan Nilai Interval Konversi 88,31 – 100 atau SANGAT BAIK, diantaranya Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdangangan, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kecamatan Polobangkeng Utara, Puskesmas Galesong, Puskesmas Pattalassang dan Puskesmas Towata.
3. Menurut Survey, 37 unit kerja memperoleh predikat rata-rata nilai interval sekitar 3,0644 - 3,532 dan Nilai Interval Konversi 76,61 - 88,30 atau kategori B (BAIK), yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa B, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Takalar, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Kepulauan

Tanakeke, Puskesmas Galesong Utara, Puskesmas Bontomangape, Puskesmas Bontokassi, Puskesmas Bontomarannu, Puskesmas Mappakasunggu, Puskesmas Manggarabombang, Puskesmas Polobangke 181 Selatan, Puskesmas Bulukunyi, Puskesmas Polobangkeng Utara, Puskesmas Ko'mara, dan Puskesmas Kepulauan Tanakeke.

4. Dari 11 unit kerja, unsur yang relatif rendah memperoleh predikat rata-rata nilai interval sekitar 2,60 – 3,064 dan Nilai Interval Konversi 65,00 - 76,60 atau kategori C (KURANG BAIK), yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasam Pemukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Kecamatan Manggarabombang, Puskesmas Aengtowa, Puskesmas Sanrobone, dan Puskesmas Pattopakang, sehingga perlu masing-masing diunit kerja melakukan perhatian bagi unsur yang relatif rendah tersebut.

Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di 55 unit kerja Kabupaten Takalar dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Takalar perlu memberikan perhatian khusus kepada unit kerja yang memiliki unsur yang relatif rendah dibanding unsur yang lain pada setiap unit kerja.
2. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama yang terkait langsung dengan pemberi layanan, perlu terus dilakukan secara berkala, baik diklat maupun pembinaan oleh pimpinan instansi unit kerja. Bersamaan dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan juga, baik kualitas maupun kuantitas.
3. Untuk mewujudkan transparansi dalam pemberian layanan, maka seluruh instansi unit kerja perlu menjelaskan dan adanya sop yang jelas dalam setiap instansi unit kerja.
4. Perlunya peningkatan komunikasi antara tenaga medis dan pasien. Mengingat persepsi masyarakat yang cenderung mengaitkan durasi pelayanan dengan kualitas layanan, upaya untuk memberikan penjelasan yang lebih baik terkait prosedur medis dan memahami kebutuhan pasien dapat memperbaiki persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan.
5. Untuk memastikan terjadinya peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan, maka survey semacam ini perlu dilakukan secara berkala, minimal sekali setahun, agar instansi unit layanan dapat melakukan perbaikan layanan sesuai dengan penilaian dan kebutuhan

2.1.8.9 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa sehat suatu keluarga. Selain menunjukkan kesehatan keluarga, indikator komposit penyusun Indeks keluarga sehat juga memberikan gambaran tentang kesejahteraan keluarga. Adapun indikator yang menjadi kompopsit Indeks Keluarga Sehat adalah :

1. Keluarga mengikuti program KB
2. Persalinan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan
3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap
4. Bayi mendapatkan ASI eksklusif
5. Pertumbuhan balita dipantau
6. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar
7. Penderita hipertensi yang berobat teratur
8. Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN
11. Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih
12. Keluarga memiliki akses/ menggunakan jamban keluarga

Untuk Kabupaten Takalar, Indeks Keluarga Sehat cukup stagnan di tahun 2020-2023 diangka 0,22. Indikator IKS dengan capaian terendah di empat tahun terakhir tersebut adalah indikator keluarga mengikuti program KB dengan rata-rata capaian sebesar 19,75persen. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Takalar Tahun 2020-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-26
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Takalar Tahun 2020-2023

NO	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.215	0.221	0.221	0.222
2	∑ Keluarga dengan IKS > 0,800	12614	13764	13764	13987
3	∑ Keluarga	58546	62344	62344	63052

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Takalar, data diolah

Untuk tingkat kecamatan, kecamatan dengan Indeks Keluarga Sehat tertinggi adalah Kecamatan Pattalassang dengan nilai IKS sebesar 0,297. Sedangkan kecamatan dengan nilai terendah adalah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan nilai 0,144. Data Indeks Keluarga Sehat per Kecamatan se Kabupaten Takalar disajikan pada grafik berikut :

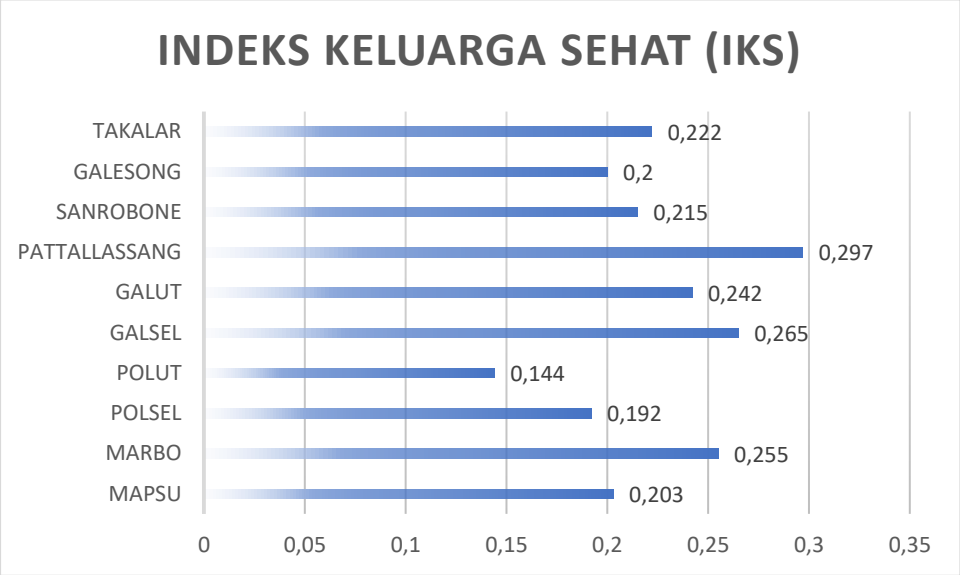

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Takalar, data diolah

2.1.8.10 *Indeks Ketimpangan Gender (IKG)*

Ketimpangan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Takalar mengalami fluktuasi di periode Tahun 2019-2023. Setelah mengalami penurunan yang cukup drastis dari 0,411 di Tahun 2020 menjadi 0,276 di Tahun 2021, IKG kembali mengalami kenaikan di Tahun 2022 dengan nilai capaian sebesar 0,396. Namun kembali turun secara drastis pada Tahun 2023 dengan capaian 0,192. Jika dibandingkan dengan IKG Provinsi Sulsel dan Nasional, Nilai IKG Kabupaten Takalar pada Tahun 2023 berada jauh di bawah dengan selisih 0,174 dengan provinsi dan 0,255 dengan nasional. Nilai IKG Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2019 – 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-27
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	Indeks Ketimpangan Gender		
	Takalar	Sulsel	Nasional
2019	0.446	0.460	0.488
2020	0.411	0.427	0.472
2021	0.276	0.410	0.465

2022	0.396	0.390	0.459
2023	0.192	0.366	0.447

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan

Semakin kecil nilai IKG maka semakin setara ketimpangan gender di suatu wilayah. Dengan terjadinya penurunan IKG di Tahun 2023, menunjukkan bahwa ketimpangan gender akan semakin setara.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG adalah rasio perbandingan antara IPM laki-laki dan IPM Perempuan. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. IPG Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan menandakan kesetaraan antara IPM laki-laki dan IPM Perempuan meningkat. Caapain IPG Kabupaten Takalar Tahun 2022 sebesar 87,66 mengalami peningkatan di Tahun 2023 menjadi sebesar 87,8. Namun demikian, capaian IPG ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian IPG Sulsel (93,19) dan IPG Nasional (91,85). Nilai IPG Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2018 – 2022 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-28
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023

Tahun	Indeks Pembangunan Gender		
	Takalar	Sulsel	Nasional
2019	87.29	93.090	91.07
2020	87.56	92.86	91.06
2021	87.45	92.85	91.27
2022	87.66	93.14	91.63
2023	87.8	93.19	91.85

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Tren IPG Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana IPG Kabupaten Takalar pada Tahun 2022 sebesar 73,39 meningkat di Tahun 2023 menjadi sebesar 74,45. Walaupun demikian capaian IDG Kabupaten Takalar Tahun 2023 masih lebih rendah dari IDG Provinsi Sulsel (75,24) dan nasional (76,9).

Nilai IDG Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional untuk Tahun 2018 – 2022 tersaji pada tabel berikut :

Tabel II-29
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2023

Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender		
	Takalar	Sulsel	Nasional
2019	70.66	76.01	75.24
2020	68.78	76.32	75.57
2021	70.67	74.76	76.26
2022	73.39	76.37	76.59
2023	74.45	75.24	76.9

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan

2.1.8.11 *Indeks Reformasi Birokrasi*

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 bahwa Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemen PAN-RB RI setiap tahun melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan lembaga pemerintahan. Adapun capaian indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Takalar selama periode 2020-2023 adalah :

Tabel II-30
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2023

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	49,49 (C)	49,45 (C)	54,92 (CC)	52,33 (CC)

Sumber : Kementerian PAN RB 2022

Hasil Evaluasi RB Kabupaten Takalar dari Tahun 2020 ke Tahun 2022 mengalami peningkatan dari 49,49 menjadi 54,92 (5,43 poin) dengan predikat CC. Sedangkan Hasil Evaluasi RB Tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena

berdasarkan Permen PAN-RB RI Nomor 3 Tahun 2023 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Hasil evaluasi RB Kabupaten Takalar memperoleh nilai sebesar 52,33 dengan predikat CC

2.1.8.12 *Nilai AKIP Daerah*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI akan melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) yang merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dengan tujuan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government) pada setiap lembaga pemerintahan. Hasil evaluasi AKIP Kabupaten Takalar pada Tahun 2019 s.d. 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-31
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)
Kabupaten Takalar Tahun 2019 dan 2022

Komponen Yang Dinilai	Nilai				
	2018	2019	2020	2022	2023
Perencanaan Kinerja	20,67	20,65	21,08	21,41	21,59
Pengukuran Kinerja	12,32	12,14	13,07	17,78	18,30
Pelaporan Kinerja	10,19	10,16	10,29	10,31	10,33
Evaluasi Kinerja	3,70	3,70	4,01	11,95	13,15
Capaian Kinerja	11,16	10,93	10,93		
Nilai Hasil Evaluasi	**58,04**	**57,58**	**59,38**	**61,45**	**63,37**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	**CC**	**CC**	**CC**	**B**	**B**

Sumber : Kementerian PAN RB RI

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 terjadi perubahan pembobotan komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian SAKIP sehingga hasil evaluasi tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2023, Nilai SAKIP Kabupaten Takalar mengalami peningkatan sebesar 1,92 poin dari 61,45 di Tahun 2022 menjadi 63,37 dan tetap dengan predikat B. meskipun mengalami peningkatan, masih terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilaksanakan yaitu :

a. Memastikan keselarasan pada dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah antara renstra, perjanjian kinerja dan IKU

b. Memastikan dalam melakukan penjabaran kinerja harus dimulai dengan menyusun pohon kinerja berdasarkan logical framework yang menggambarkan hubungan "sebab-akibat" dan berdasarkan Critical Success Factor (CSF) antar level kondisi kinerja yang dijabarkan sehingga dapat dipastikan pencapaian kinerja level bawah berpengaruh pada pencapaian kinerja level diatasnya;
c. Mereviu kembali perencanaan kinerja pada seluruh unit kerja untuk dapat merumuskan sasaran strategisnya lebih berorientasi outcome pada level kinerjanya dan juga memastikan indikator kinerja yang dimiliki dapat relevan;
d. Mereviu dan memperbaiki formulasi indikator kinerja yang belum tepat agar data kinerja yang dihasilkan dapat lebih handal dan mencerminkan kinerja yang diharapkan;
e. Mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja baik tingkat unit kerja dan individu pegawai sehingga akan terjaga kesesuaian antara kinerja unit kerja dan kinerja individu pegawai;
f. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit/satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling pimpinan unit/satuan kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;
g. Menyelaraskan data target yang dilaporkan pada laporan kinerja dengan dokumen PK yang diperjanjikan pada awal tahun. Kemudian meningkatkan kualitas data yang disajikan pada laporan kinerja agar dapat menyampaikan kinerja sesuai yang diharapkan;
h. Merumuskan mekanisme monitoring tindak lanjut unit kerja terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi yang diberikan oleh pengawas internal sudah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
i. Mendorong adanya kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga akan mendorong percepatan peningkatan implementasi AKIP di unit/satuan kerja.

2.1.8.13 *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor

27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), oksigen terlarut (DO), nitrat (NO_3-N), Total Fosfat (T-Phosphat), total nitrogen, Fecal Coliform, klorofil dan transparansi; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan vegetasi non hutan. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup dan indikator kompositnya diklasifikasikan berdasarkan range capaian dengan klasifikasi sangat baik (skor 90-100), baik (skor 70-90), sedang (skor 50-70), kurang (skor 25-50) dan sangat kurang (skor 0-25)

Tabel II-32
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar
Tahun 2021 - 2023

Indikator	Satuan	Tahun		
		2021	2022	2023
Peningkatan Indeks Kualitas Air	Angka	69,51	69,61	70,48
Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Angka	85,69	89,92	78,53
Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	Angka	30,39	-	54,75
IKLH		**58,98**		**70,29**

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 2023 (diolah)

Pada tahun 2023, capaian Indeks Kualitas Air sebesar 70,48 dengan kategori baik, capaian Indeks Kualitas Udara sebesar 78,53 dengan kategori baik dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 54,75 dengan kategori sedang sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 70,29 dengan kategori baik.

2.1.8.14 *Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)*

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah emisi gas dari berbagai aktifitas manusia di bumi yang dilepaskan ke atmosfer dan menimbulkan efek rumah kaca dimana panas matahari terperangkap didalamnya dan mencegahnya bocor kembali ke ruang angkasa sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Gas-gas rumah kaca yang dimaksud adalah Karbon Dioksida (CO_2), Belerang Dioksida (SO_2), Nitrogen Monoksida (NO), Nitrogen Dioksida (NO_2), Gas Metana (CH4) dan Klorofluorokarbon (CFC).

Pemerintah menyadari perubahan iklim merupakan persoalan krusial, berdampak luas pada berbagai sendi kehidupan serta dapat

mempengaruhi capaian pembangunan nasional atas dasar itu persoalan perubahan iklim memerlukan respon yang cepat, tepat, dan terintegrasi. Untuk itu dibutuhkan aksi nyata dari semua pihak khususnya pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim baik itu melalui pembangunan rendah karbon maupun pembangunan berketahanan iklim. Aksi nyata tersebut dapat meliputi beberapa sektor yakni energi, transportasi, lahan, pengolahan limbah dan kawasan pesisir dan kelautan. Sebagai wadah/platform perekaman aksi tersebut maka Bappenas menyediakan Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) yang akan menyajikan data dan informasi total pencapaian penurunan emisi GRK sebagai indikator dari aksi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia secara akurat, transparan dan partisipatif.

Sejak Tahun 2020 Kabupaten Takalar secara aktif melaporkan kegiatan aksi mitigasi GRK yang yang dianggarkan dalam APBD melalui Aplikasi AKSARA. Pelaporan tersebut dilakukan secara berkala dan tepat waktu meskipun belum mencakup semua sektor. Dari Tahun 2020-2023, hanya sektor energi dan pemanfaatan lahan yang dilaporkan secara aktif oleh perangkat daerah pengampuh data. Berdasarkan pelaporan yang dilakukan pada Aplikasi AKSARA, persentase penurunan emisi GRK Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2023 disajikan pada grafik berikut :

Grafik
Total Penurunan Emisi GRK Kabupaten Takalar
Tahun 2020 – 2023

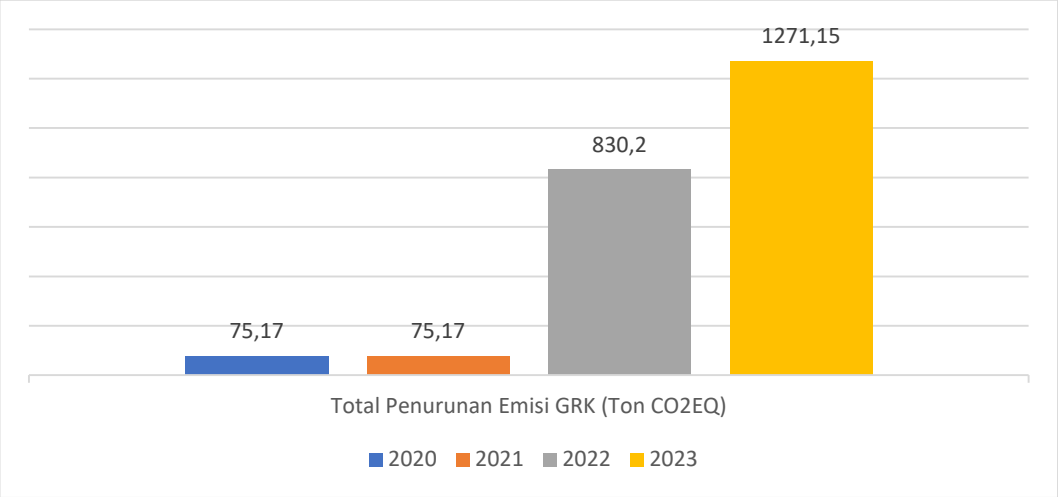

Sumber : Aplikasi AKSARA Bappenas RI

Pada Tahun 2023, dari delapan aksi yang dilaksanakan dan dilaporkan pada Aplikasi AKSARA dapat menurunkan potensi emisi GRK sebanyak 1.271,15 Ton CO_2EQ yang dikontribusi oleh sektor lahan sebanyak 1.151,03 Ton CO_2EQ (90,55 persen), sektor transportasi sebanyak 96,14 Ton CO_2EQ (7,56 persen) dan sektor energi sebanyak 23,98 Ton CO_2EQ (1,88 persen). Sedangkan besaran anggaran APBD yang mendukung pelaksanaan delapan aksi tersebut adalah sebesar Rp. 2,02 Milyar dengan rincian Rp. 767,28 juta untuk pembiayaan efisiensi energi melalui penggunaan lampu jalan hemat energi jenis LED/CFL (satu kegiatan) dan Rp. 1,26 milyar untuk pembiayaan penggunaan pupuk organik pada lahan pertanian (enam kegiatan). Sedangkan satu kegiatan car freeday sebagai upaya mengurangi emisi kendaraan dapat dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran.

2.1.8.15 *Indeks Kepatuhan Terhadap SPM*

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pengukuran Indeks kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan untuk menilai seberapa besar penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah dilaksanakan oleh instansi pengampu kewenangan pelayanan dasar. Pengukuran realisasi capaian penerapan SPM dilaksanakan per triwulan oleh Ditjen Bangda Kemendagri RI melalui aplikasi E-SPM Bangda. Berdasarkan hasil pengukuran pada aplikasi tersebut, berikut disajikan data realisasi capaian penerapan SPM Kabupaten Takalar setiap Triwulan IV pada Tahun 2018-2023 :

Tabel II-33
Capaian Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal
Di Kabupaten Takalar Tahun 2018-2022

No	Jenis Pelayanan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Dasar Pendidikan	56,58	75,46	45,47	60,75	100	100
2	Pelayanan Dasar Kesehatan	67,82	66,69	54,42	74,49	83,49	79,47
3	Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N/A	N/A	12,3	32	92,22	95,97
4	Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	N/A	66,295	N/A	0	96,37	100

No	Jenis Pelayanan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Pelayanan Dasar Sosial	59,68	72,00	17,81	50,80	78,97	88,24
6	Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	2,275	N/A	33,96	58,30	95,35	99,00
Rata Rata Capaian Kabupaten		31,06	46,74	27,33	46,11	91,07	93,78

Sumber : Bappelitbangda Takalar, 2022 (Data Diolah)

Sebagaimana diketahui bahwa penerapan SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang capaiannya harus 100%. Namun berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian penerapan SPM dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 belum mencapai 100%. Bahkan di Tahun 2018 s.d. 2021, capaian penerpan SPM masih berada di bawah 50%. Hal ini wajib menjadi perhatian pemerintah, khususnya bagi perangkat daerah pengampu SPM. Efektifitas penerapan SPM sangat bergantung pada perhitungan jumlah barang, jasa dan SDM yang dibutuhkan dalam penerapan layanan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan serta berbasis pada data penerima layanan, sehingga layanan yang diberikan tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efisien.

2.1.9 Aspek Daya Saing

2.1.9.1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran global competitiveness index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini, IDSD 2022 selaras dengan GCI sehingga bisa digunakan stakeholder global untuk mengukur GCI bagi Indonesia. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri

dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Berikut rinciannya :

1. **Lingkungan Pendukung**, meliputi empat pilar yaitu :
   a. **Institusi** yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan keamanan;
   b. **Infrastruktur** yang dapat mendukung aktivitas perekonomian;
   c. **Adopsi TIK** yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0; dan
   d. **Stabilitas ekonomi makro** yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup
2. **Sumber Daya Manusia,** meliputi dua pilar yaitu :
   a. **Kesehatan** merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup; dan
   b. **Keterampilan** yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
3. **Pasar,** meliputi empat pilar yaitu ;
   a. **Pasar produk** yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi;
   b. **Pasar tenaga kerja** yang mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja;
   c. **Sistem Keuangan** yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan
   d. **Ukuran pasar** yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya iptek.
4. **Ekosistem Inovasi**, yang meliputi dua pilar yaitu :
   a. **Dinamisme bisnis** yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja;
   b. **Kapabilitas inovasi** yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Berdasarkan pengukuran IDSD oleh BRIN Tahun 2022, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 adalah 2,84 atau lebih rendah dari IDSD Provinsi Sulsel (3,35) dan IDSD Nasional (3,26). Skor IDSD Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-34
Skor IDSD Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2022

Nasional/ Provinsi/ Kabupaten	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 1	Pilar 2	
Nasional	4.14	2.91	3.57	3.05	3.76	3.73	2.68	3.73	2.66	1.31	5.00	2.62	3.26
Sulawesi Selatan	3.65	3.21	3.39	3.61	3.83	3.85	2.70	3.13	3.14	1.16	5.00	3.48	3.35
Takalar	3.92	1.92	3.07	2.77	3.62	2.97	2.50	2.39	4.71	0.45	5.00	0.82	2.84

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022

Dari keduabelas pilar daya saing, hanya dua pilar yang skornya berada di atas skor rata-rata IDSD Provinsi Sulsel. Yang pertama adalah pilar institusi pada komponen lingkungan pendukung. Pilar ini merupakan pendorong fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang memberikan ketentuan dalam bentuk peraturan tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang memengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal. Pelaku ekonomi akan berinvestasi di suatu daerah yang memiliki institusi yang membentuk iklim bisnis yang kondusif. Capaian pilar IDSD ini sebesar 3,92 lebih tinggi 0,27 poin dibandingkan capaian Provinsi Sulsel yang sebesar 3,65. Pilar yang kedua adalah Sistem Keuangan dengan capaian sebesar 4,71 lebih tinggi 1,57 poin dari capaian Provinsi Sulsel (3,14) dan lebih tinggi 2,05 poin dari capaian nasional (2,66). Pilar ini mencerminkan tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap layanan keuangan. Hal ini menggambarkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan khususnya permodalan baik melalui lembaga keuangan perbankan dan non perbankan sudah sangat baik.

2.1.9.2 *Indeks Daya Saing Infrastruktur*

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, nilai Indeks Daya Saing Infrastruktur Kabupaten Takalar Tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana dari capaian 45,57 di Tahun 2022 turun sebesar 11,69 poin menjadi 33,88 di Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena menurunnya tingkat kemantapan jalan dan akses terhadap air bersih yang sulit pada akhir Tahun 2023 akibat kekeringan yang melanda hampir seluruh wilayah di Sulsel. Hal ini juga disebabkan karena akses rumah tangga terhadap sanitasi aman yang masih sangat rendah meskipun mengalami peningkatan capaian di Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan nilai indeks daya saing infrastruktur Provinsi Sulsel Tahun 2023 yang

sebesar 80,39, maka nilai indeks daya saing infrastruktur Kabupaten Takalar masih sangat jauh di bawah dengan selisih 46,51 poin. Dengan kondisi ini, Kabupaten Takalar sangat membutuhkan peningkatan kualitas infrastuktur karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas masyarakat serta iklim investasi di daerah ini. Selain itu, perlu juga dilakukan pengukuran yang lebih intens terhadap data sektoral yang menjadi variabel pengukuran indeks daya saing infrastuktur, agar nilai yang dihasilkan lebih valid dan terupdate dan betul-betul menggambarkan kondisi daerah ini.

2.1.9.3 *Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan*

Persentase rumah tangga dengan akses air minum perpipaan pada Tahun 2023 sebesar 33,09 persen menurun 1,7 poin dari capaian tahun 2022 yang sebesar 34,79 persen. Hal ini disebabkan oleh el nino yang merupakan efek dari perubahan iklim dan mengakibatkan terjadinya kekeringan di seluruh wilayah Kabupaten Takalar, sehingga debit air yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh rumah tangga. Akses terhadap air minum yang layak merupakan salahsatu indikator penerapan SPM yang ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat (target 100persen) sebagaimana target RPJPN 2045 bahwa seluruh rumah tangga di Indonesia telah dapat mengakses aman dengan target 75persen melalui jaringan perpipaan dan 25persen melalui non jaringan perpipaan, sehingga kondisi ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan segera mempersiapkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang lebih baik dan alternatif guna mengantisipasi dampak perubahan iklim berkepanjangan. Capaian persentase akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan di Kabupaten Takalar pada Tahun 2022 berada di atas capaian Provinsi Sulsel (25,15persen) dan capaian nasional (19,47persen). Data persentase akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan di Kabupaten Takalar Tahun 2013 – 2023 disajikan pada grafik berikut :

Grafik
Data Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Perpipaan
Di Kabupaten Takalar Tahun 2013 – 2023

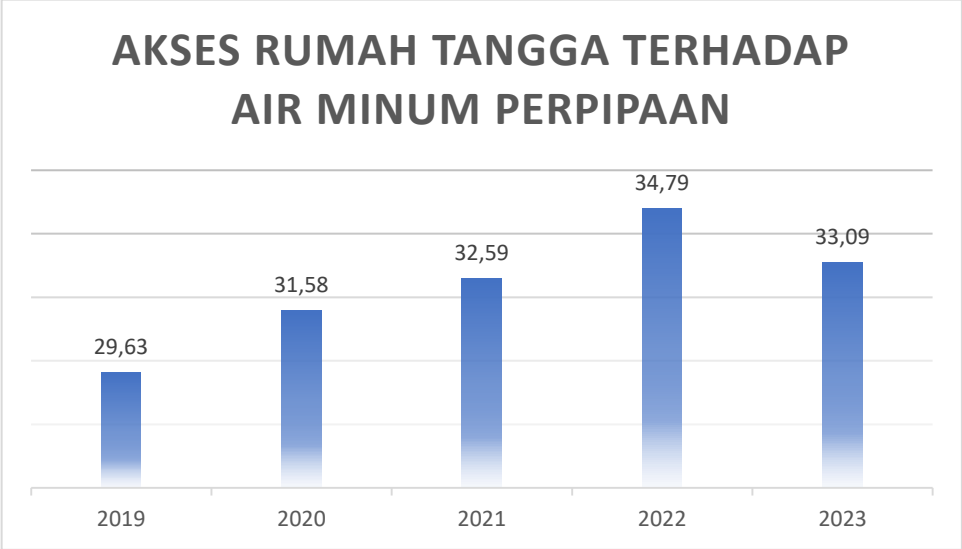

Sumber : Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar

2.1.9.4 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan pada periode Tahun 2019-2022, dimana capaian pada Tahun 2022 sebesar 3,77persen meningkat 1,73 persen dibandingkan dengan capaian di Tahun 2021 yang sebesar 2,04persen. Meskipun mengalami peningkatan, namun capaian Kabupaten Takalar pada indikator ini masih jauh di bawah capaian Provinsi Sulses (12,92persen) dan capaian nasional (10,16persen). Data persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional pada Tahun 2019 – 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-35
Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulsel dan Nasional pada Tahun 2019 – 2022

No	Tahun	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		
		Takalar	Provinsi	Nasional
1	2019	1,30	4,70	7,49
2	2020	1,76	4,74	7,64
3	2021	2,04	3,97	7,25
4	2022	3,77	12,92	10,16

Sumber : Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar

Salah satu syarat dari sanitasi aman adalah adanya penyedotan lumpur tinja pada rumah-rumah warga. Dari tahun 2013 sampai 2021 penyedotan lumpur tinja di Kabupaten Takalar belum beroperasi meskipun sarana dan prasarana IPLT telah terbangun di tahun 2017 dan truk tinja tersedia di tahun 2019. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Takalar bekerjasama dengan USAID IWUASH TANGGUH dalam hal pengelolaan air limbah domestik. USAID memfasilitasi pengembangan SDM melalui bimbingan teknis operator IPLT baik petugas di IPLT maupun driver dan tenaga peyedotan. Dan pada saat Hari Jadi Kabupaten Takalar di Tanggal 10 Februari Tahun 2022 menjadi awal layanan penyedotan lumpur tinja dilaksanakan di Kabupaten Takalar tepatnya di IPAL Komunal Lingkungan Manyampa Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattalassang. Selain itu, untuk mempermudah proses pelayanan IPLT, perlu dilakukan standarisasi terhadap sistem sanitasi di masyarakat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dengan adanya layanan IPLT ini, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sanitasi aman pada seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Takalar sehingga mampu menciptakan lingkungan yang sehat.

2.1.9.5 *Kapasitas Tampungan Air*

Kapasitas tampungan air di Kabupaten Takalar pada periode Tahun 2013-2023 terus meningkat. Pada Tahun 2023, kapasitas tampungan air Kabupaten Takalar sebanyak 13,70 juta m^3/kapita, meningkat 338,75 ribu m^3/kapita dari capaian tahun sebelumnya. Data kapasitas tampungan air Kabupaten Takalar pada Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-36
Kapasitas Tampungan Air di Kabupaten Takalar
pada Tahun 2019 – 2023

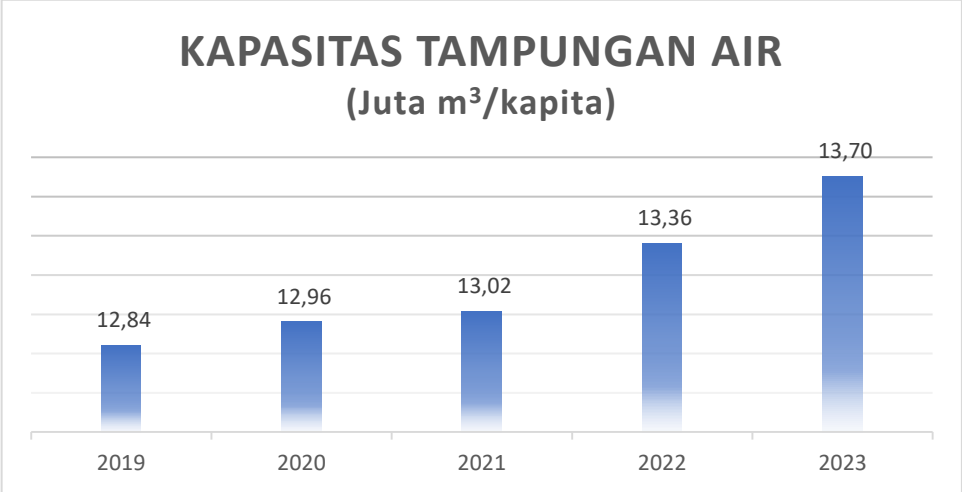

Sumber : Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar

Keberadaan Bendungan Pammukkulu dengan kapasitas tampung efektif sebanyak 77 juta m³ yang akan mulai beroperasi pada Tahun 2024, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasokan air baku rumah tangga, peternakan, perikanan dan irigasi pertanian serta mendukung ketahanan pangan daerah. Yang dibutuhkan saat ini adalah penyediaan saluran irigasi yang memadai agar air dapat terdistribusi efektif ke seluruh wilayah Kabupaten Takalar.

2.1.9.6 *Nilai Tukar Petani (NTP)*

Menurut BPS, NTP merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib) dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index. Penghitungan NTP dilandasi pemikiran bahwa sebagai agen ekonomi, baik sebagai produsen dan konsumen, petani memproduksi hasil pertanian yang kemudian hasilnya dijual dan petani juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga mengeluarkan biaya produksi dalam usahanya untuk memproduksi komoditas/produk pertanian. Semakin tinggi nilai NTP, maka semakin baik pula pendapatan petani dalam suatu wilayah tertentu.

NTP Kabupaten Takalar selama periode Tahun 2017-2022 mengalami peningkatan yang cukup fluktuatif dengan peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yakni sebesar 105,31, naik 3,54 persen dari Tahun

2017 dengan nilai NTP 101,71. Sedangkan Tahun 2022, nilai NTP mengalami sedikit koreksi menjadi 101,14. NTP Kabupaten Takalar Tahun 2022 masih lebih rendah 6,19 poin dari NTP Sulsel yang mana sebesar 107,33.

2.1.9.7 Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk yang secara ekonomis dianggap produktif (usia 15-64 tahun). Sehingga semakin kecil porsi penduduk yang berusia non-produktif, maka semakin kecil pula angka beban ketergantungan itu dan sebaliknya semakin besar porsi penduduk berusia non-produktif, maka semakin besar pula angka beban ketergantungan tersebut. Angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk Kabupaten Takalar menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun selama periode 2018-2022. Semakin rendah rasio ketergantungan, berarti semakin kecil beban yang ditanggung kelompok usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Data komposisi penduduk dan Angka Ketergantungan di Kabupaten Takalar Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-37
Angka Ketergantungan Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Usia Penduduk	2019	2020	2021	2022	2023
<14	79,625	76,952	76,094	76,952	85,937
15-64	198,917	205,592	207,598	205,592	217,669
65+	20,146	18,309	19,003	22,533	22,438
Angka Ketergantungan	**50.16**	**46.33**	**45.81**	**48.39**	**49.79**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka ketergantungan. Angka ketergantungan Kabupaten Takalar pada tahun 2019 sebesar 50,16. Artinya, setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 50 penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia. Angka ini terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 menjadi 45,81, tapi kemudian meningkat lagi menjadi 48,39 pada tahun 2022 dan 49,79 di Tahun 2023. Artinya, setiap 100 penduduk produktif pada tahun 2023 menanggung 50 penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak (0-14 tahun) dan penduduk lansia (65 tahun keatas).

2.1.9.8 Angka Kriminalitas

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum, serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Maslow (1943) dalam teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting. Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (crime total) serta jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100.000 penduduk atau angka kriminalitas.

Angka kriminalitas adalah resiko menjadi korban kejahatan yang diukur dengan membandingkan antara jumlah kasus yang terjadi dalam setahun dengan jumlah total penduduk dikalikan 100.000. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. Angka kriminalitas Kabupaten Takalar Tahun 2014-2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-38
Angka Kriminalitas di Kabupaten Takalar Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Total Tindak Pidana yang Dilaporkan	210	613	430	576	961
Jumlah Penduduk	295,892	*298,688*	*300,835*	*302,695*	*305,077*
Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk	*70.97*	*205.23*	*142.94*	*190.29*	*315.00*

Sumber Data : Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sulawesi Selatan (BPS)

Angka kriminalitas Kabupaten Takalar cukup fluktuatif dan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Angka kriminalitas tertinggi terjadi di Tahun 2022 dengan nilai mencapai 315 yang menandakan bahwa dari 100.000 penduduk terdapat 315 jiwa yang beresiko menjadi korban

kejahatan di Tahun 2022. Angka ini meningkat sangat signifikan yakni 124,71 poin dibanding angka kriminalitas di Tahun 2021 yang capaiannya sebesar 190,29. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Takalar masih sangat rendah dan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Pada tabel di atas juga dapat dilihat peningkatan kasus terlapor cukup tinggi sejak tahun 2019 – 2022. Secara positif hal ini dapat dimaknai bahwa tingkat literasi dan aksesibilitas masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dalam penyelesaian masalah semakin tinggi. Serta kinerja para aparat penegak hukum dalam melakukan pelayanan sudah cukup baik. Capaian Angka Kriminalitas Tahun 2022 yang cukup tinggi terjadi akibat tingginya kasus kejahatan yang dilaporkan yakni 961 kasus. Kasus yang dilaporkan didominasi oleh kasus penganiayaan ringan (27,16persen) dan kasus pencurian biasa (22,37persen). Data kasus terlapor berdasarkan jenis kasus di Kabupaten Takalar Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-39
Kasus Terlapor Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Takalar
Tahun 2014-2022

No	Jenis Kasus	Jumlah	%
1	Pembunuhan	1	0.10
2	Penganiayaan Berat	39	4.06
3	Penganiayaan Ringan	261	27.16
4	KDRT	61	6.35
5	Perkosaan	12	1.25
6	Melanggar kesopanan/ kesusilaan/ pencabulan	23	2.39
7	Penculikan	10	1.04
8	Pencurian dengan kekerasan	3	0.31
9	Pencurian biasa (termasuk ringan)	215	22.37
10	Curanmor	36	3.75
11	Pencurian dengan pemberatan	9	0.94
12	Pengrusakan/ penghancuran barang	25	2.60
13	Penipuan / Perbuatan Curang	129	13.42
14	Penggelapan	61	6.35
15	Kejahatan terhadap ketertiban umum	76	7.91
JUMLAH		**961**	**100**

Sumber Data : Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sulawesi Selatan (BPS)

2.1.9.9 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Indeks ini disusun oleh tiga pilar dan delapan sub pilar, dimana pilar pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang merupakan landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif yang terdiri dari sub pilar pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan infrastruktur ekonomi. Pilar kedua yaitu pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dimana pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat dan ketimpangan dari sisi pendapatan, gender maupun wilayah harus dihapuskan. Pilar ini terdiri dari sub pilar ketimpangan dan kemiskinan. Pilar ketiga yaitu perluasan akses dan kesempatan dimana memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas SDM yang adil dan berkualitas. Pilar ini terdiri dari sub pilar kapabilitas manusia, infrastruktur dasar dan keuangan inklusif.

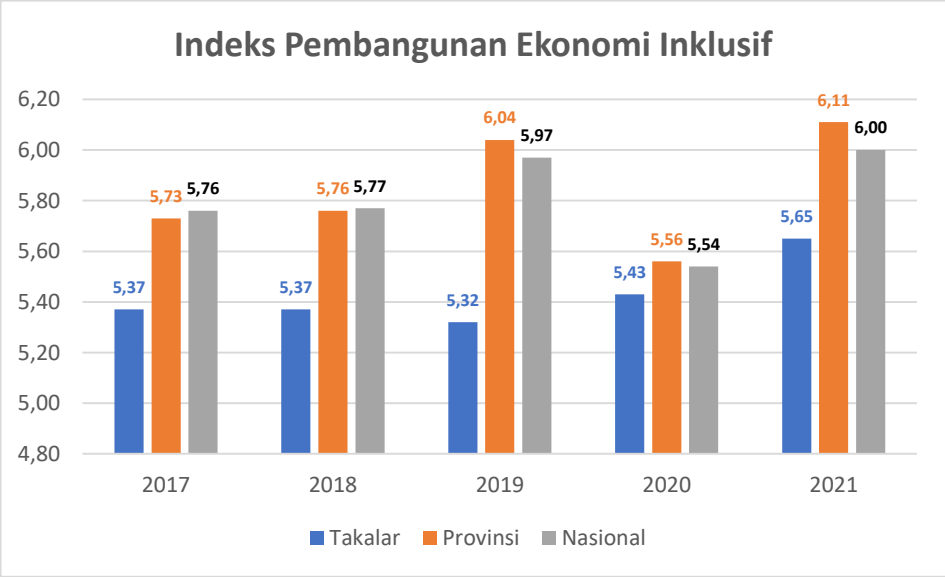

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh BAPPENAS, Indeks pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Takalar untuk periode Tahun 2017-2021 cukup fluktuatif dan selalu berada di bawah nilai indeks

provinsi maupun nasional. Untuk Tahun 2021, capaian indeks pembangunan ekonomi inklusif Kabupaten Takalar sebesar 5,64 berada 0,46 poin dibawah capaian Provinsi Sulsel dan 0,35 poin dibawah nasional.

2.1.10 Aspek Pelayanan Umum

Indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan umum di Kabupaten Takalar dalam dokumen ini merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator yang diukur adalah berupa indikator kinerja hasil/outcome.

2.1.10.1 *Layanan Urusan Wajib Dasar*

2.1.10.1.1 Urusan Wajib Pendidikan

1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

   Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

   Capaian tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD di Kabupaten Takalar selama periode 2019-2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Capaian tingkat partisipasi terendah dicapai pada tahun 2019 yaitu sebesar 48,11%. Kemudian meningkat terus pada empat tahun berikutnya hingga pada tahun 2023 mencapai 115,81%. Namun demikian capaian tersebut masih lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Tabel II-40
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun
Yang Berpartisipasi Dalam PAUD Kabupaten Takalar
Tahun 2019 - 2023

Indikator	Satuan	Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	48,11	52,03	61,01	67,39	76,63

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, 2023 (data diolah)

Untuk Tahun 2023, tingkat partisipasi dalam PAUD mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 48,42 poin jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kemendikbud Ristek RI bahwa jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam PAUD di Kabupaten Takalar sebanyak 7.192 jiwa. Sedangkan berdasarkan data kependudukan dari Disdukcapil Kabupaten Takalar, jumlah penduduk usia 5-6 Tahun pada Tahun 2023 sebanyak 6.210 jiwa. Sehingga tingkat partisipasi dalam PAUD Tahun 2023 di Kabupaten Takalar sebesar 115,81% atau melewati target 100% yang telah ditetapkan.

2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar kepada seluruh warga negara yang berusia 7 – 15 Tahun. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat diberikan kepada warga negara usia 7-12 tahun. Sedangkan pendidikan dasar berbentuk sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat diberikan kepada warga negara usia 13-15 tahun.

Trend capaian tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar setingkat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat di Kabupaten Takalar selama periode 2018-2022 menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun. Pada

tahun 2021, capaian tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar yang diperoleh sebesar 90,52% Tahun 2022 sebesar 89,31% atau berada dibawah target tahun 2021 yaitu sebesar 100%.

Tabel II-41
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun
Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar
Kabupaten Takalar Tahun 2018 - 2023

Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	102,76	94,92	91,25	90,52	89,31	**109,19**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, 2023 (data diolah)

Untuk Tahun 2023, tingkat partisipasi dalam pendidikan dasar setingkat SD atau sederajat juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 19,88 poin jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kemendikbud Ristek RI bahwa jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar setingkat SD atau sederajat di Kabupaten Takalar sebanyak 32.304 jiwa. Sedangkan berdasarkan data kependudukan dari Disdukcapil Kabupaten Takalar, jumlah penduduk usia 7-12 Tahun pada Tahun 2023 sebanyak 29.584 jiwa. Sehingga tingkat partisipasi dalam pendidikan dasar setingkat SD atau sederajat Tahun 2023 di Kabupaten Takalar sebesar 109,19 % atau melewati target 100% yang telah ditetapkan.

3) Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat di Kabupaten Takalar selama periode 2018-2021 memiliki kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Tingkat capaian yang diraih untuk indikator ini pada tahun 2021 adalah sebesar 76,46% dan Tahun 2022 sebesar 78,98% atau lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Tabel II-42
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13- 15 Tahun
Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama
Kabupaten Takalar Tahun 2018 - 2023

Formulasi/Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	80,77	82,59	76,88	76,46	78,98	71,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 (diolah)

Untuk Tahun 2023, tingkat partisipasi dalam pendidikan dasar setingkat SMP atau sederajat kembali mengalami penurunan yang cukup dalam yakni sebesar 7,13 poin jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kemendikbud Ristek RI bahwa jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar setingkat SMP atau sederajat di Kabupaten Takalar sebanyak 12.487 jiwa. Sedangkan berdasarkan data kependudukan dari Disdukcapil Kabupaten Takalar, jumlah penduduk usia 13-15 Tahun pada Tahun 2023 sebanyak 17.380 jiwa. Sehingga tingkat partisipasi dalam pendidikan dasar setingkat SMP atau sederajat Tahun 2023 di Kabupaten Takalar sebesar 71,85% jauh lebih rendah dari target 100% yang telah ditetapkan.

4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan atau akses bagi warga masyarakat khususnya para pemuda yang putus sekolah dan putus lanjut di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum, yang mencakup program paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA. Program ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat mengikuti pendidikan di bangku sekolah, putus sekolah dan putus lanjut di berbagai jenjang pendidikan, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya, serta masyarakat

lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari peningkatan taraf hidup dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pengembangan program pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C ini diharapkan semakin memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat melalui layanan pendidikan nonformal.

Pada tabel II-43 Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Takalar mengalami fluktuasi selama periode 2017-2021. Pada tahun 2021, tingkat partisipasi untuk indikator ini mencapai 37,86% dan Tahun 2022 4,81% atau lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Tabel II-43
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun
Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah
Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan
Kabupaten Takalar Tahun 2018 - 2022

Formulasi/Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	4,10	89,76	7.74	37,86	4,81	17,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022 (diolah)

2.1.10.1.2 Urusan Wajib Kesehatan

1) Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk

Jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Takalar pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 (empat) unit rumah sakit yang terdiri atas 3 (tiga) rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Takalar salah satunya adalah rumah sakit bersalin dan 1 (satu) rumah sakit milik swasta. Dari 4 (empat) rumah sakit tersebut, 2 (dua) diantaranya adalah rumah sakit rujukan yaitu RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle dan RS. Maryam (Swasta)

Daya tampung rumah sakit ditandai dengan jumlah tempat tidur yang tersedia dan disiapkan untuk pelayanan kesehatan rujukan terutama rawat inap bagi penduduk. Rasio ideal ketersediaan tempat tidur menurut World Health Organization (WHO) adalah 1 : 1000 penduduk.

Rasio daya tampung rumah sakit di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-44
Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk
Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Daya Tampung RS Rujukan	Tempat Tidur	246	356	356	305	381
Jumlah Penduduk	Jiwa	298.688	300.853	302.695	305.077	326.044
Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,82	1,18	1,18	1,00	1,17

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

Jumlah tempat tidur yang tersedia pada 2 (dua) rumah sakit rujukan di Kabupaten Takalar mengalami kenaikan dari 305 unit di Tahun 2022 bertambah menjadi 381 di tahun 2023. Sehingga rasio daya tampung rumah sakit rujukan terhadap jumlah penduduk sebesar 1,17. Sebagaimana dengan rasio ideal yang ditetapkan WHO yaitu 1 unit tempat tidur per 1000 penduduk (0,001) maka Kabupaten Takalar telah melampaui rasio yang dipersyaratkan oleh WHO dengan nilai rasio sebesar 1,17 per 1000 penduduk.

2) Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi. Data RS rujukan yang terakreditasi di Kabupaten Takalar Tahun 2019 s.d. 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-45
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi
Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	Unit	1	2	2	2	2
Jumlah RS di kabupaten/kota	Unit	2	2	4	4	4
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	Persen	50	100	50	50	50

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

Rumah sakit yang melaksanakan pelayanan rujukan dan telah terakreditasi di Kabupaten Takalar sampai dengan tahun 2023 sebanyak 2 (dua) unit yang terdiri atas 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Takalar dengan status akreditasi UTAMA dan 1 (satu) rumah sakit milik swasta dengan status akreditasi PARIPURNA.

3) Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.

Faktor yang berkontribusi terhadap kematian ibu, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu adalah faktor yang berhubungan dengan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas seperti perdarahan, preeklampsia/eklampsia, infeksi, persalinan macet dan abortus. Penyebab tidak langsung kematian ibu adalah faktor-faktor yang memperberat keadaan ibu hamil seperti EMPAT TERLALU (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan dan terlalu dekat jarak kelahiran).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan mempersyaratkan bahwa setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang meliputi standar kuantitas maupun kualitas. Standar kuantitas yaitu memenuhi jumlah kunjungan sebanyak 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga sementara standar kualitas harus memenuhi 10 T.

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai dengan tabel II-46, menunjukkan adanya fluktuasi capaian dari tahun ke tahun. Capaian kinerja indikator pelayanan kesehatan di Kabupaten Takalar pada tahun 2021 sebesar 104,13% telah melampaui target capaian yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Namun terus mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya dimana ibu hamil yang menerima layanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di Tahun 2022 sebesar 90,73% dan 89,42% di Tahun 2023. Pada tahun 2023, dari 6.428 jiwa ibu hamil, terdapat 5.748 jiwa (89,42%) yang menerima layanan 4 kali kunjungan pemeriksaan (sesuai standar K4). Bahkan dari jumlah tersebut, terdapat 5.172 jiwa (80,46%) diantaranya melakukan pemeriksaan hingga 6 kali kunjungan. Namun demikian terdapat pula ibu hamil sebanyak 447 jiwa (6,95%) yang hanya melakukan 1 kali kunjungan pemeriksaan dan terdapat 223 jiwa (3,62%) yang tidak melakukan pemeriksaan sama sekali. Sehingga total ibu hamil yang tidak terpenuhi pelayanan kesehataan ibu hamil adalah sebanyak 680 jiwa (10,58%). Persentase ibu hamil yang memperoleh layanan kesehatan ibu hamil pada Tahun 2019-2023 di Kabupaten Takalar disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-46
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	95,62	94,48	104,13	90,73	89,42

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

4) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persalinan atau disebut dengan partus adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (Mochtar, 2013).

Banyak faktor yang memberikan pengaruh terhadap persalinan yaitu antara lain; faktor maternal biologi berupa usia ibu, paritas, jarak kehamilan, tinggi badan kurang 145 cm dan kelainan jalan lahir; faktor maternal lainnya meliputi status gizi/IMT, anemia, tekanan darah, riwayat obstetrik buruk, penyakit penyerta, dan komplikasi persalinan; dan faktor lingkungan yang dapat berupa pendidikan, sosial ekonomi dan lain sebagainya.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mempersyaratkan bahwa setiap ibu bersalin berhak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar yang meliputi persalinan normal dan persalinan dengan komplikasi.

Capaian indikator SPM pelayanan persalinan di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi dengan nilai capaian pada tahun 2021 berada dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Berdasarkan data pada tabel II-39 Dapat ditemukan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Capaian indikator SPM pelayanan persalinan di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif. Untuk Tahun 2023, jumlah ibu bersalin yang menerima pelayanan persalinan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebanyak 5.661 jiwa dari 6.133 jiwa ibu bersalin lahir di tahun 2023 dengan tingkat capaian 92,26%. Persentase ibu bersalin yang menerima pelayanan persalinan di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-47
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan
Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	94,64	100,19	96,77	95,57	92,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

5) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan

esensial neonatal yang diberikan kepada bayi baru lahir baik dari aspek standar kuantitas maupun standar kualitas. Yang dimaksud dengan standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 (tiga) kali selama periode neonatal dengan ketentuan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 – 8 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 – 7 hari dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. Sementara untuk; a. standar kualitas pelayanan esensial neonatal saat lahir (0 – 6) meliputi pemotongan dan perawatan tali pusat, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), injeksi Vitamin K1, pemberian salep/tetes mata antibiotik, pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0); b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) meliputi Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif, Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM, Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1, Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif. Dalam range waktu tersebut terdapat dua tahun yakni 2019 dan 2021 yang mampu mencapai bahkan melampaui target 100%. Untuk Tahun 2023, jumlah bayi lahir yang menerima pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Takalar sebanyak 5.558 jiwa dari 5.844 jiwa bayi lahir di tahun 2023 dengan tingkat capaian 95,11%. Persentase bayi lahir yang menerima pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-48
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00	95,65	109,69	97,13	95,11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

6) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan balita usia 12 – 59 bulan yang meliputi pelayanan kesehatan

balita sakit dan pelayanan kesehatan balita sehat. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Trend capaian indikator SPM cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif. Untuk capaian Tahun 2023, indikator ini mengalami penurunan yang cukup ekstrem jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, dimana dari 95,85% di Tahun 2022 turun 22,77 poin menjadi 73,08% di Tahun 2023. Jumlah balita usia 12-59 bulan yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di Tahun 2023 sebanyak 23.551 jiwa dari 32.228 jiwa total balita di Kabupaten Takalar. Data cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-49
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar
Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	68,65	57,52	80,39	95,85	73,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

7) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar adalah pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar yang meliputi skrining kesehatan dan tindaklanjut hasil skrining kesehatan yang dilaksanakan terhadap anak kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan) minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Data persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-50
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	86,49	84,67	89,27	92,63	98,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif. Namun demikian, dalam range waktu tersebut belum ada yang mencapai target 100%. Untuk Tahun 2023, jumlah anak usia pendidikan dasar yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebanyak 42.570 jiwa dari 43.356 jiwa bayi lahir di tahun 2023 dengan tingkat capaian 98,2%.

8) Persentase Warga Negara Usia Produkstif (15-59 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM dan skrining faktor risiko penyakit menular/penyakit tidak menular yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnese perilaku risiko. Data persentase warga negara usia produktif (usia 15-59 tahun) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-51
Persentase Warga Negara Usia Produktif (Usia 15-59 Tahun) Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	27,51	14,42	52,03	72,91	78,9%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator SPM pelayanan kesehatan bagi warga negara usia produktif (15-59 tahun) sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif. Untuk Tahun 2023, jumlah penduduk usia produktif yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebanyak 154.756 jiwa dari 196.171 jiwa total penduduk usia produktif di tahun 2023 dengan tingkat capaian 78,9%, meningkat 6 poin dari capaian tahun sebelumnya, namun belum memenuhi target 100% yang telah dtetapkan.

9) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah dan skrining faktor risiko pada usia lanjut yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesa perilaku berisiko. Data persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-52
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	49,52	54,27	60,00	71,92	80,13%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator SPM pelayanan kesehatan bagi warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung meningkat meskipun belum ada yang mencapai target 100%. Untuk Tahun 2023, jumlah penduduk usia 60 tahun keatas yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebanyak 22.952 jiwa dari 28.642 jiwa total penduduk usia 60 tahun keatas di tahun 2023 dengan tingkat capaian 80,13%, meningkat 8,21% dari capaian tahun sebelumnya.

10) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi usia 15 tahun keatas sesuai standar meliputi kegiatan pengukuran tekanan darah yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan dan edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat serta rujukan kasus jika diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Data persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-53
Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	52,24	5,27	22,97	44,82	48,46%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator SPM pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif. Untuk Tahun 2023, jumlah penderita hipertensi yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebanyak 32.686 jiwa dari 67.451 jiwa total penderita hipertensi di tahun 2023 dengan tingkat capaian 48,4%, meningkat 3,64 poin dari capaian tahun sebelumnya, namun belum memenuhi target 100% yang telah dtetapkan

11) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan bagi penderita Diabetes Millitus (DM) usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran gula darah yang dilaksanakan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi berupa perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi dan terapi farmakologi serta pelayanan rujukan bila diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Data persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-54
Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	52,24	52,7	85,22	94,48	96,73

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator pelayanan kesehatan bagi penderita Diabetes Mellitus (DM) sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung meningkat. Untuk Tahun 2023, jumlah penderita Diabetes Mellitus (DM) yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebanyak 5.211 jiwa dari 5.387 jiwa total penderita Diabetes Mellitus (DM) di tahun 2023 dengan tingkat capaian 96,73 %, meningkat 3,27 poin dari capaian tahun sebelumnya, namun belum memenuhi target 100% yang telah dtetapkan.

12) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Pelayanan kesehatan bagi penderita ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilaksanakan pemeriksaan status mental dan wawancara, edukasi kepatuhan minum obat dan pelayanan rujukan bila diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Data persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-55
Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan	Persen	70,19	110,97	68,35	85,83	90,22

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar						

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif. Untuk Tahun 2023, jumlah ODGJ yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebanyak 664 jiwa dari 736 jiwa total ODGJ di tahun 2023 dengan tingkat capaian 90,22 %, meningkat 9,78 poin dari capaian tahun sebelumnya, namun belum memenuhi target 100% yang telah dtetapkan.

13) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Pelayanan kesehatan bagi orang terduga TBC sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis (tanda dan gejala) yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun, pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis, edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan serta pelayanan rujukan bila diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Data persentase oarang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-56
Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100,00	8,89	42,45	77,41	48,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator pelayanan TBC bagi orang terduga TBC sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif. Untuk Tahun 2023, jumlah orang terduga TBC yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebanyak 5.506 jiwa dari 11.410 jiwa total sasaran orang terduga TBC di tahun 2023 dengan tingkat capaian 48,26 %. Capaian ini mengalami penurunan secara ekstrem jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022, dimana dari 77,41 % di Tahun 2022 menurun 29,15 poin dari capaian tahun sebelumnya

15) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Pelayanan kesehatan bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku risiko dan pencegahan penularan, skrining dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam satu tahun serta pelayanan rujukan bila diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Data persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-57
Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar
Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	3,17	21,45	82,59	84,29	94,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator pelayanan deteksi dini HIV bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif. Untuk Tahun 2023, jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Takalar sebanyak 7.063 jiwa dari 7.504 jiwa total orang dengan resiko terinfeksi HIV di tahun 2023 dengan tingkat capaian 94,12 %, meningkat 9,83 poin dari capaian tahun sebelumnya, namun belum memenuhi target 100% yang telah dtetapkan.

16) Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Masa neonatal adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28 hari) sesudah kelahiran. Bayi usia kurang dari satu bulan mempunyai tubuh yang sangat lemah dan rentan terkena penyakit. Itulah kenapa bayi yang baru lahir perlu mendapatkan perhatian khusus supaya kesehatannya tetap optimal. Kematian neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian neotanal adalah angka yang menunjukkan jumlah kasus kematian bayi usia 0-28 hari per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini akan menunjukkan derajat kesehatan masyarakat, karena kondisi bayi baru lahir yang masih sangat lemah akan tergantung dari berbagai kondisi seperti lingkungan sekitar dan status sosial orangtuanya. Angka kematian neotanal di Kabupaten Takalar pada Tahun 2019 s.d. 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-58
Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka kematian neonatal per-1000 kelahiran hidup.	Jiwa/ 1000 kelahiran hidup	4,48	4,29	3,81	1,9	2,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kematian neotanal di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2022 cenderung menurun, namun kemudian meningkat di Tahun 2023. Pada Tahun 2023, jumlah kasus kematian bayi usia 0-28 hari sebanyak 13 dari total 5.622 kelahiran hidup. Sehingga angka kematian neotanal pada Tahun 2023 sebanyak 2,3 jiwa/1.000 kelahiran hidup meningkat 0,4 poin dari kondisi Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa di Tahun 2023 terjadi 2,3 kasus kematian bayi usia 0-28 hari di setiap 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Takalar.

17) Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI/Maternal Mortality Rate) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan (nifas) per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Berikut ini adalah data Angka Kematian Ibu di Kabupaten Takalar Tahun 2015-2019 :

Tabel II-59
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Angka kematian Ibu per-100.000 kelahiran hidup	Jiwa/ 100.000 kelahiran hidup	125	103	190,38	68,52	142,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023 sangat fluktuatif dan cukup tinggi. Pada Tahun 2023, jumlah kasus kematian ibu

akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan (nifas) sebanyak 8 kasus dari total 5.622 kelahiran hidup. Sehingga angka kematin ibu pada Tahun 2023 sebanyak 142,3 jiwa disetiap 100.000 kelahiran hidup, meningkat sangat signifikan (107,7%) jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2022.

2.1.10.1.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

1) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km^2 dimana wilayahnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan. Sama halnya dengan kawasan pemukiman rawan banjir yang juga ditetapkan melalui regulasi kabupaten/kota berdasarkan peta rawan bencana pada kawasan permukiman. Kawasan ini perlu terlindungi dengan infrastruktur pengendalian banjir seperti bangunan perkuat tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain untuk meminimalisir dampak banjir.

Ketersediaan data rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota cukup minim karena hanya tersedia data untuk Tahun 2019,2021 dan 2023. Pada Tahun 2019 capaian indikator ini hanya mencapai 2,73 persen kemudian meningkat di Tahun 2021 dengan capaian 26,17 persen, namun menurun kembali di Tahun 2023 dengan capaian sebesar 10,41 persen dimana pada tahun tersebut dari 114 Ha luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah sungai, 15 Ha diantaranya telah terlindungi dengan infrastruktur pengendalian banjir. Data ini menunjukkan masih rendahnya kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Tabel II-60
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio luas kawasan permukiman	Persen	2,73	N/A	26,17	N/A	10,41

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota						

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2023

2) Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Pada tahun 2019, persentase luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 74,04 persen dan kondisi ini bertahan hingga tahun 2020. Pada Tahun 2021, capaian ini meningkat menjadi 77 persen, namun menurun kembali di Tahun 2022 menjadi sebesar 74,08 persen. Pada Tahun 2023, dari 2.859 Ha luas daerah irigasi, 3.852 Ha diantaranya terlayani oleh jaringan irigasi atau sebesar 74,22 persen. Data Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi di Kabupaten Takalar untuk Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-61
Proporsi panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	74,04	74,04	77,00	74,08	74,22

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar, Tahun 2024

3) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

Pada tahun 2020, terdapat 12,29% luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten dan meningkat terus hingga Tahun 2022 menjadi 21,78%. Namun pada Tahun 2023, rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai kembali menurun di angka 17,77 persen, dimana dari 63.682 meter

panjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi, hanya 11.318 meter yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Kabupaten Takalar. Data rasio kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten Takalar untuk Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-62

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Di Kabupaten Takalar Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kabupaten/kota	Persen	N/A	12,29	12,89	21,78	17,77

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2023

4) Persentase Jumlah rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

Berdasarkan table II-63 dapat bahwa pada tahun 2019, jumlah rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Takalar sebesar 9,55%, meningkat sangat signifikan dalam lima tahun terakhir dengan kondisi pada tahun 2022 menjadi 97,85%. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa program atau sumber dana lainnya yang mendukung pemenuhan kebutuhan air minum, misalnya DAK, HIBAH, HAMP, Pamsimas dan HID Mama. Untuk dana yang bersumber dari APBD Kabuaten Takalar jumlahnya sangat rendah dan tidak memungkinkan untuk membiayai kegiatan air minum.

Tabel II-63
Jumlah Rumah Tangga Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota
Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadapa air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen	9,55	3,41	92,91	97,85	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2023

5) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Berdasarkan table II-64 dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada periode 2017-2021 memperlihatkan trend peningkatan yang sangat menggembirakan. Walaupun alokasi APBD untuk bidang sanitasi sangat minim, tetapi Kabupaten Takalar mendapatkan sumber pendanaan lainnya yaitu bersumber dari dana APBN, dimana pada tahun 2021 persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik naik 2% karena adanya dana DAK Reguler dan penugasan serta adanya dana Sanitasi Desa Padat Karya untuk pembangunan tangki limbah domestik individual.

Tabel II-64
Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	0,73	1,42	4,88	91,42	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2022

6) Rasio kepatuhan IMB kab/ kota

Berdasarkan Tabel II-65 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten /Kota Takalar dalam mengurus IMB untuk pembangunan gedung atau rumah tinggal sudah baik, hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kab. Takalar terkait bagaimana cara pengendalian dan pemanfaatan penataan ruang. Hal ini tidak terlepas dari terbentuknya Tim Terpadu yang melibatkan Dinas Tekhnis yang terkait yang memberikan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB. Pemerintah sudah mensosialisasikan dengan baik, sudah membuat Perda Bangunan yang dimana isi dari Perda tersebut menjelaskan fungsi dan sanksi kepada masyarakat jika tidak memiliki IMB.

Tabel II-65

Rasio kepatuhan IMB kab/kota domestik Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2022

7) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

Tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Takalar terus mengalami peningkatan dari 54,5 % di Tahun 2019 hingga mencapai 63,90 % di Tahun 2021. Namun ada Tahun 2022, tingkat kemantapan jalan mengalami penurunan menjadi 62,77 % dan kembali meningkat menjadi 63,46 % di Tahun 2023. Tingkat kemantapan jalan yang meningkat didukung oleh jumlah alokasi anggaran untuk perbaikan jalan dalam Kabupaten Takalar yang tersedia cukup besar sehingga bisa mengakomodir perbaikan dan pemeliharaan jalan kabupaten /kota. Disamping itu, selain alokasi anggaran APBD Kabupaten (DAK dan Non DAK) juga terdapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN yang turut memberikan berkontribusi dalam perbaikan jalan baik jalan provinsi maupun jalan nasional yang ada/melintasi Kabupaten Takalar. Tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Takalar untuk Tahun 2019-2023disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-66
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	54,50	54,77	63,90	62,77	63,46

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2023

8) Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

Berdasarkan Tabel II-67 dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2021, Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPRPKP telah melaksanakan pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sebanyak 370 orang atau 37,00%. Jumlah ini masih sangat minim untuk memenuhi standar dan kualifikasi jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota Takalar.

Tabel II-67
Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	21,33	40,63	37,00	2,36	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2022

9) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Berdasarkan table II-68 dapat dilihat bahwa jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasan kabupaten yang terjadi kecelakaan konstruksi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan belum maksimalnya pengawasan kerja yang baik, karena keterbatasan anggaran, karena keterbatasan SDM dimana tenaga tehnis yang berkualifikasi kurang memadai.

Tabel II-68
Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi Tahun 2019 – 2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konsruksi	Persen	0	100	50	0	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2022

10) Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan

Tabel II-69
Tabel Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan

Indikator	*Satuan*	*Tahun*		
		2020	*2021*	*2022*
Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/ Kawasan	*Persen*	*0,028*	*0,030*	*0,031*

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 2022

2.1.10.1.4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Berdasarkan Tabel II-70 dapat dilihat bahwa belum ada upaya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang tertangani di Kabupaten Takalar, disebabkan karena belum adanya kegiatan dan belum adanya anggaran dialokasikan untuk penanganan rumah korban bencana.

Tabel II-70
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0	100	0	0	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2022

2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

Berdasarkan Tabel II-71 dapat dilihat bahwa jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan hanya ada pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.804 rumah sementara jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni sebanyak 588 rumah tangga (32,59%). Sementara untuk tahun 2021 belum pernah ada kegiatan pemerintah terkait relokasi.

Tabel II-71
Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	RT	162	491	588	600	350
Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	RT	0	0	1.804	0	0
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	Persen	0	0	32,59	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

3) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani

Berdasarkan Tabel II-72 dapat dilihat bahwa intervensi penanganan luasan kumuh di bawah 10 ha yang merupakan kewenangan

pemerintah kabupaten/kota berdasarkan SK Bupati Takalar tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukinan kumuh secara keseluruhan yaitu sebesar 110,65 ha belum ada yang tertangani. Penanganan/intervensi kawasan kumuh pada tahun 2021 dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Takalar yang awalnya seluas 43,10 ha membantu menangani dua(2) kelurahan yaitu Kelurahan Pattalassang awalnya luasnya 26,22 ha setelah intervensi program KOTAKU menjadi 16,57 ha dan Kelurahan Pallantikang awalnya 40,43 ha setelah intervensi KOTAKU menjadi 32,93 ha.

Tabel II-72
Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/Kota Yang Ditangani Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	Ha	0	0	0	0	0
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	Ha	0	0	22,58	10,65	23
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/kota yang ditangani	Persen	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

4) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Berdasarkan tabel II-66 menunjukkan bahwa persentase jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 mengalami penurunan dari tahun ke tahun . Pada tahun 2021, persentase jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 8,52% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 10,94%. Hal ini disebabkan karena adanya dana APBN berupa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang banyak berkontribusi mengurangi kriteria Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di Kabupaten Takalar.

Tabel II-73
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah unit rumah tidak layak huni	Unit	0	0	8.498	7.910	6.159
Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	Unit	0	0	72.297	72.297	72.297
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	0	0	11,75	10,94	8,52

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

5) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Berdasarkan tabel II-74 dapat dilihat bahwa data jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) hanya tersedia pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 1,59% sementara untuk tahun 2020 dan 2021 tidak ditemukan datanya.

Tabel II-74
Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	Unit	0	0	1.151	0	0
Jumlah unit rumah kab/kota	Unit	0	0	72.297	72.297	72.297
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	0	0	1,59	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.1.10.1.5 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Pada periode 2019 – 2023, persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan untuk dua tahun terakhir capaian indikator ini telah mencapai target 100%. Pada Tahun 2023, dari 70 laporan kasus yang diterima oleh

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar, seluruhnya dapat diselesaikan. Data persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan pada Periode Tahun 2019-2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-75
Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	95,59	93,26	97,51	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar, 2024

2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Berdasarkan tabel II-76 dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2019-2023, jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan sebanyak 8 produk hukum dan sepenuhnya telah dilakukan penegakan terhadap produk hukum tersebut.

Tabel II-76
Perda dan Perkada Yang Ditegakkan Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar, 2024

3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat penyusunan kajian risiko bencana dan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana. Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana meliputi wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/zoonosis prioritas diantaranya

rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Jumkah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada periode 2019 -2023 cukup fluktuatif. Untuk Tahun 2023 layanan penyampaian informasi rawan bencana dilaksanakan di berbagai fasilitas publik seperti pelaksanaan pelatihan literasi dan mitigasi bencana yang dilaksanakan di SMK 1 Takalar dan diikti oleh 100 orang pelajar. Hal yang sama juga dilakukan langsung di tingkat desa/ kelurahan yang dianggap sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Seperti Sosialisasi dan Simulasi Mitigasi Bancana yang dilaksanakan masing-masing di Desa Boddia dengan peserta sebanyak 50 orang dan yang dilaksanakan di Desa Bentang dengan jumlah peserta juga sebanyak 50 orang. Data Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Takalar pada tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-77
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	75	200	0	0	200

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar, 2023

4) Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/zoonosis prioritas

diantaranya rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Takalar selama periode 2019-2022 relatif kecil jumlahnya dan bahkan pada tahun 2020 tidak ada warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Baru pada Tahun 2023 jumlah warga negara yang menerima layanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mengalami peningkatan yang cukup pesat dimana warga negara yang terlayani sebanyak 19.015 jiwa dengan rincian 505 orang yang telah mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana, 1 orang menadapatkan layanan Pusdalops dan 18.509 orang yang mendapatkan layanan perlindungan bencana. Dalam pelaksanaan layanan ini juga telah diselesaikan satu dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Takalar.

Tabel II-78

Jumlah Warga Negara Yang Layanan Pencegahan dan Terhadap Bencana Memperoleh Pencegahan Kesiapsiagaan Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	50	0	150	N/A	19.015

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar

5) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan

epidemi/wabah penyakit/zoonosis prioritas diantaranya rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Pada tahun 2021 hanya 16 orang warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Kemudian meingkat pesat di Tahun 2023 dimana jumlah penerima layanan sebanyak 143 jiwa.

Tabel II-79
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelematan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1	40	16		143

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar

6) Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Terdampak

Pada Tahun 2023, Kabupaten Takalar dilanda sejumlah bencana yang menimbulkan kerugian yang cukup besar. Data kasus bencana yang terjadi sebanjang Tahun 2023 di Kabupaten Takalar selanjunya disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-80
Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Terdampak Tahun 2023

Jenis	Satuan	Korban Terdampak
1. Angin Kencang/ Putting Beliung	Unit rumah	707
2. Abrasi Pantai	Km	20
3. Kebakaran	Unit rumah	20
4. Orang Tenggelam	Jiwa	3
5. Kekeringan	Ha	1.528
6. Banjir Rob	Unit	9

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar, 2022

7) Luas Wilayah Rawan Bencana

Untuk data Luas Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Takalar telah dijelaskan secara detail pada Sub Bab 2.1.5 Wilayah Rawan Bencana

8) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian

kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Berdasarkan tabel II-81 dapat dilihat bahwa jumlah Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran selama periode 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan nilai persentase yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 87,27%.

Tabel II-81
Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran
Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	84,44	98,25	87,27		

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar, 2023

9) Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran

Tingkat waktu tanggap (response time) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (nonkebakaran).

Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran di Kabupaten selama periode 2019-2019 telah sesuai dengan nilai rata rata capaian waktu tanggap yang dipersyaratkan yaitu 15 (lima belas) menit.

2.1.10.1.6 Urusan Wajib Sosial

1) Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)

Pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat dengan cara memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

Capaian persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Takalar pada periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup fluktuatif. Pada tahun 2023, persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti mencapai target 100 persen sesuai dengan yang ditetapkan. Dimana dari 2.546 jiwa disabilitas terlantar, 23.020 jiwa anak terlantar dan 2.535 jiwa lanjut usia terlantar, seluruhnya mampu terpenuhi kebutuhannya baik itu kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan. Data penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Kabupaten Takalar Tahun 2019 s.d. 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-82
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM) Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	Persen	72	61,96	63	47,23	100

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Takalar, 2024

2) Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah selama periode tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan

setiap tahunnya. Bahkan untuk Tahun 2022 dan 2023 mampu mencapai target yang telah ditetapkan yakni 100 persen. Pada Tahun 2023, dari 293 keluarga yang menjadi korban bencana alam dan sosial, seluruhnya mampu terpenuhi kebutuhan dasarnnya.

Tabel II-83
Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2023

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	6,68	4,00	7,24	100	100

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Takalar, 2024

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Sampai Triwulan Ke II

2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-84
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	Jmlh Prog.	Jmlh Keg.	Jmlh Sub Keg.	Indikator		
					Jmlh Prog.	Jmlh Keg.	Jmlh Sub Keg.
1	2	3	4	5	3	4	5
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	19	91	93	19	91	0
2	Dinas Kesehatan	22	85	92	22	85	0
3	RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle	5	6	7	5	7	0
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	20	47	50	20	47	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	14	55	60	14	55	0
6	Badan Penanggulanan Bencana Daerah	10	17	21	10	17	0
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18	47	50	18	47	0
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	12	27	30	12	27	0
9	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	12	15	16	12	15	0

NO	PERANGKAT DAERAH	Jmlh Prog.	Jmlh Keg.	Jmlh Sub Keg.	Indikator		
					Jmlh Prog.	Jmlh Keg.	Jmlh Sub Keg.
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	14	36	44	14	36	0
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	0	0	0	0	0	0
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13	24	28	13	24	-
13	Dinas Perhubungan	11	23	27	11	23	0
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	9	29	31	9	29	0
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	34	38	11	34	0
16	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	14	31	36	14	31	0
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	25	29	7	25	0
18	Dinas Perikanan	12	20	22	12	20	0
19	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	12	25	32	12	25	0
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	13	22	27	13	22	0
21	Sekretariat Daerah	19	61	78	19	61	0
22	Sekretariat DPRD	16	61	65	16	61	0
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	17	45	50	17	45	0
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13	86	86	13	86	0
25	Badan Pendapatan Daerah	9	46	49	9	46	0
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	19	20	9	19	0
27	Inspektorat Daerah	11	32	37	11	32	0
28	Kecamatan Pattalassang	9	23	28	9	23	0
29	Kecamatan Sanrobone	7	11	15	7	11	0
30	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	7	9	13	7	9	0

NO	PERANGKAT DAERAH	Jmlh Prog.	Jmlh Keg.	Jmlh Sub Keg.	Indikator		
					Jmlh Prog.	Jmlh Keg.	Jmlh Sub Keg.
31	Kecamatan Polongbangkeng Utara	13	36	48	13	36	0
32	Kecamatan Mangarabombang	17	37	45	17	37	0
33	Kecamatan Mappakasunggu	8	18	22	8	18	0
34	Kecamatan Galesong	11	19	21	11	19	0
35	Kecamatan Galesong Selatan	9	21	22	9	21	0
36	Kecamatan Galesong Utara	13	28	35	13	28	0
37	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	7	15	16	7	15	0
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	12	41	43	12	41	0
	TOTAL	**455**	**1267**	**1426**	**455**	**1268**	**0**

Sumber : RKPD Pokok 2024, dan SIPD 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 455, jumlah kegiatan 1267, dan jumlah sub kegiatan 1426, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 455, jumlah indikator kegiatan sebanyak 455, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 0.

2.2.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2024. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-85
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Kabupaten Takalar Tahun 2024
Hingga Triwulan II

NO	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	390,434,577,231	96,496,056,592	6.85%	24.72%
2	Dinas Kesehatan	138,107,717,033	51,456,277,032	8.35%	37.26%
3	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	114,179,261,142	48,372,218,518	25.69%	42.37%
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	90,079,223,260	23,103,230,315	39.01%	25.65%
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12,133,147,443	4,959,032,385	24.36%	40.87%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,016,969,351	1,208,949,709	53.79%	40.07%
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5,604,278,122	2,392,892,788	23.12%	42.70%
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8,006,554,745	3,225,130,446	22.88%	40.28%
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10,906,281,152	2,179,238,986	12.51%	19.98%
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	28,422,792,646	5,596,991,962	9.55%	19.69%
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	13,194,925,147	4,195,720,379	38.27%	31.80%
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4,737,975,128	2,001,834,755	64.95%	42.25%
13	Dinas Perhubungan	6,057,654,884	2,622,998,397	0.00%	43.30%
14	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	6,542,136,842	2,984,825,334	50.70%	45.62%
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,118,316,964	1,636,655,706	55.33%	39.74%

NO	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
16	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	8,655,779,214	3,726,929,498	50.80%	43.06%
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5,376,721,083	1,848,973,225	34.70%	34.39%
18	Dinas Perikanan	7,719,060,392	1,441,932,667	22.08%	18.68%
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7,627,665,744	2,013,117,689	24.59%	26.39%
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4,492,682,694	1,844,140,797	24.90%	41.05%
21	Sekretariat Daerah	41,208,731,098	20,249,902,232	59.85%	49.14%
22	Sekretariat DPRD	33,077,444,247	11,042,453,894	31.44%	33.38%
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7,235,269,948	2,419,278,448	31.69%	33.44%
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	203,160,456,644	98,038,454,324	29.21%	48.26%
25	Badan Pendapatan Daerah	12,544,185,099	4,294,614,834	57.56%	34.24%
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,601,184,124	2,493,982,696	32.16%	44.53%
27	Inspektorat	15,097,518,714	5,605,576,422	24.56%	37.13%
28	Kecamatan Pattallassang	10,146,045,934	4,034,274,371	66.20%	39.76%
29	Kecamatan Sanrobone	1,540,396,538	664,446,712	76.43%	43.13%
30	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	7,523,655,110	3,262,503,908	71.59%	43.36%
31	Kecamatan Polongbangkeng Utara	9,114,859,704	2,634,424,485	17.80%	28.90%
32	Kecamatan Mangarabombang	3,493,414,715	1,254,305,794	10.18%	35.90%
33	Kecamatan Mappakasunggu	2,816,487,865	1,094,472,076	36.61%	38.86%
34	Kecamatan Galesong	1,914,203,298	891,543,749	53.01%	46.58%
35	Kecamatan Galesong Selatan	2,085,392,438	754,245,699	82.01%	36.17%
36	Kecamatan Galesong Utara	3,467,155,128	1,621,164,983	46.99%	46.76%
37	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	1,684,577,672	802,808,542	20.56%	47.66%
38	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	28,074,070,747	519,773,366	15.98%	1.85%
		1,259,198,769,240	***424,985,373,715***	***35.69%***	***36.55%***

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II, diolah Bappelitbangda

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebesar Rp. **424,985,373,715**,- anggaran tersebut dilaksanakan oleh 38 perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 36,55 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 35,69 persen. Kondisi ini menunjukkan capaian masih kurang 14,31 persen dari target 50 persen yang diharapkan pada triwulan II. Dari 38 perangkat daerah yang ada, terdapat 13 (Tiga Belas) OPD yang dapat dikategorikan memiliki kinerja baik dari sisi penyerapan anggaran sebab persentase diperoleh telah melebihi nilai 43 persen yang ditetapkan pada triwulan II. Adapun organisasi perangkap daerah yang dapat dikategorikan berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas 43 persen (tinggi) adalah :

1. Kecamatan Galesong Selatan dengan realisasi anggaran sebesar 36,17% persen dengan realisasi fisik sebesar 82,01 persen;
2. Kecamatan Sanrobone dengan realisasi anggaran sebesar 43,13 persen dengan realisasi fisik 76,43 persen;
3. Kecamatan Polongbangkeng Selatan dengan realisasi anggaran sebesar 43,36 persen dengan realisasi fisik sebesar 71,59 persen;
4. Kecamatan Pattallassang dengan realisasi anggaran sebesar 39,76 persen dengan realisasi fisik sebesar 66,20 persen;
5. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan realisasi anggaran sebesar 42,25 persen dengan realisasi fisik sebesar 64,95 persen;
6. Sekretariat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 49,14 persen dengan realisasi fisik sebesar 59,85 persen;
7. Badan Pendapatan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 34,24 persen dengan realisasi fisik sebesar 57,56 persen;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan realisasi anggaran sebesar 39,74 persen dengan realisasi fisik sebesar 55,33 persen;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 40,07 persen dengan realisasi fisik sebesar 53,79 persen;
10. Kecamatan Galesong dengan realisasi anggaran sebesar 46,58 persen dengan realisasi fisik sebesar 53,01 persen
11. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga dengan realisasi anggaran sebesar 43,06 persen dengan realisasi fisik sebesar 50,80 persen;

12. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan realisasi anggaran sebesar 45,62 persen dengan realisasi fisik sebesar 50,70 persen;
13. Kecamatan Galesong Utara dengan realisasi anggaran sebesar 46,76 persen dengan realisasi fisik sebesar 46,99 persen;

Sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan OPD hingga triwulan II masih dalam kategori sedang yaitu >20 – <43 persen dengan jumlah sebanyak 17 (Tujuh Belas) OPD atau 44,74 persen dari jumlah keseluruhan OPD, selebihnya sebanyak 8 (Delapan) OPD atau 21,05 persen dari jumlah keseluruhan OPD dengan realisasi anggaran yang tergolong rendah dengan serapan anggaran kurang dari 20 persen hingga triwulan II.

2.2.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2024

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 43 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah sebanyak 175 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 62 program atau 35,43 persen (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 62 program atau 35,43 persen (realisasi >20-43 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 51 program atau 29,14 persen (realisasi diatas 43 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 479 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun

2023. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 162 kegiatan atau 33,82 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 153 kegiatan atau 31,94 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 43 persen sebanyak 164 kegiatan atau masih 34,24 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada masing-masing perangkat daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1273 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 terdapat 531 sub kegiatan atau 41,71 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 268 sub kegiatan, dan 474 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-86
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD
Kabupaten Takalar Triwulan II Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4	2	2	0	9	5	2	2	48	34	6	8
2	Dinas Kesehatan	5	4	0	1	22	12	8	2	82	58	16	8
3	RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle	2	0	0	2	6	3	1	2	10	6	2	2
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	14	5	3	6	24	7	5	12	56	19	6	31
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3	0	0	3	14	3	2	9	45	18	4	23
6	Badan Penanggulanan Bencana Daerah	2	1	1	0	9	4	3	2	16	7	6	3
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	1	4	3	10	3	3	4	40	13	8	19
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7	5	2	0	11	7	3	1	17	10	4	3
9	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8	3	4	1	18	4	10	4	36	16	11	9
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	8	3	3	2	17	5	6	6	44	14	10	20
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	6	1	2	3	13	3	4	6	45	14	11	20
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	0	4	1	13	4	6	3	24	10	5	9
13	Dinas Perhubungan	3	2	1	0	17	4	7	6	20	10	5	5

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	5	0	3	2	9	0	6	3	24	9	8	7
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	3	2	1	12	6	4	2	34	14	12	8
16	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	7	1	2	4	16	4	1	11	35	9	2	24
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	2	0	1	7	4	2	1	23	11	5	7
18	Dinas Perikanan	4	3	0	1	12	6	1	5	19	8	2	9
19	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	5	3	2	0	14	5	4	5	29	11	2	16
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6	3	2	1	13	7	3	3	22	16	3	3
21	Sekretariat Daerah	3	0	2	1	19	1	6	12	61	9	12	40
22	Sekretariat DPRD	2	0	2	0	16	7	5	4	62	35	17	10
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	2	1	1	17	8	4	5	37	23	3	11
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	1	1	1	13	1	3	9	84	16	20	48
25	Badan Pendapatan Daerah	2	0	2	0	9	2	5	2	51	17	14	20
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	1	2	0	10	3	4	3	20	6	4	10
27	Inspektorat Daerah	3	0	1	2	11	2	3	6	27	5	5	17
28	Kecamatan Pattalassang	3	1	0	2	9	1	5	3	22	6	9	7
29	Kecamatan Sanrobone	2	0	1	1	7	1	2	4	11	2	2	7
30	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	2	1	0	1	7	4	2	1	10	3	2	5
31	Kecamatan Polongbangkeng Utara	5	3	1	1	13	8	3	2	35	24	5	6
32	Kecamatan Mangarabombang	6	4	1	1	17	8	5	4	37	26	5	6

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
33	Kecamatan Mappakasunggu	3	2	1	0	9	5	3	1	19	9	6	4
34	Kecamatan Galesong	5	1	3	1	11	2	6	3	20	3	12	5
35	Kecamatan Galesong Selatan	5	1	3	1	11	2	6	3	19	4	10	5
36	Kecamatan Galesong Utara	5	1	1	3	14	6	3	5	29	11	3	15
37	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	2	0	1	1	8	2	2	4	18	6	2	10
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	2	2	2	12	3	5	4	42	19	9	14
TOTAL		**175**	**62**	**62**	**51**	**479**	**162**	**153**	**164**	**1273**	**531**	**268**	**474**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II, diolah Bappelitbangda

2.2.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2024

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori **Sedang** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian realisasi kinerja lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada tiap-tiap perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa dari 175 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori rendah atau dibawah 20 persen terdapat 58 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 20-43 persen) terdapat 48 program, selebihnya sebanyak 69 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 43 persen pada triwulan II Tahun 2024.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 479 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 171 kegiatan (35,70 persen) yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 20 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 139 kegiatan (29,02 persen), selebihnya terdapat 169 kegiatan (35,28 persen) yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1273 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20 persen terdapat 553 sub kegiatan (43,44 persen), sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 198 kegiatan, selebihnya

yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 522 sub kegiatan, yaitu pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II-87
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD
Kabupaten Takalar Triwulan II Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4	2	0	2	9	4	2	3	48	34	4	10
2	Dinas Kesehatan	5	1	2	2	22	11	4	7	82	48	10	24
3	RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle	2	1	1	0	6	2	2	2	10	5	1	4
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	14	8	1	5	24	15	0	9	56	30	2	24
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3	1	2	0	14	5	6	3	45	28	2	15
6	Badan Penanggulanan Bencana Daerah	2	0	0	2	9	1	2	6	16	2	5	9
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	1	2	5	10	2	3	5	40	15	1	24
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7	6	1	0	11	7	3	1	17	10	1	6
9	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8	3	2	3	18	3	7	8	36	12	9	15
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	8	4	2	2	17	8	5	4	44	18	6	20
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	6	3	1	4	13	3	4	6	45	14	6	25
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	0	2	3	13	1	5	7	24	6	3	15

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
13	Dinas Perhubungan	3	0	1	0	17	8	4	5	20	11	4	5
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	5	1	1	3	9	2	2	5	24	11	1	12
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	2	1	3	12	5	4	3	34	14	10	10
16	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	7	2	2	3	16	6	2	8	35	13	2	20
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	3	0	0	7	4	2	1	23	16	1	6
18	Dinas Perikanan	4	1	3	0	12	6	1	5	19	8	2	9
19	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	5	1	2	2	14	4	4	6	29	8	6	15
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6	4	1	1	13	6	4	3	22	10	5	7
21	Sekretariat Daerah	3	2	1	0	19	9	5	5	61	30	11	20
22	Sekretariat DPRD	2	0	2	0	16	3	10	3	62	31	15	16
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	1	2	1	17	5	7	5	37	17	7	13
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	0	1	2	13	2	5	6	84	22	11	51
25	Badan Pendapatan Daerah	2	0	1	1	9	2	4	3	51	13	13	25
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	0	0	3	10	2	3	5	20	5	1	14
27	Inspektorat Daerah	3	0	0	3	11	3	3	5	27	7	1	19
28	Kecamatan Pattalassang	3	1	1	1	9	2	3	4	22	7	8	7
29	Kecamatan Sanrobone	2	0	0	2	7	1	1	5	11	1	1	9
30	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	2	1	1	0	7	5	1	1	10	3	1	6
31	Kecamatan Polongbangkeng Utara	5	4	1	0	13	9	2	2	35	23	7	5
32	Kecamatan Mangarabombang	6	2	2	2	17	6	5	6	37	22	4	11
33	Kecamatan Mappakasunggu	3	0	1	2	9	5	3	1	19	9	4	6
34	Kecamatan Galesong	5	0	1	4	11	1	3	7	20	2	5	13
35	Kecamatan Galesong Selatan	5	0	1	4	11	1	3	7	19	3	7	9

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
36	Kecamatan Galesong Utara	5	1	3	1	14	5	7	2	29	11	12	6
37	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	2	2	0	0	8	6	2	0	18	15	0	3
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	0	3	3	12	1	6	5	42	19	9	14
TOTAL		**175**	**58**	**48**	**69**	**479**	**171**	**139**	**169**	**1273**	**553**	**198**	**522**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II, diolah Bappelitbangda

2.2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan

Realisasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan urusan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dalam kategori sedang (diatas 20 persen), sedangkan realisasi anggaran masuk kategori tinggi (diatas 43 persen). Hal dimaksud digambarkan sebagai berikut :

1. Untuk Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian dalam kategori sedang, baik kinerja maupun keuangan;
2. Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata capaian kinerja pada kategori sedang namun untuk keuangan sudah pada kategori Tinggi;
3. Urusan Pemerintahan Pilihan dengan rata-rata capaian kinerja masih pada kategori rendah namun untuk keuangan sudah pada kategori sedang;
4. Unsur Pendukung Urusan pemerintahan dengan rata-rata capaian kinerja masih pada kategori rendah namun untuk keuangan sudah pada kategori Tinggi;
5. Unsur Penunjang Urusan pemerintahan dengan raat-rata capaian kinerja pada kategori sedang namun untuk keuangan sudah pada kategori sedang dan Tinggi;
6. Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan rata-rata capaian kinerja pada kategori sedang namun untuk keuangan sudah pada kategori Tinggi;
7. Unsur Kewilayahan rata-rata capaian kinerja pada kategori sedang, baik kinerja maupun keuangan; dan
8. Unsur Pemerintahan umum rata-rata capaian kinerja masih pada kategori rendah namun untuk keuangan sudah pada kategori Tinggi.

Tabel II-88
Capaian kinerja RKPD berdasarkan urusan Pemerintahan

Kode		Urusan/Bidang Urusan	Pagu dan Realisasi Anggaran			Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja			
			RKPD	APBD	Realisasi	Rp (%)	K (%)	Rp	K
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Urusan Pemerintahan Wajib	**580,858,099,071**	**707,939,121,299**	**203,550,584,397**	**28.75%**	**26.87%**	**S**	**S**
1		**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**534,296,104,005**	**639,006,072,440**	**179,431,100,171**	**28.08%**	**22.86%**	**S**	**S**
1	**1**	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	343,211,313,580	388,917,941,531	96,420,300,292	24.79%	9.13%	S	R
1	**2**	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	158,863,551,563	138,107,717,033	51,456,277,032	37.26%	8.35%	S	R
1	**3**	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19,926,887,228	90,079,223,260	23,103,230,315	25.65%	34.08%	S	S
1	**4**	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1,550,000,000	2,094,995,700	95,054,850	4.54%	10.19%	R	R
1	**5**	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	10,084,351,633	15,150,116,794	6,167,982,094	40.71%	39.07%	S	S
1	**6**	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	660,000,000	4,656,078,122	2,188,255,588	47.00%	36.35%	T	S
2		**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**46,561,995,066**	**68,933,048,859**	**24,119,484,226**	**34.99%**	**30.88%**	**S**	**S**
2	**7**	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	22,500,000	22,500,000	7,307,800	32.48%	33.33%	S	S
2	**8**	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3,979,178,164	4,950,300,252	1,789,345,485	36.15%	15.75%	S	R
2	**9**	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	432,500,100	157,539,500	17,920,300	11.38%	6.67%	R	R
2	**10**	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	10,000,000	2,500,999,900	39,263,400	1.57%	20.00%	R	S

Kode		Urusan/Bidang Urusan	Pagu dan Realisasi Anggaran			Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja			
			RKPD	APBD	Realisasi	Rp (%)	K (%)	Rp	K
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	7,469,231,742	10,693,925,247	4,156,456,979	38.87%	47.83%	S	T
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3,958,869,664	4,737,975,128	2,001,834,755	42.25%	64.95%	S	T
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3,531,647,020	948,200,000	204,637,200	21.58%	1.62%	S	R
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3,479,862,800	5,955,980,900	389,893,501	6.55%	9.27%	R	R
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	4,119,312,298	6,057,654,884	2,622,998,397	43.30%	30.47%	T	S
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3,724,639,128	6,517,136,842	2,984,825,334	45.80%	53.56%	T	T
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	5,736,187,745	7,969,054,745	3,217,092,646	40.37%	17.66%	S	R
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	2,443,899,442	4,118,316,964	1,636,655,706	39.74%	55.33%	S	T
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	3,961,219,780	7,385,107,714	3,114,988,898	42.18%	54.58%	S	T
2	20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	15,000,000	15,000,000	7,465,200	49.77%	51.92%	T	T
2	21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	10,000,000	10,000,000	4,069,100	40.69%	40.91%	S	S
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1,085,000,000	1,516,635,700	75,756,300	5.00%	4.44%	R	R
2	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2,564,947,184	5,358,721,083	1,846,313,225	34.45%	34.70%	S	S
2	24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	18,000,000	18,000,000	2,660,000	14.78%	12.78%	R	R
3		**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**24,863,283,731**	**41,762,667,732**	**9,477,815,726**	**22.69%**	**21.32%**	**S**	**S**

Kode		Urusan/Bidang Urusan	Pagu dan Realisasi Anggaran			Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja			
			RKPD	APBD	Realisasi	Rp (%)	K (%)	Rp	K
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	4,609,762,737	7,719,060,392	1,441,932,667	18.68%	22.08%	R	S
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	18,600,000	1,270,671,500	611,940,600	48.16%	45.77%	T	T
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	16,867,294,387	28,265,253,146	5,579,071,662	19.74%	10.13%	R	R
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	3,002,626,607	4,442,619,694	1,837,586,297	41.36%	49.92%	S	T
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	350,000,000	50,063,000	6,554,500	13.09%	0.00%	R	R
3	32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	15,000,000	15,000,000	730,000	4.87%	0.00%	R	R
4		**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**49,695,856,384**	**74,286,175,345**	**31,292,356,126**	**42.12%**	**45.64%**	**S**	**T**
4	1	Sekretariat Daerah	25,066,254,367	41,208,731,098	20,249,902,232	49.14%	59.85%	T	T
4	2	Sekretariat DPRD	24,629,602,017	33,077,444,247	11,042,453,894	33.38%	31.44%	S	S
5		**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**236,326,820,692**	**228,541,095,815**	**107,446,490,434**	**47.01%**	**23.56%**	**T**	**S**
5	1	Perencanaan	5,631,937,640	6,210,151,048	2,355,300,948	37.93%	42.25%	S	S
5	2	Keuangan	226,515,765,450	215,704,641,743	102,533,229,290	47.53%	43.38%	T	T
5	3	Kepegawaian	3,589,662,250	5,601,184,124	2,493,982,696	44.53%	32.16%	T	S
5	4	Pendidikan Dan Pelatihan	0	0	0	0.00%	0.00%	R	R
5	5	Penelitian Dan Pengembangan	589,455,352	1,025,118,900	63,977,500	6.24%	0.00%	R	R
6		**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**18,982,289,146**	**15,097,518,714**	**5,605,576,422**	**37.13%**	**24.56%**	**S**	**S**
6	1	Inspektorat Daerah	18,982,289,146	15,097,518,714	5,605,576,422	37.13%	24.56%	S	S
7		**Unsur Kewilayahan**	**36,521,541,947**	**43,786,188,402**	**17,013,965,469**	**38.86%**	**28.81%**	**S**	**S**
7	1	Kecamatan	36,521,541,947	43,786,188,402	17,013,965,469	38.86%	28.81%	S	S
8		**Unsur Pemerintahan Umum**	**19,876,341,774**	**28,074,070,747**	**4,177,539,147**	**14.88%**	**15.98%**	**R**	**R**

Kode		Urusan/Bidang Urusan	Pagu dan Realisasi Anggaran			Rata Rata Capaian Kinerja Kegiatan dan Predikat Kinerja			
			RKPD	APBD	Realisasi	Rp (%)	K (%)	Rp	K
8	1	Kesatuan Bangsa dan politik	19,876,341,774	28,074,070,747	4,177,539,147	14.88%	15.98%	R	R
		JUMLAH	**967,124,232,745**	**1,139,486,838,054**	**378,564,327,721**	**33.22%**	**26.70%**	**S**	**S**

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2024

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2024 sampai dengan Triwulan ke II

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
2. Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.
3. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
4. Perlunya Dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.

Beberapa komponen kegiatan pada sistem aplikasi perencanaan terkait kodefikasi program/kegiatan dan penganggaran mengalami perubahan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan ini berdampak pada kode rekening belanja.

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2024 sampai dengan Triwulan ke II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dari seluruh OPD dapat disampaikan bebrapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;

5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
7. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2024 Triwulan selanjutnya

Berdasarkan uraian atas faktor pendorong dan factor penghambat pencapaian kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi proram di lingkungan Bappelitbangda serta pengendalian dan evaluasi dilakukan terus menerus.
2. Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan.
3. Peran aktif Kepala Badan selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
9. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
10. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

a. Tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Kabupaten Takalar untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era glogal, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
b. Mendorong Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan Penuntasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun.

c. Meningkatkan kemampuan daya saing peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang bereputasi.
d. Mengupayakan untuk menangani secara lebih efektif target-target masyarakat yang tidak terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif, untuk meningkatkan persamaan akses pendidikan semua jenjang melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para stake holder Pendidikan.
e. Penanganan anak tidak sekolah melalui Program Gerakan Kembali Bersekolah, dan Gerakan sSatu PKBM Satu Desa. ; meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan; mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas; dan memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

1. Peningkatan mutu tenaga kesehatan dan memberdayakan para tenaga kesehatan non PNS secara professional dengan didukung oleh kecukupan sarana dan prasarana kesehatan serta keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga Negara dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Peemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Memperhatikan gambaran tersebut, maka penanganan pembangunan kesehatan di Kabupaten Takalar akan dilakukan melalui strategi:

a. Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit, ambulance siaga, dan mengaktifkan posyandu – posyandu se;

b. Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terpencil dan kepulauan;
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;
d. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani melalui pengembangan dan pembinaan olahraga.
e. Menjamin tersedianya barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya;
f. Mengutamakan pelayanan kesehatan yang berpihak kepada kaum marginal, kebijakan menempatkan satu tenaga kesehatan disetiap dusun dengan memamkai pendekatan *home Visit,* serta pelayanan pasien berbasis *online.*

2. Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja, pencari kerja dan wirausahawan.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar. Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali peserta secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan.

Pengantar diatas memberikan gambaran bahwa pengembangan kompetensi tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap untuk bersaing antar daerah, nasional maupun internasional. Kebijakan pemerintah periode ini ingin menyediakan 10.000 orang tenaga kerja handal, yang mempunyai etos kerja yang tinggi sehingga berdampak pada menurunnya beban hidup masyarakat menuju pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah yang tidak familiar adalah menghentikan perekrutan Tenaga sekarela/honor dan

menyeleksi kembali tenaga honor/sukarela yang telah bertugas secara profesional dan dijadikan tenaga non PNS yang professional.

3. Optimalisasi pengembangan sektor unggulan pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan jasa berbasis jaringan dengan Sistem Pertanian Terpadu.

Sistem Pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan menjadi salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa secara terpadu. Diharapkan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang petani berupa pangan, sandang dan papan akan tercukupi dengan sistem pertanian ini**.**

Pertanian terpadu pada hakekatnya adalah memanfaatkan seluruh potensi energi sehingga dapat dipanen secara seimbang. Pertanian melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapan dan memerlukan ruang untuk kegiatan serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi. Dengan pertanian terpadu ada pengikatan bahan organik di dalam tanah dan penyerapan karbon lebih rendah dibanding pertanian konvensional yang pakai pupuk nitrogen dan sebagainya. Agar proses pemanfaatan tersebut dapat terjadi secara efektif dan efisien, maka sebaiknya produksi pertanian terpadu berada dalam suatu kawasan. Pada kawasan tersebut sebaiknya terdapat sektor produksi tanaman, peternakan maupun perikanan. Keberadaan sektor-sektor ini akan mengakibatkan kawasan tersebut memiliki ekosistem yang lengkap dan seluruh komponen produksi tidak akan menjadi limbah karena pasti akan dimanfaatkan oleh komponen lainnya. Disamping akan terjadi peningkatan hasil produksi dan penekanan biaya produksi sehingga efektivitas dan efisiensi produksi akan tercapai.

Selain hemat energi, keunggulan lain dari pertanian terpadu adalah petani akan memiliki beragam sumber penghasilan. Sistem Pertanian terpadu memperhatikan diversifikasi tanaman dan polikultur. Seorang petani bisa menanam padi dan bisa juga beternak sapi, kambing atau ayam dan menanam jagung serta sayuran. Kotoran yang dihasilkan oleh ternak dapat digunakan sebagai pupuk sehingga petani tidak perlu membeli pupuk lagi. Jika panen gagal, petani masih bisa mengandalkan daging atau telur ayam, atau bahkan menjual sapi atau kambing untuk mendapatkan penghasilan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar menjadikan Sistem Pertanian Terpadu sebagai wujud nyata dari janji politik yang menjadi program prioritas daerah. Bantuan sapi perkelompok tani, pemanfaatan kotoran sapi melalui teknologi terapan dan pengadaan pakan ternak dengan

menggunakan ampas tebu, pengadaan biogas dengan menggunakan kotoran sapi, sampai kepada pembuatan pupuk organik yang nantinya akan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan akan menambah pendapatan para petani. Penangkaran bibit tanaman khususnya jagung serta budidaya perikanan tangkap dan pengolahan rumput laut mewarnai system pertanian yang terpadu dengan berkonsentrasi dibeberapa kecamatan. Lebih jauh perencanaan terkait pemanfaatan system pertanian terpadu akan dijadikan sebagai bentuk "Inovasi Daerah" dalam mendukung program pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah Daerah berharap kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait merapatkan barisan untuk sama-sama memaksimalkan dan mengembangkan kawasan pertanian terpadu, untuk ketahanan pangan dan pembangunan bekerlanjutan ke depan.

4. **Penajaman target penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu.**

Secara umum, kelemahan utama penanggulangan kemiskinan pada masa lalu yang perlu dikoreksi secara mendasar, antara lain: masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, kebijakan yang terpusat, lebih bersifat karikatif, bernuansa jangka pendek dan tidak bersifat struktural, memposisikan masyarakat sebagai obyek, cara pandang tentang kemiskinan yang diorientasikan pada ekonomi, dan asumsi permasalahan dan penanggulangan kemiskinan yang sering dipandang sama.

Tantangan perekonomian Kabupaten Takalar kedepan, sebagaimana pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian tidak lagi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Faktanya, bahwa inklusivitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar tergolong rendah dalam lima tahun terakhir, sehingga kerangka pendanaan harus mampu difokuskan pada inklusivitas pertumbuhan, dan tetap diupayakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai selama ini.

Corona virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Menurut World Health Organization (WHO), COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) yang menyerang sistem pernapasan. Namun tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya vaksin atas penyakit tersebut membuat COVID-19 memberikan ancaman

serius pada kesehatan publik, terutama terlihat dari tingkat kematian yang terus meningkat. Untuk itu, kecenderungan pembiayaan yang lebih ekspansif ditempuh Sulawesi Selatan harus dapat memastikan untuk meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini.

Kerangka pendanaan untuk alokasi program pembangunan daerah dan program perangkat daerah Kabupaten Takalar yang lebih ekspansif ke depan, akan difokuskan pada arah kebijakan, antara lain: (1) mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, untuk tetap menjaga stabilitas permintaan konsumsi domestik; serta (2) menciptakan iklim investasi untuk mendorong peningkatan investasi daerah,

Dampak dari COVID-19 pada sektor riil dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan COVID-19 yang extraordinary dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan (demand) maupun sisi penawaran (supply), yang pada gilirannya akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga diperkirakan akan terdampak signifikan dari disupsi ekonomi akibat COVID-19 ini. Terlebih jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak pada profitabilitas, solvabilitasi, serta keberlangsungan usaha. Selain melakukan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan terjadinya krisis kesehatan, Pemerintah juga sudah melakukan langkahlangkah kebijakan ekonomi berupa, antara lain, refocusing dan realokasi APBD.

Fokus utama kebijakan Pemerintah dalam penanganan COVID-19 adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas social safety net untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Langkah-langkah extraordinary ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan fleksibiltas APBD yang memastikan ketersedian anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan daerah.

5. **Menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkualitas melalui promosi – promosi kekayaan sumber daya alam sebagai bentuk pariwisata berkelanjutan, kebudayaan lokal serta penyiapan prasarana investasi melalui jaringan multipihak.**

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mengundang semua pihak – terutama anggota masyarakat – untuk mengelola sumber daya dengan cara yang memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika sambil memastikan keberlanjutan budaya lokal, habitat alam, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung penting lainnya. Takalar kaya akan sumber daya alam yang indah mulai dari pantai, pegunungan dan pulaunya, serta kebudayaan dan tempat – tempat bersejarah. diperlukan penanganan yang serius untuk mempromosikan kekayaan tersebut dengan berbasis jaringan dan investor dalam dan luar negeri.

Sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi daerah. Hal inidapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas. Pembangunan dan Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk: a. Peningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan yang menekankan kepada pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata nasional dan daerah dalam menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara

Konsep pariwisata yang diusung oleh pemerintah Kabupaten Takalar adalah membuat destinasi – destinasi wisata mulai dari barat sampai timur Takalar. Peningggalan – peninggalan bersejarah berupa situs diantaranya adalah Kota Pemerintahan yang pernah diduduki oleh Belanda yang terletak di Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu, Perairan Galesong yang pernah manjadi tempat berlabuhnya tentara Sultan Hasanuddin, Benteng Sanrobone yang lahir pada abad XV dari buah tangan Raja Sanrobone I Karaeng Dampang Panca Belong, dan sejarah Kerajaan Laikang serta Kerajaan Polongbangkeng.

Wisata kuliner termasuk program prioritas pemerintah daerah yang menjadi peluang cukup besar diantaranya wisata kuliner ikan segar, kuliner jagung manis yang akan ditata kembali sarana dan prasarananya. “Wisata Berburu” di Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan yang akan diintegrasikan dengan wisata kebun dan buah. Bendungan

Pammukulu selain berfungsi sebagai irigasi dapat juga diubah menjadi destinasi wisata dengan objeknya adalah danau.

6. **Mengintegrasikan perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten sampai ke tingkat desa berlandaskan kekuatan yang ada di desa serta meningkatkan kemandirian desa secara berkelanjutan.**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11/PRT/M/2012, yang dimaksud dengan infrastruktur mencakup bidang sumberdaya air, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, dan penataan ruang. Program pemerintah saat ini, mendorong pembangunan jaringan infrastruktur jembatan laut, dan sistem logistik harus terintegrasi satu sama lain agar dapat memberikan manfaat nyata terhadap aspek ekonomi, serta mampu meningkatkan arus masuk/keluar barang dan jasa antar kota, antar kabupaten, antar provinsi, antar pulau, dan antar wilayah. Penerapan rencana aksi tentang isu berkelanjutan dapat dimulai di tingkat kota atau dapat dilakukan secara simultan di tingkat kabupaten dan provinsi.

Konsep pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar yang saling terkait satu sama lain dan saling menunjang yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup (KTT Bumi,1992). Definisi lain dari pembangunan berkelanjutan adalah (1) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; (2) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan (3) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. (RPJMN Tahun 2015-2019).

Perencanaan pemerintah daerah terkait dengan infrastruktur terintegrasi dan berkelanjutan adalah konsep *"one hour around Takalar"* satu jam berkeliling takalar dengan membuat infrastruktur jalan jembatan dengan system "Lingkar barat sampai Lingkar Timur" mulai dari Kecamatan galesong Utara sampai kepada Kecamatan Polombangkeng Utara dengan melewati banyak destinasi wisata yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mendatangkan devisa daerah. Lingkar Timur yang langsung menghubungkan Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Gowa dan Lingkar Barat yang menghubungkan langsung Takalar dengan Kota Makassar. Dengan konsep *one hour around Takalar* diharapkan mampu menyerap orang – orang untuk datang ke Takalar menikmati keindahan alamnya sepanjang jalan sehingga mampu merealisasikan strategi "*something to see, something to do, something to buy",* setiap orang yang datang akan melihat, melakukan dan membeli sesuatu yang bermanfaat.

7. **Membangun akhlak bersendikan agama sejak dini melalui aktivitas keagamaan dan memberikan apresiasi kepada imam desa, imam dusun dan tokoh agama yang berprestasi.**

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini. Usia dini yang dikenal juga dengan "*Golden Age*", mendidik anak dengan bekal nilai – nilai luhur dimasa ini akan memberikan dampak yang kuat bagi kehidupan pada masa dewasa.

Program prioritas pemerintah kabupaten Takalar meletakkan sendi – sendi agama sejak usia dini melalui kegiatan keagamaan diantaranya gerakan shalat berjamaah, hafidz Qur'an serta kegiatan keagamaan lainnya. Pemberian apresiasi kepada para tokoh agama yang berprestasi berupa insentif dan umrah.

8. **Penegakan kedisiplinan seluruh aparat sipil Negara dengan payung hukum reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja dan pengawasan serta pemberian pengakuan terhadap kinerja penata kelolaan pemerintahan daerah dan desa.**

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada

jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan aparatur sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara.

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

a. Nilai dasar;
b. Kode etik dan kode perilaku;
c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e. Kualifikasi akademik;
f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
g. Profesionalitas jabatan.

Penjabaran salah satu misi pemerintah daerah “menerapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan demokratis” dijabarkan dalam program prioritas adalah bagaimana menciptkan pemerintahan yang *good governance* melalui program peningkatan kesejahteraan aparatur sipil Negara, meminimalisir temuan atas kesalahan administrasi terkait keuangan dan laporan kinerja, serta memperkuat dan meningkatkan bentuk pelayanan kepada publik dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

Tabel II-89
Visi, Misi, Tujuan. Sasaran dan Strategi Kabupaten Takalar 2023 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Tujuan-1: Memperkuat daya saing daerah	Sasaran-1.1.: Meningkatnya kualitas hidup manusia	Pemenuhan SDM, sarana-prasarana dan kolaborasi multi pihak dalam perbaikan derajat pendidikan, derajat kesehatan, daya beli, kesetaraan gender, literasi masyarakat serta daya saing pemuda dan olah raga.
		Sasaran-1.2: Meningkatnya daya saing infrastruktur daerah	Pemenuhan SDM dan peralatan konstruksi dalam pembangunan dan pemeliharaan infratruktur jalan dan jembatan, perhubungan, perumahan dan pemukiman, ketersedian air bersih dan fasilitas sanitasi, pemanfaatan ruang berbasis RTRW.
2.	Tujuan-2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	Sasaran-2.1: Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pengembangan dan adopsi inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perindustrian, usaha mikro dan kecil, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja secara adaptif dengan revolusi industri 4.0
		Sasaran-2.2: Berkurangnya penduduk miskin	Pengurangan beban pengeluaran, pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan UMKM dan perbaikan pemanfaatan dana desa bagi rumah tangga miskin berdasarkan DTKS yang akurat dan mutakhir

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Sasaran-2.3.: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Perbaikan sistem pengelolaan dan penegakan regulasi dalam penanganan limbah/bahan beracun dan berbahaya serta penanganan sampah berbasis reduce, reuse dan recicle (3R) diringi dengan pemeliharaan keragaman hayati.
3.	Tujuan 3: Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan	Sasaran 3.1.: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja diiringi dengan perbaikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam mencapai kinerja yang optimal
		Sasaran 3.2.: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kesadaran masyarakat, pemenuhan SDM dan fasilitas, dan pemutakhiran data penerima layanan secara kontinyu dalam memenuhi SPM pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan sosial serta sistem pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
		Sasaran 3.3.: Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	Koordinasi Forkopimda, penguatan swadaya masyarakat dan pelibatan berbagai organisasi sosial-kemasyarakatan dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat serat wawasan kebangsaan.

Sumber : Bappelitbangda 2022, diolah

2.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Adapun Arah kebijakan yang merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Disamping itu arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Adapun perubahan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II-90
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 sesuai RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Tujuan-1: Memperkuat daya saing daerah	Sasaran-1.1.: Meningkatnya kualitas hidup manusia	Pemenuhan SDM, sarana-prasarana dan kolaborasi multi pihak dalam perbaikan derajat pendidikan, derajat kesehatan, daya beli, kesetaraan gender, literasi masyarakat serta daya saing pemuda dan olah raga.	• Penguatan daya beli masyarakat • Pengembangan literasi masyarakat
		Sasaran-1.2: Meningkatnya daya saing infrastruktur daerah	Pemenuhan SDM dan peralatan konstruksi dalam pembangunan dan pemeliharaan infratruktur jalan dan jembatan, perhubungan, perumahan dan pemukiman, ketersedian air bersih dan fasilitas sanitasi, pemanfaatan ruang berbasis RTRW.	• Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan perhubungan
2	Tujuan-2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	Sasaran-2.1: Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pengembangan dan adopsi inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perindustrian, usaha mikro dan kecil, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja secara adaptif dengan revolusi industri 4.0	• Pengembangan kualitas koperasi dan permodalan UMKM • Pengembangan jaringan perdagangan barang pokok dan penting • Pengembangan sistem ekonomi sirkuler

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Sasaran-2.2: Berkurangnya penduduk miskin	Pengurangan beban pengeluaran, pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan UMKM dan perbaikan pemanfaatan dana desa bagi rumah tangga miskin berdasarkan DTKS yang akurat dan mutakhir	• Perlindungan sosial bagi orang miskin • Pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan
		Sasaran-2.3.: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Perbaikan sistem pengelolaan dan penegakan regulasi dalam penanganan limbah/bahan beracun dan berbahaya serta penanganan sampah berbasis reduce, reuse dan recicle (3R) diringi dengan pemeliharaan keragaman hayati.	• Pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recicle (3R)
3	Tujuan 3: Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan	Sasaran 3.1.: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja diiringi dengan perbaikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam mencapai kinerja yang optimal	• Pemantapan sistem pengawasan internal pemerintah • Pemantapan sistem pengadaan barang dan jasa
		Sasaran 3.2.: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kesadaran masyarakat, pemenuhan SDM dan fasilitas, dan pemutakhiran data penerima layanan secara kontinyu dalam memenuhi SPM pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan sosial serta sistem pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.	• Pengembangan inovasi pelayanan publik • Akselerasi pemenuhan standar pelayan berbasis SPM dan pelayanan public lainnya

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Sasaran 3.3.: Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	Koordinasi Forkopimda, penguatan swadaya masyarakat dan pelibatan berbagai organisasi sosial-kemasyarakatan dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat serat wawasan kebangsaan.	• Penguatan demokrasi dan dinamika politik daerah • Deteksi dini dan pencegahan konflik sosial

Sumber : Bappelitbangda 2022, Diolah

2.4 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Prioritas, arah kebijakan, strategi, Arah kebijakan, dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan Tahun 2024 yang meliputi antara lain:

Tabel II-91
Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 sesuai RPD kabupaten Takalar 2023 – 2026

No	Indikator Makro Pembangunan	Realisasi Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	3,86%	5,04 – 6,52	5,04 – 6,52
2.	PDRB Perkapita (ADHB)	41,14 juta	49,52	49,52
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,58	2,49	2,49
	Jumlah Penganggur	5.541		
4.	Tingkat Kemiskinan	8,29	6,90	6,90
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,46	69,70	69,70
6.	Gini Ratio	0,386	0,364	0,364
7.	Indeks Williams			
8.	Tingkat Inflasi	2,89	3,48	3,48

Sumber : Bappelitbangda 2024, diolah

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2024. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2024

3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengembangan sumber daya alam sektor unggulan serta optimalisasi potensi sektor pariwisata dan sektor lainnya untuk mengefektifkan pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih lanjut, ini dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas rakyat agar dapat lebih menjadi subjek dan mampu menciptakan kesejahteraan dengan upaya penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif.

3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar mengalami perbaikan di level yang lebih tinggi dibandingkan kinerja nasional dan provinsi, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Takalar mampu mempertahankan kinerja lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional, terlihat pada capaian Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Takalar mampu tumbuh positif pada posisi 3,86%, berada dibawah angka Pertumbuhan ekonomi provinsi yang juga sudah tumbuh positif pada posisi 4,51% dan nasional pada posisi 5,05%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan PDRB ADHB pada beberapa sektor lapangan usaha antara lain : Pertanian, Kehutanan & Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi dan Takalar.

A. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ketahanan perekonomian Indonesia sendiri tetap terjaga meskipun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,0% (yoy). Pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang

menurun utamanya karena keberhasilan pemerintah dalam menurunkan inflasi bahan pangan. Tingkat inflasi tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada bulan April 2023.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Sementara itu, indikator dini lainnya juga menunjukkan tren yang relatif kuat. Purchasing Managers' Index (PMI) nasional bulan April 2023 mencapai 52,7, terus berada pada zona ekspansif sejak awal tahun hingga saat ini. Di tengah menguatnya fondasi ekonomi domestik serta membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi global, pemerintah mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada di kisaran 5,3-5,7%.

Melihat tren normal pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun lima tahun sebelum pandemi di kisaran 5%, lalu pascapandemi saat ini bisa kembali ke tren jangka panjang di kisaran 5%, maka pemerintah membutuhkan upaya luar biasa untuk bisa mencapai target pertumbuhan 5,3-5,7% dalam jangka pendek. Ada tiga tantangan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 yang betul-betul harus dimitigasi.

Pertama, adalah suku bunga yang tinggi. Menurutnya, hingga tahun 2025 bank sentral negara utama bakal masih menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi. Salah satunya The Fed yang bakal berimbas pada penguatan dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintahnya. Kondisi ini akan memberikan dampak pada keluarnya dana asing atau outflow dari Indonesia. Sebab, investor akan memilih untuk menaruh dananya di negara yang memiliki bunga tinggi. Kalau interest rate high terjadi, maka akan ada capital outflow. Ini yang sekarang kita rasakan, SBN kita dalam hal ini termasuk kena capital outflow non residence. Jadi pemegang SBN asing keluar dari Indonesia atau melepas SBN kita, artinya yield SBN kita akan naik.

Kedua, inflasi karena kenaikan harga energi yang bakal berdampak pada daya beli masyarakat. Pasalnya, harga minyak masih dibayangi ketidakpastian di tengah kondisi perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, pertemuan OPEC, dan rencana negara G7 menetapkan harga minyak. Daya beli ini adalah risiko yang harus tetap dijaga pemerintah agar perekonomian tetap tangguh. Apalagi, konsumsi masyarakat menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Artinya, konsumsi harus tetap bisa tumbuh di atas 5 persen agar perekonomian terealisasi tinggi seperti sekarang.

Ketiga, pelemahan ekonomi global ke kinerja ekspor. Jika perekonomian negara mitra dagang melemah, maka ekspor Indonesia akan

turun dan tak bisa lagi setinggi saat ini. Di sinilah kebijakan pemerintah harus betul-betul tepat. Tahun ini ekspor tinggi karena dua hal volume, itu kan sebagian karena permintaan tinggi dari RRT, AS, Eropa, Jepang untuk CPO kita. Kalau dunia temaram pasti permintaan ekspor turun, komoditas tak setinggi itu. Ini menjadi faktor ketiga dalam outlook growth kita tahun depan yang harus terus dimonitor.

Pada saat ini ekonomi dunia memang masih belum terang dan penuh badai. Menurutnya, hal ini tercermin dari masih banyaknya negara mengalami lonjakan inflasi dan perekonomian yang melambat. Bahkan, tahun depan banyak yang bakal masuk ke jurang resesi. Meski perekonomian Indonesia saat ini tanggung dan mampu tumbuh di atas 5 persen, jika perekonomian global masih dibayangi awan gelap akan tetap terdampak. Karenanya, koordinasi dengan berbagai pihak harus dilakukan, terutama kebijakan moneter Bank Indonesia, dan sektor riil melalui kebijakan di Otoritas Jasa Keuangan. Bila ketiganya bisa berjalan dengan serentak, maka ekonomi akan tetap tangguh.

Tabel III-1
Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2022–2024
(Persen, YoY)

Uraian	Realisasi Tahun 2022 a)	Target RPJMN Tahun 2023 b)	Target RKP Tahun 2024 c)
Pertumbuhan PDB			
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,40	3,7–3,8	3,4
Pertambangan dan Penggalian	-2,0	1,9–1,9	1,0
Industri Pengolahan	-2,9	5,2–5,5	4,2
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,3	5,2–5,2	5,0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,9	4,3–4,4	5,4
Konstruksi	-3,3	5,8–6,1	5,7
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,7	5,6–6,0	4,4
Transportasi dan Pergudangan	-15,0	7,1–7,4	4,8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,2	6,1–6,3	5,4
Informasi dan Komunikasi	10,6	7,7–8,8	9,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,2	6,4–6,9	4,6
Real Estate	2,3	5,0–5,0	4,1

Uraian	Realisasi Tahun 2022 a)	Target RPJMN Tahun 2023 b)	Target RKP Tahun 2024 c)
Jasa Perusahaan	-5,4	8,4–8,4	4,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,0	4,8–5,1	2,9
Jasa Pendidikan	2,6	5,2–5,2	3,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,6	7,6–8,0	4,9
Jasa Lainnya	-4,1	9,3–9,5	4,6

Sumber: a) BPS, 2024; b) RPJMN 2020 - 2024; c) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas

B. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Perekonomian Sulawesi selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I – 2022 mencapai Rp.136,69 Trilliun dan atas dasar konstan 2010 mencapai RP.83,36 Trilliun. Ekonomi Sulawesi selatan triwulan I- 2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami konstraksi sebesar – 5,77 % (q - to - q). Dari sisi produksi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,03 persen. Sementara dari sisi pengeluaran komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,17 persen. Ekonomi Sulawesi selatan triwulan I – 2022 terhdadap triwulan I – 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,27 persen (y – on – y) . Dari sisi produksi lapangan usaha pengadaan Listrik danGas pertumbuhan tertinggi sebesar 19,82 persen. Dari sisi pengeluaran komponen ekspor jasa barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 77,10 persen.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2022, diarahkan untuk "Inovasi pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi**",** dengan prioritas meliputi Pemantapan Reformasi Birokrasi, Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk Akselerasi Pertumbuhan, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial, Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan Berbudaya, dan Pengelolaan Komoditas Unggulan berbasis Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Sulawesi Selatan terhadap perekonomian nasional diharapkan mampu melakukan terobosan di beberapa sektor potensial agar dapat

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang wilayah timur Indonesia berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata serta industri pengolahan diharapkan mampu menjadi motor di dalam pertumbuhan ekonomi, melalui pengembangan di sektor pertanian sebagai lumbung pangan padi dan jagung serta kakao, pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi serta peningkatan industri pengolahan dan industri jasa dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Tabel III-2
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan
Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II
Tahun 2024 (Persen)

URAIAN	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi	5,23-6,71	5,23-6,71		

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan; 2024

C. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar

Perekonomian Kabupaten Takalar berdasarkan besaran Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2023 mencapai Rp. 12.868,38 Milyar dan atas dasar konstan 2010 mencapai RP.7.507,06 Milyar. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,64% pada Tahun 2022 atau mengalami kontraksi sebesar 0,78 % dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 3,86%.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Takalar yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024, diarahkan untuk **"Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Yang Inklusif Serta Penguatan Demokrasi"** dengan prioritas meliputi : Peningkatan mutu tenaga pendidik dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; Peningkatan mutu tenaga kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan serta keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu, Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja, pencari kerja dan wirausahawan; Optimalisasi pengembangan sektor unggulan pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan jasa berbasis jaringan dengan Sistem Pertanian Terpadu; Penajaman target

penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu; Pengembangan sektor pariwisata guna menunjang iklim investasi yang sehat dan berkualitas; Pengintegrasian perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten ke tingkat desa yang berkelanjutan; Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kualitas ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat; Penegakan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja aparatur serta penatakelolaan pemerintahan daerah dan desa.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi perekonomian Kabupaten Takalar terhadap perekonomian Sulawesi Selatan dan nasional diharapkan mampu melakukan terobosan di beberapa sektor potensial agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Takalar merupakan salah satu wilayah penyangga Kota Makassar yang tergabung dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Selain bisa meningkatkan peran Takalar pada sektor jasa serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi. Potensi sumber daya alam khususnya pada sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi sektor unggulan, serta pengembangan kawasan pariwisata yang dapat membantu peningkatan peran pada sektor jasa. Rencana pengembangan Kawasan Industri Takalar juga diharapkan mampu berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja produktif. Dengan optimalisasi potensi-potensi tersebut, diharapkan mampu menjadi motor di dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Tabel III-3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar
Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024,
Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II
Tahun 2024 (Persen)

URAIAN	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi	5,04-6,52%	5,04-6,52%	5,04-6,52%	

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2024

3.1.1.2 Inflasi

Capaian Inflasi Takalar Tahun 2023 sebesar 2,89%. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pada RKPD Pokok Tahun 2024 sebesar 3,48%. Kenaikan terutama dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat yang membaik dan cenderung meningkat akibat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang juga semakin membaik. Dengan membaiknya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Mencermati hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar tetap berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih. Sejalan dengan perbaikan ekonomi, maka diharapkan inflasi triwulan II 2024 dapat meningkat meskipun tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,55% (yoy). Terkait hal tersebut Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Takalar akan terus memperkuat koordinasi secara intensif dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan dan mengefektifkan jalur distribusi yang efisien.

Tabel III-4
Inflasi Kabupaten Takalar
Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024,
Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II
Tahun 2024 (Persen)

URAIAN	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024
Inflasi	3,48%	3,48%	3,48%	

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2024

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran maupun penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor perekonomian yang ada dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja menurut sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Takalar 2023 sebesar 2,89 persen. Kondisi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target yang ada pada RKPD Pokok Tahun 2024 sebesar 3,48 persen. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka tersebut tidak terlepas dari lapangan pekerjaan lokal yang semakin

berkurang. Di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Takalar juga berupaya mendorong optimalisasi penyerapan tenaga kerja antara lain melalui *job fair* dan penyederhanaan izin usaha.

Tabel III-5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar
Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024,
Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II
Tahun 2024 (Persen)

URAIAN	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,11	3,11	3,11	

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2024

3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

Seperti halnya dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, dengan melandainya pandemi Covid-19 serta dibukanya aturan pengetatan kegiatan masyarakat secara nasional, maka sebagian besar masyarakat di Takalar juga terkena dampaknya, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah serta sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Takalar pada Tahun 2024 di prediksi akan sedikit menurun menjadi 6,90 persen dibandingkan dari Tahun 2023 yang mencapai 8,29 persen (menurun sebesar 1,39 persen), namun masih lebih rendah dari capaian provinsi Tahun 2023 sebesar 8,70 persen dan nasional sebesar 7,90 persen.

Kondisi yang telah dijelaskan di atas, mengindikasikan bahwa rata rata pendapatan dan ketimpangan kemiskinan di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan daerah perdesaan atau dengan kata lain, daerah perkotaan menyediakan pendapatan yang lebih besar dengan pilihan pekerjaan beragam yang umumnya ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. Selain itu, kondisi ini ditunjang pula oleh vaksinasi dan aktivitas usaha yang perlahan aktif kembali. Hal lain yang menggembirakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan yang mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani di Takalar.

Tabel III-6
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Takalar
Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024,
Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II
Tahun 2024 (Persen)

URAIAN	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024
Tingkat Kemiskinan	6,90	6,90	6,90	

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2024

3.2 Tantangan Perekonomian Daerah

3.2.1 Aspek Eksternal

Perekonomian global pada tahun ini dinilai lebih sulit. Pasalnya, faktor perang dagang kini tak hanya antara Amerika Serikat dengan China, tapi sudah meluas ke Uni Eropa. Apalagi dengan kondisi saat ini, wabah Virus Covid – 19 (Coronavirus Disease 19) telah menyebar di beberapa belahan dunia yang membuat perekonomian menjadi tidak stabil. Diperkirakan situasi ekonomi tahun ini tidak mudah di tengah perlambatan ekonomi global dan ancaman resesi di sejumlah negara. Indonesia harus menggunakan kekuatan perekonomian dalam negeri. konsumsi domestik, yang berkontribusi hampir separuh dari perekonomian nasional. Selain itu penopang pertumbuhan lainnya adalah, belanja pemerintah, ekspor, dan investasi. pertumbuhan ekonomi baru menyasar sektor yang dinilai punya potensi besar, antara lain sektor pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa umum seperti perdagangan dan pariwisata inklusif. Beberapa tantangan global dan nasional yang menjadi perhatian antara lain :

9. Ketidakpastian global masih tinggi.
10. Probabilitas terjadinya resesi global tetap tinggi.
11. Tekanan inflasi yang presisten tinggi dan tidak mampu turun dalam waktu cepat.
12. Dampak lanjutan dari pengetatan keuangan dan peningkatan suku bunga global.
13. Deglobalisasi akibat geopolitik.
14. Risiko *scarring effect* akibat pandemi pada negara berkembang yang lebih tinggi dari negara maju.

15. Defisit anggaran di berbagai negara diperkirakan belum kembali ke level tahun 2019

3.2.2 Aspek Internal

Perekonomian Takalar Tahun ini diperkirakan akan sedikit membaik dari tahun sebelumnya meskipun progresnya diperkirakan tidak akan agresif dan akan bergerak lambat. Takalar harus memanfaatkan kondisi perekonomian global, nasional dan internal Sulwesi Selatan dengan lebih mengedepankan konsumsi lokal, optimalisasi belanja pemerintah serta optimalisasi sektor yang dinilai mempunyai potensi besar antara lain, sektor pertanian dan perikanan, pariwisata dan perdagangan besar, kecil dan eceran. Beberapa tantangan perekonomian daerah antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi
   Meskipun pertumbuhan ekonomi Takalar pertahunnya rata-rata masih lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, namun pertumbuhan ekonomi tahun ini akan diprediksi belum seprogresif tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dampak ketidakpastian serta perlambatan ekonomi global dan nasional yang diprediksi masih akan terjadi pada tahun ini.
2. *Climate Change*
   Perubahan iklim yang terjadi secara global juga mempengaruhi produksi pertanian dan perikanan di Kabupaten Takalar. Musim hujan yang intensitasnya lebih panjang menyebabkan beberapa wilayah produksi pertanian mengalami gagal panen dan cuaca yang tidak menentu mengakibatkan banyak nelayan yang produksinya tidak optimal.

3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 ditargetkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel III-7
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Indikator	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,04-6,52	5,04-6,52	5,04-6,52

No	Indikator	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
2	Laju Inflasi (Nilai)	3,48	3,48	3,48
3	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	49.52	49.52	49.52
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,90	6,90	6,90
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,85	72,85	72,85
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,11	3,11	3,11

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2024

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Takalar selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Takalar, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Takalar. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Takalar 2024, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran yang ditekan peningkatannya. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Kabupaten Takalar.

Perekonomian Kabupaten Takalar pada perubahan Tahun 2024 dititikberatkan pada menekan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan tercapai dengan upaya sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan berusaha (penyederhanaan proses perijinan dan digitalisasi perijinan, mempermudah akses ke penyedia modal, dll)
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil;
3. Mendorong investasi seluruh bidang usaha;
4. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan, infrastruktur dsb);
6. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan keluarga miskin dalam rangka peningkatan pendapatan;
7. Mengembangkan ketenagakerjaan;

8. Peningkatan infrastruktur jalan yang menghubungkan titik-titik strategis perekonomian rakyat.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Regulasi yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Adapun aspek - aspek yang mempengaruhi perubahan kebijakan pendapatan daerah antara lain adalah pertumbuhan penduduk, nilai investasi dan pertumbuhan PDRB.

Berdasarkan hal tersebut diatas, upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah agar dapat lebih maksimal adalah:

a. Dalam merencanakan target pendapatan supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah.
b. Melaksanakan review terhadap sistem dan peraturan perundang-undangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah serta penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya.
c. Meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi tanpa harus menambah beban masyarakat, tetapi melalui penyederhanaan pungutan dan peningkatan fasilitas pelayanan termasuk sistemnya.
d. Peningkatan dan Pengembangan sumber-sumber pendapatan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi serta penggalian sumber-sumber lain pendapatan daerah, melalui pendayagunaan dan optimalisasi kerja perusahaan-perusahaan daerah yang telah di bentuk dan meningkatkan kerjasama dengan investor nasional dan lokal, serta dunia usaha lainnya.
e. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola pendapatan serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang.
f. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dengan demikian, Perubahan Pendapatan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Pendapatan Daerah sebagai berikut :

3.3.1.1 *Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024*

Sampai dengan akhir Juni Tahun 2024, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Takalar mencapai Rp. 565 Milyar lebih, atau baru 44,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.275.587.955.641,00 pada APBD Pokok 2024. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp.70,226 Milyar lebih atau baru 26,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.264.742.600.000,00, Pendapatan Transfer terealisasi Rp.494,865 Milyar lebih atau 48,96% dari Target yang sebesar Rp.1.010.845.355.641,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 0,00, karena tidak ditargetkan pada APBD Pokok 2024.

Dalam Perubahan RKPD 2024, target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.1,270,324,991,382.00 atau turun sebesar Rp.-5,262,964,259.00 dibandingkan Target Pokok 2024. Adapun rincian perubahan target pendapatan daerah selengkapnya adalah sebagai berikut :

3.3.1.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.216,376,100,286.00 mengalami penurunan sebesar Rp.-48,366,499,714.00, atau -18% dibandingkan APBD Pokok 2023 yang sebesar Rp. 304.458.386.445,00, PAD tersebut terdiri atas Pajak Daerah sebesar Rp.60,892,300,286.00 mengalami penurunan sebesar Rp.-18,230,699,714.00 atau turun -23% dari APBD Pokok 2024 yang telah ditargetkan sebesar Rp.79,123,000,000.00. Retribusi Daerah sebesar Rp.17,986,600,000.00 mengalami penurunan sebesar Rp.-30,333,000,000.00 atau turun -63% dari APBD Pokok 2024 yang telah ditargetkan sebesar Rp. 48,319,600,000.00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap atau tidak mengalami perubahan dari APBD Pokok 2024 yang telah ditargetkan sebesar Rp.14,000,000,000.00, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.123,497,200,000.00, mengalami kenaikan sebesar Rp.197,200,000.00 atau 0,16% dari APBD Pokok 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.123,300,000,000.00.

3.3.1.1.2 Perubahan Pendapatan Transfer

Pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Transfer ditargetkan Rp.1,044,948,891,096.00, naik sebesar Rp.34,103,535,455.00 atau 3,37% yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, Dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024. Dibandingkan dengan Target Pokok 2024 yang sebesar

Rp.1,010,845,355,641.00, Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp.955,405,633,560.00, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.89,543,257,536.00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.34,103,535,455.00 dari target yang telah ditetapkan pada APBD Pokok 2024.

3.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.9,000,000,000.00, meningkat dari target yang ditetapkan di Anggaran Pokok sebesar Rp.0,00 .

Adapun struktur pendapatan daerah pada rancangan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat sebagai berikut ini :

Tabel III-8
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar
Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
8	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,275,587,955,641.00**	**1,270,324,991,382.00**	**- 5,262,964,259.00**	**0.00**
8.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**264,742,600,000.00**	**216,376,100,286.00**	**-48,366,499,714.00**	**-0.18**
8.1.1	Pajak Daerah	79,123,000,000.00	60,892,300,286.00	-18,230,699,714.00	-0.23
8.1.2	Retribusi Daerah	48,319,600,000.00	17,986,600,000.00	-30,333,000,000.00	-0.63
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00	0.00	0.00
8.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	123,300,000,000.00	123,497,200,000.00	197,200,000.00	0.00
8.2	**Pendapatan Transfer**	**1,010,845,355,641.00**	**1,044,948,891,096.00**	**34103535455.00**	**0,00**
8.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**955,405,633,560.00**	**955,405,633,560.00**	**0.00**	**0,00**
8.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	0		0.00	#DIV/0!
8.2.1.2	Dana Alokasi Umum	955,405,633,560.00	955,405,633,560.00	0.00	-
8.2.1.3	Dana Alokasi Khusus			0.00	0,00
8.2.1.4	Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	0.00	0,00
8.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0,00**
8.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00		0.00	0,00
8.2.2.2	Dana Penyesuaian	0.00		0.00	0,00
8.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**55,439,722,081.00**	**89,543,257,536.00**	**34,103,535,455.00**	**0,00**

NO.	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	%
8.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55,439,722,081.00	89,543,257,536.00	34,103,535,455.00	0.38
8.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			-	0,00
8.2.3.3	Pendapatan Bantuan Keuangan			-	0,00
8.3	**Lain - lain Pendapatan yang Sah**	**0.00**	**9,000,000,000.00**	**9,000,000,000.00**	**0,00**
8.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0,00
8.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	0

Sumber : Bapenda; BPKD Kabupaten Takalar, 2024; Diolah Bappelitbangda

3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana struktur Belanja Daerah dibagi ke dalam empat kelompok belanja yakni; Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Klasifikasi Belanja Operasi terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal terdiri dari satu jenis belanja yakni Belanja Modal. Belanja Tidak Terduga terdiri atas satu jenis belanja yakni Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Transfer terdiri dari dua jenis belanja yaitu; Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Adapun aspek - aspek yang mempengaruhi perubahan kebijakan belanja daerah antara lain adalah rasionalisasi PAD yang tidak sesuai dengan target pokok, serta memperhatikan kebijakan pemerintah pusat yang sifatnya mandatory.

kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 khususnya pada Penyesuaian Belanja Daerah diarahkan pada beberapa hal, yaitu :

1. Penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien dan rasional;
2. Memilih kegiatan/proyek dengan skala prioritas dimana kegiatan secara signifikan dapat mengatasi issu atau permasalahan di bidangnya;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan dana hibah, tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi;
4. Membuat atau meninjau kebijakan/regulasi untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
5. Memperhatikan kebijakan belanja pegawai berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.
6. Memperhatikan program dan kegiatan yang sifatnya mandatory.

Dengan demikian, Perubahan Belanja Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Belanja Daerah sebagai berikut :

3.3.2.1 *Belanja Operasi*

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, sedangkan untuk Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan

pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.3.2.2 *Belanja Modal*

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria :

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

a) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
b) Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
c) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
d) Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
e) Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak

memenuh idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.3.2.3 *Belanja Tidak Terduga*

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.3.2.4 *Belanja Transfer*

1. Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten kepada Desa dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2024. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa dialokasikan sesuai dengan ketentuan, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian ke Desa dengan komposisi 60% dibagi secara merata dan 40% dibagi secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan daftar Nama Desa serta besaran pagu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas

wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Adapun Belanja Bantuan Keuangan ke Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi Dana Alokasi khusus (DAK).

Secara rinci target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III-9
Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
9	**BELANJA DAERAH**	**1,307,521,710,600.00**	**1,337,835,278,005.00**	**30,313,567,405.00**	**0.02318**
9.1	**BELANJA OPERASI**	**994,434,694,240.00**	**1,017,434,694,240.00**	**23,000,000,000.00**	**-**
9.1.1	Belanja Pegawai	608,821,183,086.00	608,821,183,086.00	0.00	0,00
9.1.2	Belanja Barang dan Jasa	323,791,155,755.00	346,791,155,755.00	23,000,000,000.00	**0,00**
9.1.3	Belanja Bunga	15,340,710,149.00	15,340,710,149.00	0.00	0,00
9.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0,00
9.1.5	Belanja Hibah	44,766,045,250.00	44,766,045,250.00	0.00	0,00
9.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1,715,600,000.00	1,715,600,000.00	0.00	0,00
9.2	**BELANJA MODAL**	**156,526,182,360.00**	**163,839,749,765.00**	**7,313,567,405.00**	**-**
9.2.1	Belanja Modal	156,526,182,360.00	163,839,749,765.00	7,313,567,405.00	0,00
9.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4,400,000,000.00**	**4,400,000,000.00**	**0**	**0,00**
9.3.1	Belanja Tidak Terduga	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00	0.00	0,00
9.4	**BELANJA TRANSFER**	**152,160,834,000.00**	**152,160,834,000.00**	**0**	**-**
9.4.1	Belanja Bagi Hasil	12,944,260,000.00	12,944,260,000.00	0.00	0,00
9.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	139,216,574,000.00	139,216,574,000.00	0.00	

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar, 2024, RPD Kabupaten Takalar 2023-2026; Diolah Bappelitbangda

3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

3.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk :

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2024, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

3.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk penyertaan Modal Daerah pada badan usaha milik daerah yang dinilai menguntungkan.

3.3.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan diarahkan : Pemerintah Kabupaten Takalar akan melakukan pengendalian batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Selengkapnya Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel III-10
Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
10	**PEMBIAYAAN NETTO**	**31,933,754,959.00**	**31,933,754,959.00**	**0**	**0,00**
10.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**55,456,430,226.00**	**55,456,430,226.00**	**0**	**0,00**
10.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	55,456,430,226.00	55,456,430,226.00	0.00	0,00
10.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0,00
10.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0,00
10.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0,00
10.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0,00
10.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0,00
10.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**23,522,675,267.00**	**23,522,675,267.00**	**0**	**0,00**
10.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0,00
10.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0,00
10.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman	23,522,675,267.00	23,522,675,267.00	0.00	0,00
10.2.4	Pemberian Pinjaman kepada Pihak ketiga	0.00	0.00	0.00	0,00
10.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	0,00

Sumber : BKAD Kabupaten Takalar, 2024; Diolah Bappelitbangda

BAB IV
SASARAN DAN PRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Dengan demikian, rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023, prioritas daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, serta prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun Tahun 2023-2043. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sampai dengan semester I, capaian target pelaksanaan RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

Substansi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 mendasarkan dan memperhatikan :

1. Arah kebijakan RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 guna mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan Tahun 2024.
2. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah dan Kabupaten sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional maupun Kabupaten.
3. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagai upaya pencapaian target pembangunan Provinsi maupun Kabupaten.

4. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada Tahun 2023. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organsasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Takalar sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP Tahun 2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan selama 4 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC.

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 - 2026. Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-2 (kedua) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026.

Berdasarkan arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, perumusan tujuan dan sasaran RPD didasarkan pada visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat serta isu aktual. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 tertuang visi RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025 yakni :

"MASYARAKAT MANDIRI, DEMOKRATIS, BERKEADILAN SOSIAL DAN SEJAHTERA LAHIR BATHIN"

Visi RPJPD Takalar memiliki vilosofi bahwa kemajuan yang dicapai melalui pembangunan idealnya mengantar daerah tersebut pada kondisi kemandirian dalam mengelola sumber daya tanpa mengabaikan interaksi dengan daerah lain. Dalam rangka ini, daya saing daerah menjadi sangat penting, baik untuk kemandirian maupun untuk interaksi dengan daerah lain. Visi RPJPD Kabupaten Takalar juga menekankan kondisi demokratis dan berkeadilan sosial sebagai satu kesatuan cita-cita ideal yang penekanannya pada pemerataan atas kesejahteraan yang dicapai secara bersama. Kesejahteraan tersebut idealnya mencakup dimensi lahir dan bathin, Karena itu ketenteraman dan ketertiban yang terpelihara menjadi keniscayaan dalam pencapaian pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM dalam berbagai aspek untuk mendukung kemandirian daerah.
2. Peningkatan tata penyelenggaraan kehidupan sosial, politik dan pemerintahan yang demokratis.
3. Peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam berbagai aspek.
4. Peningkatan produktivitas daerah yang mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara material.
5. Peningkatan pengamalan ajaran agama serta penghayatan nilai-nilai budaya dalam mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara bathiniah.

Sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Takalar Tahap Keempat secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas hidup manusia.
2. Meningkatnya kapasitas infrastruktur daerah.
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Terwujudnya tatakelola pmerintahan yang baik.
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram lahir bathin.
6. Terpeliharanya kondisi lingkungan hidup daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar

penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPD sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan, sasaran RPD juga dapat diterjemahkan kedalam sasaran secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. Secara skematik keterkaitan antara visi-misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar IV-1
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber : UU No.25 Tahun 2014; PMDN No.90 Tahun 2019; diolah

Terkait RKPD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut : (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan

memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Target dari tujuan dan sasaran Tahun 2024 menjadi landasan RKPD Tahun 2024, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel IV-1.

Tabel IV-1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Takalar dan Target Kinerja Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Tahun			Penjelasan
			Capaian	Target		
			2022	2024 (RPD)	2024 (RKPD)	
T1.Memperkuat Daya Saing Daerah	1.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,445	2,453	2,453	Target RKPD sama dengan target RPD
S1.1. Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,31	69,70	69,70	Target RKPD sama dengan target RPD
S1.2. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah	3.	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	29.170	29.178	29.178	Target RKPD sama dengan target RPD
T2. Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	4.	PDRB Perkapita	43,38 (Juta Rp)	49,52 (Juta Rp)	49,52 (Juta Rp)	Target RKPD sama dengan target RPD
	5.	Indeks Gini	0,375	0,365	0,365	Target RKPD sama dengan target RPD
S2.1. Meningkatnya produktifitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	6.	Pertumbuhan Ekonomi	4,64%	5,04-6,52%	5,04-6,52%	Target RKPD sama dengan target RPD
	7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,63%	3,11%	2,49%	Target RKPD sama dengan target RPD
S2.2. Berkurangnya penduduk miskin	8.	Angka Kemiskinan	8,25%	6,90%	6,90%	Target RKPD sama dengan target RPD

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Tahun			Penjelasan
			Capaian	Target		
			2022	2024 (RPD)	2024 (RKPD)	
S2.3. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	58,98	59,06	59,06	Target RKPD sama dengan target RPD
T3. Memperbaiki kualitas tatakelola pemerintahan	10.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	CC (59,38)	BB (73-75)	BB (73-75)	Target RKPD sama dengan target RPD
S3.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	11.	Nilai Sakip Daerah	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	Target RKPD sama dengan target RPD
	12.	Indeks Kepatuhan Terhadap SPM	46,11	70-80	70-80	Target RKPD sama dengan target RPD
S3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	13.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BELUM DINILAI	BAIK	BAIK	Target RKPD sama dengan target RPD
S3.3. Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	14.	Angka Kriminalitas	96,41 PER 100,000 PENDUDUK	89,41 PER 100,000 PENDUDUK	89,41 PER 100,000 PENDUDUK	Target RKPD sama dengan target RPD

Sumber : RPD Takalar Tahun 2023-2026, diolah Bappelitbangda

Tabel IV-2
Sandingan Sasaran Pembangunan Makro Kabupaten Takalar dan Arahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Capaian 2023 dan Target Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Pembangunan Makro	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
					RPD	RKPD	Arahan Provinsi (RKPD)	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	3,86	5,04-6,52	5,04-6,52	5,70	Target Kabupaten lebih tinggi dari arahan provinsi
2	Angka Kemiskinan	%	8,25	8,29	6,90	6,90	7,47	Target Kabupaten lebih rendah dari arahan provinsi
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,63	3,58	3,11	2,49	2,49	Target Kabupaten sama dengan arahan provinsi
4	Gini Rasio	Nilai	0,375	0,386	0,365	0,364	0,364	Target Kabupaten sama dengan arahan provinsi
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	68,31	71,46	69,70	69,70	69,51	Target Kabupaten lebih tinggi dari arahan provinsi

Sumber : RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026; data diolah Bappelitbangda; 2024

Penentuan target indikator pembangunan makro Kabupaten Takalar dilakukan dengan memperhatikan trend pertumbuhan masing-masing indikator lima tahun sebelumnya, target tersebut merupakan target rasional yang diperkirakan mampu dicapai oleh Kabupaten Takalar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Sedangkan untuk menjabarkan target indikator makro pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan arahan target Tahun 2024 yang harus dipenuhi dan dicapai oleh Kabupaten Takalar yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Mengingat target indikator pembangunan makro yang ditetapkan oleh Kabupaten Takalar lebih rendah / dibawah target yang ditetapkan oleh Provinsi, maka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional, Pemerintah Kabupaten Takalar akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target yang ditetapkan oleh provinsi dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, akan dilakukan optimalisasi pada sektor-sektor PDRB yang menjadi unggulan daerah seperti pertanian dan perikanan dengan memperhatikan hilirisasi produk-produk pertanian dan perikanan;
2. Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, akan dilakukan optimalisasi pada upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih terpadu dan berbasis data *by name by address*;
3. Untuk mencapai target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), akan dilakukan optimalisasi pada upaya-upaya penyerapan tenaga kerja lokal melalui penyediaan akses terhadap lowongan kerja dan memperhatikan sektor-sektor informal;
4. Untuk mencapai target penurunan angka gini rasio akan dilakukan upaya-upaya yang simultan dengan upaya penurunan angka kemiskinan dengan menitik beratkan pada upaya memperkecil kedalaman dan keparahan kemiskinan (P1 dan P2) perkotaan dan perdesaan;
5. Untuk mencapai target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), akan dilakukan optimalisasi peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) melalui Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) serta tetap melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan serta upaya peningkatan daya beli masyarakat.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan lebih difokuskan pada percepatan penyelesaian sasaran dan target pembangunan utamanya upaya akselerasi pembangunan ekonomi melalui penyuluhan teknologi 4.0 untuk pertanian, peternakan dan perikanan, pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana pertanian, peternakan dan perikanan, serta perintisan system ekonomi sirkular serta perbaikan pelayanan dasar yang belum optimal melalui Pemantapan mall pelayanan publik terpadu dan akselerasi pemenuhan cakupan pelayanan berbasis dalam rangka memperkuat daya saing daerah, perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan, dan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan.

Pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP Nasional) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RKPD Provinsi) Tahun 2024.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKP Nasional menjadi perhatian dalam menyusun rancangan RKPD Kabupaten karena keberhasilan pembangunan di daerah termasuk perencanaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Adapun Visi Tahun

2020-2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** yang didukung oleh 9 (sembilan) misi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan system hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

4.2.1.1 *Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional*

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Secara visual, kerangka pikir tema dimaksud ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar IV-2
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024

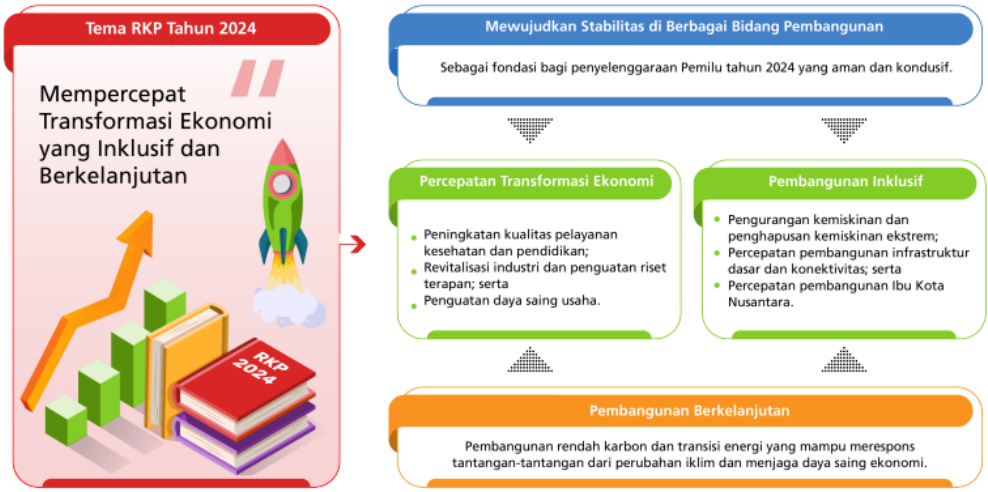

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional

Pembangunan Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Uraian lebih lanjut ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar IV-3
Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024

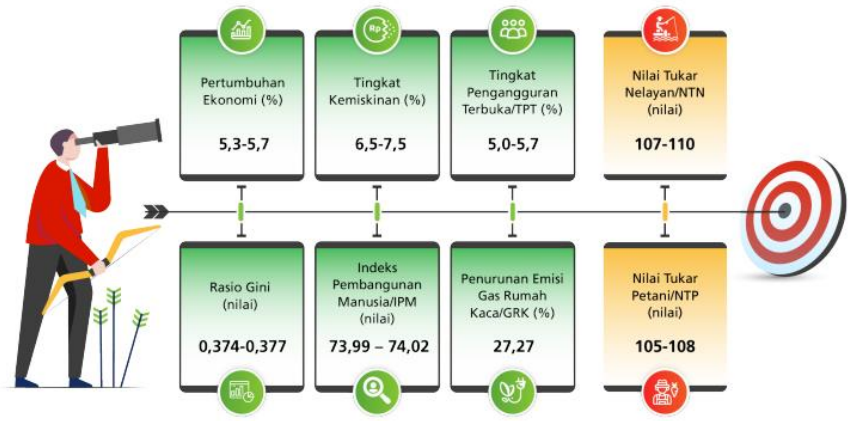

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

4.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis di bawah ini.

Gambar IV-4
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2023

4.2.1.4 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Pada tahun 2024, sasaran dan arah kebijakan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini. Setiap penggambaran PN mencakup pendahuluan dengan muatan isu strategis/tantangan yang menjadi dasar penentuan

sasaran capaian PN, arah kebijakan, serta strategi perwujudan kebijakan terkait. Penjelasan PN dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP).

Gambar IV-5
Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Penyusunan kebijakan dan target pada masing-masing PN Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 telah mempertimbangkan kondisi ketidakpastian global, risiko resesi, dan penurunan rantai pasok melalui spesifikasi dalam strategi dan kegiatan-kegiatan terkait, dan didukung oleh kerangka implementasi. Pada subbab ini dijabarkan strategi dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dimanifestasikan menjadi kegiatan-kegiatan prioritas terkait untuk tiap PN. Kerangka implementasi meliputi kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta alokasi pendanaan turut mendukung pelaksanaan PN, yang difokuskan pada program-program prioritas pembangunan.

Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. *Prioritas Nasional 1 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi, dan ekonomi hijau.*

Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangandan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkansinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sulawesi, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar IV.8, Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan didukung dengan KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK/KI Palu di Provinsi Sulawesi Tengah; KEK Bitung sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah dan DPP Manado-Likupang/KEK Likupang di Provinsi Sulawesi Utara; KI Takalar dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar- Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan; serta DPP Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas lada, cengkeh, pala, kopi, kakao, kelapa, garam, tebu, dan perikanan budi daya. Perikanan budi daya dikembangkan dengan mengadakan revitalisasi dan pengembangan kawasan tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air payau, benih ikan air tawar, ikan air payau, kepiting, udang, ikan air laut, serta sarana produksi usaha dan pembenihan ikan yang disalurkan kepada masyarakat;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pengembangan WM Makassar dan WM Manado; lima kota sedang (Gorontalo, Palu, Parepare, Palopo, Kendari); dan satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Mamuju;

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 1.043 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 507 desa berkembang menjadi desa mandiri,

serta 3 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya seperti pada Tabel IV-8; (b) 2 PKSN yaitu PKSN Melonguane dan PKSN Tahuna, serta pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 18 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sulawesi; (c) pembangunan di 16 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), yaitu KPPN Minahasa Utara, KPPN Morowali, KPPN Buol, KPPN Poso, KPPN Gorontalo, KPPN Boalemo, KPPN Gorontalo Utara, KPPN Mamuju Tengah, KPPN Mamuju, KPPN Barru, KPPN Pinrang, KPPN Bone, KPPN Luwu Timur, KPPN Konawe Selatan, KPPN Wakatobi, dan KPPN Muna; (d) revitalisasi 18 kawasan transmigrasi meliputi 4 kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo (Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten Gorontalo, Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo), 6 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tengah (Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampo Lore di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat (Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Pasang Kayu), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, dan Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa di Kabupaten Konawe), dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, dan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur); dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang sosial, perumahan rakyat,

Trantibumlinmas, pekerjaan umum); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi; (c) penguatan peran dan fungsi GWPP pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota; (d) peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah; (e)penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, dan peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar IV-6

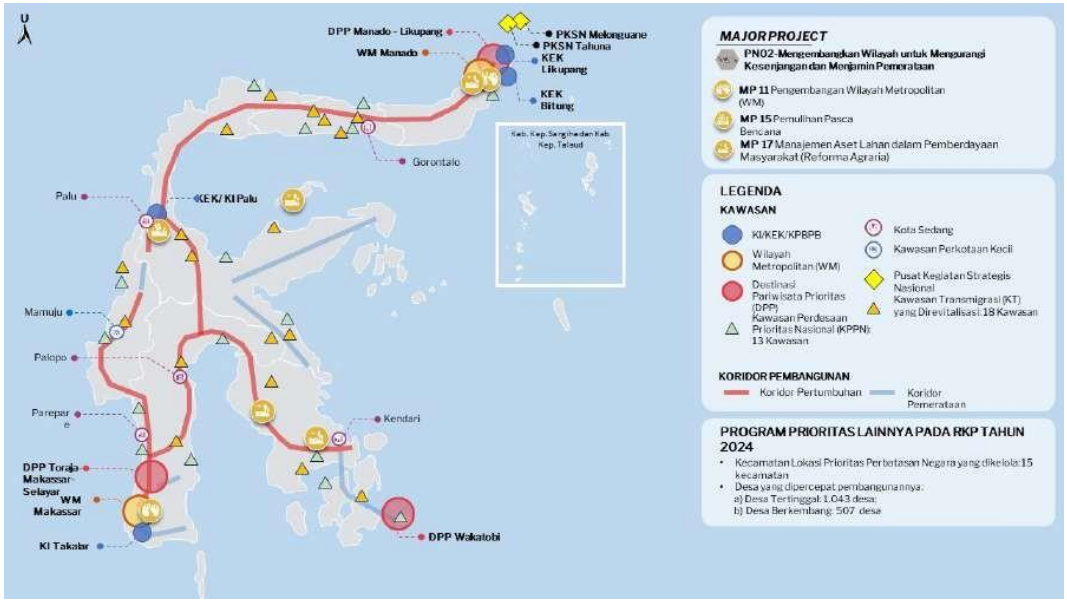

Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas danBerdaya Saing

Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 akan difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui

keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan telah menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan *mampu mendayagunakan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.*

Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2024 difokuskan sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan TransformasiPelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya dilakukan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan

kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

Tabel IV-3
Target Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Indikator Pembangunan Makro	Satuan	Baseline (2019)	Capaian 2022	Target 2024	
					RPJMN	RKP
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,31	6,20–6,50	5,3-5,7
2	Pertumbuhan Investasi	%	4,5	3,87	6,6-7,0	6,2-7,0
3	Share Industri Pengolahan	%	19,7	18,3	21,0	19,9 -20,5
4	Tingkat Inflasi	%	2,72	5,51	2,70	1,5–3,5
5	Pertumbuhan Ekspor Non Migas	%	-4,82	25,8	7,4	5,9-11,7
6	Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas	%	4,34	5,01	6,6-7,0	5,80-6,20
7	Rasio Pajak	% PDB	9,76	10,4	10,7-12,3	9,91-10,18
8	Tingkat Kemiskinan	%	9,22	9,57	6,00–7,00	6,5-7,5
9	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT	%	5,23	5,86	3,60–4,30	5,0-5,7
10	Gini Rasio	Nilai	0,380	0,381	0,360 – 0,374	0,374 - 0,377
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	71,92	72,91	75,54	73,99 - 74,02
12	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK	%	23,46	26,87	27,30	27,27

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2024

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan agenda Tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Tahun 2024 yaitu **Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Yang Inklusif,** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif (TATA KELOLA)

2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata (INFRASTUKTUR)
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah (PENGEMBANGAN WILAYAH DAN HILIRISASI)
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata (SOSIAL EKONOMI)
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (LINGKUNGAN HIDUP)
6. Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada table IV-4 berikut:

Tabel IV-4
Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Satuan	Capaian 2022	Target 2024	Target RKP 2024
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ angka	66,16 (B)	67,31 (B)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ angka	68,08 (B)	68,52 (B)	
		Optimalnya Kualitas pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ angka	4,10 (A-)	A- (4,01 – 4,50)	
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan merata	4	Indeks Williamson	Angka	0,687	0,67	
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	80,39	81,97	
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	6	Produktifitas Total Daerah	Rp/- Angkatan Kerja	79.149.920,77	84.248.042,86	
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	7	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09	5,23-6,71	5,5-6,9
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	8	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	62,43	70,7	
			9	Gini Rasio	%	0,365	**0,361**	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Satuan	Capaian 2022	Target 2024	Target RKP 2024
		Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	10	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,51	4,24	3,59-4,30
		Menurunya angka kemiskinan	11	Tingkat Kemiskinan	Angka	8,63	8,31	6,7 -7,7
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif	12	IPM	Angka	72,82	73,99	74,02
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,85 (2021)	93,65	
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan	14	IKLH	poin	72,63	73,57	
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO_2Eq)	Juta Ton CO2Eq	1.360.000	1.823.583	

Sumber : RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2024

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 4 (empat) tahun dalam RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP) Tahun 2023, prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (RKPD Sulsel) Tahun 2023 serta memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dalam Rancangan RTRW Kabupaten Takalar Tahun 2021-2041 untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2024 yaitu : **"Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Yang Inklusif Serta Penguatan Demokrasi"**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia
2. Penguatan Infrastruktur Wilayah
3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja
4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi
5. Pelestarian Lingkungan Hidup
6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada table IV-5 berikut :

Tabel IV-5
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target			
						RKPD Tahun 2024	RPD 2023-2026	RKPD Sulsel 2024	Ranc-RKP 2024
1	Pembangunan Manusia	Memperkuat Daya Saing Daerah	1	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	2,453	2,453		
		Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM	Nilai	69,70	69,70	73,99	73,99 -74,02
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah	4	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Nilai	29.178	29.178	81,97	
3	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	5	PDRB Perkapita	Rp. Juta	49,52	49,52	70,7	
			6	Indeks Gini	Nilai	0,364	0,365	0,361	0,374 -0,377
		Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	7	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04-6,52	5,04-6,52	5,23-6,71	5,3-5,7
			8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,49	3,11	4,24	5,0-5,7
4	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Berkurangnya penduduk miskin	9	Angka Kemiskinan	%	6,90	6,90	8,31	6,5-7,5

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target			
						RKPD Tahun 2024	RPD 2023-2026	RKPD Sulsel 2024	Ranc-RKP 2024
5	Pelestarian Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Nilai	59,06	59,06	73,57	
6	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperbaiki kualitas tatakelola pemerintahan	11	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat/ Nilai	BB (73-75)	BB (73-75)	B (67,31)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	12	Nilai Sakip Daerah	Predikat/ Nilai	B (>60-70)	B (>60-70)	B (68,08)	
			13	Indeks Kepatuhan Terhadap SPM	Nilai	70-80	70-80		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	BAIK	BAIK		
7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	15	Angka Kriminalitas	Kasus/ 100.000 Penduduk	89,41	89,41		

Sumber : RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, diolah Bappelitbangda;

Prioritas Pembangunan Tahun 2024 di atas dimaksudkan sebagai fokus pembangunan Tahun 2024 untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah Tahun 2024 sebagai mana yang yang telah di bahas pada Bab II (kedua), untuk melihat sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan Tahun 2024, sebagai mana Tabel IV-6 sebagai berikut:

Tabel IV-6
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dan Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2024

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
1	Masih rendahnya indeks daya saing daerah Human Capital belum optimal	Rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar	(1) Pembangunan Manusia	Memperkuat Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
		Rendahnya kapasitas sumber daya manusia di perdesaan		Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM
		Peningkatan dan pemerataan kualitas SDM yang berdaya saing dan bermartabat			
		Rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar	(2) Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah
2	Pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan yang belum maksimal	Belum kuatnya bergaining position UKM dan sumberdaya wirausahawan	(3) Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	PDRB Perkapita
		Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan ekonomi inklusif			Indeks Gini
		Pertumbuhan ekonomi yang belum fokus pada sektor unggulan		Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi
		Belum kuatnya bergaining			Tingkat

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan
		position UKM dan sumberdaya wirausahawan			Pengangguran Terbuka (TPT)
		Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan ekonomi inklusif	(4) Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Berkurangnya penduduk miskin	Angka Kemiskinan
		Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam	(5) Pelestarian Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
3	Belum optimalnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik	(6) Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperbaiki kualitas tatakelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai Sakip Daerah
		Belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi			Indeks Kepatuhan Terhadap SPM
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik	(7) Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas

Sumber : RPD 2023-2026; diolah Bappelitbangda

4.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

4.2.4.1 Strategi Pembangunan Tahun 2024

Pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, didasarkan pada strategi yang dirumuskan dengan melakukan analisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Proses perumusan strategi dilakukan dengan langkah-langkah: 1. Mengkaji sasaran pembangunan yang akan diwujudkan serta indikator kinerjanya; 2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan Tahun 2022; 3. Mengkaji permasalahan pembangunan utama dan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4. Menganalisis kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat) dalam mencapai setiap sasaran; 4. Memformulasi alternatif-alternatif strategi dan merumuskan pilihan strategi untuk setiap sasaran.

Adapun strategi pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan SDM, sarana-prasarana dan kolaborasi multi pihak dalam perbaikan derajat pendidikan, derajat kesehatan, daya beli, kesetaraan gender, literasi masyarakat serta daya saing pemuda dan olah raga**;**
2. Pemenuhan SDM dan peralatan konstruksi dalam pembangunan dan pemeliharaan infratruktur jalan dan jembatan, perhubungan, perumahan dan pemukiman, ketersedian air bersih dan fasilitas sanitasi, pemanfaatan ruang berbasis RTRW.
3. Pengembangan dan adopsi inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perindustrian, usaha mikro dan kecil, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja secara adaptif dengan revolusi industri 4.0
4. Pengurangan beban pengeluaran, pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan UMKM dan perbaikan pemanfaatan dana desa bagi rumah tangga miskin berdasarkan DTKS yang akurat dan mutakhir
5. Perbaikan sistem pengelolaan dan penegakan regulasi dalam penanganan limbah/bahan beracun dan berbahaya serta penanganan sampah berbasis reduce, reuse dan recicle (3R) diringi dengan pemeliharaan keragaman hayati.
6. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja diiringi dengan perbaikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam mencapai kinerja yang optimal
7. Peningkatan kesadaran masyarakat, pemenuhan SDM dan fasilitas, dan pemutakhiran data penerima layanan secara kontinyu dalam memenuhi SPM pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan sosial serta sistem pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
8. Koordinasi Forkopimda, penguatan swadaya masyarakat dan pelibatan berbagai organisasi sosial-kemasyarakatan dalam memelihara

ketenteraman dan ketertiban masyarakat serat wawasan kebangsaan.

Tabel IV-7
Prioritas dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah
1	Pembangunan Manusia	Pemenuhan SDM, sarana-prasarana dan kolaborasi multi pihak dalam perbaikan derajat pendidikan, derajat kesehatan, daya beli, kesetaraan gender, literasi masyarakat serta daya saing pemuda dan olah raga;
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Pemenuhan SDM dan peralatan konstruksi dalam pembangunan dan pemeliharaan infratruktur jalan dan jembatan, perhubungan, perumahan dan pemukiman, ketersedian air bersih dan fasilitas sanitasi, pemanfaatan ruang berbasis RTRW.
3	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pengembangan dan adopsi inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perindustrian, usaha mikro dan kecil, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja secara adaptif dengan revolusi industri 4.0
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Pengurangan beban pengeluaran, pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan UMKM dan perbaikan pemanfaatan dana desa bagi rumah tangga miskin berdasarkan DTKS yang akurat dan mutakhir
5	Pelestarian Lingkungan Hidup	Perbaikan sistem pengelolaan dan penegakan regulasi dalam penanganan limbah/bahan beracun dan berbahaya serta penanganan sampah berbasis reduce, reuse dan recicle (3R) diringi dengan pemeliharaan keragaman hayati.
6	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja diiringi dengan perbaikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam mencapai kinerja yang optimal

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Strategi Prioritas Pembangunan Daerah
		Peningkatan kesadaran masyarakat, pemenuhan SDM dan fasilitas, dan pemutakhiran data penerima layanan secara kontinyu dalam memenuhi SPM pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan sosial serta sistem pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Koordinasi Forkopimda, penguatan swadaya masyarakat dan pelibatan berbagai organisasi sosial-kemasyarakatan dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat serat wawasan kebangsaan.

Sumber : RPD 2023-2026; diolah Bappelitbangda

4.2.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 berdasarkan arah Kebijakan RPD Kabupaten Takalar

Penyusunan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD. Adapun Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPD terhadap prioritas pembangunan Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel IV-8. berikut.

Tabel IV-8
Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Takalar Tahun 2024

	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024
	Pembangunan Manusia	Penguatan daya beli masyarakat
		Pengembangan literasi masyarakat
	Penguatan infrastruktur wilayah	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan perhubungan
	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pengembangan kualitas koperasi dan permodalan UMKM
		Pengembangan jaringan perdagangan barang pokok dan penting
		Pengembangan sistem ekonomi sirkuler
	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Perlindungan sosial bagi orang miskin
		Pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan
	Pelestarian Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recicle (3R)
	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemantapan sistem pengawasan internal pemerintah
		Pemantapan sistem pengadaan barang dan jasa
		Pengembangan inovasi pelayanan publik
		Akselerasi pemenuhan standar pelayan berbasis SPM dan pelayanan publik lainnya
	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Penguatan demokrasi dan dinamika politik daerah
		Deteksi dini dan pencegahan konflik sosial

Sumber : RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026; diolah Bappelitbangda

4.2.4.3 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024, dirumuskan program prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari program RPD Kabupaten Takalar sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV-9
Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 (Pagu Indikatif)

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas hidup manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	93.069.661.280	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Persentase warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartsipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%		100%	
				Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%		100%	
				Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	20%		35%	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	20%		35%	
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal (ritual adat dan tradisi) yang dikembangkan sebagai budaya	55%	526.500.000	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	60%	115.000.000	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan	100%	135.500.000	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	75%	181.500.000	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Permuseuman	Presentase Pemenuhan Pengelolaan Permuseuman yang Dilaksanakan (%)	100%	126.500.000	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,4	16.000.000	1,6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Naskah Kuno (Eksemplar)	88	5.000.000	90	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Program Pengelolaan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	77,29	5.500.000	100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	77,48	10.500.000	85,42	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	55	2.000.000	100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	100%	221.000.000	100%	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	100%	8.000.000	100%	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Peningkatan Kapasistas Kepramukaan (%)	100%	1.000.000	100%	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	105.022.647.254	100%	Dinas Kesehatan
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%		100%	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		100%	
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		100%	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		100%	
				Persentase warga negara produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		100%	
				Persentase warga Negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		100%	
				Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		100%	
				Persentase warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		100%	
				Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		100%	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		100%	
				Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%		100%	
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	7		3	
				Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH				
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH				
				Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus	100%		100%	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	35%	425.000.000	58%	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berijin	95%	1.500.000.000	100%	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga aktif	38%	210.000.000	45%	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	100%	55.652.524.304	100%	Rsud H. Padjonga Daeng Ngalle
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	95%	10.000.000	100%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Program Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,02	412.200.000	1	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				TFR (Angka Kelahiran Total)	2,06		2,02	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Age Specific Fertility Rate (ASFR)	138		125	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Capaian KB Aktif	80%	886.062.800	87%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kelompok Tribina	83%	2.181.600.000	100%	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	Penguatan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya daya saing infrastruktur daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	27,17	1.700.000.000	29,17	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80		86	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	100%	3.625.000.000	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%		100%	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	600.000.000	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	10%	3.210.000.000	20%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
								Permukiman
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi persetujuan bangunan gedung (PBG)	50%	57.000.000		Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	11.597,98	850.000.000	11.597,98	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten	80%		100%	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	75%	3.793.633.000	85%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	60	10.000.000	80	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang	60%	3.000.000	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang	60%		100%	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	100%	622.236.580	100%	Dinas Perhubungan
				Persentase layanan angkutan darat	100%		100%	
			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase layanan angkutan penyeberangan	100%	7.120.000	100%	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan yang mendapatkan izin	60%	500.000.000	80%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	Persentase ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	100%	250.000.000	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	20,41%	800.000.000	34,48%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
3	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap nelayan kecil	22.050 ton	946.180.000	22.050 ton	Dinas Perikanan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
	Penyerapan Tenaga Kerja	perekonomian daerah						
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya	590.403 Ton	20.000.000	590.403 Ton	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persenatse poklahsar yang meningkat kelasnya	26%	20.000.000	28%	Dinas Perikanan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	4,50%	409.999.880	5,50%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
				Cakupan bina kelompok petani	60		80	
				Persentase peningkatan produksi peternakan	4		6	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan	95	1.454.999.780	100	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman perkebunan dan holtikultura	90		100	
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan	95		100	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase prasarana Pertanian/peternakan yang disediakan dan dikembangkan (%)	100	591.000.000	100	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana Pertanian/peternakan yang disediakan dan dikembangkan (%)	100	1.650.810.900	100	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan Usaha produk hewan yang bersertifikat PRA/NKV	90	170.575.000	100	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	100		100	
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	-7		-8	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian/peternakan yang dibina (%)	100	20.000.000	100	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	90	5.157.460	100	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas pada kelompok tani/gapoktan (%)	75	124.999.800	85	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	48,79	22.500.000	56,79	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro naik kelas	44,79	300.000.000	52,79	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	20	340.000.000	60	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	50		50	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				Persentase cakupan pengembangan sentra industri	20		40	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	100	10.000.000	100	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	100		100	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di daerah Kabupaten/ Kota	100		100	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	24	9.500.000	26	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	100		100	
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi	23,72	20.000.000	32,72	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	23,97	60.000.000	32,97	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha/penanam modal terhadap penyampaian LKPM	23,10	18.560.000	32,10	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal	50	5.000.000	50	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan wisata	2	11.600.000	2	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per kebangsaan	100	2.000.000	100	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
				Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang Ke Kabupaten/Kota	100		100	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif (%)	70	2.000.000	100	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kraetif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi	100	3.000.000	100	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	PERSENTASE PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN (%)	100	500.000	100	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	75	20.000.000	90	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	1	10.000.000	2	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku	60	20.000.000	70	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	4	7.500.000	6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	79	15.000.000	83	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	60	10.000.000	80	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
4	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Berkurangnya penduduk miskin	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	87,9	232.499.700	95,2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan/wilayah rentan rawan pangan	0	200.000.400	0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	75	15.000.000	77	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	48,79	22.500.000	56,79	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro naik kelas	44,79	300.000.000	52,79	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	85	3.000.000	100	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar Penyandang disabilitas diluar panti	80	440.000.000	80	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	80		80	
				Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial usia lanjut terlantar diluar panti	80		80	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				Persentase pelayanana rehabilitasi Sosial usia tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	80		80	
				Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80		80	
				Persentase pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	80		80	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosia	100	64.000.000	100	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	90	150.000.000	100	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80		80	
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (%)	100	3.000.000	100	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Penataan Desa	Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	100	2.000.000	100	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa Yang Memiliki Kompetensi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa (%)	98	8.000.000	100	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	87	110.000.000	96	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas	100	15.000.000	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
5	Pelestarian Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan bidang lingkungan hidup	80	1.561.000	85	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	59,05	5.900.000	65	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
				Indeks kualitas udara	83,99		83,99	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks kualitas tutupan lahan	32,24	873.760.000	31,5	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	30	999.000	30	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	35	2.040.000	45	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota	80	2.408.160.000	90	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
6	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang perankat daerah	93	524.134.496.228	93	Semua Perangkat Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi, Umum, Keprotokoleran,)	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	0	13.639.803.921	22,5	Bagian Ortala Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	64		68	
				Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	100		100	
				Nilai Sakip Sekretariat Daerah	66		68	
				Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya B	0		25	
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah	100	1.205.900.000	100	Bappelitbangda
				Capaian kinerja Perangkat Daerah	90		96	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	806.000.000	100	Bappelitbangda
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100		100	
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	100		100	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	85	6.920.100.000	95	Inspektorat Daerah
			Program Perumusann Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase penyelesaian temuan berulang kode 01, 02 dan 03	85	1.038.872.000	95	Inspektorat Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD tepat waktu	100	183.320.357.754	100	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu	93		95	
				Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan tepat waktu	93		95	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	91	1.042.366.044	93	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100	3.388.249.270	100	Badan Pendapatan Daerah
				Jumlah penambahan wajib pajak baru	100		100	
			Program Adminsitrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	98	8.000.000	100	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	100	42.414.700	100	Kecamatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi, Umum, Keprotokoleran,)	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	0	13.639.803.921	22,5	Sekretariat Daerah
				Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	64		68	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	100		100	
				Nilai Sakip Sekretariat Daerah	66		68	
				Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya B	0		25	
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitas	100	11.231.450.446	100	Sekretariat Daerah
				Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	B		B	
				Persentase penyelesaian pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat yang tepat dan akurat	100		100	
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	100	195.000.000	100	Sekretariat Daerah
				Persentase Penayangan SIRUP	100		100	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang dimanfaatkan menjadi kebijakan	100		100	
				Tingkat Inflasi	2,03		2,01	
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan (%)	100	589.455.352	100	Bappelitbangda
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penerbitan SK secara tepat waktu	100	90.224.000	100	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase Penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	100		100	
			Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP-el	97	725.000.000	97	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik	98		98	
				Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	55		65	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	98	70.000.000	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100		100	
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100		100	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	98	180.000.000	99	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	98		99	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun (%)	98	20.000.000	98	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Presentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu sesuai propemperda	100	5.170.880.100	100	Sekretariat DPRD
				Presentase aspirasi yang ditindaklanjuti	100		100	
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	25	25.000.000	35	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	25		35	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	25	957.400.000	35	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	25	15.000.000	35	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
				Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan daerah	25		35	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	28,57	10.000.000	33	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	100	351.407.500	100	Kecamatan
7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	94	850.000.000	95	Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	94		95	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	410.000.000	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100		100	
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100		100	
				Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100		100	
				Persentase penanganan pasca bencana	100		100	

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	98,25	130.000.000	99	Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran
				Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	15		15	
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	90	150.000.000	100	Dinas Sosial Dan Pemerintahan Masyarakat Desa
				Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80		80	
			Program Koordiansi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	100	49.010.000	100	Kecamatan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	100	42.414.700	100	Kecamatan
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Angka potensi konflik SARA di masyarkat	2	14.382.550	4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya	100	17.553.194.000	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatn	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	66	7.224.850	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Angka potensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	24	11.895.750	24	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja di Akhir Periode	Perangkat Daerah
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Angka potensi gangguan ideologi, politik,pertahanan dan keamanan	12	20.458.995	12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL						**1.075.965.750.218,80**		

4.2.5 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Sasaran RPD

RKPD Tahun 2024 sebagai perencanaan tahunan tetap menjaga konsistensi dengan RPD Tahun 2023-2026 yang tergambarkan melalui sasaran prioritas pembangunan. Adapun konsistensi RKPD terhadap RPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-10
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Sasaran RPD untuk Tahun 2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target	
						RKPD Tahun 2024	RPD Untuk 2024
1	Pembangunan Manusia	Memperkuat Daya Saing Daerah	1	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	2,453	2,453
		Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	69,70	69,70
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah	3	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Nilai	29,178	29,178
3	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	4	PDRB Perkapita	Rp. Juta	34,07	34,07
			5	Indeks Gini	Nilai	0,364	0,350
		Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.04-6.52	5.04-6.52
			7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,49	3,11
4	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Berkurangnya penduduk miskin	8	Angka Kemiskinan	%	6,90	6,90
5	Pelestarian Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Nilai	59,06	59,06

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target	
						RKPD Tahun 2024	RPD Untuk 2024
6	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperbaiki kualitas tatakelola pemerintahan	10	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat/ Nilai	BB (73-75)	BB (73-75)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	11	Nilai Sakip Daerah	Predikat/ Nilai	B (>60-70)	B (>60-70)
			12	Indeks Kepatuhan Terhadap SPM	Nilai	70-80	70-80
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	BAIK	BAIK
7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	14	Angka Kriminalitas	Kasus/ 100.000 Penduduk	89,41	89,41

Sumber : RPD 2023-2026; diolah Bappelitbangda

4.2.6 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2023-2026 dan mendukung prioritas nasional Tahun 2024 yang merupakan tahun awal paruh kedua dari rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel IV-11
Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabuaten Takalar dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No. PD	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	No. PN
1	Pembangunan Manusia	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PN 3

No. PD	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	No. PN
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN 5
3	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan	PN 1
4	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PN 2
5	Pelestarian Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PN 6
6	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN 7
7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PN 4

Sumber : RPD 2023-2026 dan RKP 2024; diolah Bappelitbangda

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan Tahun 2024, maka arah kebijakan nasional yang akan ditempuh pada RKP 2024 dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian RPJMN 2020-2024, tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 tetap dipertahankan sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan di Tahun 2024. Prioritas nasional tetap didukung dengan pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/Major Project yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi target-target pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut makan rencana prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka hubungan sasaran pembangunan daerah dengan sasaran prioritas nasional Tahun 2024 sebagai mana pada Tabel IV-12 sebagai berikut :

Tabel IV-12
Keselarasan Sasaran pembangunan Daerah terhadap Sasaran Prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah**	**Prioritas Pembangunan Nasional**	**Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**	**Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**
1	Pembangunan Manusia	Memperkuat Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan Berkualitas	(a) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (b) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (c) harapan lama sekolah;
		Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM		Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	a. menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah**	**Prioritas Pembangunan Nasional**	**Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**	**Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**
						10-18 tahun
						(a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Penyediaan Infrasutruktur Layanan Dasar	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)
						Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %); peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)
3	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	PDRB Perkapita	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan	Meningkatnya daya dukung dan Kualitas Sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi Pembvangunan ekonomi yang bekelanjutan	(a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan,
			Indeks Gini			
		Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor	Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, Investasi, Ekspor, dan daya	(a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d)
			Tingkat Pengangguran			

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah**	**Prioritas Pembangunan Nasional**	**Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**	**Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**
		perekonomian daerah	Terbuka (TPT)		saing perekonomian	pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun,(i) pertumbuhan investasi (PMTB),
4	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Berkurangnya penduduk miskin	Angka Kemiskinan	PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya perumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan timur Indonesia (KTI)	PDRB KTI Persentase Penduduk Miskin KTI
5	Pelestarian Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	PN 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Meningkatnya capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	(a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.
6	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperbaiki kualitas tatakelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	PN 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Perbaikan tata Kelola dan Birokrasi	Indeks Pelayanaan Publik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai Sakip Daerah			

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah**	**Prioritas Pembangunan Nasional**	**Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**	**Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional**
			Indeks Kepatuhan Terhadap SPM			
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas	PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian	Indeks Pembangunan Masyarakat
					Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama

Sebagai dukungan terhadapa kegiatan prioritas nasional Tahun 2024, maka Kabupaten Takalar menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagai mana pada tabel berikut :

Tabel IV-13
Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	1	Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Terbarukan (Ebt)	1	Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan		
				2	Peningkatan Pasokan Bahan Bakar nabati		
				3	Peningkatan Pelaksanaan Konservasi Dan Efisinsi		
				4	Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik		
				5	Pengembangan Industri Pendukung Ebt		
		2	Peningkatan Kualitas / Ketahanan Air Untuk Mendukung Perumbuhan Ekonomi	1	Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindungi (Kumulatif)		
				2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
				3	Penyediaan Air Untuk Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
				4	Penyediaan Air Baku Untuk Kawasan Prioritas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				5	Pemeliharaan, Pemulihan Dan Konserfasi Sumber Daya Air Dan Ekosistemnya Termasuk Revitalisasi Danau Dan Infrastruktur Hijau	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
		3	Peningkatan Ketersediaan,	1	Peningkatan Kualitas Komsumsi,	Program Peningkatan	Dinas Tanaman

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
			Akses Dan Kualitas Komsumsi Pangan		Keamanan, Fortifikasi Dan Bioafortifikasi Pangan	Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				2	Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan Untuk Menjaga Stabilitas Pasokan Dan Harga Kebutuhan Pokok	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
				3	Peningkatan Produktifitas Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan Dan Kepastian Pasar	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
				4	Peningkatan Keberlanjutan Prodiktivitas Sumber Daya Pertanian, Dan Digitalisasi Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				5	Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		4	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, Dan Kelautan	1	Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Dan Tata Ruang Laut Dan Rencana Zonasi Pesisir Serta Pengelolaan Ruang Laut		
				2	Peningkatan Ekosistem Kelautan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
					Dan Pemanfaatan Jasa Kelautan		
				3	Peningkatan Produksi, Produktifitas, Standarisasi Mutu Dan Nilai Tambah Produk Kelautan Dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
				4	Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, Dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan Perikanan Skala Kecil Serta Akses Terhadap Pengelolaan Sumber Daya	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				5	Peningkatan SDM Dan Riset Kemaritiman Dan Kelautan Serta Database Kelautan Perikanan		
		5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menegah (UMKM) Dan Koperasi	1	Peningkatan Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro Kecil Dan Usaha Menengah Besar	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2	Peningkatan Kapasitas Usaha Dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	
				3	Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, Dan Inovasi Koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
				4	Peningkatan Penciptaan Start-Up Dan Peluang Usaha	Program Pengembangan UMKM	
				5	Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	Program Pengembangan UMKM	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
		6	Peningkatatan Nilai Tambah Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil Dan Insdustrialisasi	1	Peningkatan Industri Pengelolaan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, Dan Non Agro Yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2	Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter Dan Kawasan Industri Terutama Di Luar Jawa	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
				3	Peningkatan Daya Saing Destinasi Dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Pariwisata Alam, Yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				4	Peningkatran Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Dan Usaha Kreatif Dan Digital	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
				5	Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				6	Pengembangan Industri Halal	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
		7	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri	1	Peningkatan Diversifikasi Nilai Tambah, Dan Daya Saing Produk Ekspor Dan Jasa	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				2	Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor		
				3	Pengelolaan Impor		
				4	Peningkatan Kandungan Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah Yang Efektif	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
				5	Peningkatan Partisipasi Dalam Jaringan Produk Global	Program Pengembangan Ekspor	
				6	Peningkatan Citra Dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas Dan Destinasi Brending, Dan Produk Kreatif	Program Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				7	Peningkatan Efektifitas Prefential Trader Agreement (Pta)/ Free Trade Agreement (Fta)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (Cepa) Dan Diplomasi Ekonomi	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		8	Penguatan Pilar	1	Peningkatan Pendalaman Sektor	Program Pengelolaan	Badan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
			Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi		Keuangan	Keuangan Daerah	Keuangandan Aset Daerah
				2	Otimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital Dan Industri 4.0	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				3	Peningkatan Sistem Logistik Dan Stabilitas Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
				4	Peningkatan Penerapan Praaktik Berkelanjutan Di Industri Pengolahan Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				5	Reformasi Fiskal	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				6	Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Data Dan Informasi Perkembagan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Dan Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurai Kesenajngan Dan Menjamin Pemerataan	1	Pengembangan Wilayah Sulawesi	1	Pengembagan Kawasan Strategis	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
				2	Pengembangan Sektor Unggulan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
						Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perkebunan dan Ketahanan Pangan; Dinas Perikanan
				3	Pengembangan Kawasan Perkotaan		
				4	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, Dan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				5	Kelembagaan Dan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	1	Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	1	Percepatan Cakupan Administarsi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				2	Integritas Sistem Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
				3	Pendampingan Dan Layanan Terpadu	Program Pendaftaran Penduduk	
				4	Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
							Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	Penguatan Pelaksanaan Penguatan Pelaksanaan	1	Sistem Jaminan Sosial Nasional	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				2	Bantuan Sosial Dan Subsidi Tapat Sasaran	Program Rehabilitasi Sosial	
				3	Perlindungan Sosial Adatif	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
				4	Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
		3	Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) Dan Kesehatan Reproduksi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Kesehatan; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				3	Peningkatan Pengendalian Penyakit		
				4	Penguatan Gerakan Masyarakat	Program Pemberdayaan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
					Hidup Sehat (Germas)	Masyarakat Bidang Kesehatan	
				5	Penguatan Sistem Kesehatan Dan Pengawsan Obat Dan Makanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		4	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1	Peningkatan Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2	Afirmasi Askes Dan Percepatan Wajib Belajar 12 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	
				3	Peningkatan Pengelolaan Dan Penempatan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
				4	Penjamin Mutu Kependidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
				5	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
		5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Dan Pemuda	1	Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
				3	Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
		6	Pengentasan Kemiskinan	1	Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga	Dinas Pengendalian

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
						Sejahtera Ks	Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2	Keperantaraan Usaha Dan Dampak Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				3	Reforma Agraria	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
				4	Perhutanan Sosial		
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalias Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	1	Revolusi Mental Dalam Sistem Pendidikan Untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja Gotong Royong, Dan Budi Pekerti	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				2	Revolusi Mental Dalam Tata Kelola Pemerintahan Untuk Penguatan Budaya Birokrasi Yang Bersih, Melayani, Dan Responsif		
				3	Revolusi Mental Dalam Sistem Sosial Untuk Memperkuat Ketahana, Kualitas Dan Peran		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
					Keluarga Dalam Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter		
				4	Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Revolusi Mental		
				5	Pembangunan Dan Pemberdayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila		
				6	Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Dan Patriotisme		
		2	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Memingkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	1	Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2	Pengembangan Dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya Untuk Memperkuat Karakter Bangsa Dan Kesejahteraan Rakyat		
				3	Perlindungan Hak Kebudayaan Dan Ekspresi Budaya Untuk Memperkuat Budaya Yang Inklusif		
				4	Pengembangan Diplomasi Budaya Untuk Memperkuat Pengaruh		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
					Indonesia Dalam Perkembangan Peradaban Dunia		
				5	Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan		
		3	Memperkuat Modernisasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, Dan Harmoni Sosial	1	Penguatan Cara Pandang, Sikap, Dan Praktik Beragama Dalam Prespektif Jalan Tengah Untuk Memantapkan Persaudaraan Dan Kebersamaan Dikalangan Umat Beragama		
				2	Penguatan Harmoni Dan Kerukunan Umat Beragama		
				3	Penyelarasan Relasi Agama Dan Budaya		
				4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan		
				5	Pengembagngan Ekonomi Dan Sumber Daya Keagamaan		
		4	Peningkatab Budaya Literasi, Inovasi, Dan Kreatifitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan Dan Berkarakter	1	Peningkatan Budaya Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				2	Pengembangan, Pembinaan, Dan Perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Dan Aksara Daerah, Serta Sastra	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				3	Pengembangan Budaya Iptek,	Program Penelitian Dan	Badan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
					Inovasi, Kreativitas Dan Daya Cipta	Pengembangan Daerah	Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				4	Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi Dan Inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan; Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	1	Penyediaan Akses Perumahan Dan Permukiman Layak, Aman, Dan Terjangkau	Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
				2	Penyediaan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak Dan Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				3	Pengelolaan Air Tanah Dan Air Baku Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				4	Keselamatan Dan Keamanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				5	Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
							Bencana Daerah
				6	Waduk Multipurpose Dan Modernisasi Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman
		2	Infrastruktur Ekonomi	1	Konektivitas Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman
				2	Konektivitas Kereta Api		
				3	Konektivitas Laut		
				4	Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		3	Infrastruktur Perkotaan	1	Transportasi Perkotaan		
				2	Infrastruktur Dan Ekosistem TIK Perkotaan		
				3	Penyediaan Akses Perumahan Dan Permukiman Layak, Aman, Dan Terjangkau Di Perkotaan		
		4	Energi Ketenaga Listrikan	1	Keberlanjutan Penyediaan Energi Dan Ketenagalistrikan		
				2	Akses Dan Keterjangkauan Energi Dan Ketenagalistrikan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
				3	Kecukupan Penyediaan Energi Dan Tenaga Listrik		
		5	Transformasi Digital	1	Penuntasan Infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				2	Pemanfaatan Infrastruktur TIK		
				3	Fasilitas Pendukung Transformasi Digital		
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
				2	Penanggulangan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup		
				3	Pemulihan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup		
				4	Penguatan Kelembagaan Dan Penegakan Hukum Di Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		2	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	1	Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
				2	Peningkatan Ketahanan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
		3	Pembangunan Rendah Karbon	1	Pembangunan Energi Berkelanjutan		
				2	Pemulihan Lahan Berkelanjutan		
				3	Pengelolaan Limbah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun B Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
				4	Pengembangan Industri Hijau		
				5	Rendah Karbon Pesisir Dan Laut		
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanaan Publik	1	Konsolidasi Demokrasi	1	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				2	Penguatan Kesetaraan Dan Kebebasan		
				3	Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1	Penguatan Integritas NKRI Dan Perlindungan WNI Di Luar Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
						Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		3	Penegakan Hukum Nasional	1	Penataan Regulasi	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum Setda
				2	Perbaikan Sistem Hukum Pidana Dan Perdata		
				3	Penguatan Sistem Anti Korupsi		
				4	Peningkatan Akses Terhadap Keadilan		
		4	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	1	Penguatan Inplementasi Manajemen Asn Berbasis Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				2	Transformasi Pelayanan Publik	Program Penataan Organisasi	Bagian Organisasi Setda
				3	Penataan Kelembagaan Dan Proses Bisnis		
				4	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		
		5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				2	Penguatan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional		Kegiatan Prioritas Nasional		Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*
				3	Penguatan Keamanan Dan Ketahanan Siber	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

4.2.7 Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar dan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023-2026 dan mendukung prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel IV-14
Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabuaten Takalar Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2024

No. PD	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulsel	No. PD
1	Pembangunan Manusia	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	PD 3
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	PD 2
3	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	PD 3
4	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	PD 3
5	Pelestarian Lingkungan Hidup	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PD 4
6	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	PD 1
7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	PD 1

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, maka hubungan sasaran pembangunan daerah dengan sasaran prioritas provinsi Tahun 2024 sebagai mana pada Tabel IV-15 sebagai berikut :

Tabel IV-15
Keselarasan Sasaran pembangunan Daerah terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		
No	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah**
1	Pembangunan Manusia	Memperkuat Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PD 3 : Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata		
		Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM		Meningkatnya kualitas SDM yang kompetitif dan inklusif	IPM
					Meningkatkan kualitas dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	PD 2 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Williamson
					Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur
3	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	PDRB Perkapita	PD 3 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita ADHB
			Indeks Gini			Gini Rasio
		Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran terbuka
4	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Berkurangnya penduduk miskin	Angka Kemiskinan	PD 3 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		
No	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah**	**Prioritas Pembangunan Daerah**	**Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah**	**Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah**
				merata		
5	Pelestarian Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	PD 45: Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	IKLH
					Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK
6	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Memperbaiki kualitas tatakelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	PD 1 : Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai Sakip Daerah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi
			Indeks Kepatuhan Terhadap SPM		Optimalnya kualitas pelayanan publik	Indeks Layanan Publik
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas			

Dengan demikian terlihat bahwa sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 memiliki keterkaitan secara keseluruhan dengan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024. Sebagai dukungan terhadap kegiatan Prioritas Sulawesi Selatan Tahun 2024, maka Kabupaten Takalar menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagai mana pada Tabel IV-16 sebagai berikut:

Tabel IV-16
Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah Sulawesi Selatan	Program Daerah Yang Mendukung Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Perangkat Daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi, Umum, keprotokoleran,)	Bagian Ortala Sekretariat Daerah
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah	Bappelitbangda
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
				Program Perumusann Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Adminsitrasi Pemerintahan Desa	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
		Optimalnya kualitas pelayanan	Indeks layanan publik	Program Pemerintahan dan	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah Sulawesi Selatan	Program Daerah Yang Mendukung Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		publik		Kesejahteraan Rakyat	
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
				Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Williamson	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTRPKP
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTRPKP
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUTRPKP
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUTRPKP
				Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUTRPKP
				Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUTRPKP
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PUTRPKP
				Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTRPKP

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah Sulawesi Selatan	Program Daerah Yang Mendukung Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUTRPKP
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTRPKP
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
				Program Pengembangan Perumahan	Dinas PUTRPKP
				Program Kawasan Permukiman	Dinas PUTRPKP
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas PUTRPKP
				Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PUTRPKP
3	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita ADHB	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah Sulawesi Selatan	Program Daerah Yang Mendukung Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Rasio Gini	Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
				Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kraetif	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah Sulawesi Selatan	Program Daerah Yang Mendukung Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUTRPKP
		Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
				Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah Sulawesi Selatan	Program Daerah Yang Mendukung Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Menurunannya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah Sulawesi Selatan	Program Daerah Yang Mendukung Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
					Transmigrasi
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Program Penataan Desa	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Program Perencanaan Kawasan	Dinas Koperasi, UKM,

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah Sulawesi Selatan	Program Daerah Yang Mendukung Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya kualitas SDM yang kompetitif dan inklusif	IPM	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
				Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas PPKBPPPA
		Meningkatnya kualitas dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKBPPPA
4	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	IKLH	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas LH dan Pertanahan
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta	Potensi Penurunan Emisi GRK	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH dan Pertanahan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan daerah Sulawesi Selatan	Program Daerah Yang Mendukung Program Prioritas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas LH dan Pertanahan
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas LH dan Pertanahan
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas LH dan Pertanahan
				Program Pengelolaan Persampahan	Dinas LH dan Pertanahan
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUTRPKP

4.2.8 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam rangka penyusunan RAPBD 2024 terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berbasis pada RPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 harus selaras dan berkesinambungan dengan RKPD sebelumnya sehingga pembangunan jangka panjang dan menengah daerah dapat direalisasikan secara bertahap. Mekanisme tersebut ditentukan dengan jelas dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Terkait dengan penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2024, DPRD perlu memberikan input. Masukan ini penting artinya agar materi yang direncanakan oleh Pemda tidak menyimpang dari RPJPD dan RPD.

Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Takalar perlu dilakukan dalam rangka memenuhi ranah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Penelaahan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Takalar dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2024 berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Adapun hasil pokok-pokok pikiran DPRD meliputi :

1. Peningkatan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan kualitas kesehatan;
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin;
4. Peningkatan sarana prasarana pertanian;
5. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
7. Peningkatan kapasitas masyarakat.

BAB V
RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2024

Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, dimana pendapatan daerah Tahun 2024 pada Bab III Perubahan RKPD diproyeksikan sebesar Rp. 1,270,324,991,38200,- yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 216,376,100,286.00,- dan pendapatan transfer sebesar Rp. 1,044,948,891,096,00,- serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 123,497,200,000.,00,-. Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2024, dengan jumlah belanja sebesar Rp. 1,337,835,278,005,00.

Belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program priority*, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2024, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Struktur Belanja dalam RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut :

Tabel V-1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar
Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	%
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
8	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,275,587,955,641.00**	**1,270,324,991,382.00**	**- 5,262,964,259.00**	**0.00**
8.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**264,742,600,000.00**	**216,376,100,286.00**	**- 48,366,499,714.00**	**-0.18**
8.1.1	Pajak Daerah	79,123,000,000.00	60,892,300,286.00	-18,230,699,714.00	-0.23
8.1.2	Retribusi Daerah	48,319,600,000.00	17,986,600,000.00	-30,333,000,000.00	-0.63
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00	0.00	0.00
8.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	123,300,000,000.00	123,497,200,000.00	197,200,000.00	0.00
8.2	**Pendapatan Transfer**	**1,010,845,355,641.00**	**1,044,948,891,096.00**	**34103535455.00**	**0,00**
8.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**955,405,633,560.00**	**955,405,633,560.00**	**0.00**	**0,00**
8.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	0		0.00	#DIV/0!
8.2.1.2	Dana Alokasi Umum	955,405,633,560.00	955,405,633,560.00	0.00	-
8.2.1.3	Dana Alokasi Khusus			0.00	0,00
8.2.1.4	Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	0.00	0,00
8.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0,00**
8.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0.00		0.00	0,00
8.2.2.2	Dana Penyesuaian	0.00		0.00	0,00
8.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**55,439,722,081.00**	**89,543,257,536.00**	**34,103,535,455.00**	**0,00**
8.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55,439,722,081.00	89,543,257,536.00	34,103,535,455.00	0.38
8.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			-	0,00
8.2.3.3	Pendapatan Bantuan Keuangan			-	0,00
8.3	**Lain - lain Pendapatan yang Sah**	**0.00**	**9,000,000,000.00**	**9,000,000,000.00**	**0,00**
8.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0,00

NO.	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	%
8.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	0

5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2024, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 9 (sembilan) prioritas pembangunan.

Prioritas pertama Peningkatan mutu tenaga pendidik dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 5 (lima) program prioritas, prioritas kedua Peningkatan mutu tenaga kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan serta keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 4 (empat) program prioritas, prioritas ketiga Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja, pencari kerja dan wirausahawan dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 13 (tiga belas) program prioritas, prioritas keempat Optimalisasi pengembangan sektor unggulan pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan jasa berbasis jaringan dengan Sistem Pertanian Terpadu dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 13 (tiga belas) program prioritas, prioritas kelima Penajaman target penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 2 (dua) program prioritas, prioritas keenam Pengembangan sektor pariwisata guna menunjang iklim investasi yang sehat dan berkualitas dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 3 (tiga) program prioritas, prioritas ketujuh Pengintegrasian perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten ke tingkat desa yang berkelanjutan dengan 4 sasaran dan dijabarkan dalam 7 (tujuh) program prioritas, prioritas kedelapan Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kualitas ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan 2 sasaran dan dijabarkan dalam 4 (empat) program prioritas, prioritas kesembilan Penegakan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja aparatur serta penata

kelolaan pemerintahan daerah dan desa dengan 1 sasaran dan dijabarkan dalam 6 (enam) program prioritas.

Secara keseluruhan prioritas pembangunan Tahun 2024 adalah sebanyak 9 (sembilan) prioritas pembangunan dengan 13 (tiga belas) sasaran, dan 57 (lima puluh tujuh) program prioritas sebagai mana di jabarkan pada tabel V-2. berikut :

Tabel V-2
Sandingan Prioritas Pembangunan RKPD 2024 Dengan Perubahan RKPD 2024

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas hidup manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	93.069.661.280			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Persentase warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartsipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%				
				Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%				
				Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	20%				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	20%				
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal (ritual adat dan tradisi) yang dikembangkan sebagai budaya	55%	526.500.000			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	60%	115.000.000			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan	100%	135.500.000			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	75%	181.500.000			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Pengelolaan Permuseuman	Presentase Pemenuhan Pengelolaan Permuseuman yang Dilaksanakan (%)	100%	126.500.000			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,4	16.000.000			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Naskah Kuno (Eksemplar)	88	5.000.000			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Program Pengelolaan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	77,29	5.500.000			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	77,48	10.500.000			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	55	2.000.000			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	100%	221.000.000			Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	100%	8.000.000			Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Peningkatan Kapasistas Kepramukaan (%)	100%	1.000.000			Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	105.022.647.254			Dinas Kesehatan
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%				
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				
				Persentase warga negara produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				
				Persentase warga Negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				sesuai standar					
				Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				
				Persentase warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				
				Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				
				Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%				
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	7				
				Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH					
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH					
				Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus	100%				
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	35%	425.000.000			Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berijin	95%	1.500.000.000			Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga aktif	38%	210.000.000			Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	100%	55.652.524.304			Rsud H. Padjonga Daeng Ngalle
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	95%	10.000.000			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,02	412.200.000			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				TFR (Angka Kelahiran Total)	2,06				
				Age Specific Fertility Rate (ASFR)	138				
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Capaian KB Aktif	80	886.062.800			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kelompok Tribina	83%	2.181.600.000			Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
									Perlindungan Anak
2	Penguatan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya daya saing infrastruktur daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	27,17	1.700.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80				Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	100%	3.625.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%				Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	600.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	10%	3.210.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi persetujuan bangunan gedung (PBG)	50%	57.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	11.597,98	850.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten	80%				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	75%	3.793.633.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	60	10.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang	60%	3.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang	60%				
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	100%	622.236.580			Dinas Perhubungan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase layanan angkutan darat	100%				
			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase layanan angkutan penyeberangan	100%	7.120.000			Dinas Perhubungan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan yang mendapatkan izin	60%	500.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	Persentase ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	100%	250.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase ketersediaan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	20,41%	800.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
3	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap nelayan kecil	22.050 ton	946.180.000			Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya	590.403 Ton	20.000.000			Dinas Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persenatse poklahsar yang meningkat kelasnya	26%	20.000.000			Dinas Perikanan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	4,50%	409.999.880			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
				Cakupan bina kelompok petani	60				
				Persentase peningkatan produksi peternakan	4				
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan	95	1.454.999.780			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman perkebunan dan holtikultura	90				
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung	95				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				peternakan					
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase prasarana Pertanian/peternakan yang disediakan dan dikembangkan (%)	100	591.000.000			Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana Pertanian/peternakan yang disediakan dan dikembangkan (%)	100	1.650.810.900			Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan Usaha produk hewan yang bersertifikat PRA/NKV	90	170.575.000			Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	100				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	-7				
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian/peternakan yang dibina (%)	100	20.000.000			Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	90	5.157.460			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas pada kelompok tani/gapoktan (%)	75	124.999.800			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	48,79	22.500.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			(Umkm)						
			Program Pengembangan Umkm	Persentase usaha mikro naik kelas	44,79	300.000.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	20	340.000.000			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	50				
				Persentase cakupan pengembangan sentra industri	20				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	100	10.000.000			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	100				
				Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di daerah Kabupaten/ Kota	100				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	24	9.500.000			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	100				
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi	23,72	20.000.000			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	23,97	60.000.000			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha/penanam modal terhadap penyampaian LKPM	23,10	18.560.000			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal	50	5.000.000			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan wisata	2	11.600.000			Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per kebangsaan	100	2.000.000			Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
				Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang Ke Kabupaten/Kota	100				
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif (%)	70	2.000.000			Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kraetif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi	100	3.000.000			Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	PERSENTASE PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN (%)	100	500.000			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	75	20.000.000			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	1	10.000.000			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku	60	20.000.000			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	4	7.500.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	79	15.000.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	60	10.000.000			Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
4	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Berkurangnya penduduk miskin	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	87,9	232.499.700			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan/wilayah rentan rawan pangan	0	200.000.400			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	75	15.000.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	48,79	22.500.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Pengembangan Umkm	Persentase usaha mikro naik kelas	44,79	300.000.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	85	3.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar Penyandang disabilitas diluar panti	80	440.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	80				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial usia lanjut terlantar diluar panti	80				
				Persentase pelayanana rehabilitasi Sosial usia tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	80				
				Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80				
				Persentase pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	80				
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosia	100	64.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	90	150.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80				
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (%)	100	3.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Penataan Desa	Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	100	2.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa Yang Memiliki Kompetensi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa (%)	98	8.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	87	110.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas	100	15.000.000			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
5	Pelestarian Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan bidang lingkungan hidup	80	1.561.000			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	59,05	5.900.000			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
				Indeks kualitas udara	83,99				
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks kualitas tutupan lahan	32,24	873.760.000			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	30	999.000			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	35	2.040.000			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota	80	2.408.160.000			Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
6	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang perankat daerah		524.134.496.228			Semua Perangkat Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	0	13.639.803.921			Bagian Ortala Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Organisasi, Umum, Keprotokoleran,)						
				Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	64				
				Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	100				
				Nilai Sakip Sekretariat Daerah	66				
				Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya B	0				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah	100	1.205.900.000			Bappelitbangda
				Capaian kinerja Perangkat Daerah	90				
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	806.000.000			Bappelitbangda

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100				
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	100				
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	85	6.920.100.000			Inspektorat Daerah

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Perumusann Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase penyelesaian temuan berulang kode 01, 02 dan 03	85	1.038.872.000			Inspektorat Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD tepat waktu	100	183.320.357.754			Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu	93				
				Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan tepat waktu	93				
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	91	1.042.366.044			Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100	3.388.249.270			Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Jumlah penambahan wajib pajak baru	100				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Adminsitrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	98	8.000.000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	100	42.414.700			Kecamatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi, Umum, Keprotokoleran,)	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	0	13.639.803.921			Sekretariat Daerah
				Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	64				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	100				
				Nilai Sakip Sekretariat Daerah	66				
				Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya B	0				
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitas	100	11.231.450.446			Sekretariat Daerah
				Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	B				
				Persentase penyelesaian pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat yang tepat dan akurat	100				
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap	100	195.000.000			Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				belanja pengadaan.					
				Persentase Penayangan SIRUP	100				
				Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang dimanfaatkan menjadi kebijakan	100				
				Tingkat Inflasi	2,03				
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan (%)	100	589.455.352			Bappelitbangda
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penerbitan SK secara tepat waktu	100	90.224.000			Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase Penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	100				
			Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP-el	97	725.000.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik	98				
				Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	55				
			Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	98	70.000.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100				
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	98	180.000.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	98				
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun (%)	98	20.000.000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Presentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu sesuai propemperda	100	5.170.880.100			Sekretariat DPRD

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Presentase aspirasi yang ditindaklanjuti	100				
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	25	25.000.000			Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
				Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	25				
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	25	957.400.000			Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	25	15.000.000			Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
				Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan daerah	25				
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	28,57	10.000.000			Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	100	351.407.500			Kecamatan
7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	94	850.000.000			Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	94				
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	410.000.000			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100				
				Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100				
				Persentase penanganan pasca bencana	100				
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	98,25	130.000.000			Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran
				Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	15				

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	90	150.000.000			Dinas Sosial Dan Pemerintahan Masyarakat Desa
				Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80				
			Program Koordiansi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	100	49.010.000			Kecamatan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	100	42.414.700			Kecamatan
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Angka potensi konflik SARA di masyarkat	2	14.382.550			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya	100	17.553.194.000			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatn	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	66	7.224.850			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Angka potensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	24	11.895.750			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Pokok Tahun 2024		Perubahan Tahun 2024		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Angka potensi gangguan ideologi, politik,pertahanan dan keamanan	12	20.458.995			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL						**1.075.965.750.218,80**		-	

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024

Perumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan sebuah produk perencana sistematis, tersusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahap perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan, dan sosial. Untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar ada 18 (delapan Belas) antara lain tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanaha lingkungan hidup, perhubungan, dan seterusnya. Urusan pilihan 6 (enam) antara lain pertanian, Kehutanan, Perdagangan, dan seterusnya, Sedangkan untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan 8 (delapan) antara lain Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan seterusnya. Rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel V-3. berikut :

Tabel V-3
Indikasi Perubahan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Takalar Tahun 2024 -2025

5.3.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							344.296.313.580,45	389.021.200.453,00	389.837.247.879,00							349.521.951.278,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							343.211.313.580,45	387.043.124.953,00	387.859.172.379,00							348.436.951.278,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							343.211.313.580,45	387.043.124.953,00	387.859.172.379,00							348.436.951.278,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				-	65 %	249.088.652.300,45	271.068.962.593,00	270.010.193.441,00							252.575.489.998,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	-			-	100 %	4.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		4.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	-			500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	-			500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	100 %	248.846.353.785,45	270.425.703.231,00	270.425.703.231,00			-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		251.739.191.483,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2386.00 Orang/bulan	2386.00 Orang/bulan	248.842.853.785,45	270.422.203.231,00	269.363.434.079,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			251.735.691.483,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Laporan Barang Milik Daerah	-			-	100 %	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00			-	-	-		2.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

						Perangkat Daerah															KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	-			700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	-			700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	-			700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	-			700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			-	100 %	19.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerint	-		19.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																		ahan dan Pelayanan Publik				
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36.00 Paket	36.00 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2.00 Orang	2.00 Orang	13.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			-	100 %	11.000.000,00	145.414.000,00	145.414.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																		n Publik				
	1	0 1	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	3 Paket	1.000.000,00	81.536.900,00	81.536.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 1	2. 06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	37.877.100,00	37.877.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbira	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerint			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																ng			ahan dan Pelayanan Publik				
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12.00 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.00 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.00 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbira	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerint			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																ng			ahan dan Pelayanan Publik				
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 %	45.200.000,00	48.972.000,00	48.972.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		45.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35.00 Unit	2 Unit	1.000.000,00	48.972.000,00	48.972.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayana			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																		n Publik				
	1	0 1	0 1	2. 07	00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	22.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 1	2. 07	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				45.00 Unit	45.00 Unit	16.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			16.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	-			-	100 %	146.798.515,00	423.273.362,00	423.273.362,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		146.798.515,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3 Laporan	95.398.515,00	91.073.362,00	91.073.362,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayana			95.398.515,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																		n Publik				
	1	0 1	0 1	2. 08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	50.400.000,00	331.200.000,00	331.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 %	13.000.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		607.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 1	2. 09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6.00 Unit	1 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayana			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																		n Publik				
	1	0 1	0 1	2. 09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45.00 Unit	10 Unit	1.000.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 1	2. 09	00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			555.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				-	20 100 % %	93.069.661.280,00	115.949.162.360,00	117.823.978.938,00							95.208.461.280,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-			-	100 %	49.810.056.563,00	64.760.311.223,00	64.760.311.223,00			-	1. Pembangunan Manusia	Warga Usia 7 - 15 Tahun		49.928.651.788,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10.00 Ruang	2 Ruang	1.450.000.000,00	404.224.846,00	404.224.846,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			2.038.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				10.00 Ruang	10.00 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	1. Pembangunan Manusia			364.395.225,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2.00 Ruang	1 Ruang	360.000.000,00	826.765.000,00	826.765.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25.00 Unit	11 Unit	733.861.000,00	3.885.102.400,00	3.985.102.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			1.039.861.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10.00 Ruang	2 Ruang	425.000.000,00	226.102.010,00	226.102.010,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10.00 Ruang	10.00 Ruang	125.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10.00 Ruang	2 Ruang	125.000.000,00	250.300.210,00	250.300.210,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				10.00 Unit	10.00 Unit	125.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah																
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				10.00 Paket	2 Paket	175.000.000,00	1.862.397.600,00	1.862.397.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				10.00 Paket	4 Paket	1.125.000.000,00	5.737.983.000,00	7.407.483.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				31546.00 Peserta Didik	31546.00 Peserta Didik	81.079.000,00	2.769.579.000,00	2.769.579.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			81.079.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				10.00 Paket	10.00 Paket	125.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	Bidang Pendidikan						
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				75.00 Peserta Didik	75.00 Peserta Didik	115.000.000,00	343.320.000,00	343.320.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				125.00 Orang	125.00 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				500.00 Orang	1679 Orang	620.000.000,00	2.458.451.900,00	2.458.451.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			620.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				236.00 Satuan Pendidikan	239 Satuan Pendidikan	176.000.000,00	1.826.688.700,00	1.932.005.278,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			176.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				236.00 Satuan Pendidikan	236.00 Satuan Pendidikan	29.616.916.563,00	28.756.416.563,00	28.756.416.563,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			29.616.916.563,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	

							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				236.00 Orang	239 Orang	95.000.000,00	195.015.500,00	195.015.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																	
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				5.00 Ruang	6 Ruang	250.000.000,00	1.085.282.315,00	1.085.282.315,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																	

							Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5.00 Ruang	5.00 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				12.00 Ruang	4 Ruang	2.975.000.000,00	2.505.605.700,00	2.505.605.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			4.725.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10.00 Unit	4 Unit	227.200.000,00	398.457.539,00	398.457.539,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			454.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				75.00 Ruang	72 Ruang	10.450.000.000,00	11.228.618.940,00	11.228.618.940,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			8.553.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendidikan Sekolah MenengahPertama	-			-	100 %	23.727.683.437,00	31.571.924.937,00	31.571.924.937,00			-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun		26.971.474.287,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				10.00 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	226.515.665,00	226.515.665,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				10.00 Ruang	2 Ruang	250.000.000,00	226.140.110,00	226.140.110,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			261.368.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																	
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				10.00 Ruang	10.00 Ruang	250.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium																	

							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1.00 Ruang	2 Ruang	175.000.000,00	1.178.333.800,00	1.178.333.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			739.022.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				10.00 Ruang	10.00 Ruang	125.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10.00 Unit	10.00 Unit	174.000.000,00	1.311.372.400,00	1.311.372.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			872.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Bidang Pendidikan						
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			5.00 Ruang	5.00 Ruang	1.650.000.000,00	2.073.749.880,00	2.073.749.880,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			2.370.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			10.00 Ruang	10.00 Ruang	175.000.000,00	147.339.950,00	147.339.950,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan	-	-			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	Penggunaannya Bidang Pendidikan					
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10.00 Ruang	10.00 Ruang	175.000.000,00	292.793.883,00	292.793.883,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10.00 Ruang	10.00 Ruang	325.000.000,00	271.206.900,00	271.206.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	-	-			325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	Pendidikan					
	1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																
							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				10.00 Ruang	10.00 Ruang	175.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10.00 Unit	10.00 Unit	325.000.000,00	362.182.920,00	362.182.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel Sekolah																

		1	2	02	25																
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10.00 Paket	10.00 Paket	225.000.000,00	1.272.682.800,00	1.272.682.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																	
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				10.00 Paket	10.00 Paket	150.000.000,00	1.960.101.000,00	1.960.101.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																	
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				45.00 Peserta Didik	45.00 Peserta Didik	325.000.000,00	2.811.159.800,00	2.811.159.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Pengguna	-	-			325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	annya Bidang Pendidikan						
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																	
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				5.00 Paket	5.00 Paket	125.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				75.00 Peserta Didik	75.00 Peserta Didik	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				125.00 Orang	125.00 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				550.00 Orang	550.00 Orang	575.000.000,00	894.004.800,00	894.004.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				45.00 Satuan Pendidikan	45.00 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	1.734.631.900,00	1.734.631.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				45.00 Satuan Pendidikan	45.00 Satuan Pendidikan	15.787.683.437,00	15.787.683.437,00	15.787.683.437,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			15.787.683.437,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				90.00 Orang	90.00 Orang	75.000.000,00	91.481.000,00	91.481.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				45.00 Satuan Pendidikan	45.00 Satuan Pendidikan	216.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			216.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																

							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5.00 Ruang	5.00 Ruang	1.560.000.000,00	516.579.650,00	516.579.650,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			2.510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3.00 Ruang	3.00 Ruang	475.000.000,00	348.965.042,00	348.965.042,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			775.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) undefined	-			-	100 % undefined undefined	9.059.367.205,00	12.561.631.000,00	12.561.631.000,00			-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun		9.474.735.205,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD															

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				10.00 Unit	10.00 Unit	450.000.000,00	932.821.200,00	795.419.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10.00 Unit	10.00 Unit	575.000.000,00	699.981.050,00	699.981.050,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			785.368.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10.00 Unit	10.00 Unit	350.000.000,00	70.702.000,00	70.702.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya	-	-			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																Bidang Pendidikan						
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD																
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			10.00 Paket	1 Paket	75.000.000,00	131.000.000,00	101.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																
							Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			10.00 Paket	10.00 Paket	85.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																

		1	2	03	11																	
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				12100.00 Peserta Didik	12100.00 Peserta Didik	65.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				10.00 Paket	1 Paket	125.000.000,00	2.083.113.000,00	2.250.514.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																

							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				12100.00 Peserta Didik	12100.00 Peserta Didik	93.567.205,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			93.567.205,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				150.00 Orang	150.00 Orang	15.000.000,00	891.439.000,00	891.439.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				215.00 Orang	215.00 Orang	185.000.000,00	481.712.300,00	481.712.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																	

							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				215.00 Satuan Pendidikan	215.00 Satuan Pendidikan	1.240.000.000,00	764.103.500,00	764.103.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			1.240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				210 Satuan Pendidikan	210 Satuan Pendidikan	4.915.800.000,00	4.563.600.000,00	4.563.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			4.915.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				250.00 Orang	250.00 Orang	35.000.000,00	135.657.000,00	135.657.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	

							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5.00 Ruang	5.00 Ruang	325.000.000,00	884.854.600,00	884.854.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5.00 Ruang	5.00 Ruang	525.000.000,00	922.647.350,00	922.647.350,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Pemenuhan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-			-	100 %	10.472.554.075,00	7.055.295.200,00	7.055.295.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Warga Usia 7 - 18 Tahun		8.833.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																	
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				15.00 Unit	15.00 Unit	560.954.075,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			2.274.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																	
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				550.00 Peserta Didik	550.00 Peserta Didik	850.000.000,00	546.829.400,00	546.829.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				150.00 Orang	150.00 Orang	450.000.000,00	435.600.000,00	435.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				250 Orang	250 Orang	460.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				45 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	625.000.000,00	1.594.989.800,00	1.594.989.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			625.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				45 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan	3.474.600.000,00	4.334.400.000,00	4.334.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			3.474.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				84.00 Orang	84.00 Orang	125.000.000,00	143.476.000,00	143.476.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3.00 Ruang	3.00 Ruang	325.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2.00 Paket	2.00 Paket	2.777.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5.00 Unit	5.00 Unit	825.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Pengembangan Kurikulum yang dilaksanakan				-	75 %	321.500.000,00	0,00	0,00							321.500.000,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dilaksanakan	-			-	25 %	193.000.000,00	0,00	0,00			-	-	Pendidik		193.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																

							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				100.00 Dokumen	100.00 Dokumen	193.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			193.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan yang dilaksanakan	-			-	25 %	128.500.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Pendidik Paud dan Non Formal		128.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																	
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				120.00 Dokumen	120.00 Dokumen	128.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			128.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan				-	60 %	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00								50.000.000,00	

	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	umlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan	-			-	60 %	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Pendidik dan Tenaga Kependiidkan		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN	Presentase Pengendalian Perizinan Pendidikan				-	100 %	475.000.000,00	0,00	0,00								75.000.000,00	

						PENDIDIKAN															
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyaraka	-			-	6 Lembaga	30.000.000,00	0,00	0,00			-	-	Lembaga Pendidikan Dasar Oleh Masayarakat		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	Jumlah Penerbitan Izin PAUD dan PendidikanNon formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-			-	10 Lembaga	445.000.000,00	0,00	0,00			-	-	Lembaga Paud dan Non Formal		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Masyarakat																
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	415.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Presentase Bahasa dan Sastra yang Dikembangkan				-	100 %	206.500.000,00	0,00	0,00							206.500.000,00	

	1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibina dan dikembangkan	-			-	100 %	206.500.000,00	0,00	0,00			-	-	Pendidik		206.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	2.01	0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota																
							Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00 Publikasi	100.00 Publikasi	85.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	06	2.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				100.00 Peserta Didik	100.00 Peserta Didik	121.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			121.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.085.000.000,00	1.978.075.500,00	1.978.075.500,00							1.085.000.000,00	
	2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.085.000.000	1.978.075.500	1.978.075.500							1.085.000.000	

		2											,00	,00	,00							,00	
7	2	2 2	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan				-	100 %	526.500.000,00	649.240.500,00	649.240.500,00							526.500.000,00	
	2	2 2	0 2	2. 01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	-			-	29 Objek	129.000.000,00	207.875.000,00	207.875.000,00			-	-	Masyarakat		129.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 2	2. 01	00 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																	
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				29.00 Objek	29.00 Objek	94.000.000,00	207.875.000,00	207.875.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			94.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 2	2. 01	00 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																	
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				45.00 Orang	45.00 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	2	2 2	0 2	2. 02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan	-			-	13 Objek	272.500.000,00	441.365.500,00	441.365.500,00			-	-	Masyarakat Pemerhati Seni		272.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 2	2. 02	00 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																	
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				13.00 Objek	13.00 Objek	195.000.000,00	405.022.000,00	405.022.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			195.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 2	2. 02	00 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																	
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1.00 Laporan	1.00 Laporan	77.500.000,00	36.343.500,00	36.343.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			77.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	2	2 2	0 2	2. 03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	-			-	13 Objek	125.000.000,00	0,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Lembaga Adat		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 2	2. 03	00 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				50.00 Orang	50.00 Orang	83.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			83.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 2	2. 03	00 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				5.00 Unit	5.00 Unit	42.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2	2 2	0 3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni				-	60 %	115.000.000,00	152.743.000,00	152.743.000,00							115.000.000,00	
	2	2 2	0 3	2. 01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya yang dibina	-			-	60 %	115.000.000,00	152.743.000,00	152.743.000,00			-	-	Masyarakat Pemerhati Seni		115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Kabupaten/Kota																
	2	2 2	0 3	2. 01	00 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50.00 Orang	50.00 Orang	75.000.000,00	152.743.000,00	152.743.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 3	2. 01	00 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				50.00 Sertifikat	50.00 Sertifikat	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 3	2. 01	00 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9.00 Lembaga	9.00 Lembaga	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	2	2 2	0 4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan				-	100 %	135.500.000,00	276.730.700,00	276.730.700,00							135.500.000,00	

	2	2 2	0 4	2. 01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal yang dibina	-			-	2 Objek	135.500.000,00	276.730.700,00	276.730.700,00			-	-	Daerah Sejarah		135.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 4	2. 01	00 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				50.00 Orang	50.00 Orang	40.500.000,00	276.730.700,00	276.730.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			40.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 4	2. 01	00 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1.00 Unit	1.00 Unit	72.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			72.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 4	2. 01	00 03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																	
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				50.00 Dokumen	50.00 Dokumen	23.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	2	2 2	0 5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan				-	75 %	181.500.000,00	437.921.500,00	437.921.500,00								181.500.000,00	

	2	2 2	0 5	2. 01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan	-			-	13 Objek	30.000.000,00	284.770.000,00	284.770.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Cagar Budaya		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 5	2. 01	00 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				13.00 Objek	13.00 Objek	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 5	2. 01	00 02	Penetapan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				13.00 Objek	13.00 Objek	15.000.000,00	284.770.000,00	284.770.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 5	2. 02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang di kelola	-			-	13 Objek	136.000.000,00	153.151.500,00	153.151.500,00			-	-	Cagar Budaya		136.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 5	2. 02	00 01	Pelindungan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				13.00 Objek	13.00 Objek	58.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidika	-	-			58.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	n						
	2	2 2	0 5	2. 02	00 02	Pengembangan Cagar Budaya																	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				13.00 Objek	13.00 Objek	78.000.000,00	153.151.500,00	153.151.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			78.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 5	2. 03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota yang di terbitkan	-			-	13 Objek	15.500.000,00	0,00	0,00			-	-	Cagar Budaya		15.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2 2	0 5	2. 03	00 01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				13.00 Objek	13.00 Objek	15.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			15.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

11	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Permuseuman yang dilaksanakan				-	80 %	126.500.000,00	461.439.800,00	461.439.800,00							126.500.000,00	
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	-			-	1 Museum	126.500.000,00	461.439.800,00	461.439.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Museum		126.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																	
							Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				1.00 Unit	1.00 Unit	17.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																	
							Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1.00 Unit	1.00 Unit	94.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunanya Bidang Pendidikan	-	-			94.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	15.000.000,00	461.439.800,00	461.439.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Pattallassang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	JUMLAH												**344.296.313.580,45**	**389.021.200.453,00**	**389.837.247.879,00**							**349.521.951.278,00**	

5.3.2 Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Kesehatan							158.863.551.563,44	134.796.273.528,00	138.130.099.745,00							211.681.212.417,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							158.863.551.563,44	134.796.273.528,00	138.130.099.745,00							211.681.212.417,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							158.863.551.563,44	134.796.273.528,00	138.130.099.745,00							211.681.212.417,00	
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	51.705.904.309,44	69.619.132.367,00	69.325.467.279,00							97.319.239.607,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	440.500.000,00	180.883.600,00	180.883.600,00			-	-	-		22.918.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	26.355.700,00	26.355.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	15.000.000,00	41.235.900,00	41.235.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			22.500.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.500.000,00	15.036.500,00	15.036.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	22.500.000,00	23.399.800,00	23.399.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			22.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.500.000,00	6.961.100,00	6.961.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana	-	-			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN

																Alokasi Umum						
	1	0 2	0 1	2.0 1	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	3.00 Laporan	350.000.000,0 0	67.894.600,00	67.894.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			350.000.000,0 0	DINAS KESEHA TAN
	1	0 2	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	48.129.193.94 0,44	57.801.388.16 7,00	57.801.388.16 7,00			-	-	-		49.289.304.01 2,00	DINAS KESEHA TAN
	1	0 2	0 1	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				670 Orang/bulan	670 Orang/bulan	47.990.193.940,44	57.706.388.167,00	57.268.536.579,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-			49.150.304.012,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	24.000.000,00	81.190.700,00	81.190.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	8.319.600,00	8.319.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	5.489.700,00	5.489.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			12.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			12.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	-	-			-	-	174.000.000,00	99.999.800,00	99.999.800,00			-	-	-		174.000.000,00	DINAS KESEHATAN

						Daerah															
	1	0 2	0 1	2.0 3	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.0 3	00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD															
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.0 3	00 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD															
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	99.999.800,00	99.999.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	67.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	-	-		77.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																

							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			22.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	22.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			22.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			22.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	187.008.029,00	201.999.800,00	201.999.800,00			-	-	-		477.008.029,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	

							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				75 Unit	75 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.400.000,00	201.999.800,00	201.999.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	49.608.029,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			49.608.029,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0.00 Orang	0.00 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	525.000.000,00	422.047.400,00	422.047.400,00			-	-	-		575.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	49.999.900,00	49.999.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	32.054.900,00	115.841.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	49.992.800,00	49.992.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.999.900,00	24.999.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	249.999.900,00	249.999.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	9.856.000.000,00	9.856.000.000,00			-	-	-		21.405.725.226,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	3.471.000.000,00	3.471.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.0	00	Pengadaan Mebel																		

		2	1	7	05																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	6.205.000.000,00	6.205.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.07	00 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.07	00 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.07	00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			14.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			4.435.725.226,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang	-	-			-	-	791.543.660,00	750.573.600,00	750.573.600,00			-	-	-		791.543.660,00	DINAS KESEHATAN

						Urusan Pemerintahan Daerah															
	1	0 2	0 1	2.0 8	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	734.043.660,00	654.223.800,00	654.223.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			734.043.660,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.0 8	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	88.849.800,00	88.849.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																Kel/Desa	Hasil					
	1	0 2	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-			-	-	1.391.158.680, 00	301.240.000,0 0	301.240.000,0 0			-	-	-		1.611.158.680, 00	DINAS KESEHA TAN
	1	0 2	0 1	2.0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	125.000.000,0 0	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			125.000.000,0 0	DINAS KESEHA TAN
	1	0 2	0 1	2.0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	100.000.000,0 0	101.240.000,0 0	101.240.000,0 0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			100.000.000,0 0	DINAS KESEHA TAN
	1	0 2	0 1	2.0 9	00 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																	
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHA TAN
	1	0	0	2.0	00	Pemeliharaan Mebel																	

		2	1	9	05																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.0 9	00 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.0 9	00 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2.0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	116.158.680,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			116.158.680,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	500.000.000,00	0,00	50.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																Alokasi Khusus Fisik						
	1	0 2	0 1	2.0 9	00 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																
							Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				0.00 Ha	0.00 Ha	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2	1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	105.022.647.254,00	63.366.768.761,00	66.948.076.066,00							111.979.472.810,00	
	1	0 2	0 2	2.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	7.375.000.000,00	19.826.386.807,00	19.826.386.807,00			-	-	-		15.921.679.795,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 1	00 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																

							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas																	
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			4.979.595.420,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				0.00 Unit	1 Unit	0,00	440.000.000,00	2.364.632.580,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																
							Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				0.00 Unit	2 Unit	0,00	1.090.000.000,00	1.090.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	4 Unit	500.000.000,00	6.220.258.540,00	5.215.112.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	296.354.100,00	114.067.560,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	48 Unit	0,00	3.792.685.560,00	3.677.627.560,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			3.567.084.375,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																	Fisik					
	1	0 2	0 2	2.0 1	00 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	150.000.000,0 0	106.305.100,0 0	106.305.100,0 0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			150.000.000,0 0	DINAS KESEHA TAN
	1	0 2	0 2	2.0 1	00 22	Pengembangan Rumah Sakit																

							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	5.250.000.000,00	7.726.549.307,00	7.457.131.201,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			5.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																	

							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				3825 Keluarga	3825 Keluarga	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																	
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				0.00 Layanan	0.00 Layanan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				20 Paket	20 Paket	25.000.000,00	154.234.200,00	154.234.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																	Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	97.272.647.254,00	43.149.995.054,00	43.149.995.054,00			-	-	-		94.932.793.015,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6254 Orang	6254 Orang	1.259.854.240,00	210.013.700,00	191.213.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			1.259.854.240,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	

							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6029 Orang	6029 Orang	1.009.854.240,00	133.400.000,00	133.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			1.009.854.240,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																	
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5682 Orang	5682 Orang	859.854.239,00	323.174.400,00	518.947.342,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			859.854.239,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31675 Orang	31675 Orang	809.854.239,00	153.924.800,00	164.904.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana	-	-			809.854.239,00	DINAS KESEHATAN

																Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				47175 Orang	47175 Orang	809.854.239,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			809.854.239,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				189231 Orang	189231 Orang	809.854.239,00	31.889.700,00	31.889.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			809.854.239,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23758 Orang	23758 Orang	689.363.367,00	97.810.000,00	97.810.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			689.363.367,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				63443 Orang	63443 Orang	709.854.239,00	31.099.700,00	31.099.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			709.854.239,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5067 Orang	5067 Orang	709.854.239,00	553.146.600,00	553.146.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-	-	-			709.854.239,00	DINAS KESEHATAN

																	BOKKB-BOKB					
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				692 Orang	692 Orang	659.854.239,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			659.854.239,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5211 Orang	5211 Orang	559.854.239,00	810.840.000,00	810.840.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			559.854.239,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	1.009.854.239,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	795.210.000,00	1.060.090.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	1. Pembangunan Manusia			270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	756.547.400,00	1.366.569.770,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	582.079.800,00	242.124.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	325.000.000,00	13.925.000,00	13.925.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			325.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				692 Orang	692 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																Umum						
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	50 Orang	200.000.000,0 0	68.200.000,00	68.200.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			200.000.000,0 0	DINAS KESEHA TAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokume n	1 Dokume n	250.000.000,0 0	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000,0 0	DINAS KESEHA TAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokume n	1 Dokume n	250.000.000,0 0	660.146.900,0 0	660.146.900,0 0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-	-	-			250.000.000,0 0	DINAS KESEHA TAN

																	BOKKB-BOK					
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokume n	1 Dokume n	61.988.723.28 4,00	31.618.708.80 0,00	31.272.931.20 0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	1. Pembang unan Manusia			61.888.723.28 4,00	DINAS KESEHA TAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan				50 Orang	50 Orang	200.000.000,0 0	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000,0 0	DINAS KESEHA TAN

							Sekolah															
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	78.089.800,00	78.089.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	2 Dokumen	964.999.998,00	4.484.311.064,00	7.343.187.163,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	1. Pembangunan Manusia			964.999.998,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				17 Dokumen	1 Dokumen	17.165.172.000,00	123.015.000,00	123.015.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			17.165.172.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	224.915.000,00	217.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																

							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				15 Unit	15 Unit	750.000.000,00	311.791.000,00	311.791.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	15.099.300,00	15.099.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																	

							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				200 Orang	200 Orang	150.000.000,00	139.119.800,00	139.119.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	55.991.974,00	36.937.290,00	36.937.290,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			55.991.974,00	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2.0	00	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																	

		2	2	2	43																	
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	150.000.000,00	207.960.300,00	207.960.300,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	207.960.300,00	207.960.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	225.000.000,00	182.426.600,00	182.426.600,00			-	-	-		975.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																	

							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	24.999.900,00	24.999.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				0.00 Unit	1 Unit	0,00	36.146.900,00	36.146.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	21.279.800,00	21.279.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	425.000.000,00	1.535.712.500,00	1.723.687.300,00							775.000.000,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	175.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	-	-		175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	250.000.000,00	487.463.100,00	487.463.100,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	47.845.900,00	47.845.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				850 Orang	850 Orang	50.000.000,00	9.309.100,00	9.309.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	430.308.100,00	430.308.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	1.023.249.400,00	1.023.249.400,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				0.00 Orang	0.00 Orang	0,00	1.023.249.400,00	1.211.224.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	1.500.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00							1.350.000.000,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	-	350.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	-			-	-	300.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																	

							Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	-	250.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-			-	-	150.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-			-	-	150.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	-	300.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																	
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	210.000.000,00	224.659.900,00	82.869.100,00							257.500.000,00	

	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	150.000.000,00	14.999.900,00	14.999.900,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	14.999.900,00	14.999.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman																	
							Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

																Umum						
	1	0 2	0 5	2.0 2		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	35.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 5	2.0 2	00 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			22.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 5	2.0 2	00 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																	

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				150 Keluarga	150 Keluarga	12.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	25.000.000,00	209.660.000,00	209.660.000,00			-	-	-		22.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	209.660.000,00	67.869.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi	-	-			22.500.000,00	DINAS KESEHATAN

																Daerah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
						Puskesmas Mangarabombang						0,00	3.429.987.000,00	3.429.987.000,00						3.369.633.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	3.429.987.000,00	3.429.987.000,00						3.369.633.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00	3.429.987.000,00	3.429.987.000,00						3.369.633.000,00	
6	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	3.404.387.000,00	3.404.387.000,00						3.349.033.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K	-	-			-	-	0,00	3.369.204.800,00	3.369.204.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-	3.337.033.000,00	DINAS KESEHATAN

						ota																
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Pembangunan Manusia			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 33	Operasional Pelayanan Puskesmas																
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																

	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	35.182.200,00	35.182.200,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
7	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00							20.600.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		20.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
						Puskesmas Pattopakang							0,00	3.371.252.800,00	3.371.252.800,00							3.371.252.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	3.371.252.800,00	3.371.252.800,00							3.371.252.800,00	

	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00	3.371.252.800,00	3.371.252.800,00							3.371.252.800,00	
8	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	3.353.852.800,00	3.353.852.800,00							3.353.852.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	3.341.852.800,00	3.341.852.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		3.341.852.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																						
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																						
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																						
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																						
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																						
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																						
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																						
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																						
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																						
9	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00							17.400.000,00	

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		17.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
						Puskesmas Mappakasunggu							0,00	2.093.598.800,00	2.093.598.800,00							1.647.925.150,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.093.598.800,00	2.093.598.800,00							1.647.925.150,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	2.093.598.800,00	2.093.598.800,00							1.647.925.150,00	
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	2.068.498.800,00	2.068.498.800,00							1.622.825.150,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	-	-			-	-	0,00	2.056.498.800,00	2.056.498.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		1.610.825.150,00	DINAS KESEHATAN

						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																

	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
11	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	25.100.000,00	25.100.000,00							25.100.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	25.100.000,00	25.100.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		25.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
						Puskesmas Sanrobone							0,00	2.977.709.800,00	2.977.709.800,00							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.977.709.800,00	2.977.709.800,00							0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	2.977.709.800,00	2.977.709.800,00							0,00	

12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	2.975.609.800,00	2.975.609.800,00							0,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	2.963.609.800,00	2.963.609.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	

	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																							
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																							
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																							
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																							
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																							
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																							
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																							
13	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00							0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	-	-			-	-	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN

						Kabupaten/Kota																
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
						Puskesmas Polongbangkeng Selatan						0,00	2.471.291.000,00	2.471.291.000,00							2.315.581.050,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	2.471.291.000,00	2.471.291.000,00							2.315.581.050,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00	2.471.291.000,00	2.471.291.000,00							2.315.581.050,00	
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	2.471.291.000,00	2.471.291.000,00							2.315.581.050,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	2.436.108.800,00	2.436.108.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		2.303.581.050,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																

	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	35.182.200,00	35.182.200,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
						Puskesmas Bulukunyi						0,00	2.779.601.800,00	2.779.601.800,00									2.782.486.600,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	2.779.601.800,00	2.779.601.800,00									2.782.486.600,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00	2.779.601.800,00	2.779.601.800,00									2.782.486.600,00	
15	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	0,00	2.729.001.800,00	2.729.001.800,00									2.731.886.600,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	2.717.001.800,00	2.717.001.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		2.717.151.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			

	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		14.734.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
16	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKA	-				-	-	0,00	50.600.000,00	50.600.000,00							50.600.000,00	

						T BIDANG KESEHATAN																
	1	0 2	0 5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	50.600.000,00	50.600.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		50.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 5	2.0 3	00 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
						Puskesmas Pattallassang							0,00	4.322.692.400,00	4.322.692.400,00							4.056.641.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	4.322.692.400,00	4.322.692.400,00							4.056.641.000,00	
	1	0 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	4.322.692.400,00	4.322.692.400,00							4.056.641.000,00	
1 7	1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	4.303.842.400,00	4.303.842.400,00							3.992.381.000,00	

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	4.274.900.200,00	4.274.900.200,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		3.980.381.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	

	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																							
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																							
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																							
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																							
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	28.942.200,00	28.942.200,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																							
18	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	18.850.000,00	18.850.000,00							64.260.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	18.850.000,00	18.850.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		64.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																							

						Puskesmas Polongbangkeng Utara							0,00	3.281.820.000,00	3.281.820.000,00								3.085.515.250,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	3.281.820.000,00	3.281.820.000,00								3.085.515.250,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	3.281.820.000,00	3.281.820.000,00								3.085.515.250,00	
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	3.255.920.000,00	3.255.920.000,00								3.059.615.250,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	3.218.937.800,00	3.218.937.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-			3.022.633.050,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			

	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	36.982.200,00	36.982.200,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		36.982.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
20	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00							25.900.000,00	

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		25.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
						Puskesmas Ko'mara							0,00	2.659.092.800,00	2.659.092.800,00							2.615.263.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.659.092.800,00	2.659.092.800,00							2.615.263.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	2.659.092.800,00	2.659.092.800,00							2.615.263.000,00	
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	2.639.642.800,00	2.639.642.800,00							2.595.813.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	-	-			-	-	0,00	2.627.642.800,00	2.627.642.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		2.583.813.000,00	DINAS KESEHATAN

						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																

	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
22	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00							19.450.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		19.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
						Puskesmas Towata							0,00	2.256.749.800,00	2.256.749.800,00							2.309.763.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.256.749.800,00	2.256.749.800,00							2.309.763.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	2.256.749.800,00	2.256.749.800,00							2.309.763.800,00	

2 3	1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T	-				-	-	0,00	2.256.749.800, 00	2.256.749.800, 00							2.309.763.800, 00	
	1	0 2	0 2	2.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembang unan Manusia	-		10.584.000,00	DINAS KESEHA TAN
	1	0 2	0 2	2.0 1	00 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
	1	0 2	0 2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	-	-			-	-	0,00	2.248.589.800, 00	2.248.589.800, 00			-	1. Pembang unan Manusia	-		2.282.919.800, 00	DINAS KESEHA TAN
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
	1	0 2	0 2	2.0 2	00 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	

	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	8.160.000,00	8.160.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		16.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
24	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00							0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
						Puskesmas Bontomarannu							0,00	2.258.445.800,00	2.258.445.800,00							934.445.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.258.445.800,00	2.258.445.800,00							934.445.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	2.258.445.800,00	2.258.445.800,00							934.445.800,00	

25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	2.224.845.800,00	2.224.845.800,00							900.845.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	2.212.845.800,00	2.212.845.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		888.845.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	

	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
26	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00							33.600.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-			-	-	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		33.600.000,00	DINAS KESEHATAN

						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
						Puskesmas Bontokassi						0,00	2.690.940.800,00	2.690.940.800,00							1.754.744.250,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	2.690.940.800,00	2.690.940.800,00							1.754.744.250,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00	2.690.940.800,00	2.690.940.800,00							1.754.744.250,00	
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	2.690.940.800,00	2.690.940.800,00							1.754.744.250,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	2.678.940.800,00	2.678.940.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		1.742.744.250,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																

	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
						Puskesmas Galesong						0,00	3.531.085.000,00	3.531.085.000,00									1.108.606.750,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	3.531.085.000,00	3.531.085.000,00									1.108.606.750,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00	3.531.085.000,00	3.531.085.000,00									1.108.606.750,00	
28	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	0,00	3.531.085.000,00	3.531.085.000,00									1.088.606.750,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	3.531.085.000,00	3.531.085.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-			1.088.606.750,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			

	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																				
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																				
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																				
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																				
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																				
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																				
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																				
29	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00							20.000.000,00				
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN			

						Daerah Kabupaten/Kota																
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
						Puskesmas Galesong Utara						0,00	3.014.930.800,00	3.014.930.800,00							3.014.930.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	3.014.930.800,00	3.014.930.800,00							3.014.930.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0,00	3.014.930.800,00	3.014.930.800,00							3.014.930.800,00	
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	3.004.030.800,00	3.004.030.800,00							3.004.030.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	2.992.030.800,00	2.992.030.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		2.992.030.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																

	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
31	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00							10.900.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		10.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
						Puskesmas Aengtowa							0,00	2.283.354.800,00	2.283.354.800,00							2.412.302.050,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.283.354.800,00	2.283.354.800,00							2.412.302.050,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	2.283.354.800,00	2.283.354.800,00							2.412.302.050,00	
32	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	-				-	-	0,00	2.281.004.800,00	2.281.004.800,00							2.409.952.050,00	

						MASYARAKAT																
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	2.281.004.800,00	2.281.004.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		2.409.952.050,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																

	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
33	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00							2.350.000,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		2.350.000,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
						Puskesmas Kepulauan Tanakeke							0,00	1.670.694.800,00	1.670.694.800,00							1.679.814.800,00		

	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.670.694.800,00	1.670.694.800,00								1.679.814.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.670.694.800,00	1.670.694.800,00								1.679.814.800,00	
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	1.660.701.800,00	1.660.701.800,00								1.669.821.800,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	1.648.701.800,00	1.648.701.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-			1.657.821.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																				
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																				
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																				
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																				
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																				
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																				

	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																				
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																				
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																				
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																				
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																				
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																				
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																				
35	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	9.993.000,00	9.993.000,00							9.993.000,00	

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	9.993.000,00	9.993.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		9.993.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
						Puskesmas Bontomangape							0,00	3.018.276.800,00	3.018.276.800,00							2.446.902.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	3.018.276.800,00	3.018.276.800,00							2.446.902.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	3.018.276.800,00	3.018.276.800,00							2.446.902.000,00	
36	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	3.003.276.800,00	3.003.276.800,00							2.431.902.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	-	-			-	-	0,00	2.991.276.800,00	2.991.276.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		2.419.902.000,00	DINAS KESEHATAN

						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																

	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
37	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00							15.000.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
											JUMLAH		**158.863.551.563,44**	**134.796.273.528,00**	**138.130.099.745,00**							**211.681.212.417,00**	

5.3.3 Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle							83.870.260.842,00	114.179.261.142,00	98.091.109.386,00							94.088.303.528,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							83.870.260.842,00	114.179.261.142,00	98.091.109.386,00							94.088.303.528,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							83.870.260.842,00	114.179.261.142,00	98.091.109.386,00							94.088.303.528,00	
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	28.217.736.538,00	32.378.505.442,00	32.189.632.950,00							28.036.303.528,00	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	35.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		35.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	2.00 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.00 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	2.00 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	2.00 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	26.085.268.702,00	31.132.023.322,00	31.132.023.322,00			-	-	-		27.896.303.528,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE

	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4844.00 Orang/bulan	4690.00 Orang/bulan	26.070.260.842,00	31.132.023.322,00	30.943.150.830,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	-	-			27.882.295.438,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	4.999.770,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	2.00 Laporan	5.008.320,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.008.320,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	2.00 Dokumen	4.999.770,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.999.770,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		5.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	100.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		100.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONG

																						A DAENG NGALLE
	1	0 2	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.00 Laporan	32.00 Laporan	100.000.000,0 0	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,0 0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONG A DAENG NGALLE
	1	0 2	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	115.000.000,0 0	9.979.500,00	9.979.500,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONG A DAENG NGALLE
	1	0 2	0 1	2.0 7	000 5	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10.00 Unit	40.00 Unit	115.000.000,0 0	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONG A DAENG NGALLE
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	-	0,00	9.979.500,00	9.979.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Pendapa tan Bagi Hasil	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONG A DAENG NGALLE

	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.877.467.836,00	1.236.502.620,00	1.236.502.620,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				96.00 Laporan	96.00 Laporan	1.877.467.836,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	55.652.524.304,00	81.800.755.700,00	65.901.476.436,00							66.052.000.000,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	8.452.000.000,00	2.900.755.700,00	2.900.755.700,00			-	-	-		8.452.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	8.452.000.000,00	2.900.755.700,00	1.900.748.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	-	-			8.452.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE

																	Fisik					
	1	0 2	0 2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	47.200.524.304,00	78.900.000.000,00	78.900.000.000,00			-	-	-		57.600.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	0 2	0 2	2.0 2	002 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100.00 Dokumen	100.00 Dokumen	43.800.524.304,00	75.000.000.000,00	60.100.728.336,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			54.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	0 2	0 2	2.0 2	003 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				100.00 Dokumen	100.00 Dokumen	3.400.000.000,00	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah	-	-			3.400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
												JUMLAH	**83.870.260.842,00**	**114.179.261.142,00**	**98.091.109.386,00**							**94.088.303.528,00**	

5.3.4 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman							21.476.887.228,00	84.508.620.995,00	89.092.428.656,00							38.323.589.948,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							21.476.887.228,00	84.508.620.995,00	89.092.428.656,00							38.323.589.948,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							19.926.887.228,00	82.413.625.295,00	86.997.432.956,00							37.248.589.948,00	
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	6.078.254.228,00	7.768.753.280,00	7.561.829.796,00							10.172.022.388,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	30.000.000,00	50.133.400,00	50.133.400,00			-	-	-		213.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	5.000.000,00	11.557.400,00	11.557.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.000.000,00	14.876.000,00	13.226.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			19.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			27.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			17.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.00 Laporan	4.00 Laporan	11.000.000,00	11.700.000,00	13.350.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.661.604.228,00	7.139.717.288,00	7.139.717.288,00			-	-	-		8.697.022.388,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85.00 Orang/bulan	85.00 Orang/bulan	5.638.104.228,00	7.109.741.288,00	6.840.317.804,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-			8.393.022.388,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	10.000.000,00	12.006.000,00	12.006.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	7.990.000,00	7.990.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																

							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.500.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			18.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	-	-		64.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	-	-		9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	

							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	12.250.000,00	33.043.600,00	33.043.600,00			-	-	-		480.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.000.000,00	954.600,00	954.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			17.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			28.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	1.00 Laporan	500.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	26.474.000,00	95.274.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	

							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	345.400.000,00	481.178.992,00	481.178.992,00			-	-	-		346.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	295.000.000,00	265.678.992,00	265.678.992,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			315.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.400.000,00	215.500.000,00	209.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			31.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	17.000.000,00	46.680.000,00	46.680.000,00			-	-	-		363.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				31.00 Unit	31.00 Unit	10.000.000,00	46.680.000,00	46.680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1.00 Unit	1.00 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			18.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-				-	-	1.700.000.000,00	4.620.379.000,00	4.870.378.900,00							825.000.000,00	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.700.000.000,00	4.620.379.000,00	4.620.379.000,00			-	-	-		825.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																

							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				200 KM	200 KM	1.000.000.000,00	4.620.379.000,00	4.870.378.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																
							Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				1.00 Bendung	1.00 Bendung	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																

							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1000.00 KM	1000.00 KM	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																	
							Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1.00 Bendung	1.00 Bendung	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-				-	-	3.625.000.000,00	5.179.995.200,00	2.209.985.200,00							5.296.250.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	3.625.000.000,00	5.179.995.200,00	5.179.995.200,00			-	-	-		5.296.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				39.00 Liter/Detik	39.00 Liter/Detik	1.625.000.000,00	179.995.200,00	209.995.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			498.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				900.00 SR	900.00 SR	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.999.990.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.797.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-				-	-	600.000.000,00	0,00	0,00							200.000.000,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	-	-			-	-	600.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMA

						Kabupaten/Kota																HAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																
							Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan				1 M^3/Hari	1 M^3/Hari	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																
							Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASA

																						N PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				0.00 Orang	0.00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASA

																						N PERMUKIMAN
5	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-				-	-	3.210.000.000,00	4.143.100.100,00	4.193.100.100,00							1.200.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	3.210.000.000,00	4.143.100.100,00	4.143.100.100,00			-	-	-		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																	
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				20.00 M	20.00 M	3.110.000.000,00	3.073.920.100,00	3.073.920.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan															
							Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				2 Sistem Drainase Lingkungan	2 Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000,00	1.069.180.000,00	1.119.180.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Retribusi Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-				-	-	57.000.000,00	164.000.000,00	204.000.000,00							400.000.000,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	-	57.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00			-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung															

							Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				0.00 Orang	0.00 Orang	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																	
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	54.000.000,00	154.000.000,00	194.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-				-	-	850.000.000,00	25.703.932.715,00	27.360.001.134,00							350.000.000,00	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	850.000.000,00	25.703.932.715,00	25.703.932.715,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMA

																						HAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				3 Kawasan	3 Kawasan	850.000.000,00	25.703.932.715,00	27.360.001.134,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

8	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	3.793.633.000,00	34.447.835.000,00	40.212.507.826,00							18.565.317.560,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	3.793.633.000,00	34.447.835.000,00	34.447.835.000,00			-	-	-		18.565.317.560,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan																	

							Panjang Jalan yang Dibangun				4.50 KM	4.50 KM	2.663.633.000,00	33.837.845.000,00	38.790.500.826,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			16.190.317.560,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																

							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2.00 KM	2.00 KM	300.000.000,00	449.990.000,00	1.262.007.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Retribusi Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan																
							Jumlah Jembatan yang Dibangun				0.15 Jembatan	0.15 Jembatan	600.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1.00 KM	1.00 KM	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMA

																						HAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-				-	-	10.000.000,00	17.640.000,00	17.640.000,00							140.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																	
							Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																	
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				0 Orang	0 Orang	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMA

																Umum						HAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	-	5.000.000,00	12.640.000,00	12.640.000,00			-	-	-		115.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				8 Paket Pekerjaan	8 Paket Pekerjaan	5.000.000,00	12.640.000,00	12.640.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			115.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	-	3.000.000,00	367.990.000,00	367.990.000,00							100.000.000,00	

	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	3.000.000,00	367.990.000,00	367.990.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																	
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				25.00 Dokumen	25.00 Dokumen	3.000.000,00	367.990.000,00	367.990.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							1.550.000.000,00	2.094.995.700,00	2.094.995.700,00							1.075.000.000,00	
11	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				-	-	500.000.000,00	210.000.000,00	196.850.000,00							675.000.000,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	-	77.000.000,00	76.833.100,00	76.833.100,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																	

							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	13.500.000,00	13.475.000,00	13.475.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	18.000.000,00	17.997.500,00	17.997.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																
							Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	36.500.000,00	36.385.600,00	29.155.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																

							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	9.000.000,00	8.975.000,00	3.055.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	-	423.000.000,00	133.166.900,00	133.166.900,00			-	-	-		555.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																	
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				8 Unit Rumah	8 Unit Rumah	140.500.000,00	90.616.900,00	20.616.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			155.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																	

							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				7 Unit Rumah	7 Unit Rumah	282.500.000,00	42.550.000,00	112.550.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	250.000.000,00	249.980.000,00	249.980.000,00							300.000.000,00	
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	-	250.000.000,00	249.980.000,00	249.980.000,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																	
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	250.000.000,00	249.980.000,00	249.980.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

13	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-				-	-	800.000.000,00	1.635.015.700,00	1.648.165.700,00							100.000.000,00	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	-	800.000.000,00	1.635.015.700,00	1.635.015.700,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																	
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	1 Lokasi	800.000.000,00	1.635.015.700,00	1.648.165.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
											JUMLAH		**21.476.887.228,00**	**84.508.620.995,00**	**89.092.428.656,00**							**38.323.589.948,00**	

5.3.5 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan							7.868.839.671,43	11.710.315.699,00	11.958.573.459,00							13.733.963.450,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.868.839.671,43	11.710.315.699,00	11.958.573.459,00							13.733.963.450,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							7.868.839.671,43	11.710.315.699,00	11.958.573.459,00							13.733.963.450,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	6.888.839.671,43	9.229.041.549,00	9.477.299.309,00							8.753.963.450,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	35.000.000,00	42.420.500,00	42.420.500,00			-	-	-		37.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.00 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	6.637.400,00	6.637.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				100 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	7.480.100,00	7.480.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				100 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	7.728.000,00	7.728.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				100 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.575.000,00	5.575.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				100 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.429.208.071,43	7.101.797.205,00	7.101.797.205,00			-	-	-		6.831.131.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	5.399.208.071,43	7.066.677.405,00	6.892.117.765,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			6.801.131.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	14.983.000,00	14.983.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				100 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.878.000,00	3.878.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				100 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	16.258.800,00	16.258.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	20.000.000,00	15.016.000,00	15.016.000,00			-	-	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				100 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.448.000,00	3.448.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	2.368.000,00	2.368.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	20.500.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00			-	-	-		20.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				100 Unit	100 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				100 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				100 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	45.100.000,00	73.770.800,00	73.770.800,00			-	-	-		45.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	1 Paket	8.100.000,00	8.095.900,00	8.095.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			8.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	1 Paket	10.000.000,00	20.154.800,00	20.154.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.995.000,00	7.995.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				100 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.992.100,00	4.992.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	25.533.000,00	73.554.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.269.031.600,00	1.818.788.544,00	1.818.788.544,00			-	-	-		1.750.231.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	124.000,00	124.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	12 Laporan	32.531.600,00	38.154.144,00	61.015.344,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			32.531.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	12 Laporan	1.224.000.000,00	1.780.510.400,00	1.780.510.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			1.705.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	70.000.000,00	163.808.500,00	163.808.500,00			-	-	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				100 Unit	1 Unit	25.000.000,00	59.430.000,00	210.640.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	100 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	17 Unit	10.000.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	100 Unit	5.000.000,00	99.998.500,00	300.723.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	100 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	100 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	850.000.000,00	806.839.000,00	806.839.000,00							850.000.000,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	400.000.000,00	651.455.000,00	651.455.000,00			-	-	-		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				95 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	474.358.000,00	474.358.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																	
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				95 laporan	12 laporan	200.000.000,00	177.097.000,00	177.097.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	-	250.000.000,00	155.384.000,00	155.384.000,00			-	-	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				95 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	155.384.000,00	155.384.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	-	200.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				95 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

3	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	130.000.000,00	1.674.435.150,00	1.674.435.150,00							4.130.000.000,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	90.000.000,00	1.487.295.150,00	1.487.295.150,00			-	-	-		4.090.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				98 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	1.457.295.350,00	1.457.295.350,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				98 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	29.999.800,00	29.999.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				-	-	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			4.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	-	10.000.000,00	56.930.000,00	56.930.000,00			-	-	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																	
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				98 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	56.930.000,00	56.930.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	-	30.000.000,00	130.210.000,00	130.210.000,00			-	-	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				98 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	115.210.000,00	115.210.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				98 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
											JUMLAH		**7.868.839.671,43**	**11.710.315.699,00**	**11.958.573.459,00**							**13.733.963.450,00**	

5.3.6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah							2.215.511.962,00	3.016.969.351,00	2.374.395.367,00							3.786.455.354,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.215.511.962,00	3.016.969.351,00	2.374.395.367,00							3.786.455.354,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							2.215.511.962,00	3.016.969.351,00	2.374.395.367,00							3.786.455.354,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	1.805.511.962,00	2.496.969.351,00	2.322.395.367,00							2.464.455.354,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	11.500.000,00	8.476.600,00	8.476.600,00			-	-	-		22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	5.000.000,00	2.840.100,00	2.840.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	3.500.000,00	2.995.300,00	2.995.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.000.000,00	2.641.200,00	2.641.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.579.870.352,00	2.113.677.466,00	2.113.677.466,00			-	-	-		1.430.206.354,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				196.00 Orang/bulan	196.00 Orang/bulan	1.577.870.352,00	2.111.523.966,00	1.936.949.982,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT] Pendapatan Bagi Hasil	-	-			1.419.206.354,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4.00 Laporan	4.00 Laporan	2.000.000,00	2.153.500,00	2.153.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	-	-		19.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			19.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	60.000.000,00	62.390.900,00	62.390.900,00			-	-	-		215.121.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	10.000.000,00	10.062.700,00	10.062.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			60.921.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	3.000.000,00	3.070.700,00	3.070.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			6.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.00 Laporan	100.00 Laporan	47.000.000,00	49.257.500,00	49.257.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			148.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	20.000.000,00	19.139.000,00	19.139.000,00			-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4.00 Unit	4.00 Unit	20.000.000,00	19.139.000,00	19.139.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	87.641.610,00	245.445.385,00	245.445.385,00			-	-	-		468.268.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	45.641.610,00	52.245.385,00	52.245.385,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	-			255.868.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				300.00 Laporan	300.00 Laporan	42.000.000,00	193.200.000,00	193.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			212.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	45.000.000,00	46.340.000,00	46.340.000,00			-	-	-		109.660.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4.00 Unit	4.00 Unit	5.000.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.360.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6.00 Unit	6.00 Unit	35.000.000,00	36.770.000,00	36.770.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			84.620.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14.00 Unit	14.00 Unit	5.000.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			9.680.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	410.000.000,00	520.000.000,00	52.000.000,00							1.322.000.000,00	
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	-	250.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00			-	-	-		950.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				0.00 Kawasan	0.00 Kawasan	250.000.000,00	360.000.000,00	26.644.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah	-	-			950.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	-	-		186.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50.00 Orang	50.00 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	15.355.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah	-	-			186.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	-	-		186.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				60.00 Kegiatan	60.00 Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			186.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	JUMLAH												**2.215.511.962,00**	**3.016.969.351,00**	**2.374.395.367,00**							**3.786.455.354,00**	

5.3.7 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							4.191.647.020,00	5.434.278.122,00	5.318.323.306,00							4.923.566.804,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							660.000.000,00	345.000.000,00	345.000.000,00							280.000.000,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							660.000.000,00	345.000.000,00	345.000.000,00							280.000.000,00	
1	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-				-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00							70.000.000,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	-	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	100 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																	
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				3.00 Sertifikat	3.00 Sertifikat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	440.000.000,00	204.802.400,00	204.802.400,00								55.000.000,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	-	320.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00			-	-	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																	

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	1000 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang																	
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	80.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				2000.00 Orang	500 Orang	20.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																	

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				17000 Orang	17000 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			-	-	120.000.000,00	102.802.400,00	102.802.400,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		

							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				500.00 Orang	500.00 Orang	90.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	10.000.000,00	1.802.400,00	1.802.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-				-	-	64.000.000,00	9.197.600,00	9.197.600,00								97.500.000,00	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-			-	-	10.000.000,00	4.197.600,00	4.197.600,00			-	-	-			7.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																		
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	4.197.600,00	4.197.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	54.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	-	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				68700 Orang	5000 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				41260 Keluarga	4126 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																	
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Keluarga	30 Keluarga	21.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																	

							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-				-	-	150.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00							17.500.000,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	-	130.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-		12.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				3000 Orang	3000 Orang	130.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-			12.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	-	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	-	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																	

							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-				-	-	3.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00							40.000.000,00	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	-	3.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00			-	-	-		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				4 Makam	4 Makam	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.531.647.020,00	5.089.278.122,00	4.973.323.306,00							4.643.566.804,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							3.531.647.020,00	5.089.278.122,00	4.973.323.306,00							4.643.566.804,00	

6	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.411.647.020,00	4.311.078.122,00	4.225.123.306,00							4.518.566.804,00	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			-	-	-		32.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			12.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.213.657.500,00	4.010.580.922,00	4.010.580.922,00			-	-	-		3.978.284.404,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47.00 Orang/bulan	47.00 Orang/bulan	3.201.657.500,00	4.000.580.922,00	3.914.630.506,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan	-	-			3.953.284.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

																	Bagi Hasil						
	2	1 3	0 1	2.0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokume n	1 Dokume n	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 2	00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokume n	1 Dokume n	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA

	2	13	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			4,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	

							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	15.000.000,00	14.993.900,00	14.993.900,00			-	-	-		225.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	5.000.000,00	4.993.900,00	4.993.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	85.300.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			220.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2	1 3	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-		7.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 7	00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			7.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	151.989.520,00	165.497.200,00	165.497.200,00			-	-	-		175.682.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	147.989.520,00	105.097.200,00	105.097.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			142.982.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	60.400.000,00	60.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			32.700.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2	1 3	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	22.000.000,0 0	12.006.100,0 0	12.006.100,0 0			-	-	-		90.000.000,0 0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	17.000.000,0 0	10.010.600,0 0	34.706.200,0 0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			40.000.000,0 0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	1.995.500,00	1.995.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,0 0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 9	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			25.000.000,0 0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7	2	1 3	0 2			PROGRAM PENATAAN DESA	-				-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							5.000.000,00	
	2	1 3	0 2	2.0 1		Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	-	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																
							Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1 Desa	1 Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00							35.000.000,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	-	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			-	-	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				87 Dokumen	87 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				87 Dokumen	87 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																

							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				87 Orang	87 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				87 Dokumen	87 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-				-	-	110.000.000,00	768.200.000,00	738.200.000,00							85.000.000,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	-	-			-	-	110.000.000,00	768.200.000,00	768.200.000,00			-	-	-		85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

						yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																
	2	1 3	0 5	2.0 1	00 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				7 Dokumen	7 Dokumen	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 5	2.0 1	00 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga	6 Lembaga	3.000.000,00	558.200.000,00	558.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				86 Dokumen	86 Dokumen	103.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				86 Laporan	86 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
												JUMLAH	**4.191.647.020,00**	**5.434.278.122,00**	**5.318.323.306,00**							**4.923.566.804,00**	

5.3.8 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi							5.773.687.744,75	8.006.554.745,00	7.841.539.913,00							9.990.065.500,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.758.687.744,75	7.991.554.745,00	7.826.539.913,00							9.970.065.500,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00							27.500.000,00	
1	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00							7.500.000,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			-	-	-		7.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																	
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16.00 Orang	16.00 Orang	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00							20.000.000,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja																	
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				3000.00 Orang	3000.00 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							5.736.187.744,75	7.969.054.745,00	7.804.039.913,00							9.942.565.500,00	
3	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.398.687.744,75	7.273.465.345,00	7.108.450.513,00							9.572.565.500,00	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	23.754.400,00	42.468.400,00	42.468.400,00			-	-	-		68.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.121.400,00	11.505.400,00	11.505.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.091.000,00	5.791.000,00	4.787.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.005.800,00	5.705.800,00	5.201.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.002.000,00	4.532.000,00	3.869.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.276.900,00	4.176.900,00	3.158.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			9.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.249.300,00	5.049.300,00	5.049.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.008.000,00	5.708.000,00	5.708.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.187.699.954,75	6.987.997.200,00	6.987.997.200,00			-	-	-		9.040.699.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79.00 Orang/bulan	79.00 Orang/bulan	5.163.226.854,75	6.958.278.100,00	6.793.263.268,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			8.970.699.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	16.393.000,00	21.159.000,00	21.159.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.020.300,00	5.500.300,00	5.500.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.059.800,00	3.059.800,00	1.019.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.000.020,00	6.965.520,00	6.965.520,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.020,00	6.965.520,00	6.965.520,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.772.480,00	54.870.080,00	54.870.080,00			-	-	-		115.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	5.992.480,00	23.330.080,00	19.882.080,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110.00 Laporan	110.00 Laporan	1.780.000,00	31.540.000,00	31.540.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	160.460.890,00	163.219.895,00	163.219.895,00			-	-	-		218.866.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	118.460.890,00	112.819.895,00	112.819.895,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			164.866.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	4 Laporan	42.000.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			54.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	16.000.000,00	17.944.250,00	17.944.250,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	5 Unit	11.940.000,00	11.734.250,00	20.410.950,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44.00 Unit	6 Unit	4.060.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-				-	-	15.000.000,00	56.532.400,00	56.532.400,00							20.000.000,00	

	2	1 7	0 3	2.0 1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	15.000.000,00	56.532.400,00	56.532.400,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	1 7	0 3	2.0 1	000 4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				65.00 Unit Usaha	65.00 Unit Usaha	15.000.000,00	56.532.400,00	56.532.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Retribusi Daerah	-	-			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5	2	1 7	0 7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-				-	-	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00							200.000.000,00	
	2	1 7	0 7	2.0 1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	-	-			-	-	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

						dengan Para Pemangku Kepentingan																
	2	1 7	0 7	2.0 1	000 2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				15.00 Unit Usaha	15.00 Unit Usaha	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	1 7	0 7	2.0 1	000 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				80.00 Unit Usaha	80.00 Unit Usaha	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6	2	1 7	0 8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-				-	-	300.000.000,00	616.557.000,00	616.557.000,00							150.000.000,00	
	2	1 7	0 8	2.0 1		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	-	300.000.000,00	616.557.000,00	616.557.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIG

																						RASI
	2	1 7	0 8	2.0 1	000 2	Pengembangan Usaha Mikro																
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				50.00 Unit Usaha	50.00 Unit Usaha	180.000.000,0 0	215.378.600,0 0	213.278.800,0 0	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGA H, TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
	2	1 7	0 8	2.0 1	000 3	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																
							Jumlah yang Difasilitasi				50.00 Orang	50.00 Orang	60.000.000,00	190.000.000,0 0	190.000.000,0 0	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Retribus i Daerah - LRA Retribus i Daerah	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGA H, TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
	2	1 7	0 8	2.0 1	000 6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				50.00 Unit Usaha	50.00 Unit Usaha	60.000.000,00	211.178.400,0 0	213.278.200,0 0	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGA H, TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00							20.000.000,00	
	3	3 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00							20.000.000,00	

7	3	3 2	0 4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00							20.000.000,00	
	3	3 2	0 4	2.0 1		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-			-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3 2	0 4	2.0 1	000 2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																	
							Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1.00 Satuan Permukiman	1.00 Satuan Permukiman	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
												JUMLAH	**5.773.687.744,75**	**8.006.554.745,00**	**7.841.539.913,00**							**9.990.065.500,00**	

5.3.9 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							7.459.040.964,00	10.906.281.152,00	11.444.614.668,00							60.749.991.800,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.459.040.964,00	10.906.281.152,00	11.444.614.668,00							60.749.991.800,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							3.979.178.164,00	4.950.300.252,00	4.862.233.568,00							5.280.750.800,00	
1	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.969.178.164,00	4.534.300.352,00	4.446.233.768,00							5.039.839.800,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	20.000.000,00	25.001.100,00	25.001.100,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	10.000.000,00	12.480.900,00	12.480.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	9.999.800,00	9.999.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	2.520.400,00	2.520.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.266.621.644,00	4.194.136.552,00	4.194.136.552,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		4.809.839.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				532 Orang/bulan	532 Orang/bulan	3.256.671.844,00	4.178.754.552,00	4.090.688.168,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	1. Pembangunan Manusia			4.809.839.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	1 Laporan	5.004.800,00	6.810.000,00	6.810.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	1 Laporan	4.945.000,00	8.572.000,00	8.572.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	20.000.000,00	26.448.000,00	26.448.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	20.000.000,00	26.448.000,00	34.198.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	1. Pembangunan Manusia			35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	662.556.520,00	288.714.700,00	288.714.700,00			-	-	-		175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.206.120,00	150.024.700,00	148.685.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	541.350.400,00	8.530.000,00	6.700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	1. Pembangunan Manusia			3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				252 Laporan	3 Laporan	42.000.000,00	130.160.000,00	125.578.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	1. Pembangunan Manusia			92.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-				-	-	10.000.000,00	9.999.900,00	9.999.900,00							0,00	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	10.000.000,00	9.999.900,00	9.999.900,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

																						PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 2	2.0 1	00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																
							Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	9.999.900,00	9.999.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	2	0 8	0 3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-				-	-	0,00	406.000.000,00	163.603.900,00							0,00	
	2	0 8	0 3	2.0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 3	2.0 1	00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	4 Dokumen	0,00	70.000.000,00	37.250.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	212.000.000,00	212.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	124.000.000,00	124.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
4	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS	-				-	-	0,00	0,00	242.396.000,00							240.911.000,00	

						ANAK															
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		64.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		125.895.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		50.766.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.479.862.800,00	5.955.980.900,00	6.582.381.100,00								55.469.241.000,00	
5	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				-	-	412.200.000,00	138.012.600,00	94.800.000,00								0,00	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	-	200.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
							Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Kegiatan	12 Kegiatan	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	212.200.000,00	138.012.600,00	138.012.600,00			-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																	
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	64.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																	
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	0 Laporan	0,00	55.200.000,00	60.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				10 Laporan	10 Laporan	88.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																	
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	82.812.600,00	34.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-				-	-	886.062.800,00	4.056.368.300,00	4.057.086.200,00							54.530.000.000,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	-	80.000.000,00	1.078.292.600,00	1.078.292.600,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				5 Laporan	5 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	1 Laporan	0,00	495.990.000,00	545.442.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		

	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	-	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																	
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	527.062.800,00	501.336.000,00	501.336.000,00			-	-	-		54.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	29.700.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			54.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	2000 Orang	0,00	453.136.000,00	453.136.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				720 Orang	720 Orang	469.063.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				10 Laporan	10 Laporan	18.300.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		

							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	9.999.800,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	-	279.000.000,00	2.116.739.700,00	2.116.739.700,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																	
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				-	1 Dokumen	0,00	42.494.700,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																	

	2	1 4	0 3	2.0 4	00 06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				18 Kampung	18 Kampung	279.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	2	1 4	0 4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-				-	-	2.181.600.000,00	1.761.600.000,00	2.430.494.900,00							939.241.000,00	
	2	1 4	0 4	2.0 1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	-	2.181.600.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		939.241.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 4	2.0 1	00 18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	

							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	0 Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				42 Unit	42 Unit	720.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				696 Orang	696 Orang	1.461.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			939.241.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	1 4	0 4	2.0 2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	-	0,00	1.461.600.000 ,00	1.461.600.000 ,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 4	2.0 2	00 05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	0 laporan	0,00	696.000.000,0 0	696.000.000,0 0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	1. Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 4	0 4	2.0 2	00 06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
												JUMLAH	**7.459.040.964,00**	**10.906.281.152,00**	**11.444.614.668,00**							**60.749.991.800,00**	

5.3.10 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan							12.077.746.714,80	28.322.792.646,00	27.723.102.374,00							31.567.605.492,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							432.500.100,00	87.497.500,00	87.497.500,00							658.160.000,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							432.500.100,00	87.497.500,00	87.497.500,00							658.160.000,00	
1	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-				-	-	232.499.700,00	87.497.500,00	87.497.500,00							558.160.000,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	-	9.999.200,00	9.997.100,00	9.997.100,00			-	-	-		127.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																	
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	1 Laporan	4.999.300,00	4.998.500,00	4.998.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			57.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																	
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				13 Laporan	13 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																	
							Informasi Harga dan Pasokan Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.999.900,00	4.998.600,00	4.998.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			40.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																	
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHAN

																						AN PANGAN
	2	0 9	0 3	2. 02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.500.500,00	52.500.400,00	52.500.400,00			-	-	-		160.760.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	0 9	0 3	2. 02	00 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				11.48 Ton	0,13 Ton	2.500.500,00	52.500.400,00	52.500.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			160.760.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	0 9	0 3	2. 04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	-	220.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	-	-		270.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	0 9	0 3	2. 04	00 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	

							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				5 Laporan	5 Laporan	220.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Daerah	-	-			270.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-				-	-	200.000.400,00	0,00	0,00							100.000.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	-	36.280.400,00	0,00	0,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																	
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	36.280.400,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	163.720.000,00	0,00	0,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN

																						PANGAN
	2	0 9	0 4	2. 02	00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				12 Laporan	12 Laporan	163.720.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							11.645.246.614,80	28.235.295.146,00	27.635.604.874,00							30.909.445.492,00	
	3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							11.645.246.614,80	28.235.295.146,00	27.635.604.874,00							30.909.445.492,00	
3	3	2 7	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	9.650.089.694,80	12.336.101.246,00	12.078.857.074,00							19.526.305.492,00	
	3	2 7	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	12.000.710,00	71.615.400,00	71.615.400,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		161.900.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	2 7	0 1	2. 01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.160,00	3.400.100,00	6.500.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			94.200.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.200,00	3.006.600,00	6.106.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			12.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.150,00	1.499.900,00	1.499.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			9.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.120,00	1.511.000,00	1.511.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.700.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.040,00	2.129.800,00	2.129.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			9.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.040,00	2.634.000,00	2.634.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			11.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	57.434.000,00	57.434.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-			15.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.388.057.370,80	11.958.002.015,00	11.958.002.015,00			-	-	-		17.546.668.300,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				109 Orang/bulan	109 Orang/bulan	9.376.055.590,80	11.945.608.215,00	11.670.917.943,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-			17.466.668.300,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1500 Dokumen	1000 Dokumen	2.500.040,00	2.408.400,00	2.408.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			40.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				24 Dokumen	12 Dokumen	1.999.840,00	1.887.900,00	4.987.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.800,00	2.642.800,00	2.642.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.001.200,00	2.059.100,00	2.059.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	2.999.900,00	3.395.600,00	4.687.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			12.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.500.660,00	5.498.400,00	5.498.400,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.360,00	2.000.100,00	2.000.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.499.800,00	1.499.800,00	1.499.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			9.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.500,00	1.998.500,00	1.998.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-		271.340.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				109 Paket	109 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			71.340.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	29.889.500,00	27.075.800,00	27.075.800,00			-	-	-		595.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	1.007.500,00	998.800,00	998.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	1.440.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				48 Laporan	1 Laporan	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			45.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	2 Laporan	24.967.000,00	22.252.000,00	59.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	212.691.454,00	272.009.631,00	272.009.631,00			-	-	-			631.797.192,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.140,00	1.252.200,00	1.252.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	161.291.314,00	178.155.331,00	147.597.331,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			354.797.192,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	50.400.000,00	92.602.100,00	92.602.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			270.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.950.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00			-	-	-		299.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				78 Unit	1 Unit	1.950.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			299.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
4	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	409.999.880,00	1.016.623.700,00	1.019.723.700,00							1.975.640.000,00	

	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	-	400.000.000,00	761.624.000,00	761.624.000,00			-	-	-		1.523.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																	
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	761.624.000,00	761.624.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Daerah	-	-			1.523.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	9.999.880,00	254.999.700,00	254.999.700,00			-	-	-		452.640.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																	
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.880,00	4.999.700,00	8.099.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			252.640.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
5	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	1.454.999.780,00	14.357.660.800,00	14.009.668.700,00							8.539.000.000,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	304.999.780,00	374.116.800,00	374.116.800,00			-	-	-		439.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																

							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				24 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	369.117.000,00	369.117.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-			399.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				10 Dokumen	1 Dokumen	4.999.780,00	4.999.800,00	4.999.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			40.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
							Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	1.150.000.000,00	13.983.544.000,00	13.983.544.000,00			-	-	-		8.100.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																	
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				30 Unit	63 Unit	1.000.000.000,00	9.665.000.000,00	9.640.907.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-			4.150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																	
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				-	4 Unit	0,00	0,00	480.000.000,00	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			600.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				29 Unit	42 Unit	150.000.000,00	3.770.376.000,00	2.966.476.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			2.050.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
6	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	5.157.460,00	5.000.000,00	5.000.000,00							61.000.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	-	5.157.460,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	-	-		61.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				70 Ha	2 Ha	5.157.460,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			61.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

7	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	124.999.800,00	519.909.400,00	522.355.400,00						807.500.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	-	124.999.800,00	519.909.400,00	519.909.400,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		807.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	9 Unit	115.000.000,00	152.760.000,00	155.206.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			305.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	2 Unit	4.999.880,00	4.999.600,00	4.999.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			52.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				-	5 Unit	0,00	257.150.000,00	257.150.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																	
	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani																	
							Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				10 Unit	2 Unit	4.999.920,00	4.999.800,00	4.999.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	JUMLAH												**12.077.746.714,80**	**28.322.792.646,00**	**27.723.102.374,00**							**31.567.605.492,00**	

5.3.11 Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan							7.479.231.742,00	13.194.925.147,00	13.074.173.755,00							28.560.198.800,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.479.231.742,00	13.194.925.147,00	13.074.173.755,00							28.560.198.800,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							10.000.000,00	2.500.999.900,00	2.500.999.900,00							15.025.000.000,00	
1	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-				-	-	4.000.000,00	999.900,00	999.900,00							25.000.000,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	4.000.000,00	999.900,00	999.900,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	10	04	2.01	0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.000.000,00	999.900,00	999.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

2	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-				-	-	6.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00							15.000.000.000,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	6.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00			-	-	-		15.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	10	05	2.01	00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	6.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			15.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							7.469.231.742,00	10.693.925.247,00	10.573.173.855,00							13.535.198.800,00	
3	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.176.811.742,00	8.866.545.547,00	8.745.794.155,00							6.544.198.800,00	

	2	1 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	66.500.000,0 0	12.699.200,00	12.699.200,00			-	-	-		205.000.000,0 0	DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
	2	1 1	0 1	2.0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokume n	2.00 Dokume n	2.000.000,00	5.336.200,00	5.336.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			40.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
	2	1 1	0 1	2.0 1	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4.00 Dokume n	4.00 Dokume n	2.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
	2	1 1	0 1	2.0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.00 Laporan	4.00 Laporan	1.500.000,00	3.013.000,00	3.013.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			55.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
	2	1 1	0 1	2.0 1	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	61.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.864.712.672,00	5.126.850.187,00	5.126.850.187,00			-	-	-		5.282.698.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55.00 Orang/bulan	55.00 Orang/bulan	3.858.212.672,00	5.109.986.487,00	4.989.235.095,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			5.237.698.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	1.000.000,00	1.017.800,00	1.017.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

	2	1 1	0 1	2.0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	1.000.000,00	5.252.800,00	5.252.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2.0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.000.000,00	6.613.100,00	6.613.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2.0 2	00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.500.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2.0 2	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6.00 Laporan	6.00 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

	2	1 1	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.507.000,00	25.060.900,00	25.060.900,00			-	-	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2.0 3	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	757.000,00	23.324.100,00	23.324.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2.0 3	00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	750.000,00	1.736.800,00	1.736.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	500.000,00	29.315.500,00	29.315.500,00			-	-	-		500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2.0 4	00 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	500.000,00	29.315.500,00	29.315.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

	2	1 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	51.000.000,0 0	4.530.500,00	4.530.500,00			-	-	-		61.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
	2	1 1	0 1	2.0 5	00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4.00 Dokume n	4.00 Dokume n	500.000,00	2.004.900,00	2.004.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
	2	1 1	0 1	2.0 5	00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4.00 Dokume n	4.00 Dokume n	500.000,00	995.600,00	995.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
	2	1 1	0 1	2.0 5	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				55 Orang	55 Orang	50.000.000,0 0	1.530.000,00	1.530.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			46.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
	2	1 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	21.097.000,0 0	52.986.300,00	52.986.300,00			-	-	-		270.000.000,0 0	DINAS LINGKUN GAN HIDUP DAN PERTANA HAN
	2	1 1	0 1	2.0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	11.597.000,00	36.976.300,00	36.976.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	8.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.00 Laporan	4.00 Laporan	1.500.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	161.819.070,00	3.573.716.960,00	3.573.716.960,00			-	-	-		230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.600.000,00	232.000,00	232.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

	2	1 1	0 1	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	119.819.070,00	127.224.000,00	127.224.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	29.400.000,00	3.446.260.960,00	3.446.260.960,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	9.676.000,00	41.386.000,00	41.386.000,00			-	-	-		490.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2.0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1.00 Unit	7.726.000,00	7.726.000,00	7.726.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah	-	-			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 1	2.0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9.00 Unit	9.00 Unit	1.950.000,00	33.660.000,00	33.660.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Retribusi Daerah	-	-			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

																a						
4	2	1 1	0 2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	1.561.000,00	20.624.000,00	20.624.000,00							150.000.000,00	
	2	1 1	0 2	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.561.000,00	20.624.000,00	20.624.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 2	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																	
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.561.000,00	20.624.000,00	20.624.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
5	2	1 1	0 3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	5.900.000,00	75.908.000,00	75.908.000,00							1.331.240.000,00	
	2	1 1	0 3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	-	5.900.000,00	75.908.000,00	75.908.000,00			-	-	-		1.331.240.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

	2	1 1	0 3	2.0 1	00 15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	5.900.000,00	75.908.000,00	75.908.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-			1.331.240.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
6	2	1 1	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-				-	-	873.760.000,00	118.987.400,00	118.987.400,00							873.760.000,00	
	2	1 1	0 4	2.0 1		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	-	873.760.000,00	118.987.400,00	118.987.400,00			-	-	-		873.760.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 4	2.0 1	00 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				12.00 Ha	12.00 Ha	873.760.000,00	118.987.400,00	118.987.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah	-	-			873.760.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
7	2	1 1	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-				-	-	999.000,00	999.000,00	999.000,00							280.000.000,00	

	2	1 1	0 5	2.0 2		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	999.000,00	999.000,00	999.000,00			-	-	-		280.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 5	2.0 2	00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	999.000,00	999.000,00	999.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			280.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
8	2	1 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	-				-	-	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00							6.000.000,00	

						LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																	
	2	1 1	0 6	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00			-	-	-		6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 6	2.0 1	00 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																	
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	0 6	2.0 1	00 05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				3.00 Badan Usaha	3.00 Badan Usaha	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

9	2	1 1	1 1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	2.408.160.000,00	1.608.821.300,00	1.608.821.300,00							4.350.000.000,00	
	2	1 1	1 1	2.01		Pengelolaan Sampah	-	-			-	-	2.408.160.000,00	1.608.821.300,00	1.608.821.300,00			-	-	-		4.350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	1 1	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																	
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				5000.00 Ton	5000.00 Ton	2.072.820.000,00	1.291.061.100,00	1.291.061.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			3.900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	1 1	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																	
							Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				0 Ton	0 Ton	100.000.000,00	655.800,00	655.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2	1 1	1 1	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																	
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				5000.00 Ton	5000.00 Ton	235.340.000,00	317.104.400,00	317.104.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah	-	-			450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
										JUMLAH			**7.479.231.742,00**	**13.194.925.147,00**	**13.074.173.755,00**							**28.560.198.800,00**	

5.3.12 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							3.958.869.664,00	4.737.975.128,00	4.654.226.504,00							5.956.992.400,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.958.869.664,00	4.737.975.128,00	4.654.226.504,00							5.956.992.400,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							3.958.869.664,00	4.737.975.128,00	4.654.226.504,00							5.956.992.400,00	
1	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.963.869.664,00	3.854.541.128,00	3.770.792.504,00							4.756.992.400,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	27.000.000,00	33.230.000,00	33.230.000,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	13.230.000,00	13.230.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.423.155.946,00	3.257.915.440,00	3.257.915.440,00			-	-	-		3.857.026.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				910 Orang/bulan	910 Orang/bulan	2.411.155.946,00	3.247.915.440,00	3.164.166.816,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.603.426.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			243.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.912.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.912.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	421.484.481,00	170.046.000,00	170.046.000,00			-	-	-		425.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	196.484.481,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7.00 Paket	7.00 Paket	60.000.000,00	32.331.300,00	32.331.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	Pajak Daerah	-	-			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

																Kel/Desa						
	2	1 2	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	135.000.000,0 0	100.012.700,0 0	100.012.700,0 0	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			150.000.000,0 0	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATA N SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATA N SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	33.202.000,00	33.202.000,00	Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATA N SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	64.317.237,00	331.859.688,0 0	331.859.688,0 0			-	-	-		219.966.200,0 0	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATA N SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	12 Laporan	44.317.237,00	91.459.688,00	91.459.688,00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			129.366.200,0 0	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATA N SIPIL

							yang Disediakan															
	2	1 2	0 1	2.0 8	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	236.400.000,00	236.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			75.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	10.000.000,00	46.590.000,00	46.590.000,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	3 Unit	10.000.000,00	46.590.000,00	46.590.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2	2	1 2	0 2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-				-	-	725.000.000,00	726.434.000,00	726.434.000,00						760.000.000,00	
	2	1 2	0 2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	-	660.000.000,00	659.834.000,00	659.834.000,00			-	-	-	670.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 2	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				9 Dokumen	9 Dokumen	650.000.000,00	639.834.000,00	639.834.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 2	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				3.00 Laporan	3.00 Laporan	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	-	45.000.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00			-	-	-	70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 2	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	45.000.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

							yang Tersedia															
	2	1 2	0 2	2.0 3		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	-	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 2	2.0 3	000 1	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2	1 2	0 3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	70.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00							140.000.000,00	
	2	1 2	0 3	2.0 1		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	-	60.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 3	2.0 1	000 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				13 Dokumen	13 Dokumen	40.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	3 Layanan	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-				-	-	180.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00							265.000.000,00	

	2	1 2	0 4	2.0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	-	-		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 1	000 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 1	000 2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	-	85.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00			-	-	-		115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 3	000 1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi				8.00 Laporan	8.00 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

							Administrasi Kependudukan															
	2	1 2	0 4	2.0 3	000 5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	75.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah	-	-			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 4		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	-	70.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 4	000 3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																
							Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	2	1 2	0 5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-				-	-	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00							35.000.000,00	

	2	1 2	0 5	2.0 1		Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	-	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	-	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 5	2.0 1	000 1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
												JUMLAH	**3.958.869.664,00**	**4.737.975.128,00**	**4.654.226.504,00**							**5.956.992.400,00**	

5.3.13 Dinas Perhubungan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Perhubungan							4.119.312.297,60	5.389.699.102,00	6.007.574.576,00							3.891.140.322,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.119.312.297,60	5.389.699.102,00	6.007.574.576,00							3.891.140.322,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							4.119.312.297,60	5.389.699.102,00	6.007.574.576,00							3.891.140.322,00	
1	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.489.955.717,60	4.576.754.602,00	4.540.308.202,00							3.361.783.742,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.300.600,00	7.021.200,00	7.021.200,00			-	-	-		5.300.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.177.800,00	1.145.200,00	1.145.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.177.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	1.085.000,00	4.124.000,00	4.124.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.085.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	1.010.100,00	1.509.500,00	1.509.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.010.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.027.700,00	242.500,00	242.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.027.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.385.776.677,60	4.276.706.802,00	4.276.706.802,00			-	-	-		3.157.604.302,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45.00 Orang/bulan	45.00 Orang/bulan	3.382.995.477,60	4.270.067.102,00	4.168.593.702,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			3.154.823.102,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.627.200,00	1.741.500,00	1.741.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.627.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	1.154.000,00	4.898.200,00	4.898.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.154.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2	1 5	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.630.000,00	0,00	0,00			-	-	-		4.630.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1.00 Orang	1.00 Orang	4.630.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.630.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.819.740,00	79.814.600,00	79.814.600,00			-	-	-		63.819.740,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	126.200,00	994.500,00	994.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			126.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				22.00 Paket	22.00 Paket	75.120,00	4.482.000,00	4.482.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.075.120,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7000.00 Paket	7000.00 Paket	2.260.420,00	1.485.100,00	1.485.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	Pajak Daerah	-	-			2.260.420,00	DINAS PERHUBUNGAN

																Kel/Desa						
	2	1 5	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				59.00 Laporan	59.00 Laporan	1.358.000,00	72.853.000,00	101.110.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			51.358.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	252.400,00	0,00	0,00			-	-	-		252.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2.0 7	000 5	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	126.200,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			126.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2.0 7	000 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	126.200,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			126.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-	-			-	-	86.316.300,00	169.632.000,00	169.632.000,00			-	-	-		86.316.300,00	DINAS PERHUBUNGAN

						Daerah																
	2	1 5	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44.316.300,00	43.632.000,00	43.632.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			44.316.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	42.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.860.000,00	43.580.000,00	43.580.000,00			-	-	-		43.860.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	3.860.000,00	43.580.000,00	80.350.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			43.860.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	2	1 5	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	-				-	-	622.236.580,00	812.944.500,00	1.467.266.374,00							522.236.580,00	

						JALAN (LLAJ)																	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-			-	-	554.400,00	703.000,00	703.000,00			-	-	-		554.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	252.400,00	351.500,00	351.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			252.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	302.000,00	351.500,00	351.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			302.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	578.004.280,00	615.000.000,00	615.000.000,00			-	-	-		478.004.280,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.222.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			222.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2	1 5	0 2	2.0 2	000 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1.00 Unit	1.00 Unit	2.205.200,00	15.000.000,0 0	734.350.282, 00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.205.200,00	DINAS PERHUBUN GAN
	2	1 5	0 2	2.0 2	000 3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																	
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	126.200,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			126.200,00	DINAS PERHUBUN GAN
	2	1 5	0 2	2.0 2	000 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	475.450.880, 00	600.000.000, 00	509.971.592, 00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah Retribus i Daerah	-	-			475.450.880, 00	DINAS PERHUBUN GAN
	2	1 5	0 2	2.0 4		Penerbitan Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-			-	-	12.600.000,0 0	9.259.000,00	9.259.000,00			-	-	-		12.600.000,0 0	DINAS PERHUBUN GAN
	2	1 5	0 2	2.0 4	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				20.00 Laporan	20.00 Laporan	12.600.000,00	9.259.000,00	9.259.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			12.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	-	14.029.700,00	172.943.000,00	172.943.000,00			-	-	-		14.029.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1.00 Unit	1.00 Unit	824.400,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			824.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1.00 Orang	1.00 Orang	42.400,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			42.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100.00 Dokumen	100.00 Dokumen	51.800,00	25.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			51.800,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2	1 5	0 2	2.0 5	000 5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
							Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5.00 Laporan	5.00 Laporan	61.100,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			61.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2.0 5	000 7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				12 Unit	12 Unit	4.350.000,00	11.027.000,00	11.027.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.350.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2.0 5	000 8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																
							Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5.00 Laporan	5.00 Laporan	8.700.000,00	36.916.000,00	36.916.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			8.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2.0 6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	15.330.400,00	11.984.500,00	11.984.500,00			-	-	-		15.330.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2.0 6	000 4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				60.00 Laporan	60.00 Laporan	14.998.800,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Pajak Daerah	-	-			14.998.800,00	DINAS PERHUBUNGAN

																a						
	2	1 5	0 2	2.0 6	001 5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				20.00 Laporan	20.00 Laporan	331.600,00	1.984.500,00	1.984.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			331.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2.0 7		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.717.800,00	3.055.000,00	3.055.000,00			-	-	-		1.717.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2.0 7	000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				3.00 Laporan	3.00 Laporan	620.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2.0 7	000 5	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin																
							Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				1.00 Orang	1.00 Orang	797.800,00	315.000,00	315.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			797.800,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2	1 5	0 2	2.0 7	000 6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																
							Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				14.00 Laporan	14.00 Laporan	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3	2	1 5	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-				-	-	7.120.000,00	0,00	0,00							7.120.000,00	
	2	1 5	0 3	2.1 3		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-			-	-	7.120.000,00	0,00	0,00			-	-	-		7.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 3	2.1 3	000 2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																	
							Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1.00 Unit	1.00 Unit	7.120.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
												JUMLAH	**4.119.312.297,60**	**5.389.699.102,00**	**6.007.574.576,00**							**3.891.140.322,00**	

5.3.14 Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian							3.749.639.127,80	6.163.368.324,00	6.437.388.242,00							5.820.153.525,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.749.639.127,80	6.163.368.324,00	6.437.388.242,00							5.820.153.525,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							3.724.639.127,80	6.138.368.324,00	6.412.388.242,00							5.795.153.525,00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.742.239.127,80	3.595.579.124,00	3.490.830.524,00							3.962.753.525,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	24.000.000,00	27.620.000,00	27.620.000,00			-	-	-		24.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.542.311.459,00	3.400.740.295,00	3.400.740.295,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.866.153.525,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	2.530.311.459,00	3.388.740.295,00	3.283.991.695,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.854.153.525,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			-	-	-		6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	

							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00			-	-	-		14.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	36 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00			-	-	-		37.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			28.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	-	-		1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	87.927.668,80	81.838.829,00	81.838.829,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		984.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	44.927.668,80	47.238.829,00	47.238.829,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			950.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	42.000.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	30.000.000,00	26.380.000,00	26.380.000,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	26.380.000,00	26.380.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-				-	-	25.000.000,00	1.536.000.000,00	1.843.839.140,00							875.000.000,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	25.000.000,00	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00			-	-	-		875.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		

							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	13.500.000,00	321.339.140,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			7.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			7.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	1.510.000.000,00	1.510.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			860.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	957.400.000,00	1.006.789.200,00	1.077.718.578,00							957.400.000,00	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	957.400.000,00	1.006.789.200,00	1.006.789.200,00			-	-	-		957.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		

							Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																	
							Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																	
							Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	942.400.000,00	911.789.200,00	982.718.578,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			942.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																	

							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00							15.000.000,00	
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00							15.000.000,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																	
							Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDI

																						AN
	2	2 0	0 2	2.0 1	00 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral																
							Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokume n	1 Dokume n	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMAT IKA, STATISTIK DAN PERSANDI AN
	2	2 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							10.000.000,0 0	10.000.000,0 0	10.000.000,0 0							10.000.000,0 0	
5	2	2 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-				-	-	10.000.000,0 0	10.000.000,0 0	10.000.000,0 0							10.000.000,0 0	
	2	2 1	0 2	2.0 1		Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	-	-			-	-	10.000.000,0 0	10.000.000,0 0	10.000.000,0 0			-	-	-		10.000.000,0 0	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMAT IKA, STATISTIK DAN PERSANDI AN
	2	2 1	0 2	2.0 1	00 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																	

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
												JUMLAH	**3.749.639.127,80**	**6.163.368.324,00**	**6.437.388.242,00**							**5.820.153.525,00**	

5.3.15 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu							2.443.899.441,60	3.974.541.364,00	4.043.758.972,00							3.549.777.018,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.443.899.441,60	3.974.541.364,00	4.043.758.972,00							3.549.777.018,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							2.443.899.441,60	3.974.541.364,00	4.043.758.972,00							3.549.777.018,00	
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	2.330.839.441,60	3.186.230.364,00	3.255.447.972,00							2.976.977.018,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	21.000.000,00	25.743.700,00	25.743.700,00			-	-	-		72.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.500.000,00	5.427.800,00	5.427.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.500.000,00	3.815.900,00	3.815.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	2.500.000,00	3.000.000,00	4.575.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.00 Laporan	4.00 Laporan	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.135.286.081,60	2.742.788.664,00	2.742.788.664,00			-	-	-		2.564.797.506,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30.00 Orang/bulan	30.00 Orang/bulan	2.119.286.081,60	2.733.556.364,00	2.658.998.372,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	-	-			2.529.797.506,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	5.096.300,00	5.096.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	3.000.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	-	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	

							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	28.970.000,00	53.468.000,00	53.468.000,00			-	-	-		116.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60.00 Dokumen	60.00 Dokumen	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	22.970.000,00	51.968.000,00	88.486.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	106.053.360,00	133.200.000,00	133.200.000,00			-	-	-		120.679.512,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

																						TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	64.053.360,00	91.200.000,00	109.975.600,0 0	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	-			78.679.512,00	DINAS PENANA MAN MODAL PELAYAN AN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6.00 Laporan	6.00 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	58.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			42.000.000,00	DINAS PENANA MAN MODAL PELAYAN AN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	34.530.000,00	226.030.000,0 0	226.030.000,0 0			-	-	-		98.500.000,00	DINAS PENANA MAN MODAL PELAYAN AN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3.00 Unit	3.00 Unit	30.000.000,00	12.000.000,00	32.020.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4.00 Unit	4.00 Unit	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			13.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3.00 Unit	3.00 Unit	2.500.000,00	212.000.000,00	262.087.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT] Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2	1 8	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-				-	-	9.500.000,00	446.000,00	446.000,00							30.000.000,00	

	2	1 8	0 2	2.0 1		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	9.500.000,00	446.000,00	446.000,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 2	2.0 1	000 1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																	
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	196.000,00	196.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 2	2.0 1	000 3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.500.000,00	250.000,00	250.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2	1 8	0 3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				-	-	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00							30.000.000,00	
	2	1 8	0 3	2.0 1		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	1 8	0 3	2.0 1	000 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 3	2.0 1	000 3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	1 8	0 4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	60.000.000,00	174.960.000,00	174.960.000,00							75.000.000,00	
	2	1 8	0 4	2.0 1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	60.000.000,00	174.960.000,00	174.960.000,00			-	-	-		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 4	2.0 1	000 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																

							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	620.000,00	620.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	20.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				28.00 Pelaku Usaha	28.00 Pelaku Usaha	25.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		

							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				1.00 Kegiatan Usaha	1.00 Kegiatan Usaha	10.000.000,00	340.000,00	340.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	18.560.000,00	597.785.000,00	597.785.000,00								427.800.000,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	18.560.000,00	597.785.000,00	597.785.000,00			-	-	-			427.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				1.00 Kegiatan Usaha.	9 Kegiatan Usaha.	1.460.000,00	89.667.000,00	89.667.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			71.460.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		

							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				246.00 Pelaku Usaha	274.00 Pelaku Usaha	7.000.000,00	328.783.000,00	328.783.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			247.866.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 5	2.0 1	000 6	Pengawasan Penanaman Modal																		
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				1 Kegiatan Usaha	17 Kegiatan Usaha	10.100.000,00	179.335.000,00	179.335.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			108.474.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2	1 8	0 6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-				-	-	5.000.000,00	120.000,00	120.000,00							10.000.000,00	
	2	1 8	0 6	2.0 1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	-	-			-	-	5.000.000,00	120.000,00	120.000,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						Kabupaten/Kota																
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	120.000,00	120.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
												JUMLAH		**2.443.899.441,60**	**3.974.541.364,00**	**4.043.758.972,00**							**3.549.777.018,00**	

5.3.16 Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga							3.979.819.780,00	8.305.779.214,00	8.530.860.006,00							6.987.589.672,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.961.219.780,00	7.330.110.614,00	7.260.188.506,00							6.566.089.672,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							3.961.219.780,00	7.330.110.614,00	7.260.188.506,00							6.566.089.672,00	
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	3.944.219.780,00	5.480.064.974,00	5.355.142.866,00							6.212.089.672,00	
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.000.000,00	50.557.300,00	50.557.300,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		55.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	14 Dokumen	1.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	1	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	

		9	1	1	05																
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	557.300,00	557.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Takalar	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15 Laporan	2.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Takalar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10 Laporan	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Takalar	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	100 %	3.832.345.746,00	5.194.742.974,00	5.194.742.974,00			-	-	ASN/ Pegawai		5.672.297.200,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51.00 Orang/bulan	51.00 Orang/bulan	3.820.345.746,00	4.974.743.474,00	4.849.824.266,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-			5.557.297.200,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	15 Dokumen	2.000.000,00	24.999.600,00	24.999.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	20 Dokumen	1.000.000,00	20.000.100,00	20.000.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	8.999.900,00	8.999.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	30 Laporan	5.000.000,00	55.999.900,00	55.999.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	8 Dokumen	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah	-			-	100 %	1.427.295,00	2.587.700,00	2.587.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/ Pegawai		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	12 Dokumen	1.427.295,00	2.587.700,00	2.587.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	100 %	3.884.975,00	24.999.900,00	24.999.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/ Pegawai		24.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	10 Paket	486.900,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	45 Orang	1.398.075,00	4.999.900,00	4.999.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	-			1.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

																Umum Retribusi Daerah						
	2	1 9	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	100 %	9.416.700,00	94.493.900,0 0	94.493.900,0 0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/ Pegawai		335.135.000, 00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	1 9	0 1	2.0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	7 Paket	486.800,00	5.007.000,00	5.007.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	1 9	0 1	2.0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	1 Paket	1.859.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Daerah Retribusi Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	1 9	0 1	2.0 6	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	1.070.900,00	5.005.900,00	5.005.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			1.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	1 9	0 1	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.600.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	1 9	0 1	2.0 6	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	10 Laporan	4.000.000,00	20.005.000,00	20.005.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	1 9	0 1	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	59.031.000,00	59.031.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			298.535.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			-	50 %	1.500.000,00	969.400,00	969.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	ASN Lingkup DISPARPORA		4.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	1 Unit	500.000,00	154.000,00	154.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			3.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	1 Unit	1.000.000,00	815.400,00	815.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 %	82.645.064,00	78.189.400,00	78.189.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/ Pegawai		85.657.472,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	82.645.064,00	78.189.400,00	78.186.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			85.657.472,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 %	8.000.000,00	33.524.400,00	33.524.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/ Pegawai		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	11 Unit	6.000.000,00	20.910.000,00	20.910.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	15 Unit	1.000.000,00	10.070.000,00	10.070.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1 Unit	1.000.000,00	2.544.400,00	2.544.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				-	-	8.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00							119.000.000,00	

	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	-	7.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Pemuda Pemudi		117.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																	
							Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				40 Orang	35 Orang	3.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Takalar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																	
							Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				40 Orang	35 Orang	2.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

	2	19	02	2.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan																	
							Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				100 Orang	100 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	20 Dokumen	1.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			2.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100 %	1.000.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Organisasi Kepemudaan		2.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

	2	1 9	0 2	2.0 2	00 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				2 Dokume n	1 Dokume n	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			2.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	2	1 9	0 3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga				-	100 %	8.000.000,00	850.045.840,00	905.045.840,00							210.000.000,00	
	2	1 9	0 3	2.0 1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100 %	3.000.000,00	277.182.040,00	277.182.040,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Pemerintah Daerah dan Pelajar		190.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	1 9	0 3	2.0 1	00 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha																	

							Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				10 Unit	35 Unit	1.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				40 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			90.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				30 Unit	2 Unit	1.000.000,00	52.182.040,00	52.182.040,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	70 %	3.000.000,00	72.863.800,00	72.863.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Alet dan pelajar Altet		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

																		Saing					
	2	1 9	0 3	2.0 2	00 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokume n	12 Dokume n	2.000.000,00	30.000.000,0 0	85.000.000,0 0	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaa nnya Bidang Pendidikan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	4. Penuruna n Kesenjang an Sosial Ekonomi			10.000.000,0 0	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
	2	1 9	0 3	2.0 2	00 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																	
							Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				0 Orang	50 Orang	1.000.000,00	42.863.800,0 0	42.863.800,0 0	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaa nnya Bidang Pendidikan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	4. Penuruna n Kesenjang an Sosial Ekonomi			0,00	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA

	2	1 9	0 3	2.0 4		Pembinaan dan Pengembanga n Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-			-	70 %	2.000.000,00	500.000.000, 00	500.000.000, 00			Meningka tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	4. Penuruna n Kesenjang an Sosial Ekonomi	Organisas i Olahraga		10.000.000,0 0	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
	2	1 9	0 3	2.0 4	00 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				13 Organisa si	31 Organisa si	2.000.000,00	500.000.000, 00	500.000.000, 00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaa nnya Bidang Pendidikan	Meningka tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	4. Penuruna n Kesenjang an Sosial Ekonomi			10.000.000,0 0	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
4	2	1 9	0 4			PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS KEPRAMUKA AN	Persentase peningkatan kapasitas kepramukaan				-	100 %	1.000.000,00	499.999.800, 00	499.999.800, 00							25.000.000,0 0	
	2	1 9	0 4	2.0 1		Pembinaan dan Pengembanga n Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-			-	100 %	1.000.000,00	499.999.800, 00	499.999.800, 00			Meningka tkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	7. Penguatan Ketentram an dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Organisas i Kepramu kaan		25.000.000,0 0	DINAS PARIWIS ATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA
	2	1 9	0 4	2.0 1	00 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																

							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				10 Organisasi	1 Organisasi	1.000.000,00	499.999.800,00	499.999.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							18.600.000,00	975.668.600,00	1.270.671.500,00							421.500.000,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							18.600.000,00	975.668.600,00	1.270.671.500,00							421.500.000,00	
5	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama kunjungan wisata				-	2 hari	11.600.000,00	305.668.600,00	400.671.500,00							360.500.000,00	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-			-	90 %	2.000.000,00	0,00	0,00			-	-	Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri Pariwisata		15.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			11.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.500.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	5.600.000,00	205.999.000,00	205.999.000,00			-	-	-		330.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	5.999.000,00	5.999.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				40 Orang	100 Orang	2.000.000,00	200.000.000,00	200.002.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

																Umum Retribusi Daerah						
	3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	4.000.000,00	99.669.600,00	99.669.600,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				6 Lokasi	1 Lokasi	2.000.000,00	0,00	95.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	99.669.600,00	99.669.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	-			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

																Umum Retribusi Daerah						
	3	2 6	0 2	2.0 3	00 10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
6	3	2 6	0 3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	2.000.000,00	400.000.000,00	600.000.000,00							30.000.000,00	
	3	2 6	0 3	2.0 1		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	2 6	0 3	2.0 1	00 05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																	
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	2 6	0 3	2.0 1	00 06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	2 Kegiatan	1.000.000,00	400.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	Pajak Daerah Retribusi Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
7	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif				-	70 %	2.000.000,00	0,00	0,00							11.000.000,00	
	3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-			-	70 %	1.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Industri Pariwisata dan Pelaku Ekraf		10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-			-	100 %	1.000.000,00	0,00	0,00			-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pelaku Ekonomi Kreatif		1.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1.00 Dokumen	6 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja			1.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

8	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	3.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00							20.000.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	-	3.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00			-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	-		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																	
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				20 Orang	135 Orang	2.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				12 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	4. Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

	JUMLAH	3.979.819.780,00	8.305.779.214,00	8.530.860.006,00							6.987.589.672,00	

5.3.17 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan							2.582.947.184,00	5.376.721.083,00	5.296.314.891,00							6.986.484.339,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.582.947.184,00	5.376.721.083,00	5.296.314.891,00							6.986.484.339,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							2.564.947.184,00	5.358.721.083,00	5.278.314.891,00							6.944.484.339,00	
1	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	2.543.947.184,00	3.308.049.083,00	3.227.642.891,00							5.425.484.339,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	-	-		11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.399.893.824,00	3.130.159.883,00	3.130.159.883,00			-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah	-		4.503.484.339,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.376.893.824,00	3.107.159.883,00	3.026.753.691,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi	-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah			4.480.484.339,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

																	Hasil					
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	

							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		265.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

																Kel/Desa			Pelayanan Publik				
	2	2 3	0 1	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 3	0 1	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 3	0 1	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 3	0 1	2.06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	106.553.360,00	132.389.200,00	132.389.200,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		263.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64.053.360,00	84.889.200,00	84.889.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			135.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			126.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	2.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

																Kel/Desa			Pelayanan Publik				
2	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-				-	-	16.000.000,00	1.975.672.000,00	1.975.672.000,00							1.504.000.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	12.000.000,00	1.302.000.000,00	1.302.000.000,00			-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah	-		824.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																	
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				100 Layanan	100 Layanan	1.000.000,00	301.000.000,00	301.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	5.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 Eksemplar	5 Eksemplar	1.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																	
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	1.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				102 Orang	102 Orang	1.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																	

							Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				50 Eksemplar	50 Eksemplar	1.000.000,00	251.000.000,00	251.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	4.000.000,00	673.672.000,00	673.672.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		680.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																	
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				70 Lokus	70 Lokus	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Perpustakaan	0,00	542.672.000,00	542.672.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah			600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				8 Orang	8 Orang	1.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																	
							Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				11 Orang	11 Orang	1.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-				-	-	5.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00								15.000.000,00	

	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																	
							Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				10 Eksemplar	10 Eksemplar	2.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	3.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																	
							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				10 Eksemplar	10 Eksemplar	2.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																	

							Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				10 Eksemplar	10 Eksemplar	1.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00							42.000.000,00	
4	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-				-	-	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00							12.000.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																	
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				2 Berkas	2 Berkas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																	
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2 Berkas	2 Berkas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerint	-		4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

																		ahan dan Pelayanan Publik				
	2	2 4	0 2	2.0 2	00 01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI																
							Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				2 Arsip	2 Arsip	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 2	2.0 2	00 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				2 Arsip	2 Arsip	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 2	2.0 3		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 2	2.0 3	00 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	1 Pengguna	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 2	2.0 3	00 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																

							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				7 Laporan	7 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-				-	-	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00							26.000.000,00	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-			-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1 Arsip	1 Arsip	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				1 Berkas	1 Berkas	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

																a			Publik			
	2	2 4	0 3	2.0 2		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 3	2.0 2	00 01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				2 Arsip	2 Arsip	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 3	2.0 2	00 02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				2 Arsip	2 Arsip	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 3	2.0 3		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan	-	-			-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

						dan Desa/Kelurahan																
	2	2 4	0 3	2.0 3	00 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	1 Daftar	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 3	2.0 3	00 02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Arsip	1 Arsip	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 3	2.0 3	00 03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan																
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan				10 Arsip	10 Arsip	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	2 4	0 3	2.0 3	00 04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan																	
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				8 Arsip	8 Arsip	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 3	2.0 4		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-			-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 3	2.0 4	00 01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																	
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				1 Arsip	1 Arsip	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 3	2.0 4	00 02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																	
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1 Arsip	1 Arsip	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 3	2.0 5		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	-	-			-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

																		Publik				
	2	2 4	0 3	2.0 5	00 01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang																
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan				1 Arsip	1 Arsip	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 3	2.0 5	00 02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang																
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang				1 Arsip	1 Arsip	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 3	2.0 5	00 03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																
							Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				4 Arsip	4 Arsip	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
6	2	2 4	0 4			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-				-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							4.000.000,00	
	2	2 4	0 4	2.0 1		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/K	-	-			-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

						ota													Publik				
	2	2 4	0 4	2.0 1	00 01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																	
							Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				2 SOP	2 SOP	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 4	0 4	2.0 1	00 02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																	
							Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				2 Arsip	2 Arsip	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	JUMLAH												**2.582.947.184,00**	**5.376.721.083,00**	**5.296.314.891,00**							**6.986.484.339,00**	

5.3.18 Dinas Perikanan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Perikanan							4.609.762.736,80	6.456.905.272,00	6.340.981.096,00							17.981.656.972,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.609.762.736,80	6.456.905.272,00	6.340.981.096,00							17.981.656.972,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							4.609.762.736,80	6.456.905.272,00	6.340.981.096,00							17.981.656.972,00	
1	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	3.623.582.736,80	4.926.759.445,00	4.810.835.269,00							4.255.178.015,00	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.316.000,00	5.052.900,00	5.052.900,00			-	-	-		3.128.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	753.000,00	2.052.900,00	2.052.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			1.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	740.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			814.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	823.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			814.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.473.994.307,80	4.527.266.807,00	4.527.266.807,00			-	-	-		4.090.850.844,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	3.472.514.307,80	4.524.266.807,00	4.408.342.631,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-			4.089.222.844,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	740.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			814.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	740.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			814.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	740.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	-	-		814.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	740.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			814.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	740.000,00	17.885.000,00	17.885.000,00			-	-	-		814.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																

							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	740.000,00	17.885.000,00	17.885.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			814.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	740.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	-	-		814.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	740.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			814.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	21.905.000,00	229.878.000,00	229.878.000,00			-	-	-		22.053.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	740.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			814.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	740.000,00	3.667.000,00	3.667.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			814.000,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	20.425.000,00	224.705.000,00	224.705.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			20.425.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	111.068.429,00	120.944.438,00	120.944.438,00			-	-	-		122.175.271,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	69.068.429,00	45.344.438,00	45.344.438,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.975.271,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			46.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	12.079.000,00	22.732.300,00	22.732.300,00			-	-	-		14.528.900,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	9.959.000,00	16.299.400,00	16.299.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			10.954.900,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.380.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.760.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	740.000,00	5.012.900,00	5.012.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			814.000,00	DINAS PERIKANAN
2	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-				-	-	946.180.000,00	714.851.300,00	714.851.300,00							5.207.329.557,00	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	836.180.000,00	604.851.300,00	604.851.300,00			-	-	-		5.107.329.557,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				17 Unit	17 Unit	831.180.000,00	599.851.300,00	599.851.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah	-	-			350.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				57 Unit	57 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			4.747.329.557,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																

							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-			-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																	
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				3 Layanan	3 Layanan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	-	20.000.000,00	595.294.650,00	595.294.650,00							4.574.574.700,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	-	5.000.000,00	85.294.700,00	85.294.700,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																	
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				15 Kelompok	15 Kelompok	5.000.000,00	85.294.700,00	85.294.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN

	3	2 5	0 4	2.0 4		Pengelolaan Pembudidayaa n Ikan	-	-			-	-	15.000.000,00	509.999.950,0 0	509.999.950,0 0			-	-	-		4.374.574.700, 00	DINAS PERIKAN AN
	3	2 5	0 4	2.0 4	000 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			40.000.000,00	DINAS PERIKAN AN
	3	2 5	0 4	2.0 4	000 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	504.999.950,0 0	504.999.950,0 0	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			500.000.000,0 0	DINAS PERIKAN AN
	3	2 5	0 4	2.0 4	000 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			3.834.574.700, 00	DINAS PERIKAN AN
4	3	2 5	0 6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	20.000.000,00	219.999.877,0 0	219.999.877,0 0							3.944.574.700, 00	

	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	-	5.000.000,00	3.382.100,00	3.382.100,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	3.382.100,00	3.382.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	-	5.000.000,00	116.087.300,00	116.087.300,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																	

							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	5.000.000,00	116.087.300,00	116.087.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	10.000.000,00	100.530.477,00	100.530.477,00			-	-	-		3.884.574.700,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				25 Ton	25 Ton	10.000.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	0,00	97.090.477,00	97.090.477,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			3.834.574.700,00	DINAS PERIKANAN

															a							
	JUMLAH											4.609.762.736,80	6.456.905.272,00	6.340.981.096,00							17.981.656.972,00	

5.3.19 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan							5.222.047.772,00	7.577.665.744,00	7.513.234.704,00							6.139.277.156,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.222.047.772,00	7.577.665.744,00	7.513.234.704,00							6.139.277.156,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							5.222.047.772,00	7.577.665.744,00	7.513.234.704,00							6.139.277.156,00	
1	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	2.789.661.872,00	3.816.921.944,00	3.752.491.104,00							4.336.277.156,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	22.126.400,00	37.666.400,00	37.666.400,00			-	-	-		19.600.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	14.249.600,00	14.789.600,00	14.789.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.100.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	901.000,00	2.181.000,00	2.181.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.800.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.673.000,00	12.951.000,00	12.951.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.843.000,00	793.000,00	793.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.800.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.786.200,00	506.200,00	506.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			3.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.673.600,00	6.445.600,00	6.445.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.668.263.392,00	3.516.949.344,00	3.516.949.344,00			-	-	-		3.974.158.906,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	2.660.889.892,00	3.509.375.844,00	3.444.946.069,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			3.967.358.906,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.568.500,00	5.768.500,00	5.768.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	8.659.400,00	9.338.600,00	9.338.600,00			-	-	-		7.450.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.019.500,00	5.019.500,00	5.019.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.314.450,00	2.314.300,00	2.314.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	Pajak Daerah	-	-			2.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

																Kel/Desa						
	3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.325.450,00	2.004.800,00	2.004.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.700.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	8.729.800,00	138.127.400,00	138.127.400,00			-	-	-		182.978.250,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.030.000,00	1.025.800,00	1.025.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.847.300,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	78.980.400,00	81.686.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			56.445.950,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.999.800,00	343.200,00	343.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			6.415.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			11.700.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	1.000.000,00	55.078.000,00	55.078.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			104.570.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	81.882.880,00	114.840.200,00	114.840.200,00			-	-	-		152.090.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	38.582.880,00	36.740.200,00	34.033.135,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			690.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	42.000.000,00	76.800.000,00	76.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			111.400.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	591.000.000,00	1.086.979.800,00	1.086.979.700,00								1.550.000.000,00	
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	5.000.200,00	105.000.000,00	105.000.000,00			-	-	-			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan																	
							Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				3.00 laporan	3.00 laporan	5.000.200,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	4.999.900,00	4.999.900,00	4.999.900,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.05	0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak																	
							Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat				1 Laporan	1 Laporan	4.999.900,00	4.999.900,00	4.999.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	-	580.999.900,00	976.979.900,00	976.979.900,00			-	-	-		1.200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																	
							Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				20 Ton	20 Ton	1.000.000,00	203.800.000,00	206.349.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																	

							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1000 Ekor	1000 Ekor	579.999.900,00	773.179.900,00	770.629.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	1.650.810.900,00	2.091.784.000,00	2.091.783.900,00							3.000.000,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	-	1.650.810.900,00	2.091.784.000,00	2.091.784.000,00			-	-	-		3.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																	
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				13 Unit	13 Unit	1.650.810.900,00	2.091.784.000,00	2.091.783.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-				-	-	170.575.000,00	561.980.000,00	561.980.000,00							225.000.000,00	

	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	20.000.000,00	180.830.000,00	180.830.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																	
							Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	180.830.000,00	180.830.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	150.575.000,00	381.150.000,00	381.150.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																	
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	150.575.000,00	381.150.000,00	381.150.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00							25.000.000,00	

	3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-			-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																	
							Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
												JUMLAH	**5.222.047.772,00**	**7.577.665.744,00**	**7.513.234.704,00**							**6.139.277.156,00**	

5.3.20 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Perindustrian dan Perdagangan							3.352.626.607,20	4.442.682.694,00	4.391.650.062,00							4.578.564.880,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.352.626.607,20	4.442.682.694,00	4.391.650.062,00							4.578.564.880,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							3.002.626.607,20	4.392.619.694,00	4.341.587.062,00							4.448.564.880,00	
1	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-				-	-	500.000,00	59.400,00	59.400,00							50.000.000,00	
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-			-	-	500.000,00	59.400,00	59.400,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	

							Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 Dokumen	5 Dokumen	500.000,00	59.400,00	59.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-				-	-	20.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00								85.000.000,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	-	20.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00			-	-	-			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				48 Unit	48 Unit	20.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-				-	-	10.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00								25.000.000,00	

	3	3 0	0 4	2.0 2		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	-	10.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 4	2.0 2	000 1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	3	3 0	0 6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	12.322.000,00							50.000.000,00	
	3	3 0	0 6	2.0 1		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 6	2.0 1	000 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																	
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	12.322.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

5	3	3 0	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	2.952.126.607,20	4.042.560.294,00	3.999.205.662,00							4.238.564.880,00	
	3	3 0	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	36.900.000,00	35.348.900,00	35.348.900,00			-	-	-		48.146.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.700.000,00	7.510.000,00	7.510.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	8.943.700,00	8.943.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			9.271.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.362.500,00	5.362.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			9.271.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2.0 1	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.874.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.234.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.809.000,00	3.809.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.234.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	7.084.700,00	7.084.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			9.561.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.772.962.108,00	3.706.643.590,00	3.706.643.590,00			-	-	-		3.661.975.080,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				456 Orang/bulan	456 Orang/bulan	2.770.462.108,00	3.704.030.790,00	3.602.998.158,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			3.658.359.480,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.612.800,00	1.612.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			615.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3	3 0	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.100.000,00	1.182.600,00	1.182.600,00			-	-	-		1.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2.0 3	000 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	682.600,00	682.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			900.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2.0 3	000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			900.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.240.000,00	2.421.800,00	2.421.800,00			-	-	-		89.990.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2.0 5	000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	2.421.800,00	2.421.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.990.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 0	0 1	2.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				38 Orang	38 Orang	1.240.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	8.222.000,00	38.460.700,00	38.460.700,00			-	-	-		83.475.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.722.000,00	18.582.000,00	26.260.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			18.801.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.189.700,00	1.189.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	17.489.000,00	57.739.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			54.974.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	4.350.800,00	40.800,00	40.800,00			-	-	-		45.830.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.350.800,00	40.800,00	40.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			45.830.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	83.164.499,20	209.651.904,00	209.651.904,00			-	-	-		117.420.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.164.499,20	38.251.904,00	38.251.904,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			53.420.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	42.000.000,00	170.400.000,00	170.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			54.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	43.187.200,00	48.810.000,00	48.810.000,00			-	-	-		189.927.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	18.187.200,00	19.500.000,00	29.250.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			39.927.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	29.310.000,00	29.310.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3	3 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						350.000.000,00	50.063.000,00	50.063.000,00							130.000.000,00	
6	3	3 1	0 2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-				-	-	340.000.000,00	10.063.000,00	10.063.000,00							30.000.000,00	
	3	3 1	0 2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	-	340.000.000,00	10.063.000,00	10.063.000,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 1	0 2	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	330.000.000,00	63.000,00	63.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 1	0 2	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	3	3 1	0 3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-				-	-	10.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							100.000.000,00	

	3	3 1	0 3	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	-	10.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3 1	0 3	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
											JUMLAH		**3.352.626.607,20**	**4.442.682.694,00**	**4.391.650.062,00**							**4.578.564.880,00**	

5.3.21 Sekretariat Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Sekretariat Daerah							25.066.254.366,63	39.912.940.469,00	41.149.214.470,00							28.802.053.309,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							25.066.254.366,63	39.912.940.469,00	41.149.214.470,00							28.802.053.309,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							25.066.254.366,63	39.912.940.469,00	41.149.214.470,00							28.802.053.309,00	
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	13.639.803.921,00	27.788.583.769,00	28.179.828.070,00							21.912.053.309,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.000.000,00	97.868.820,00	97.868.820,00			-	-	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	1.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	1.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	1.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	1.000.000,00	23.368.820,00	23.368.820,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	1.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.00 Laporan	16.00 Laporan	500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	Pajak Daerah	-	-			17.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Kel/Desa						
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.616.206.085,00	13.248.188.036,00	13.248.188.036,00			-	-	-		15.397.230.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1708.00 Orang/bulan	1708.00 Orang/bulan	9.609.206.085,00	12.675.610.636,00	12.355.290.030,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			15.199.730.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				48 Dokumen	48 Dokumen	2.000.000,00	358.577.400,00	358.577.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	1.000.000,00	171.000.000,00	171.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.00 Laporan	4.00 Laporan	1.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				8.00 Laporan	8.00 Laporan	1.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	

							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	1.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.000.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00			-	-	-		105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				48.00 Laporan	48.00 Laporan	1.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				16.00 Laporan	16.00 Laporan	1.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8.00 Laporan	8.00 Laporan	1.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00			-	-	-		2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.500.000,00	59.023.139,00	59.023.139,00			-	-	-		92.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	1.000.000,00	51.490.600,00	51.490.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1.00 Orang	1.00 Orang	500.000,00	6.532.539,00	6.532.539,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			22.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	19.000.000,00	2.130.374.140,00	2.130.374.140,00			-	-	-		885.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	2.000.000,00	341.999.000,00	341.999.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.000.000,00	140.148.140,00	188.157.840,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.000.000,00	48.227.000,00	63.218.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	1.199.000.000,00	1.270.485.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	20.000.000,00	2.406.594.248,00	2.406.594.248,00			-	-	-		210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																a						
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	5.000.000,00	56.777.000,00	56.777.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	5.000.000,00	2.349.817.248,00	2.579.838.038,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.537.610.436,00	2.896.639.616,00	2.896.639.616,00			-	-	-		1.652.323.209,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	58.522.600,00	58.522.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.054.467.364,00	944.317.416,00	1.041.150.644,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			1.062.323.209,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	664.999.600,00	1.290.981.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	481.143.072,00	1.228.800.000,00	1.228.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	3.000.000,00	2.689.162.810,00	2.689.162.810,00			-	-	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	1.000.000,00	948.830.000,00	985.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	1.000.000,00	40.370.000,00	40.370.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				92 Unit	92 Unit	1.000.000,00	1.699.962.810,00	1.301.923.499,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	-	602.000.000,00	749.788.000,00	749.788.000,00			-	-	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.00 Orang/Bulan	2.00 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	2.000.000,00	149.788.000,00	149.788.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			12.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.00 Orang	2.00 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			12.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	-	1.699.987.400,00	2.692.444.960,00	2.692.444.960,00			-	-	-		837.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.349.987.400,00	2.244.854.960,00	2.264.297.460,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			287.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

															a							
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	447.590.000,00	413.660.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00			-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	4 Dokumen	12.067.000,00	12.067.000,00	12.067.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	18.904.000,00	22.733.000,00	22.733.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	19.127.000,00	15.298.000,00	15.298.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Kel/Desa						
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	14.902.000,00	14.902.000,00	14.902.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	-	65.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00			-	-	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	25.302.000,00	300.302.000,00	300.302.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	13.144.000,00	13.144.000,00	13.144.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	

							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	26.554.000,00	226.554.000,00	226.554.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	11.231.450.445,63	11.304.356.700,00	11.948.581.700,00							5.900.000.000,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	-	45.718.000,00	462.748.000,00	462.748.000,00			-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	27.018.000,00	424.048.000,00	424.048.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				6 Dokumen	6 Dokumen	9.401.000,00	29.401.000,00	29.401.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	9.299.000,00	9.299.000,00	9.299.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	-	10.976.999.999,63	10.250.446.000,00	10.250.446.000,00			-	-	-		4.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	4 Dokumen	10.955.447.999,63	10.225.446.000,00	10.869.671.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Takalar	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-			4.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen	4 Dokumen	10.650.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	4 Dokumen	10.902.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	-	189.450.446,00	571.880.700,00	571.880.700,00			-	-	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																	
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				650 Dokumen	650 Dokumen	124.450.446,00	124.450.300,00	124.450.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																	
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	35.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																	
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				650 Dokumen	650 Dokumen	30.000.000,00	182.430.400,00	182.430.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	-	19.282.000,00	19.282.000,00	19.282.000,00			-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				5 Dokumen	5 Dokumen	9.685.000,00	9.685.000,00	9.685.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	Pajak Daerah	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Kel/Desa						
	4	01	02	2.04	00 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	2 Laporan	9.597.000,00	9.597.000,00	9.597.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	195.000.000,00	820.000.000,00	1.020.804.700,00							990.000.000,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	-	32.626.000,00	657.626.000,00	657.626.000,00			-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.894.000,00	10.894.000,00	10.894.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	00 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	10.948.000,00	135.948.000,00	135.948.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																	
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	2 Dokumen	10.784.000,00	510.784.000,00	629.464.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00			-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	21.688.000,00	21.688.000,00	21.688.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	21.859.000,00	21.859.000,00	21.859.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	21.453.000,00	21.453.000,00	21.453.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00			-	-	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	4 Dokumen	21.633.000,00	21.633.000,00	21.633.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				800 Dokumen	800 Dokumen	22.073.000,00	22.073.000,00	22.073.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				6 Orang	6 Orang	21.294.000,00	21.294.000,00	21.294.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	-	32.374.000,00	32.374.000,00	32.374.000,00			-	-	-		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	2 Dokumen	10.776.000,00	10.776.000,00	92.900.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				2 Dokumen	2 Dokumen	10.798.000,00	10.798.000,00	10.798.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
												JUMLAH	**25.066.254.366,63**	**39.912.940.469,00**	**41.149.214.470,00**							**28.802.053.309,00**	

5.3.22 Sekretariat DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Sekretariat DPRD							24.629.602.017,00	33.077.444.247,00	32.963.987.847,00							29.996.434.539,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							24.629.602.017,00	33.077.444.247,00	32.963.987.847,00							29.996.434.539,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							24.629.602.017,00	33.077.444.247,00	32.963.987.847,00							29.996.434.539,00	
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	19.458.721.917,00	22.272.982.827,00	22.159.526.427,00							23.483.732.539,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	41.358.100,00	178.205.340,00	178.205.340,00			-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	6.052.400,00	27.591.940,00	27.591.940,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

		2	1	1	02																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.079.800,00	29.619.700,00	29.619.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.964.400,00	29.394.200,00	29.394.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.455.900,00	28.985.900,00	28.985.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.235.700,00	28.092.500,00	28.092.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.054.300,00	29.005.500,00	29.005.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.515.600,00	5.515.600,00	5.515.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.396.451.168,00	4.588.210.508,00	4.588.210.508,00			-	-	-		5.374.666.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	3.367.651.168,00	4.487.264.408,00	4.373.808.008,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapa	-	-			5.294.666.300,00	SEKRETARIAT DPRD

																	tan Bagi Hasil						
	4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.935.400,00	33.512.700,00	33.512.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	6.554.300,00	30.446.300,00	30.446.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.874.500,00	5.324.500,00	5.324.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.873.500,00	27.100.300,00	27.100.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.562.300,00	4.562.300,00	4.562.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.568.100,00	13.042.500,00	13.042.500,00			-	-	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.456.300,00	6.806.300,00	6.806.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.111.800,00	6.236.200,00	6.236.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	43.316.300,00	56.704.300,00	56.704.300,00			-	-	-		779.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	5.260.600,00	7.764.300,00	7.764.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	10.970.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			375.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	1.180.100,00	1.146.400,00	1.146.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			354.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	25.905.600,00	36.843.600,00	36.843.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	214.596.700,00	953.609.440,00	953.609.440,00			-	-	-		560.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11.258.000,00	22.549.500,00	22.549.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	36.074.000,00	628.804.840,00	628.804.840,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	2.508.000,00	26.478.900,00	26.478.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	21.517.900,00	48.260.000,00	48.260.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				55 Dokumen	984 Dokumen	60.264.000,00	106.800.000,00	106.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	12 Laporan	67.500.000,00	105.600.000,00	105.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	15.474.800,00	15.116.200,00	15.116.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	631.871.210,00	1.083.546.200,00	1.083.546.200,00			-	-	-		1.035.967.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.436.400,00	6.452.600,00	6.452.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	474.234.810,00	463.893.600,00	463.893.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			451.652.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	151.200.000,00	613.200.000,00	613.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			569.315.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	304.074.000,00	445.826.000,00	445.826.000,00			-	-	-		1.119.230.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	270.374.000,00	299.610.000,00	299.610.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			714.230.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	3 Unit	20.500.000,00	123.866.000,00	123.866.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	40 Unit	13.200.000,00	22.350.000,00	22.350.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	-	14.438.703.539,00	14.505.473.539,00	14.505.473.539,00			-	-	-		13.956.756.039,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																	
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	13.436.516.039,00	13.436.516.039,00	13.436.516.039,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			13.436.516.039,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	942.187.500,00	965.357.500,00	965.357.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			460.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	35 Orang	60.000.000,00	103.600.000,00	103.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	-	377.782.800,00	448.365.000,00	448.365.000,00			-	-	-		548.113.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				7 Laporan	7 Laporan	15.165.400,00	40.990.400,00	40.990.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			88.840.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	62.617.400,00	107.367.400,00	107.367.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			159.273.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	300.000.000,00	300.007.200,00	300.007.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	5.170.880.100,00	10.804.461.420,00	10.804.461.420,00							6.512.702.000,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	-	333.826.300,00	1.678.245.560,00	1.678.245.560,00			-	-	-		1.331.548.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				20 Dokumen	2 Dokumen	9.449.900,00	561.757.900,00	561.757.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			137.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				20 Dokumen	2 Dokumen	274.786.500,00	925.638.500,00	925.638.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			658.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																	
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	5 Dokumen	3.865.600,00	3.866.560,00	3.866.560,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah	-	-			131.048.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																	

							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				6 Dokumen	2 Dokumen	40.672.700,00	181.931.000,00	181.931.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.051.600,00	5.051.600,00	5.051.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	873.715.000,00	296.203.900,00	296.203.900,00			-	-	-		1.563.577.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	55.558.800,00	55.558.800,00	55.558.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			72.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	51.036.800,00	51.036.800,00	51.036.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			68.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2.0	00	Pembahasan APBD																		

		2	2	2	03																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	575.672.600,00	56.173.500,00	56.173.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			437.978.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	45.174.200,00	45.174.200,00	45.174.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			319.949.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	2 Dokumen	45.609.800,00	45.609.800,00	45.609.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			35.087.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.662.800,00	42.650.800,00	42.650.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			628.963.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	425.664.200,00	1.488.550.560,00	1.488.550.560,00			-	-	-		240.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				5 Laporan	5 Laporan	1.140.600,00	5.675.760,00	5.675.760,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	1.140.600,00	5.649.800,00	5.649.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																	
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				5 Laporan	5 Laporan	1.140.600,00	5.649.800,00	5.649.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	1.140.600,00	5.649.800,00	5.649.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																	

							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				5 Laporan	5 Laporan	1.140.600,00	5.649.800,00	5.649.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.140.600,00	5.649.800,00	5.649.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	417.680.000,00	1.448.976.000,00	1.448.976.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																	
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1.140.600,00	5.649.800,00	5.649.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	1.623.126.400,00	2.207.985.900,00	2.207.985.900,00			-	-	-		1.157.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD																	

							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	538.288.800,00	336.383.300,00	336.383.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	2 Dokumen	506.900.000,00	1.145.715.000,00	1.145.715.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			845.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	3 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			25.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		

							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	15.015.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																	
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.022.600,00	20.022.600,00	20.022.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																	
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				435 Dokumen	435 Dokumen	200.900.000,00	348.850.000,00	348.850.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	-	1.379.211.200,00	1.379.211.200,00	1.379.211.200,00			-	-	-		1.492.175.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	36.843.200,00	36.843.200,00	36.843.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																	

							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.010.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses																	
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1.332.358.000,00	1.332.358.000,00	1.332.358.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			1.430.175.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	-	9.955.000,00	7.856.300,00	7.856.300,00			-	-	-		39.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																	
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.051.600,00	5.051.600,00	5.051.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			29.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	2 Laporan	4.903.400,00	2.804.700,00	2.804.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	-	525.382.000,00	3.746.408.000,00	3.746.408.000,00			-	-	-		688.602.000,00	SEKRETARIAT

																						DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				20 Dokumen	15 Dokumen	525.382.000,00	3.746.408.000,00	3.746.408.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah	-	-			688.602.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	JUMLAH												**24.629.602.017,00**	**33.077.444.247,00**	**32.963.987.847,00**							**29.996.434.539,00**	

5.3.23 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah							6.221.392.992,75	7.135.669.948,00	7.137.892.972,00							5.199.526.420,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6.221.392.992,75	7.135.669.948,00	7.137.892.972,00							5.199.526.420,00	
	5	01				PERENCANAAN							5.631.937.640,37	6.110.551.048,00	6.112.774.072,00							4.746.526.420,00	
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-				-	-	3.620.037.640,37	4.480.262.548,00	4.382.885.672,00							197.000.000,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	75.000.000,00	64.881.300,00	64.881.300,00			-	-	-		37.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	10.000.000,00	13.128.900,00	13.128.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA

																						NGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	15.386.000,00	15.386.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.120.800,00	5.120.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	7.095.900,00	7.095.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	7.449.700,00	7.891.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.860.155.571,99	3.762.771.548,00	3.762.771.548,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

		1	1	2	01																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	2.833.155.571,99	3.735.771.848,00	3.638.394.972,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.999.900,00	9.999.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	6.999.800,00	6.999.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	27.000.000,00	24.131.900,00	24.131.900,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.011.100,00	7.011.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	7.859.500,00	7.859.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				30 Laporan	30 Laporan	10.000.000,00	9.261.300,00	13.593.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	80.000.000,00	52.997.400,00	52.997.400,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	19.050.000,00	11.430.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	24.227.400,00	24.227.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	9.720.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	220.000.000,00	176.834.000,00	176.834.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	50 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.00 Laporan	250.00 Laporan	200.000.000,00	166.834.000,00	166.834.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	55.000.000,00	161.696.000,00	161.696.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	161.696.000,00	147.096.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Retribusi Daerah - LRA	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	151.426.716,00	148.490.400,00	148.490.400,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36.00 Laporan	36.00 Laporan	109.426.716,00	106.490.400,00	106.490.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				72.00 Laporan	72.00 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	50.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	151.455.352,38	88.460.000,00	88.460.000,00			-	-	-		160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7.00 Unit	7.00 Unit	86.455.352,38	45.180.000,00	23.870.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	43.280.000,00	83.356.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	1.205.900.000,00	1.150.900.000,00	1.250.499.900,00							1.128.000.000,00	

	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	-	797.900.000,00	766.900.000,00	766.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah		670.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																	
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1.00 Berita Acara	1.00 Berita Acara	35.000.000,00	35.000.000,00	30.650.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																	
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1.00 Berita Acara	1.00 Berita Acara	35.000.000,00	35.000.000,00	22.943.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	2 Berita Acara	80.000.000,00	80.000.000,00	51.420.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				100.00 Usulan	100.00 Usulan	35.000.000,00	35.000.000,00	25.050.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	612.900.000,00	581.900.000,00	631.425.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	-	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00			-	-	-		103.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	56.191.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				38 Orang	38 Orang	53.000.000,00	53.000.000,00	41.850.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			53.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	-	180.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00			-	-	-		230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4.00 Laporan	3.00 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

																						PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	56.000.000,00	165.970.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	-	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00			-	-	-		125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																	
							Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				5 Dokumen	38 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	806.000.000,00	479.388.500,00	479.388.500,00							3.421.526.420,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	-	286.000.000,00	164.614.800,00	164.614.800,00			-	-	-		1.288.295.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				19.00 Dokumen	19.00 Dokumen	10.000.000,00	4.614.800,00	4.614.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			129.383.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				19 Laporan	19 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			131.410.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	

							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				19 Laporan	19 Laporan	11.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			147.758.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				19 Laporan	19 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			150.154.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			174.758.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8 Laporan	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			184.249.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8 Laporan	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			139.383.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8 Laporan	145.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			231.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	-	205.000.000,00	144.773.600,00	144.773.600,00			-	-	-		1.250.530.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			122.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																						DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			129.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			128.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	130.000.000,00	86.797.300,00	86.797.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			149.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			168.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			181.430.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			142.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	7.976.300,00	7.976.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			228.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA

																						NGAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	-	315.000.000,00	170.000.100,00	170.000.100,00			-	-	-		882.701.420,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA	-	-			134.210.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			78.550.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			81.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			175.690.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			111.440.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			78.550.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

																						DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			94.710.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	85.000.000,00	50.000.100,00	50.000.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			128.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						589.455.352,38	1.025.118.900,00	1.025.118.900,00								453.000.000,00	
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-				-	-	589.455.352,38	1.025.118.900,00	1.025.118.900,00								453.000.000,00	

	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	-	70.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	-	-		310.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan																	
							Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1.00 Rekomendasi	1.00 Rekomendasi	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	-	216.455.352,38	495.119.600,00	495.119.600,00			-	-	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																	

							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	80.000.000,00	345.119.600,00	345.119.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Retribusi Daerah - LRA DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	136.455.352,38	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	-	102.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00			-	-	-		82.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	-	201.000.000,00	409.999.300,00	409.999.300,00			-	-	-		41.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	65.000.000,00	393.999.500,00	393.999.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	15.999.800,00	15.999.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA

																						NGAN DAERAH
	JUMLAH											6.221.392.992,75	7.135.669.948,00	7.137.892.972,00							5.199.526.420,00	

5.3.24 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Keuangan dan Aset Daerah							215.039.744.777,10	200.969.968.717,00	191.481.387.408,00							250.042.422.765,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							215.039.744.777,10	200.969.968.717,00	191.481.387.408,00							250.042.422.765,00	
	5	02				KEUANGAN							215.039.744.777,10	200.969.968.717,00	191.481.387.408,00							250.042.422.765,00	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	30.677.020.979,10	22.876.413.508,00	23.008.168.999,00							33.736.232.148,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	290.620.000,00	304.120.000,00	304.120.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		308.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	40.500.000,00	46.450.000,00	46.450.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			44.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			39.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			39.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			39.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			39.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	42.120.000,00	42.120.000,00	42.120.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			44.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	67.550.000,00	67.550.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			64.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	28.458.200.779,10	20.286.945.708,00	20.286.945.708,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		30.541.428.248,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	28.056.872.445,10	19.873.617.308,00	19.721.569.319,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	1. Pembangunan Manusia			30.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	47.360.250,00	59.360.300,00	59.360.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			67.360.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11000 Dokumen	11000 Dokumen	109.221.216,00	109.221.200,00	109.221.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			149.321.130,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	

							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	51.672.154,00	51.672.200,00	51.672.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			71.672.154,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	52.536.514,00	52.536.400,00	52.536.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			75.536.514,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	50.000.100,00	50.000.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	55.000.000,00	55.000.100,00	55.000.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	

							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	35.538.200,00	35.538.100,00	35.538.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			37.538.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	189.093.800,00	225.380.100,00	225.380.100,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		251.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			35.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.081.800,00	30.081.700,00	30.081.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			35.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			32.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	

							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.571.200,00	23.664.000,00	23.664.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			27.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	46.640.000,00	46.640.000,00	46.640.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			49.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			31.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.300.800,00	38.494.400,00	38.494.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			42.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	181.258.700,00	181.258.700,00	181.258.700,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		238.908.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				53 Paket	53 Paket	43.350.000,00	43.350.000,00	36.111.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			37.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	35.992.800,00	35.992.800,00	35.992.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			37.992.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	101.915.900,00	101.915.900,00	101.915.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			103.915.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.099.993.700,00	1.238.057.000,00	1.238.057.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		1.258.236.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15.626.700,00	15.627.400,00	15.627.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			17.626.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	41.976.000,00	168.681.000,00	556.138.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			168.681.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.335.400,00	16.333.400,00	16.333.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			18.335.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	423.530.000,00	418.103.700,00	30.340.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			442.848.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.360.000,00	12.364.000,00	12.364.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan,	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan	-	1. Pembangunan Manusia			14.360.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

																Semua Kel/Desa	Disiplin					
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	53.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			125.220.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			23.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	404.570.000,00	421.352.000,00	481.632.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			406.570.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38.995.600,00	38.995.500,00	38.995.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			40.995.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	420.882.000,00	603.680.000,00	603.680.000,00			-	-	-		1.084.686.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	370.482.000,00	289.280.000,00	282.280.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			290.286.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.400.000,00	314.400.000,00	331.838.580,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			794.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	36.972.000,00	36.972.000,00	36.972.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		53.972.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	28 Unit	19.822.000,00	19.822.000,00	282.792.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			23.822.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.450.000,00	10.450.000,00	21.280.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			13.450.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	6.700.000,00	6.700.000,00	24.730.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			16.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-				-	-	183.320.357.754,00	176.876.189.409,00	167.255.852.609,00								215.129.824.573,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	-	961.270.000,00	1.408.323.360,00	1.408.323.360,00			-	1. Pembangunan Manusia	-			1.393.270.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																	
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	90.000.000,00	107.430.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	90.000.000,00	98.092.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

																Kel/Desa						
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	38 Dokumen	80.000.000,00	139.980.000,00	144.710.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	76 Dokumen	80.000.000,00	139.980.000,00	155.640.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	38 Dokumen	80.000.000,00	90.000.000,00	108.910.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				38 Dokumen	76 Dokumen	80.000.000,00	90.000.000,00	115.767.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																	
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	110.000.000,00	126.310.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																	
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	5 Dokumen	110.000.000,00	150.000.000,00	159.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			140.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	70.040.000,00	85.043.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	88.000.000,00	94.390.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																	

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	61.270.000,00	80.323.360,00	108.700.160,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			63.270.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	70.000.000,00	94.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	-	1.113.094.200,00	1.338.094.200,00	1.338.094.200,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		1.348.094.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	86.969.400,00	199.701.400,00	199.701.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan,	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan	-	1. Pembangunan Manusia			110.969.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

																Semua Kel/Desa	Disiplin					
	5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2.00 Laporan	2.00 Laporan	40.643.400,00	52.108.400,00	52.108.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			43.643.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				840 Dokumen	840 Dokumen	109.676.000,00	109.676.000,00	109.676.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			142.676.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				5000 Dokumen	5000 Dokumen	46.121.400,00	73.407.600,00	73.407.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			48.121.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				26 Dokumen	26 Dokumen	67.509.200,00	115.202.000,00	155.072.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			78.509.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			32.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																	

							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				48 Laporan	48 Laporan	212.473.600,00	212.473.600,00	204.470.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			252.473.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	41.640.200,00	41.640.200,00	41.640.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	1. Pembangunan Manusia			43.640.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																	

							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				184 Dokumen	184 Dokumen	133.036.000,00	133.036.000,00	133.025.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			165.036.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	32.765.800,00	32.765.800,00	32.765.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			35.765.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	312.259.200,00	338.083.200,00	539.575.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			395.259.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	-	1.043.228.200,00	1.418.227.700,00	1.418.227.700,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		1.211.228.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		

							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				24 Laporan	24 Laporan	65.699.200,00	76.014.800,00	76.014.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			67.699.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																	
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				300 Dokumen	300 Dokumen	204.741.800,00	251.004.800,00	251.004.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			245.741.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																	
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				19 Laporan	19 Laporan	159.998.800,00	172.970.000,00	172.970.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			190.998.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	208.735.000,00	218.835.900,00	218.835.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	1. Pembangunan Manusia			260.735.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																			
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	135.157.000,00	430.505.900,00	187.237.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	1. Pembangunan Manusia			140.157.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																			
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	190.861.000,00	190.861.000,00	190.861.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	1. Pembangunan Manusia			225.861.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																			

							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	78.035.400,00	78.035.300,00	320.908.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			80.035.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	-	179.392.765.354,00	171.901.544.149,00	171.901.544.149,00			-	-	-		210.362.232.173,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	38.666.372.254,00	15.340.710.149,00	15.340.710.149,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-			53.098.696.673,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				4 Laporan	4 Laporan	126.394.493.100,00	139.216.574.000,00	139.216.574.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa	-	1. Pembangunan Manusia			138.066.175.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	9.331.900.000,00	12.944.260.000,00	3.000.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	1. Pembangunan Manusia			15.197.360.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	-	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		815.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																

							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			800.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-				-	-	1.042.366.044,00	1.217.365.800,00	1.217.365.800,00							1.176.366.044,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	-	1.042.366.044,00	1.217.365.800,00	1.217.365.800,00			-	1. Pembangunan Manusia	-		1.176.366.044,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	211.695.000,00	211.695.000,00	211.695.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			245.695.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	19.333.600,00	19.333.600,00	19.333.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			22.333.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.378.800,00	25.378.800,00	25.378.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan,	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan	-	1. Pembangunan Manusia			30.378.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

																Semua Kel/Desa	Disiplin						
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	37.052.800,00	37.052.800,00	37.052.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			40.052.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				6 Laporan	6 Laporan	111.436.800,00	111.436.800,00	111.436.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			115.436.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	78.225.200,00	78.225.200,00	78.225.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			80.225.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	102.022.400,00	152.022.400,00	152.022.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			125.022.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	92.486.400,00	194.896.400,00	194.896.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			95.486.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				38 Dokumen	38 Dokumen	57.438.500,00	57.438.500,00	57.438.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			60.438.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	83.782.200,00	83.782.200,00	83.782.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			85.782.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	223.514.344,00	246.104.100,00	246.104.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	1. Pembangunan Manusia			275.514.344,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
												JUMLAH	**215.039.744.777,10**	**200.969.968.717,00**	**191.481.387.408,00**							**250.042.422.765,00**	

5.3.25 Badan Pendapatan Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Pendapatan Daerah							11.476.020.672,40	12.544.185.099,00	11.736.641.615,00							16.031.851.130,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							11.476.020.672,40	12.544.185.099,00	11.736.641.615,00							16.031.851.130,00	
	5	02				KEUANGAN							11.476.020.672,40	12.544.185.099,00	11.736.641.615,00							16.031.851.130,00	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	8.087.771.402,40	9.519.633.299,00	8.662.089.815,00							11.220.110.930,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	100.000.000,00	168.497.900,00	168.497.900,00			-	-	-		480.907.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	20.364.300,00	35.320.000,00	51.074.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			67.578.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				16 Dokumen	16 Dokumen	17.041.500,00	30.320.000,00	30.320.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			61.907.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	12.914.200,00	18.204.500,00	23.073.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			69.696.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	9.978.900,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			44.122.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.565.600,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			52.041.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25 Laporan	25 Laporan	20.741.600,00	52.503.200,00	52.503.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			104.269.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	24 Laporan	13.393.900,00	21.150.200,00	21.150.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			81.291.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.412.228.812,00	8.091.031.188,00	8.091.031.188,00			-	-	-		8.469.767.912,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2750.00 Orang/bulan	2750.00 Orang/bulan	6.312.228.812,00	8.011.230.988,00	7.153.687.504,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Pendapata	-	-			8.091.140.312,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

																	n Bagi Hasil Pajak					
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.833.400,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15.034.300,00	12.000.000,00	23.394.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				52.00 Dokumen	52.00 Dokumen	16.979.200,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			77.569.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

																Kel/Desa						
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				29.00 Laporan	29.00 Laporan	23.984.900,00	20.000.200,00	20.000.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			81.561.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	12 Dokumen	14.631.700,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			42.002.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				36.00 Laporan	36.00 Laporan	16.536.500,00	25.800.000,00	25.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			72.495.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	30.553.600,00	21.138.300,00	21.138.300,00			-	-	-		126.004.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	5.054.700,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			33.670.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.498.000,00	8.567.200,00	8.567.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			36.444.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.000.800,00	5.883.300,00	5.883.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			30.666.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	6.000.100,00	1.687.800,00	1.687.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			25.223.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	75.486.030,00	67.145.000,00	67.145.000,00			-	-	-		102.987.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	22.500.000,00	20.955.000,00	20.955.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				55 Dokumen	55 Dokumen	29.999.030,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	22.987.000,00	36.190.000,00	36.190.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			52.987.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	755.270.800,00	510.396.700,00	510.396.700,00			-	-	-		884.852.270,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.499.900,00	2.654.400,00	2.654.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	84.020.000,00	293.858.000,00	293.858.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.852.300,00	3.320.800,00	3.320.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			10.852.270,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300.00 Paket	300.00 Paket	312.087.600,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				45 Dokumen	45 Dokumen	29.892.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				600 Laporan	600 Laporan	19.995.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			34.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

																Kel/Desa						
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.00 Laporan	50.00 Laporan	299.924.000,00	187.563.500,00	187.563.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	100.175.500,00	79.958.000,00	79.958.000,00			-	-	-		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	100.175.500,00	79.958.000,00	79.958.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	377.586.660,40	438.546.211,00	438.546.211,00			-	-	-		705.592.248,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	121.792.800,00	120.546.211,00	109.151.911,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			135.992.248,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				32.00 Laporan	32.00 Laporan	42.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			32.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				768.00 Laporan	768.00 Laporan	213.793.860,40	318.000.000,00	318.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			537.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	236.470.000,00	142.920.000,00	142.920.000,00			-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11.00 Unit	11.00 Unit	86.510.000,00	122.380.000,00	122.296.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

																a						
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	49.960.000,00	20.540.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	3.388.249.270,00	3.024.551.800,00	3.074.551.800,00							4.811.740.200,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	-	3.388.249.270,00	3.024.551.800,00	3.024.551.800,00			-	-	-		4.811.740.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				68.00 Dokumen	68.00 Dokumen	130.417.300,00	101.593.100,00	101.593.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-			220.930.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				98.00 Dokumen	98.00 Dokumen	300.000.870,00	184.406.800,00	184.406.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			489.484.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				102.00 Laporan	102.00 Laporan	133.904.100,00	108.599.800,00	108.599.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			183.445.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5.00 Unit	5.00 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			1.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																	

							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				3040.00 Laporan	3040.00 Laporan	132.311.500,00	300.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			297.269.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	115.956.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			230.395.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																	

							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2120 Obyek Pajak	2120 Obyek Pajak	90.194.500,00	86.750.000,00	86.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-			171.332.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12120.00 Dokumen	12120.00 Dokumen	303.655.000,00	370.655.900,00	370.655.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			297.590.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																	

							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3000 Layanan	3000 Layanan	82.937.400,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			103.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				650 Dokumen	650 Dokumen	127.980.500,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			226.110.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12092 Dokumen	12092 Dokumen	899.727.200,00	810.000.000,00	822.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			583.766.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				80.00 Dokumen	80.00 Dokumen	51.363.500,00	30.000.000,00	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			120.598.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	79.851.600,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			80.413.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				84 Laporan	84 Laporan	83.805.300,00	65.796.200,00	265.796.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-			154.085.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

																Kel/Desa						
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				60 Laporan	60 Laporan	156.144.500,00	91.750.000,00	91.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-			152.571.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	JUMLAH												**11.476.020.672,40**	**12.544.185.099,00**	**11.736.641.615,00**							**16.031.851.130,00**	

5.3.26 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							3.589.662.250,00	5.345.034.124,00	5.466.966.332,00							757.673.100,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							3.589.662.250,00	5.345.034.124,00	5.466.966.332,00							757.673.100,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN							3.589.662.250,00	5.345.034.124,00	5.466.966.332,00							757.673.100,00	
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.499.438.250,00	4.738.810.124,00	4.604.592.332,00							404.580.600,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	28.820.080,00	28.820.080,00	28.820.080,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.144.680,00	12.144.680,00	12.144.680,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.331.400,00	15.331.400,00	15.331.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.269.031.950,00	4.507.692.140,00	4.507.692.140,00			-	-	-		150.814.025,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.269.031.950,00	4.507.692.140,00	4.373.474.348,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	-	-			150.814.025,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	70.665.920,00	91.395.920,00	91.395.920,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		84.998.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11.00 Paket	11.00 Paket	16.677.920,00	16.677.920,00	16.677.920,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.200.000,00	9.330.000,00	9.330.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	41.388.000,00	59.988.000,00	59.988.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			24.998.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	120.630.300,00	100.641.984,00	100.641.984,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		137.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78.630.300,00	58.641.984,00	58.641.984,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			42.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	10.290.000,00	10.260.000,00	10.260.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	-		17.768.575,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	10.290.000,00	10.260.000,00	10.260.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			17.768.575,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-				-	-	90.224.000,00	606.224.000,00	862.374.000,00							353.092.500,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	-	30.012.000,00	30.012.000,00	30.012.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		31.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																	
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	908.000,00	908.000,00	125.908.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																	

							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				2 Dokumen	2 Dokumen	24.904.000,00	24.904.000,00	24.904.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				4330 Dokumen	4330 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			11.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	-	30.012.000,00	82.212.000,00	82.212.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	4.012.000,00	56.212.000,00	56.212.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																	
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	22.640.000,00	22.640.000,00	22.640.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			34.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				50 Dokumen	50 Dokumen	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	-	26.840.000,00	490.640.000,00	490.640.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																	
							Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				50.00 Orang	50.00 Orang	8.490.000,00	108.490.000,00	208.490.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	18.350.000,00	382.150.000,00	413.300.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	-	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00			-	-	-		1.592.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	4 Dokumen	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.592.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
												JUMLAH	**3.589.662.250,00**	**5.345.034.124,00**	**5.466.966.332,00**							**757.673.100,00**	

5.3.27 Inspektorat Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Inspektorat							18.982.289.146,00	15.097.518.714,00	15.097.518.714,00							9.320.374.100,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							18.982.289.146,00	15.097.518.714,00	15.097.518.714,00							9.320.374.100,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							18.982.289.146,00	15.097.518.714,00	15.097.518.714,00							9.320.374.100,00	
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.023.317.146,00	11.079.180.914,00	11.079.180.914,00							9.320.374.100,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	46.416.000,00	52.960.000,00	52.960.000,00			-	-	-		21.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	4 Laporan	16.416.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	8.343.145.535,00	7.561.518.714,00	7.561.518.714,00			-	-	-		9.118.574.200,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58.00 Orang/bulan	58.00 Orang/bulan	8.328.145.535,00	7.546.518.714,00	7.546.518.714,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapa	-	-			9.109.574.200,00	INSPEKTORAT

																	tan Bagi Hasil Pajak						
	6	0 1	0 1	2.0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	0 1	0 1	2.0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	0 1	0 1	2.0 2	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	-	-		6.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.03	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.03	00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.03	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	INSPEKTORAT

																a							
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.363.566.500,00	1.441.851.400,00	1.441.851.400,00			-	-	-		28.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70.00 Paket	70.00 Paket	42.250.000,00	95.304.000,00	95.304.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			750.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10.00 Orang	40 Orang	842.506.000,00	826.607.000,00	826.607.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			23.250.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				58.00 Orang	58.00 Orang	478.810.500,00	519.940.400,00	519.940.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			4.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	453.761.000,00	1.133.537.400,00	1.133.537.400,00			-	-	-		109.028.900,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	20.003.500,00	13.161.000,00	13.161.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.149.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	20.659.500,00	5.764.500,00	5.764.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	50.000.000,00	62.039.900,00	62.039.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.549.900,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	8.000.000,00	22.499.000,00	22.499.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.270.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	5.088.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	INSPEKTORAT

																Kel/Desa						
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.00 Laporan	35.00 Laporan	350.010.000,00	1.000.073.000,00	1.000.073.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			99.060.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	308.606.251,00	364.505.400,00	364.505.400,00			-	-	-		21.686.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1.00 Unit	9 Unit	93.702.251,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.390.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1.00 Unit	52 Unit	50.000.000,00	78.498.400,00	78.498.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.160.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3.00 Unit	53 Unit	164.904.000,00	286.007.000,00	286.007.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.136.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	197.383.860,00	276.418.000,00	276.418.000,00			-	-	-		1.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	10.254.900,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	0 Laporan	104.868.960,00	118.528.000,00	118.528.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	40.260.000,00	40.090.000,00	40.090.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	295.438.000,00	233.390.000,00	233.390.000,00			-	-	-		15.085.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6.00 Unit	14 Unit	200.438.000,00	144.780.000,00	144.780.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			14.040.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	95.000.000,00	88.610.000,00	88.610.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.045.000,00	INSPEKTORAT

2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	6.920.100.000,00	3.140.537.800,00	3.140.537.800,00							0,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	-	2.880.900.000,00	2.752.417.800,00	2.752.417.800,00			-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				36 Laporan	24 Laporan	1.094.760.000,00	289.950.000,00	289.950.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				49 Laporan	66 Laporan	913.260.000,00	1.228.950.000,00	1.228.950.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja																	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				6 Laporan	2 Laporan	39.600.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				4 Laporan	2 Laporan	74.160.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT

																Kel/Desa						
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa																
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				9 Laporan	9 Laporan	287.520.000,00	302.400.000,00	302.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	79.200.000,00	230.917.800,00	230.917.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				24 Dokumen	24 Dokumen	392.400.000,00	545.400.000,00	545.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	-	4.039.200.000,00	388.120.000,00	388.120.000,00			-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																

							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				0 Laporan	2 Laporan	79.200.000,00	16.320.000,00	16.320.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				0 Laporan	40 Laporan	3.960.000.000,00	371.800.000,00	371.800.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	1.038.872.000,00	877.800.000,00	877.800.000,00								0,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	-	5.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00			-	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	5.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	-	1.033.872.000,00	868.800.000,00	868.800.000,00			-	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		

							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				35 perangkat daerah	38 perangkat daerah	354.672.000,00	212.040.000,00	212.040.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				35 perangkat daerah	38 perangkat daerah	27.000.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																	
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				35 Kegiatan	33 Kegiatan	632.400.000,00	609.660.000,00	609.660.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				9 perangkat daerah	9 perangkat daerah	19.800.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	JUMLAH												**18.982.289.146,00**	**15.097.518.714,00**	**15.097.518.714,00**							**9.320.374.100,00**	

5.3.28 Kecamatan Pattalassang

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Pattalassang							8.806.859.235,00	10.146.045.934,00	9.951.914.446,00							9.695.499.270,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							8.806.859.235,00	10.146.045.934,00	9.951.914.446,00							9.695.499.270,00	
	7	01				KECAMATAN							8.806.859.235,00	10.146.045.934,00	9.951.914.446,00							9.695.499.270,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	6.890.759.235,00	8.512.628.316,00	8.318.496.828,00							7.779.399.270,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00			-	-	-		17.500.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Pajak Daerah	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.947.315.385,00	7.647.841.316,00	7.647.841.316,00			-	-	-		6.835.955.420,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/bulan	103 Orang/bulan	5.940.815.385,00	7.641.341.316,00	7.447.209.828,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			6.829.455.420,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.500.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG

	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00			-	-	-		600.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			600.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	249.406.800,00	224.739.200,00	224.739.200,00			-	-	-		249.406.800,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	88.618.800,00	83.194.200,00	83.194.200,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			88.618.800,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.440.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			13.440.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.720.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			12.720.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	85.275.000,00	83.475.000,00	83.475.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			85.275.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	49.353.000,00	44.630.000,00	44.630.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			49.353.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	606.443.850,00	555.537.000,00	555.537.000,00			-	-	-		606.443.850,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.443.850,00	46.137.000,00	46.137.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			48.443.850,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	558.000.000,00	509.400.000,00	509.400.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			558.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	69.493.200,00	66.410.800,00	66.410.800,00			-	-	-		69.493.200,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	33.653.200,00	33.690.800,00	33.690.800,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			33.653.200,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	19.000.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			19.000.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	65 Unit	16.840.000,00	15.620.000,00	15.620.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			16.840.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	12.150.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00							12.150.000,00	

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	2.025.000,00	0,00	0,00			-	-	-		2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.025.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	6.075.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00			-	-	-		6.075.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.050.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.025.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG

	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	-	2.025.000,00	0,00	0,00			-	-	-		2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	2.025.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	2.025.000,00	0,00	0,00			-	-	-		2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	2.025.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.899.900.000,00	1.629.367.618,00	1.629.367.618,00							1.899.900.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	1.818.225.000,00	1.550.392.618,00	1.550.392.618,00			-	-	-		1.818.225.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	18.225.000,00	18.225.000,00	18.225.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			18.225.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	1.399.983.200,00	853.106.450,00	853.106.450,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			1.399.983.200,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	400.016.800,00	679.061.168,00	679.061.168,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			400.016.800,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	81.675.000,00	78.975.000,00	78.975.000,00			-	-	-		81.675.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	81.675.000,00	78.975.000,00	78.975.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			81.675.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	-				-	-	4.050.000,00	0,00	0,00							4.050.000,00	

						UMUM																
	7	0 1	0 4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	4.050.000,00	0,00	0,00			-	-	-		4.050.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	0 1	0 4	2.0 1	00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.025.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
	7	0 1	0 4	2.0 1	00 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	2.025.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.025.000,00	KECAMATAN PATTALLASSANG
											JUMLAH		**8.806.859.235,00**	**10.146.045.934,00**	**9.951.914.446,00**							**9.695.499.270,00**	

5.3.29 Kecamatan Sanrobone

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Sanrobone							1.234.709.602,00	1.540.396.538,00	1.521.029.290,00							1.508.589.920,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.234.709.602,00	1.540.396.538,00	1.521.029.290,00							1.508.589.920,00	
	7	01				KECAMATAN							1.234.709.602,00	1.540.396.538,00	1.521.029.290,00							1.508.589.920,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	1.213.209.602,00	1.518.896.538,00	1.499.529.290,00							1.487.089.920,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		7.500.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.050.119.682,00	1.386.405.938,00	1.386.405.938,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		1.302.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.048.119.682,00	1.384.405.938,00	1.365.038.690,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.300.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE

	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.000.000,00	2.035.600,00	2.035.600,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.035.600,00	2.035.600,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	72.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		72.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			13.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	57.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			57.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	36.589.920,00	35.955.000,00	35.955.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		48.589.920,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.589.920,00	11.955.000,00	11.955.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.589.920,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			36.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	45.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		55.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
2	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00							18.500.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.500.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.500.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6.00 Lembaga Kemasyarakatan	6.00 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
3	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00							3.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6.00 Laporan	6.00 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Sanrobone, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN SANROBONE
	JUMLAH												**1.234.709.602,00**	**1.540.396.538,00**	**1.521.029.290,00**							**1.508.589.920,00**	

5.3.30 Kecamatan Polongbangkeng Selatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Polongbangkeng Selatan							6.221.549.130,00	7.500.008.412,00	7.400.506.270,00							10.107.701.756,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							6.221.549.130,00	7.500.008.412,00	7.400.506.270,00							10.107.701.756,00	
	7	01				KECAMATAN							6.221.549.130,00	7.500.008.412,00	7.400.506.270,00							10.107.701.756,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	5.561.924.130,00	6.185.592.512,00	6.062.443.672,00							9.836.701.756,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	41.000.000,00	42.333.400,00	42.333.400,00			-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	2.433.400,00	2.433.400,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	23.000.000,00	24.900.000,00	9.620.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.222.483.038,00	5.376.881.652,00	5.376.881.652,00			-	-	-		9.359.301.756,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	4.213.483.038,00	5.370.881.652,00	5.247.732.812,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	-	-			4.671.650.878,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				52 Dokumen	52 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.671.650.878,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

																Umum						
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	0	0	2.0	00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																

		1	1	3	01																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	

							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	314.791.092,00	178.598.460,00	178.598.460,00			-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		18.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	156.228.592,00	7.266.960,00	11.878.960,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	6 Paket	158.562.500,00	164.481.500,00	164.481.500,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	0 Laporan	0,00	6.850.000,00	2.518.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	314.125.000,00	36.729.000,00	36.729.000,00			-	-	-		17.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				52 Unit	52 Unit	314.125.000,00	36.729.000,00	51.729.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	647.525.000,00	531.050.000,00	531.050.000,00			-	-	-		350.400.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				129 Laporan	6 Laporan	647.525.000,00	531.050.000,00	531.050.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi	-	-			350.400.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

																Hasil						
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	307.000.000,00	0,00	0,00							62.000.000,00	

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	307.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		62.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	305.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			12.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	310.625.000,00	1.287.165.900,00	1.310.812.598,00							55.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			-	-	-		49.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1.00 Lembaga Kemasyarakatan	1.00 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			44.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	303.125.000,00	1.279.665.900,00	1.279.665.900,00			-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	0	0	2.0	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

		1	3	2	01																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1.00 Lembaga Kemasyarakatan	1.00 Lembaga Kemasyarakatan	303.125.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	0 1	0 3	2.0 2	00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	6 Unit	0,00	937.444.500,00	937.444.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	0 1	0 3	2.0 2	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
4	7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00								68.000.000,00	
	7	0 1	0 4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			-	-	-			68.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			44.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00							75.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan				1 Orang	50 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

							dan Ketahanan Nasional																
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	14.500.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00							11.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	14.500.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00			-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	5 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

							Pemerintahan Desa										Alokasi Umum						
	7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			2.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			2.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan				5 Dokumen	5 Dokumen	2.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN

							Desa										Umum						
	J U M L A H											**6.221.549.130,00**	**7.500.008.412,00**	**7.400.506.270,00**							**10.107.701.756,00**	

5.3.31 Kecamatan Polongbangken Utara

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Polongbangkeng Utara							7.627.425.342,00	9.114.859.704,00	8.957.594.696,00							8.795.427.910,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							7.627.425.342,00	9.114.859.704,00	8.957.594.696,00							8.795.427.910,00	
	7	01				KECAMATAN							7.627.425.342,00	9.114.859.704,00	8.957.594.696,00							8.795.427.910,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	7.576.810.642,00	7.817.769.704,00	7.660.504.696,00							7.565.035.248,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	31.241.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00			-	-	-		8.680.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.256.000,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			680.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.265.600,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.265.600,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.094.100,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.094.100,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.265.600,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	5.665.874.642,00	7.163.729.704,00	7.163.729.704,00			-	-	-		7.114.169.528,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79.00 Orang/bulan	79.00 Orang/bulan	5.663.298.342,00	7.162.369.704,00	7.005.121.896,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			7.112.169.528,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.136.100,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.440.200,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00			-	-	-		1.360.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	680.000,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			680.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.00 Laporan	4.00 Laporan	680.000,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			680.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	-	1.398.270.900,00	129.605.700,00	129.605.700,00			-	-	-		320.220.900,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7.00 Paket	7.00 Paket	22.904.200,00	9.293.000,00	9.293.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			22.904.200,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	532.070.000,00	44.786.000,00	44.786.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			172.720.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7 Paket	359.615.000,00	7.687.700,00	7.687.700,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			265.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	7 Paket	12.693.700,00	9.305.000,00	9.305.000,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			12.693.700,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	24 Dokumen	19.080.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			19.080.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	7 Laporan	384.400.000,00	18.254.000,00	18.254.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.050.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	35 Laporan	67.508.000,00	37.880.000,00	37.880.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			67.508.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	439.834.400,00	476.562.000,00	476.562.000,00			-	-	-		80.375.120,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	50.134.400,00	65.232.000,00	63.214.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			50.125.120,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	30.250.000,00	14.730.000,00	14.730.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.250.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	359.450.000,00	396.600.000,00	396.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	40.229.700,00	42.432.300,00	42.432.300,00			-	-	-		40.229.700,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	12.679.700,00	24.572.300,00	26.572.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			12.679.700,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7 Unit	27.550.000,00	17.860.000,00	17.860.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			27.550.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	11.582.500,00	5.420.000,00	5.420.000,00							11.582.500,00	

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	1.850.000,00	680.000,00	680.000,00			-	-	-		1.850.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.850.000,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.850.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	8.660.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00			-	-	-		8.660.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.660.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.660.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	1.072.500,00	680.000,00	680.000,00			-	-	-		1.072.500,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.072.500,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.072.500,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	30.225.000,00	1.288.950.000,00	1.288.950.000,00							1.210.002.962,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	0,00	1.272.950.000,00	1.272.950.000,00			-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah	-		1.179.777.962,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	12 Unit	0,00	1.115.746.700,00	1.115.746.700,00	Kab. Takalar, Polombangkeng Utara, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah			1.022.574.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	30.225.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00			-	-	-		30.225.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	30.225.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.225.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	1.210.000,00	680.000,00	680.000,00							1.210.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	1.210.000,00	680.000,00	680.000,00			-	-	-		1.210.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	1.210.000,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.210.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	7.597.200,00	2.040.000,00	2.040.000,00							7.597.200,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	-	-			-	-	7.597.200,00	2.040.000,00	2.040.000,00			-	-	-		7.597.200,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

						Desa																
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	3.835.000,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.835.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	1.712.200,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.712.200,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	7 Laporan	2.050.000,00	680.000,00	680.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.050.000,00	KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
												JUMLAH	**7.627.425.342,00**	**9.114.859.704,00**	**8.957.594.696,00**							**8.795.427.910,00**	

5.3.32 Kecamatan Mangarabombang

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Mangarabombang							2.973.545.618,30	3.493.414.715,00	3.457.450.387,00							4.556.348.400,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.973.545.618,30	3.493.414.715,00	3.457.450.387,00							4.556.348.400,00	
	7	01				KECAMATAN							2.973.545.618,30	3.493.414.715,00	3.457.450.387,00							4.556.348.400,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	2.885.745.618,30	3.318.932.585,00	3.282.968.257,00							4.343.599.900,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.900.000,00	8.594.200,00	8.594.200,00			-	-	-		19.600.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.100.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.100.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.800.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.300.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.214.200,00	1.214.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.800.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	650.000,00	650.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.300.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.300.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.483.591.788,30	3.077.795.285,00	3.077.795.285,00			-	-	-		3.924.154.900,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31.00 Orang/bulan	31.00 Orang/bulan	2.479.691.788,30	3.073.675.285,00	3.037.710.957,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	-	-			3.917.038.400,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.100.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.816.500,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.800.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.300.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.675.000,00	4.126.300,00	4.126.300,00			-	-	-		6.125.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.175.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.175.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.321.300,00	1.321.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.250.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.700.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	4.500.000,00	9.525.000,00	9.525.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26.00 Paket	26.00 Paket	4.500.000,00	9.525.000,00	9.525.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	60.725.000,00	82.843.700,00	82.843.700,00			-	-	-		181.978.250,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.025.000,00	1.352.200,00	1.352.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.847.300,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	25.000.000,00	30.021.300,00	30.021.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			56.445.950,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	700.000,00	692.100,00	692.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	1.200.000,00	1.278.100,00	1.278.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			6.415.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	2.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			11.700.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.00 Laporan	90.00 Laporan	30.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			102.570.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	299.853.830,00	114.648.700,00	114.648.700,00			-	-	-		151.400.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	41.053.830,00	39.098.700,00	39.098.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20.00 Laporan	20.00 Laporan	258.800.000,00	75.550.000,00	75.550.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			111.400.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	21.500.000,00	21.399.400,00	21.399.400,00			-	-	-		60.341.750,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	15.500.000,00	16.839.400,00	16.839.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			54.541.750,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.800.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	14.582.500,00	8.621.200,00	8.621.200,00								18.913.500,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	4.000.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00			-	-	-			7.100.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	

							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.000.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.100.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	8.082.500,00	4.616.200,00	4.616.200,00			-	-	-		8.273.500,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.500.000,00	2.766.200,00	2.766.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.691.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	2.582.500,00	1.850.000,00	1.850.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.582.500,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	-	2.500.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		3.540.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			3.540.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	64.000.000,00	165.860.930,00	165.860.930,00							178.570.000,00	

	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	3.500.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		4.850.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12.00 Lembaga Kemasyarakatan	12.00 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			4.850.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	50.000.000,00	162.840.930,00	162.840.930,00			-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1.00 Unit	1.00 Unit	30.000.000,00	154.296.030,00	154.296.030,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Keluraha	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

																	n					
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5.00 Pokmas / Ormas	5.00 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	8.544.900,00	8.544.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Keluraha n	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	7.500.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00			-	-	-		20.220.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				12.00 Lembaga Kemasyarakatan	12.00 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			16.220.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			4.000.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	-	3.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		3.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																	

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50.00 Keluarga	50.00 Keluarga	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			3.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	5.500.000,00	0,00	0,00							6.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	2.500.000,00	0,00	0,00			-	-	-		4.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG

	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	-	3.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		1.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		1.500.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	1.350.000,00	0,00	0,00							3.315.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	1.350.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		3.315.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																	

							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	12 Laporan	1.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			3.315.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	2.367.500,00	0,00	0,00							5.950.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	2.367.500,00	0,00	0,00			-	-	-		5.950.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11.00 Dokumen	11.00 Dokumen	1.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.150.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	1.017.500,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.800.000,00	KECAMATAN MANGARABOMBANG
	JUMLAH												**2.973.545.618,30**	**3.493.414.715,00**	**3.457.450.387,00**							**4.556.348.400,00**	

5.3.33 Kecamatan Mappakasunggu

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Mappakasunggu							2.339.218.430,00	2.816.487.865,00	2.783.596.905,00							3.635.483.160,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.339.218.430,00	2.816.487.865,00	2.783.596.905,00							3.635.483.160,00	
	7	01				KECAMATAN							2.339.218.430,00	2.816.487.865,00	2.783.596.905,00							3.635.483.160,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	2.242.493.430,00	2.482.041.665,00	2.449.150.705,00							3.335.483.160,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	13.952.000,00	11.826.700,00	11.826.700,00			-	-	-		9.275.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.724.000,00	2.017.200,00	2.017.200,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.855.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.742.000,00	1.978.900,00	1.978.900,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.855.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.266.000,00	2.295.600,00	2.295.600,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.855.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.840.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.415.000,00	745.000,00	745.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.855.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.965.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.855.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.796.133.350,00	2.257.101.765,00	2.257.101.765,00			-	-	-		3.294.776.700,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1.790.810.350,00	2.251.757.465,00	2.218.866.505,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.291.066.700,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.972.000,00	1.993.300,00	1.993.300,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.855.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.351.000,00	3.351.000,00	3.351.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.855.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	30.000.000,00	27.543.000,00	27.543.000,00			-	-	-		31.431.460,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	9.000.000,00	12.243.000,00	12.243.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			21.800.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	1.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.631.460,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				96 Laporan	96 Laporan	12.000.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-	-	-			0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

																	Dana Alokasi Umum						
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	348.408.080,00	156.352.200,00	156.352.200,00			-	-	-			0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.208.080,00	8.752.200,00	8.752.200,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	339.200.000,00	147.600.000,00	147.600.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	54.000.000,00	29.218.000,00	29.218.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	54.000.000,00	29.218.000,00	29.218.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	4.725.000,00	4.725.000,00	4.725.000,00							0,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	4.725.000,00	4.725.000,00	4.725.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	1 Laporan	4.725.000,00	4.725.000,00	4.725.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU

3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	74.000.000,00	311.721.200,00	311.721.200,00						300.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	50.000.000,00	287.721.200,00	287.721.200,00			-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah	-		300.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	3 Unit	0,00	123.060.000,00	123.060.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Takalar	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	2. Penguatan Infrastruktur Wilayah			300.000.000,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	164.661.200,00	164.661.200,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00							0,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Takalar, Mappakasunggu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			0,00	KECAMATAN MAPPAKASUNGGU
												JUMLAH	**2.339.218.430,00**	**2.816.487.865,00**	**2.783.596.905,00**							**3.635.483.160,00**	

5.3.34 Kecamatan Galesong

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Galesong							1.587.668.256,00	1.914.203.298,00	1.890.646.250,00							2.338.740.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.587.668.256,00	1.914.203.298,00	1.890.646.250,00							2.338.740.000,00	
	7	01				KECAMATAN							1.587.668.256,00	1.914.203.298,00	1.890.646.250,00							2.338.740.000,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.559.668.256,00	1.884.951.298,00	1.861.394.250,00							2.315.240.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	9.541.000,00	10.685.000,00	10.685.000,00			-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.041.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.399.107.131,00	1.756.880.798,00	1.756.880.798,00			-	-	-		2.148.740.000,00	KECAMATAN GALESONG

	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.397.107.131,00	1.754.430.798,00	1.730.873.750,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			2.146.240.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00			-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/De	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	KECAMATAN GALESONG

																sa						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	71.009.000,00	45.958.000,00	45.958.000,00			-	-	-		52.500.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	12 Paket	13.500.000,00	7.475.000,00	12.123.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.115.000,00	4.698.000,00	4.881.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	6 Dokumen	2.544.000,00	720.000,00	1.440.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	48.850.000,00	33.065.000,00	27.514.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua	Pajak Daerah	-	-			46.000.000,00	KECAMATAN GALESONG

																Kel/Desa						
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	40.561.125,00	39.772.500,00	39.772.500,00			-	-	-		57.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	16.561.125,00	15.772.500,00	15.772.500,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			42.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	37.450.000,00	29.405.000,00	29.405.000,00			-	-	-		46.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	30.620.000,00	24.485.000,00	24.485.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			36.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3 Unit	3.410.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.420.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	4.500.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00							4.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	2.500.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00			-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG

	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	-	2.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00			-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	18.500.000,00	18.425.000,00	18.425.000,00							15.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	4.500.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00			-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				17 Lembaga Kemasyarakatan	17 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	14.000.000,00	13.085.000,00	13.085.000,00			-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				17 Laporan	4 Laporan	14.000.000,00	13.085.000,00	13.085.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	2.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00							2.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	2.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00			-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4.00 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	2.500.000,00	2.502.000,00	2.502.000,00							2.500.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	2.500.000,00	2.502.000,00	2.502.000,00			-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN GALESONG
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				17 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.502.000,00	2.502.000,00	Kab. Takalar, Galesong, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN GALESONG
												JUMLAH	**1.587.668.256,00**	**1.914.203.298,00**	**1.890.646.250,00**							**2.338.740.000,00**	

5.3.35 Kecamatan Galesong Selatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Galesong Selatan							1.631.465.276,00	2.085.392.438,00	2.058.786.190,00							2.585.663.800,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.631.465.276,00	2.085.392.438,00	2.058.786.190,00							2.585.663.800,00	
	7	01				KECAMATAN							1.631.465.276,00	2.085.392.438,00	2.058.786.190,00							2.585.663.800,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.615.415.276,00	2.062.245.838,00	2.035.639.590,00							2.568.513.800,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	14.500.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00			-	-	-		17.650.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.500.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.750.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.750.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.800.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/De	Pajak Daerah	-	-			3.300.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN

							Perubahan DPA-SKPD									sa						
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.350.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.441.825.976,00	1.939.082.438,00	1.939.082.438,00			-	-	-		2.353.219.800,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17.00 Orang/bulan	17.00 Orang/bulan	1.439.125.976,00	1.936.382.438,00	1.909.776.190,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			2.350.519.800,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.700.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.500.000,00	1.661.900,00	1.661.900,00			-	-	-		1.500.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																

							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.500.000,00	1.661.900,00	1.661.900,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.500.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	41.861.700,00	45.295.500,00	45.295.500,00			-	-	-		74.416.400,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	22.066.400,00	14.936.600,00	14.936.600,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	5.000.000,00	4.993.600,00	4.993.600,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.250.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.500.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	Kab. Takalar, Galesong	Pajak Daerah	-	-			1.750.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN

							Perundang-Undangan yang Disediakan									Selatan, Semua Kel/Desa							
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	13.295.300,00	23.805.300,00	23.805.300,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			47.416.400,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	78.844.000,00	29.010.000,00	29.010.000,00			-	-	-		84.844.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	17.994.000,00	11.010.000,00	11.010.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			17.994.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	36.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			36.850.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN

	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	24.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	36.883.600,00	31.196.000,00	31.196.000,00			-	-	-		36.883.600,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2.00 Unit	2.00 Unit	36.883.600,00	31.196.000,00	31.196.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			36.883.600,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00							4.600.000,00	

	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00			-	-	-		2.300.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.300.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00			-	-	-		2.300.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				30.00 Dokumen	30.00 Dokumen	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.300.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.400.000,00	12.612.800,00	12.612.800,00							4.700.000,00	

	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	4.400.000,00	12.612.800,00	12.612.800,00			-	-	-		4.700.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1.00 Lembaga Kemasyarakatan	1.00 Lembaga Kemasyarakatan	2.200.000,00	10.412.800,00	10.412.800,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.350.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.350.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	2.750.000,00	1.891.600,00	1.891.600,00							3.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	2.750.000,00	1.891.600,00	1.891.600,00			-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.750.000,00	1.891.600,00	1.891.600,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	4.450.000,00	4.192.200,00	4.192.200,00							4.850.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	4.450.000,00	4.192.200,00	4.192.200,00			-	-	-		4.850.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.250.000,00	1.992.200,00	1.992.200,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Takalar, Galesong Selatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.350.000,00	KECAMATAN GALESONG SELATAN
	JUMLAH											**1.631.465.276,00**	**2.085.392.438,00**	**2.058.786.190,00**							**2.585.663.800,00**	

5.3.36 Kecamatan Galesong Utara

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Galesong Utara							2.812.542.858,00	3.467.155.128,00	3.418.657.568,00							4.024.686.400,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.812.542.858,00	3.467.155.128,00	3.418.657.568,00							4.024.686.400,00	
	7	01				KECAMATAN							2.812.542.858,00	3.467.155.128,00	3.418.657.568,00							4.024.686.400,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.535.042.858,00	3.129.044.928,00	3.080.547.368,00							3.903.306.400,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	8.000.000,00	14.180.000,00	14.180.000,00			-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.000.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	4.015.000,00	4.015.000,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	0 1	0 1	2.0 1	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	0 1	0 1	2.0 1	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	0 1	0 1	2.0 1	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	0 1	0 1	2.0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.282.218.45 8,00	2.856.110.92 8,00	2.856.110.92 8,00			-	-	-		3.628.478.40 0,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	0 1	0 1	2.0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1040 Orang/bula n	1040 Orang/bula n	2.278.218.45 8,00	2.852.375.92 8,00	2.803.878.36 8,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapa tan Bagi Hasil Pajak	-	-			3.624.478.40 0,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	0 1	0 1	2.0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	0 1	0 1	2.0 2	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	0 1	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.000.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00			-	-	-		2.000.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	0 1	0 1	2.0 3	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	0 1	0 1	2.0 3	00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			1.000.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	71.630.000,00	74.964.400,00	74.964.400,00			-	-	-		68.430.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				160 Paket	160 Paket	8.040.000,00	11.699.400,00	11.699.400,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.360.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2000 Paket	2000 Paket	840.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			570.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				340 Laporan	340 Laporan	62.750.000,00	61.765.000,00	61.765.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			60.500.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	134.324.400,00	157.928.000,00	157.928.000,00			-	-	-		155.528.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	33.524.400,00	31.928.000,00	31.928.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			31.928.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	3 Laporan	100.800.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah Pendapa tan Bagi Hasil	-	-			123.600.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	36.870.000,00	22.901.600,00	22.901.600,00			-	-	-		36.870.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	28.140.000,00	20.512.000,00	20.512.000,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			28.140.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	8.000.000,00	1.049.600,00	1.049.600,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			8.000.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	730.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			730.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA

2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							4.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	-	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	265.500.000,00	332.110.200,00	332.110.200,00						111.380.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			-	-	-	3.500.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				27 Lembaga Kemasyarakatan	27 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.500.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	250.000.000,00	305.060.200,00	305.060.200,00			-	-	-	91.880.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2.00 Lembaga Kemasyarakatan	2.00 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				300 Unit	300 Unit	89.880.000,00	111.780.000,00	111.780.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurah	-	-			89.880.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

																an						
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	110.120.000,00	192.071.200,00	192.071.200,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			0,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	12.000.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00			-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			14.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				50 Laporan	50 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							2.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
5	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00							4.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Galesong Utara, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN GALESONG UTARA

	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	13 Dokumen	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Galeson g Utara, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			0,00	KECAMA TAN GALESON G UTARA
	JUMLAH													**2.812.542.858,00**	**3.467.155.128,00**	**3.418.657.568,00**						**4.024.686.400,00**	

5.3.37 Kecamatan Kepulauan Tanakeke

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Kepulauan Tanakeke							1.286.558.200,00	1.696.148.372,00	1.673.698.252,00							1.456.828.234,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.286.558.200,00	1.696.148.372,00	1.673.698.252,00							1.456.828.234,00	
	7	01				KECAMATAN							1.286.558.200,00	1.696.148.372,00	1.673.698.252,00							1.456.828.234,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	1.258.658.200,00	1.673.103.472,00	1.644.383.352,00							1.428.928.234,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	31.000.000,00	22.442.700,00	22.442.700,00			-	-	-		31.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.660.600,00	2.660.600,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	13.500.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.315.300,00	3.315.300,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.000.000,00	2.636.200,00	2.636.200,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	2.830.600,00	2.830.600,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	1.116.207.715,00	1.558.204.348,00	1.558.204.348,00			-	-	-		1.319.235.634,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				156 Orang/bulan	156 Orang/bulan	1.107.207.715,00	1.548.852.748,00	1.526.402.628,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			1.310.235.634,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.351.600,00	4.351.600,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

																Kel/Desa							
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	65.100.000,00	51.841.800,00	51.841.800,00			-	-	-		34.600.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	34.902.800,00	290.800,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			0,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Des	Pajak Daerah	-	-			1.800.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

																a							
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	59.500.000,0 0	15.139.000,0 0	32.981.000,0 0	Kab. Takalar , Kepula uan Tanake ke, Semua Kel/Des a	Pajak Daerah	-	-			29.800.000,0 0	KECAMA TAN KEPULAU AN TANAKE KE
	7	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	29.350.485,0 0	23.695.624,0 0	23.695.624,0 0			-	-	-			27.092.600,0 0	KECAMA TAN KEPULAU AN TANAKE KE
	7	0 1	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.350.485,00	5.095.624,00	5.095.624,00	Kab. Takalar , Kepula uan Tanake ke, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.092.600,00	KECAMA TAN KEPULAU AN TANAKE KE
	7	0 1	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,0 0	18.600.000,0 0	18.600.000,0 0	Kab. Takalar , Kepula uan Tanake ke, Semua Kel/Des	Pajak Daerah	-	-			22.000.000,0 0	KECAMA TAN KEPULAU AN TANAKE KE

																a							
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	12.000.000,00	11.919.000,00	11.919.000,00			-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	12.000.000,00	11.919.000,00	11.919.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
2	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	20.400.000,00	17.651.700,00	22.021.700,00							20.400.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	20.400.000,00	17.651.700,00	17.651.700,00			-	-	-		20.400.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	6.081.000,00	10.451.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	14.400.000,00	11.570.700,00	11.570.700,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			14.400.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
3	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00							2.500.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Des	Pajak Daerah	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE

																a							
4	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	5.000.000,00	2.893.200,00	4.793.200,00							5.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	5.000.000,00	2.893.200,00	2.893.200,00			-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	5.000.000,00	2.893.200,00	4.793.200,00	Kab. Takalar, Kepulauan Tanakeke, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE
	JUMLAH												**1.286.558.200,00**	**1.696.148.372,00**	**1.673.698.252,00**							**1.456.828.234,00**	

5.3.38 Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik							19.876.341.773,95	28.074.070.747,00	28.402.615.763,00							20.454.338.879,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							19.876.341.773,95	28.074.070.747,00	28.402.615.763,00							20.454.338.879,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							19.876.341.773,95	28.074.070.747,00	28.402.615.763,00							20.454.338.879,00	
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	2.269.185.628,95	3.002.813.447,00	3.062.530.463,00							2.847.275.734,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	18.833.648,00	19.015.000,00	19.015.000,00			-	-	-		18.833.648,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.754.400,00	2.646.700,00	2.646.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.754.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.860.000,00	2.865.600,00	2.865.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.860.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.620.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.620.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.860.000,00	2.208.300,00	2.208.300,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.860.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.323.848,00	4.324.000,00	4.324.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.323.848,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	2.895.400,00	2.895.400,00	2.895.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.895.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.069.071.770,95	2.798.465.228,00	2.798.465.228,00			-	-	-		2.639.919.170,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23.00 Orang/bulan	23.00 Orang/bulan	2.062.397.570,95	2.791.791.028,00	2.745.336.044,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapata	-	-			2.633.244.970,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

																	n Bagi Hasil						
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.182.600,00	3.182.600,00	3.182.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.182.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.491.600,00	3.491.600,00	3.491.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.491.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.559.810,00	10.472.100,00	10.472.100,00			-	-	-		10.559.810,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.860.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.999.810,00	2.912.100,00	2.912.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.999.810,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.631.100,00	11.149.800,00	11.149.800,00			-	-	-		10.631.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	7.430.000,00	7.429.800,00	7.429.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.430.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	3.201.100,00	3.720.000,00	3.720.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			3.201.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	47.283.097,00	54.442.100,00	54.442.100,00			-	-	-		56.190.287,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	3.252.087,00	3.366.100,00	3.366.100,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.252.087,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	678.000,00	749.500,00	15.749.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			678.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	2.582.200,00	861.700,00	861.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.582.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	2.000.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	1.840.000,00	1.838.800,00	1.838.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.840.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan,	Pajak Daerah	-	-			3.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

																Semua Kel/Desa						POLITIK
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	30.030.810,00	37.078.000,00	128.250.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			38.938.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	80.834.203,00	78.579.719,00	78.579.719,00			-	-	-		79.169.719,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34.954.203,00	33.289.719,00	33.289.719,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			33.289.719,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	3.880.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.880.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			42.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	31.972.000,00	30.689.500,00	30.689.500,00			-	-	-		31.972.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2.00 Unit	2.00 Unit	31.972.000,00	30.689.500,00	30.689.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			31.972.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-				-	-	14.382.550,00	615.621.600,00	615.621.600,00							14.382.550,00	

	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	-	14.382.550,00	615.621.600,00	615.621.600,00			-	-	-		14.382.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				9 Orang	9 Orang	5.428.813,00	5.428.600,00	5.428.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.428.813,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				11 Orang	11 Orang	3.597.670,00	3.597.400,00	3.597.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.597.670,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	

							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 Laporan	2 Laporan	5.299.270,00	6.200.000,00	6.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.299.270,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																		
							Jumlah Paskibraka				75.00 Orang	75.00 Orang	56.797,00	600.395.600,00	600.395.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah	-	-			56.797,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-				-	-	17.553.194.000,00	23.764.869.000,00	23.673.697.000,00							17.553.194.000,00	

	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	-	17.553.194.000,00	23.764.869.000,00	23.764.869.000,00			-	-	-		17.553.194.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12.00 Orang	16.00 Orang	17.546.754.300,00	23.658.439.000,00	23.658.439.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			17.546.754.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	6.439.700,00	106.430.000,00	15.258.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			6.439.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	7.224.850,00	7.556.400,00	7.556.400,00							6.812.900,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	-	7.224.850,00	7.556.400,00	7.556.400,00			-	-	-		6.812.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				8 Orang	8 Orang	3.818.400,00	3.720.000,00	3.720.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.406.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.406.450,00	3.836.400,00	3.836.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.406.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	11.895.750,00	13.020.000,00	13.020.000,00								12.214.700,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan	-	-			-	-	11.895.750,00	13.020.000,00	13.020.000,00			-	-	-			12.214.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

						Budaya																
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				10.00 Orang	10.00 Orang	4.117.500,00	4.960.000,00	4.960.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.117.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				10.00 Orang	10.00 Orang	3.729.650,00	3.720.000,00	3.720.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.048.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		

							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	4.048.600,00	4.340.000,00	4.340.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			4.048.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	20.458.995,00	670.190.300,00	1.030.190.300,00							20.458.995,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	-	20.458.995,00	670.190.300,00	670.190.300,00			-	-	-		20.458.995,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				54 Orang	54 Orang	6.735.100,00	156.734.900,00	156.734.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA	-	-			6.735.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				57 Orang	57 Orang	5.936.200,00	5.936.200,00	365.936.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			5.936.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10 Laporan	10 Laporan	5.882.950,00	5.723.600,00	5.723.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.882.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				48 Dokumen	48 Dokumen	1.904.745,00	501.795.600,00	501.795.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA	-	-			1.904.745,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
										JUMLAH		**19.876.341.773,95**	**28.074.070.747,00**	**28.402.615.763,00**							**20.454.338.879,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator Suistanable Development Goals (SDGs), dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembanguan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. PDRB Perkapita
3. Tingkat Kemiskinan
4. Tingkat Penganggurasn Terbuka (TPT)
   - Jumlah Penganggur (Ribu orang)
5. Gini Ratio
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
   - Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
   - Harapan Lama Sekolah (HLS)
   - Angka Harapan Hidup (AHH)
   - Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)
   - ADHB
   - ADHK

Target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI-1
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Takalar Tahun 2023-2025

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target RKPD tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,86	5,04-6,52	5,04-6,52	6,10 – 7,14
2.	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,29	6,9	6,9	6,69
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,38	2,5	2,5	2,2
4.	Indeks Gini	Angka / Nilai	0,386 (Maret 2023)	0,35	0,35	0,34
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka / Nilai	71,46	72,85	72,85	73,45
6.	PDRB Perkapita (ADHB)	Jt. Rp.	41,14	43,38	43,38	49,52

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2024

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini

Indikator kinerja daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RPJMD yang digariskan pada tahun yang penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKU daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian indikator sasaran RPJMD yang digariskan pada Tahun 2022. Penetapan IKU juga merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Takalar. Lebih lanjut Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Takalar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel VI-2 berikut ini :

Tabel VI-2
Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Takalar Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Asumsi Capaian Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Tahun 2025
			Target	Capaian Tahun 2023			
1	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	2,45	3,21	3,51	3,51	3,9
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	68,83	71,46	72,85	72,85	73,45
3	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	2.9.174	33,88	34,18	34,18	35,18
4	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	34,03	41,14	49,52	49,52	51,24
5	Indeks Gini	Angka	0,35	0,386 (Maret 2023)	0,35	0,35	0,34
6	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,62-5,98	3,86	5,04-6,52	5,04-6,52	6,10-7,14
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,32	3,58	2,5	2,5	2,2
8	Angka kemiskinan (%)	Persen	7,09	8,29	6,9	6,9	6,69
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Angka	59,02	66,23 (Konversi Rumus Lama), 70,29 (Konversi Rumus Baru)	70,5	70,5	70,72

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Asumsi Capaian Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Tahun 2025
			Target	Capaian Tahun 2023			
10	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Predikat	BB (71-80)	CC (52,33)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)
11	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B (60-70)	B (63,37)	B (60-70)	B (60-70)	BB (71-80)
12	Indeks Kepatuhan Terhadap SPM (Capaian Standar Minimal)	Persen	60 - 70	93,78	90 - 100	90 - 100	90 - 100
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B (76,61 - 88,30)	B (80,16)	B (76,61 - 88,30)	B (76,61 - 88,30)	B (76,61 - 88,30)
14	Angka kriminalitas	Persen	91,91 per 100.000 Penduduk		89,41 per 100.000 Penduduk	89,41 per 100.000 Penduduk	86,91 per 100.000 Penduduk

Sumber : BPS, RPD 2023-2026

6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indkator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023 Kabupaten Takalar sudah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 merujuk pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-3
Asumsi Capaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Takalar

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	Layanan Urusan Wajib Dasar				
	Pendidikan				**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	IKK Outcome				
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (negeri dan swasta)	Sekolah	209	209	
			Akreditasi A = 3	Akreditasi A = 3	
			Akreditasi B = 115	Akreditasi B = 115	
			Akreditasi C = 53	Akreditasi C = 53	
			Tahap Penilaian : 39	Tahap Penilaian : 39	
2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Orang	7866	7866	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	7866	7866	
4	Jumlah minimal kebutuhan pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Orang	408	408	
5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Orang	607	607	
6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dinai, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	495	495	
			S1/D.IV = 495	S1/D.IV = 495	
			Psikolog =	Psikolog =	
			Sertifikat Profesi Guru PAUD = 172	Sertifikat Profesi Guru PAUD = 172	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Orang	76	76	
			S1/D.IV = 3	S1/D.IV = 3	
			Sertifikat pendidikan/ surat tanda tamat pendidikan/ dan pelatihan calon kepala sekolah PAUD formal	Sertifikat pendidikan/ surat tanda tamat pendidikan/ dan pelatihan calon kepala sekolah PAUD formal	
			S1/D.IV = 73	S1/D.IV = 73	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
			Sertifikat pendidikan/ surat tanda tamat pendidikan/ dan pelatihan calon kepala sekolah PAUD non formal	Sertifikat pendidikan/ surat tanda tamat pendidikan/ dan pelatihan calon kepala sekolah PAUD non formal	
	IKK Outcome				
2	Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah SD Terakreditasi	Sekolah	239	239	
			SD	SD	
			Akreditasi A = 19	Akreditasi A = 19	
			Akreditasi B = 163	Akreditasi B = 163	
			Akreditasi C = 55	Akreditasi C = 55	
			Belum Terakreditasi = 3	Belum Terakreditasi = 3	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
2	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	orang	32275	32275	
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	orang	12482	12482	
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		32775	32775	
5	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		207	207	
6	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		2452	2452	
7	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		207	207	
8	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		668	668	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		2452	2452	
			S1/D.IV = 2452	S1/D.IV = 2452	
			Sertifikat pendidik = 1081	Sertifikat pendidik = 1081	
10	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	240	240	
			S1/D.IV = 240	S1/D.IV = 240	
			Sertifikat pendidik = 234	Sertifikat pendidik = 234	
			surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah = 240	surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah = 240	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
11	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Menengah) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	orang	202	202	
	IKK Outcome				
3	Tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah SMP Negeri terakreditasi		43	43	
			Akreditasi A = 11	Akreditasi A = 11	
			Akreditasi B = 16	Akreditasi B = 16	
			Akreditasi C = 16	Akreditasi C = 16	
			Belum Terakreditasi = 5	Belum Terakreditasi = 5	
2	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Orang	12482	12482	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	12482	12482	
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	48	48	
5	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	1088	1088	
6	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	48	48	
7	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	329	329	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	1032	1032	
			S1/D.IV = 1032	S1/D.IV = 1032	
			Sertifikat pendidik = 558	Sertifikat pendidik = 558	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
9	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	48	48	
			S1/D.IV = 48	S1/D.IV = 48	
			Sertifikat pendidik = 48	Sertifikat pendidik = 48	
			surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah = 48	surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah = 48	
10	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	orang	254	254	
	IKK Outcome				
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	IKK Output				
1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	lembaga	11	11	
			Akreditasi A = 1	Akreditasi A = 1	
			Akreditasi B = 8	Akreditasi B = 8	
			Akreditasi C = 2	Akreditasi C = 2	
			Belum Terakreditasi = 38	Belum Terakreditasi = 38	
2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	Orang	10780	10780	
3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	orang	10780	10780	
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	orang	176	176	
5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	orang	237	237	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	orang	136	136	
7	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	48	48	
			S1/D.IV = 48	S1/D.IV = 48	
			Sertifikat Pendidik = 0	Sertifikat Pendidik = 0	
			surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah = 0	surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah = 0	
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	orang	48	48	
	Kesehatan				**Dinas Kesehatan**
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	2	2	
	IKK Output				
1	Jumlah RS rujukan Kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehata (SPA) sesuai standar	Rumah Sakit			
	IKK Outcome				
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen			
	IKK Output				
2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Rumah Sakit			
	IKK Outcome				
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia				
	a. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			
	b. Tablet tambah darah	tablet			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	c. Alat deteksi risiko ibu hamil				
	- tes kehamilan	pack			
	- pemeriksaan Hb	strip			
	- pemeriksaan golongan darah	strip			
	- Pemeriksaan glukoprotein urin	-			
	d. Kartu ibu/rekam medis ibu	lembar			
	e. Buku KIA	buah			
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal				
	a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan	orang			
	b. Bidan	orang			
	c. Perawat	orang			
	IKK Outcome				
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia				
	a. Formulir partograf	lembar			
	b. Kartu ibu (rekam medis)	lembar			
	c. Buku KIA	buah			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar				
	a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan	orang			
	b. Bidan	orang			
	c. Perawat	orang			
	IKK Outcome				
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia				
	a. Vaksin Hepatitis B0	vial			
	b. Vitamin K1 Injeksi	ampul			
	c. Salep/tetes mata antibiotik	tube			
	d. Formulir Bayi Baru Lahir	lembar			
	e. Formulir MTBM	lembar			
	f. Buku KIA	buah			
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar				
	a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan	orang			
	b. Bidan	orang			
	c. Perawat	orang			
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia				
	a. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	lembar			
	b. Formulir DDTK	lembar			
	c. Buku KIA	buah			
	d. Vitamin A Biru	tablet			
	e. Vitamin A Merah	tablet			
	f. Vaksin imunisasi dasar :				
	HB0	vial			
	BCG	vial			
	Polio	vial			
	IPV	vial			
	DPT-HB-Hib	vial			
	Campak	vial			
	Rubell	Vaksin			
	g. Vaksin imunisasi Lanjutan : DPT-HB-Hib	vial			
	Campak	Vaksin			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	Rubella	Vaksin			
	h. Jarum suntik dan BHP	pcs			
	i. Peralatan anafilaktik	-			
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
	a. Dokter	orang			
	b. Bidan	orang			
	c. Perawat	orang			
	d. Gizi	orang			
	IKK Outcome				
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia				
	a. Buku Rapor Kesehatanku	-			
	b. Buku Pemantauan Kesehatan	-			
	c. Kuesioner Skrining kesehatan	lembar			
	d. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	lembar			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	e. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.	lembar			
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar				
	a. Dokter/ dokter gigi	orang			
	b. Bidan	orang			
	c. Perawat	orang			
	d. Gizi	orang			
	e. Tenaga kesehatan masyarakat	orang			
	IKK Outcome				
8	Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia				
	a. Pedoman dan media KIE	-			
	b. - Alat ukur berat badan,	buah			
	- Alat ukur tinggi badan,	buah			
	- Alat ukur lingkarperut,	buah			
	- Tensimeter,	buah			
	- Glukometer,	buah			
	- Tes strip gula darah,	-			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	- Lancet	-			
	- Kapas alkohol,	-			
	- KIT IVA tes.	-			
	c. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM)	buku			
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar				
	a. Dokter	orang			
	b. Bidan	orang			
	c. Perawat	orang			
	d. Gizi	orang			
	e. Tenaga kesehatan masyarakat	orang			
	IKK Outcome				
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia				
	a. - Strip uji pemeriksaan :				
	- Gula darah	-			
	- Kolesterol	-			
	b. - Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS),	-			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	- Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT)	-			
	- Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	-			
	c. Buku Kesehatan Lansia	-			
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar				
	a. Dokter	orang			
	b. Bidan	orang			
	c. Perawat	orang			
	d. Gizi	orang			
	e. Tenaga kesehatan masyarakat	orang			
	IKK Outcome				
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia				
	a. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE	-			
	b. Tensimeter	buah			
	c. Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	buku			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	d. Obat Hipertensi	Paket			
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar				
	a. Dokter	orang			
	b. Bidan	orang			
	c. Perawat	orang			
	d. Tenaga kesehatan masyarakat	orang			
	IKK Outcome				
11	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia				
	a. • Glukometer	buah			
	• Strip tes Gula Darah	-			
	• Kapas Alkohol	-			
	• Lancet	-			
	b. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM	buku			
	c. Pedoman dan media KIE	-			
	f. Obat Diabetes Melitus	Paket			
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar				
	a. Dokter	orang			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	b. Bidan	orang			
	c. Perawat	orang			
	d. Gizi	orang			
	e. Tenaga kesehatan masyarakat	orang			
	IKK Outcome				
12	Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia				
	a. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	-			
	b. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	-			
	c. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	-			
	d. Media KIE	-			
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar				
	a. Dokter	orang			
	c. Perawat terlatih jiwa	-			
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
13	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia				
	a. Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	media			
	b. Reagen Zn TB	paket			
	c. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket			
	d. Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi,ether alkohol lampu spirtus/bunsen,ose/lidi), rak pengering	Paket			
	e. Catridge Tes cepat Molekuler	Paket			
	f. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen			
	g. Pedoman/ standar operasional prosedur	Dokumen			
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar				
	a. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	orang			
	b. Perawat	orang			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	c. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	orang			
	d. Penata Rontgen	orang			
	e. Tenaga kesehatan masyarakat	orang			
	IKK Outcome				
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia				
	a. Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	media			
	b. Tes Cepat HIV (RDT) pertama)	Paket			
	c. Bahan medis habis pakai handschoen, alkohol swab, plester, lancet/jarum steril, jarum spuit yg sesuai/vacutainer dan jarum sesuai	Paket			
	c. - Alat tulis - Rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket			
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	a. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin	orang			
	b. Perawat	orang			
	c. Bidan	orang			
	d. ATLM	orang			
	e. Tenaga kesehatan masyarakat	orang			
	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang				**Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman**
	IKK Outcome				
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Ha	0	0	
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	m	0	0	
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kabupaten/kota	Persen	100	100	
	IKK Output				
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenanagan kabupaten/kota (ha)	Persen	0	0	
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	m	0	0	
5	Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	ada	ada	
6	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	ada	ada	
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	1. Bangunan perkuatan tebing = (m)				
	2. Tanggul sungai = (m)				
	3. Kanal banjir = (m)				
	4. Pintu air/ bendung pengendali banjir = (unit)				
	5. Pompa banjir = (unit dan Kapasitas)				
	6. Polder / kolam referensi = (Unit)				
	7. Breakwater = (m)				
	8. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya = (m)				
	IKK Outcome				
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	%			
2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	74,23	74,23	
3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%			
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadapa air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota (ada/tidak)	Dokumen	Legalisasi	Legalisasi	
2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten/kota (ada/tidak)	Dokumen			
3	Jumlah BUMD dan/atau UPTD kab/kota penyelenggara SPAM (ada/tidak)	BUMD/KPSPAM	BUMD (1)KPSPAM (54)	BUMD (1)KPSPAM (54)	
4	Jumlah izin yang diberikan kepada badan usha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	BUMD	1 (Perumda)	1 (Perumda)	
5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain	SPAM REGIONAL	1(SPAM REGIONAL)	1(SPAM REGIONAL)	
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	Unit	3.656	3.656	
2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	SR	1.611	1.611	
3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	Unit	5.267	5.267	
4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	RT	50	50	
5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	RT	50	50	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	RT	5.317	5.317	
7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	Persen	98,12	98,12	
8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	Persen	0,75	0,75	
9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	Persen	15,7	15,7	
10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Persen	35,73	35,73	
11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan kumpur tinja	Persen	100	100	
12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Persen	100	100	
13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Persen	100	100	
14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Persen	0,75	0,75	
	IKK Outcome				
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Persen			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
2	Jumlah IMB yang diberikan oleh pemerintah kab/kota dalam tahun eksisting	izin			
3	Penetapan peraturan daerah tentang bangunan/ gedung (Ada/Tidak)	Dokumen			
4	Penetapan keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/Tidak)	Dokumen			
5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh bupati/ walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Unit			
6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Waikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Unit			
7	Jumlah bangunan gedung Negara milik pemerintah kab/kota	Unit			
8	Jumlah bangunan gedung Negara milik peemrintah kabupaten/ kota yang dipelihara/ dirawat	0			
	IKK Outcome				
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	100	100	
	IKK Output				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
1	Panjang jalan berdasarakan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/kota	km	754,49	754,49	
2	Panjang jalan yang dibangun	km	-	-	
3	Panjang jembatan yang dibangun	km	-	-	
4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/ fungsi)	m	-	-	
5	Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan	m	-	-	
6	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	km	15	15	
7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	-	-	
8	Panjang jalan yang dipelihara	m			
9	Panjang jembatan yang dipelihara	m	-	-	
	IKK Outcome				
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah pelatihan tenaga operator / teknis/ analisis di wilayah kabupaten/ kota	Kegiatan			
2	Jumlah tenaga kerja operator / teknis / analis yang terlatih di wilayah kabupaten/ kota	Orang			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator / teknis / analis yang terlatih di wilayah kabupaten/ kota	Orang			
4	Terselenggaranya System Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Kegiatan			
5	Tersedianya data dari informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD kab/kota	Dokumen			
6	Tersedianya data dari informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Dokumen			
7	Tersedianya data dari informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/ kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Dokumen			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Dokumen			
9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/ kota	Dokumen			
10	Tersedianya data dari informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/ analis konstruksi di wilayah kabupaten/ kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan pelatihan kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Dokumen			
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis	Orang			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/ analis di wilayah kab/kota	Dokumen			
13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Badan Usaha			
14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Dokumen			
15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dokumen			
16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dokumen			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
17	Tersedianaya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Dokumen			
18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Badan Usaha			
19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Badan Usaha			
20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota	Badan Usaha			
21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Badan Usaha			
22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha perseorangan yang memiliki TDUP yang disetujui	Dokumen			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuj dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Kegiatan			
24	Jumlah kecelakaan konstrukasi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Kejadian			
25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.	Kegiatan			
	IKK Outcome				
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konsruksi	Persen	100	100	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				**Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman**
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah Rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Unit	7.228	7.228	
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Unit	18	18	
3	Jumlah RT, RK dan jiwa korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam	Orang	140	140	
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	0	0	
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencanan aksi	Unit	3	3	
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/ relokasi sesuai dengan rencana aksi	Unit	0	0	
7	Jumlah unit dan lokasi rumah yang sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Unit	0	0	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
8	Jumlah RT, KK, dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Orang	5	5	
9	Jumlah luasan dan lokasi pencadangan lahan	Ha	0	0	
	IKK Outcome				
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian asset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	1	1	
2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	15	15	
3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	0	0	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	1	1	
5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	RT	0	0	
6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Ha	0	0	
	IKK Outcome				
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/kota yang ditangani	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Ha	55,57	55,57	
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	120	120	
3	Jumlah luasan (Ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Ha	0	0	
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	Unit	70.333	70.333	
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	20	20	
3	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	5650	5650	
4	Rasio rumah dan KK	Rasio	0,77629386	0,77629386	
5	Jumlah rumah pembangunan baru	Unit	0	0	
	IKK Outcome				
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah perumahan yang terfasiliatsi PSU	Unit	69	69	
2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Unit			
3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Unit	70.333	70.333	
4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on side/off side)	Unit			
5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Unit	0	0	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Unit			
7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Perusahaan	7	7	
8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	Perusahaan	7	7	
9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Perusahaan	0	0	
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				**Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
	IKK Outcome				
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/ kota yang ditangani	Pengaduan			
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	orang			
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda/ perbub			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	orang			
5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Dokumen			
6	Tersedianya sarana prasarana minimal	unit			
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	IKK Outcome				
3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/ legal	Persen	0,00%	0,00%	
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen			
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai sampai dinyatakan sah/ legal	Persen	0,00%	0,00%	
2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Persen	0,00%	0,00%	
3	Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	Orang			
4	Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	Orang			
5	Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulamgan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Persen	10,00%	10,00%	
6	Persentase warga Negara yang mendapat layanan perlindungan	Persen			
	IKK Outcome				
5	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	
	IKK Output				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Persen			
2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persen			
3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Persen			
4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Persen			
	IKK Outcome				
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	
	IKK Output				
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan di Kab/kota	Kejadian	150	150	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
2	Tersedianya pos sector damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di Kantor kecamatan	Pos	3	3	
3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Orang	20	20	
4	Pos damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/ desa	Pos	0	0	
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Unit	11	11	
6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam kebakaran	Orang	5	5	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Orang	220	220	
8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Kegiatan	1	1	
	Sosial				**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**
	IKK Outcome				
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Orang	11235	11235	
2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0rang	17267	17267	
3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	orang	20	20	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	0rang	27000	27000	
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kadaruratan yang dimiliki	Unit	4	4	
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Orang	50	50	
7	Jumlah runah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	N/A	0	0	
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Orang	50	50	
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	orang (Berupa tongkat adaptif u disabilitas)	50	50	
10	Jumlah alat bantu yang tersedia dirumah singgah/ shelter	N/A	0	0	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	0	0	
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	0	0	
13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan dirumah singgah	0	0	0	
14	Jumlah pekerja social professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	0	167	167	
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/shelter dan/ atau pusat kesejahteraan social	0	240	240	
16	Jumlah bimbingan social yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	240	240	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	3	3	
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0rang	900	900	
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Orang	3	3	
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0	3	3	
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
2	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	orang	500	500	
2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	orang	500	500	
3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	0	0	
4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	0	0	
5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	500	500	
6	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan social dan/ atau relawan social yang tersedia	orang	167	167	
	a. Pekerja sosial profesional	orang	47	47	
	b. Tenaga kesejahteraan sosial	orang	10	10	
	c. Relawan sosial	orang	110	110	
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	Tenaga Kerja				**Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	IKK Outcome				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kab/kota	Dokumen			
2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	%			
3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Perusahaan			
	IKK Outcome				
2	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%			
2	Persentase infrastruktur bersertifikat kompetensi	%			
3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Orang			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
4	Persentase LPK yang terakreditasi	0			
5	Persentase LPK yang memiliki jumlah penganggur yang dilatih	LPK			
6	Jumlah penganggur yang dilatih	Orang			
7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Orang			
8	Persentase penyerapan lulusan	%			
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Orang			
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0			
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0			
	IKK Outcome				
3	Tingkat produktivitas Tenaga Kerja	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Perusahaan			
2	Data tingkat produktivitas total				
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Perusahaan			
2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Perusahaan			
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat,federasi SP/SB yang tercatat SP/SB di perusahaan yang tercatat SP/ SB diluar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	SP			
4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Perusahaan			
5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	Perusahaan			
6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Perusahaan			
7	Jumlah mogok kerja	0			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
8	Jumlah penutupan perusahaan	Perusahaan			
9	Jumlah perselisihan kepentingan	Perusahaan			
10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0			
11	Jumlah perselisihan PHK	Perselisihan			
12	Jumlah pekerja/buruh yang ter PHK	Orang			
14	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Perusahaan			
15	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/kota yang diberdayakan	0			
16	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Perusahaan			
	IKK Outcome				
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	79	79	
	IKK Output				
1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten.kota	Orang			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Orang			
3	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kab/kota	0			
4	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kab/kota	0			
5	Jumlah pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0			
6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja local dalam satu wilayah kabupaten/kota	Lembaga			
7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh Dinas bidang ketenagakerjaan kab/kota	Dokumen			
8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang			
9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang mendapatkan sosialisasi	Orang			
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0			
12	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0			
13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0			
14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	0			
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka**
	IKK Outcome				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	95	95	
	IKK Output				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/ kota yang telah dilatih PUG	orang			
2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/ kota	Program			
	IKK Outcome				
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/ Kota	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerjasama dengan pemkab/kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Lembar			
2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal yang dimaksud seperti apa, dan dasar regulasinya)	Lembaga			
3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Kasus			
4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Lembaga			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD Kab/kota)	Lembaga			
	IKK Outcome				
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapatkan pelatihan	Lembaga			
2	Jumlah kader permpuan di tingkat Kabupaten/kota yang sudah dilatih	kader			
3	umlah layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	kader			
4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Lembaga			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Persen			
6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Persen			
7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persen			
	Pangan				**Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan**
	IKK Outcome				
1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	10	10	
	IKK Output				
1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Unit	1	1	
2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Komoditi	11	11	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Regulasi	0	0	
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Kegiatan	5	5	
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dokumen	1	1	
6	Tertanganinya kerawanan pangan	Kecamatan	0	0	
7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ton	0	0	
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Kecamatan	10	10	
	Pertanahan				**Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan**
	IKK Outcome				
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	SK Izin Lokais yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota	SK			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
2	SK Bupati/Wali Kota tentang penetapan tanah obyek *Landreform* yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/ absente dan daftar subyek	SK			
3	SK Bupati/Wali Kota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemeilik tanah kelebihan maksimum/ absente	SK			
4	Dokumen izin membuka tanah	Dokumen			
5	Dokumen perencanaan penggunaan tanah kabupaten/kota	Dokumen			
	IKK Outcome				
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	60	60	
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	100	100	
4	Tersedianya tanah obyek *Landreform* (TOL) yang siap direditribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absente	Persen	100	100	
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	100	100	
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	Lingkungan Hidup				**Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan**
	IKK Outcome				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka	70,29 capaian Tahun 2023	70,29 capaian Tahun 2023	Menggunakan Konversi Rumus Baru
	IKK Output				
1	Hasil perhitungan provinsi terhadap:				
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	70,48 capaian Tahun 2023		Menggunakan Konversi Rumus Baru
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	78,53 capaian Tahun 2023		Menggunakan Konversi Rumus Baru
	c. Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	Angka	54,75 capaian Tahun 2023		Menggunakan Konversi Rumus Baru
	c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Angka			
	IKK Outcome				
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	M3			
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100	100	
	IKK Output				
1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Izin			
2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Persen			
3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	Persen			
4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hokum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Persen			
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Lembaga			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
6	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani	Persen			
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				**Dinas Kependudukan dan Catatatan Sipil**
	IKK Outcome				
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	97	97	
	IKK Output				
1	Penerbitan akte perkawinan	Persen			
2	Penerbitan akta perceraian	persen			
3	Penerbitan akta kematian	persen			
4	Penyajian data kependudukan	persen			
	IKK Outcome				
2	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	persen	55	55	
3	Kepemilikan akta kelahiran	persen	98	98	
4	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	persen	98	98	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	IKK Outcome				
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	persen	100	100	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	persen	13	13	
	IKK Output				
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Desa			
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Desa			
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas	Lembaga			
4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa			
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka**

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	IKK Outcome				
1	Total Fertility Rate (TFR) (Angka Kelahiran Total)	Per 1.000 WUS	2,06	2,06	
	IKK Output				
1	Tersedianya dokumen grand design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-perdakan	Dokumen			
2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Usia			
3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility rate/ASFR 15-19)	%			
4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%			
5	Jumlah stakeholder/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	OPD			
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	68,73	68,73	
	IKK Output				
1	Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	%			
2	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	%			
3	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Pokja			
4	Persentase pelayanan KB pasca Persalinan	%			
	IKK Outcome				
3	Persentase kebuthan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	13,28	13,28	
	IKK Output				
1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah	%			
2	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	%			
	Perhubungan				**Dinas Perhubungan**
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	N/A			
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Persen			
3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	N/A			
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	Persen			
	IKK Outcome				
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah			
	Komunikasi dan Informatika				**Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian**
	IKK Outcome				
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	25	25	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	IKK Output				
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen			
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Persen			
3	Tersedianya system eletronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan *sinyal* lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Unit			
	IKK Outcome				
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100	100	
	IKK Output				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan public pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggaraan Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Persen			
2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Persen			
3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	Persen			
4	Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Persen			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Persen			
6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan	Persen			
7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah	Persen			
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Persen			
9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Persen			
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Persen			
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Persen			
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	Persen			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas Kominfo	Persen			
14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Dokumen			
	IKK Outcome				
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota	persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Persen			
2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Persen			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Persen			
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				**Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	IKK Outcome				
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	penerbitan izin			
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	izin pembukaan kantor cabang			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam darah kab/kota	pemeriksa/pengawasan			
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	usaha sinpan pimjam (USP)			
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Pelatihan			
6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	koperasi yang mengikuti pelatihan			
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	koperasi yang mengikuti diklat			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan daerah provinsi	jumlah koperasi			
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	koperasi yang memiliki sertifikat NIK			
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	pembiayaan			
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	pemasaran			
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Pendampingan			
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Kemitraan			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	IKK Outcome				
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	persen	48,79	48,79	
	IKK Output				
1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mkro	26353			
2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system *online Data system* (ODS)	1.781			
3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	17.587			
4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	9 UKM			
5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	50 UKM			
6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	517 UKM			
7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	48 UKM			
	Penanaman Modal				**Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	IKK Outcome				
1	Persentase peningkatan investasi di kab/kota	Persen	24	24	
	IKK Output				
1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Perda	Sementara Proses Di Bagian Hukum	Sementara Proses Di Bagian Hukum	
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitasi insntif penanaman modal	Dokumen SOP	Tidak Ada	Tidak Ada	
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	Laporan evaluasi	0	0	
4	Kegiatan seminar, bisnis, *forum, one on one meeting*	Kegiatan	0	0	
5	Kegiatan pameran penanaman modal	Kegiatan	tidak Perna Dilakukan Karena Keterbatasan Anggaran	tidak Perna Dilakukan Karena Keterbatasan Anggaran	
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kegiatan	3	3	
7	Konsultasi penerimaan misi penanaman modal	Konsultasi	6	6	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
8	Penertbitan perizinandan non perizinan penanaman modal	Izin	2017 S/D 22200	2017 S/D 22200	
9	Laporan realisasi penanaman modal	Nilai	17,24	17,24	
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab/kota	Orang	0	0	
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Perusahaan	0	0	
12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kab/kota	Jumlah permintaaan data yang ditenuhi	10	10	
	Kepemudaan dan Olahraga				**Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**
	IKK Outcome				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewiarusahaan	Orang			
2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Orang			
	IKK Outcome				
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	100	100	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	IKK Output				
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kependuduka, kesukarewalanan dan kepeloporan pemuda	Orang			
2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Pengelola Organisasi			
	IKK Outcome				
3	Peningkatan prestasi olahraga	persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan – satuan pendidikan	Pelatih			
2	Jumlah penyelenggaraan even olahraga prestasi tingkat daerah	Even			
	Statistik				**Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian**
	IKK Outcome				
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	25	30	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	25	30	
	IKK Output				
1	Tersedianya buku profil daerah				
2	Jumlah survey statistic sektoral yang dilakukan				
3	Jumlah kompilasi statistic sektoral yang dilakukan				
4	Jumlah survey statistic sektoral yang mendapat rekomendari dari BPS				
5	Jumlah kompilasi statistic sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS				
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistic sektoral				
7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral				
	Persandian				**Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian**
	IKK Outcome				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	28,57	28,57	
	IKK Output				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
1	Persentase kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamatan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan				
2	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip – prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian disbanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah Daerah				
3	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit denganresiko kategori rendah				
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan				
	Kebudayaan				**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	IKK Outcome				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	persen	100	100	
	IKK Output				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)				
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)				
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)				
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)				
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)				
6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
7	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data				
8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)				
9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)				
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum				
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum				
12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kab/kota				
13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya				
14	Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten/kota				
15	Fasilitas serifikasi tim ahli cagar budaya				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
16	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseman				
17	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman				
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman				
19	Penyelenggraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat				
	Perpustakaan				**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	IKK Outcome				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	100	100	
	IKK Output				
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	buku			
2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%			
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	orang			
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%			
5	Jumlah permasyarakatan gemar membaca di masyarakat	orang			
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih mdia (digitalisasi/ terdaftar yang ada diwilayahnya	naskah			
2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	naskah			
3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya (item)	buku			
	Kearsipan				**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	IKK Outcome				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional) pasal 40 dan pasal 50 Undang – undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	persen			
2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	persen			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	persen			
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	persen			
	IKK Outcome				
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persen	77,29	77,29	
	IKK Output				
1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Arsip			
2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Arsip			
3	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab/kota yang sesuai NSPK di provinsi	Arsip			
4	Autensifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	Arsip			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Arsip			
6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Arsip			
	Layanan Urusan Pilihan				
	Kelautan dan Perikanan				**Dinas Perikanan**
	IKK Outcome				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/kota (sumber data: *one* data KKP)	persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP			
2	Persentase tempat Pelelangan Ikan yang operasional	%			
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kab/kota yang diterbitkan	-			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses Iptek dan Informasi/ dan penguatan kelembagaan	Kelompok			
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	Ekor			
	Pariwisata				**Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**
	IKK Outcome				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	persen	100	100	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	persen	100	100	
3	Tingkat hunian akomodasi	persen	100	100	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	100	100	
5	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	persen	100	100	
	IKK Output				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Orang			
2	Jumlah kelengkapan Infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Gazebo			
3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kab/kota	TDUP			
4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Orang			
5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Event			
6	Jumlah even luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Event			
7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Industri Pariwisata			
8	Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi	Persen			
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Persen			
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	Pertanian				**Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan**
	IKK Outcome				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	58,14	58,14	
	IKK Output				
1	Jumlah sarana pertanian yang diberikan	Unit	200	200	
2	Prasarana pertanian yang digunakan	Unit	105	105	
3	Penerbitan izin usaha pertanian	-	0	0	
4	Persentase prasarana yang digunakan	Persen	100	100	
5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	-	0	0	
	IKK Outcome				
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana				
	Perdagangan				**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
	IKK Outcome				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin:				
	a. Pusat kelengkapan				
	b. Toko swalayan				
2	Persentase penerbitan TDG				
3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG				
4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk				
	a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri				
	b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri				
	c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab/kota				
6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu				
7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu				
	IKK Outcome				
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	100	100	
	IKK Output				
1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan				
	IKK Outcome				
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	100	100	
	IKK Output				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera/ tera ulang dalam tahun berjalan				
2	Persentase kesesuaian BDRT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku				
	Perindustrian				**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
	IKK Outcome				
1	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industry (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota	industri			
	IKK Outcome				
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	persen	100	100	
	IKK Output				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
1	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	dokumen perda			
	IKK Outcome				
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	izin industri			
	IKK Outcome				
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	100	100	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	persen	100	100	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	IKK Output				
1	Persentase jumlah izin perluasan industry (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan2.	izin industri			
	IKK Outcome				
6	Tersedianya informal industry secara lengkap dan terkini	persen	100	100	
	IKK Output				
1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	industri			
	Transmigrasi				**Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	IKK Output				
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Lokasi			
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Lokasi			
3	Jumlah satuan permukiman yang bina	Lokasi			

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
	Penunjang Urusan Pemerintahan				
	Perencanaan dan Keuangan				
	IKK Outcome				
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	persen	100	100	**Badan Keuangan Aset Daerah**
2	Rasio PAD	persen	100	100	**Badan Pendapatan Aset Daerah**
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	persen	100	100	**Inspektorat**
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	persen	100	100	**Inspektorat**
5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	persen	100	100	**Badan Pendapatan Aset Daerah**
6	Opini laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	**Badan Keuangan Aset Daerah**
	Pengadaan				**Bagian Barang dan Jasa Setda**
	IKK Outcome				
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	persen	0	0	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	persen	100	100	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	persen	100	100	

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah	persen	100	100	
	Kepegawaian				**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	IKK Outcome				
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	100	100	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	100	100	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	100	100	
	Manajemen Keuangan				**Badan Keuangan dan Aset Daerah**
	IKK Outcome				
1	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD				

No.	IKK Outcome / IKK Outcome	Satuan	Asusmsi Capaian 2024	Target RKPD 2024	OPD Penanggung Jawab
2	Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD				
3	Aset Management				
4	Cash Management : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya				
	Transparansi dan Partisipasi Publik				
	IKK Outcome				
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan				
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)				

Sumber Data: Bapppelitbangda Kabupaten Takalar Tahun 2023, Data Diolah

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal kemudian lebih teknis dijelaskan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-4
Realisasi SPM Kabupaten Takalar Tahun 2023 dan Target 2024 (Permendagri No 59 Tahun 2021)

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2024
				Tahun 2022	Tahun 2023	
Pendidikan						
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartispasi dalam PAUD	Persen	100	67,39	76,63	100
Pendidikan Dasar						
	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar					
	SD	Persen	100	91,09	87,63	100
	SMP	Persen	100	68,14	62	100
Pendidikan Keseteraan						
	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100		17,31	100
Kemampuan Literasi						
	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Persen				

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2024
				Tahun 2022	Tahun 2023	
	SD			37,08	44,33	100
	SMP			47,53	49,75	100
Kemampua Numerasi						
	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	Persen				
	SD			29,39	35	
	SMP			49,08	48,51	
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B						
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	100	68,18	65,17	100
Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4						
	Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV	Persen	100	62,93	62,18	100
Iklim Keamanan						
	Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan					
	SD	Persen	100	64,12	67,78	100
	SMP	Persen	100	64,14	64,27	100
Iklim Kebhinekaan						
	Indeks Iklim Kebhinekaan di Satuan Pendidikan					
	SD	Persen	100	59,51	65,88	100

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2024
				Tahun 2022	Tahun 2023	
	SMP	Persen	100	58,84	64,17	100
Iklim Inklusivitas						
	Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan					
	SD	Persen	100	51,85	54,9	100
	SMP	Persen	100	51,28	53,57	100
Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	90,73	89,42	100
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	95,52	92,25	100
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	97,13	95,11	100
Pelayanan kesehatan balita						
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	95,85	73,08	100
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						
	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	92,63	98,19	100
Pelayanan kesehatan pada usia produktif,						

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2024
				Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	72,91	78,89	100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;						
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	71,92	80,13	100
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi						
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	44,82	48,46	100
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus						
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	94,48	96,73	100
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat						
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	100	85,83	90,22	100
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis						
	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	77,41	48,3	100
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus)						

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2024
				Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	84,29	94,12	100
Pekerjaan Umum						
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	100	98,8		100
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	85,64		100
Perumahan Permukiman						
Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota						
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	92,74		100
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota						

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2024
				Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	tidak terdapat relokasi program pemerintah daerah	tidak terdapat relokasi program pemerintah daerah	100
Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100			100
Pelayanan informasi rawan bencana						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100			100
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100			100
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	Persen	100			100

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2024
				Tahun 2022	Tahun 2023	
	penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	100			100
Sosial						
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti						
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	71,4		100
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti						
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	67,18		100
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti						
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	11,67		100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti						

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Tahun 2024
				Tahun 2022	Tahun 2023	
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	0		100
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota						
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	100		100

Sumber Data: Bagian Pemrintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023, Data Diolah

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penetapan target tahun 2024 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut :

Tabel VI-5
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Takalar Tahun 2024

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun								
1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional								
(1.2.1*)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS/ Dinas Sosial dan PMD	Persen	8,29	6,9	6,9	Menurunnya Tingkat kemiskinan menjadi 6,0 – 7,0 %	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS	Persen	72,85	100	100	Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN menjadi 98%	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan	Persen		87,9	87,9	Meningkatnya cakupan kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 74,57% untuk pekerja formal dan 25,94o/o untuk peke{a informal	Dinas PMPTSP Nakertrans
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Bidang Rehabilitasi sosial	Persen		100	100		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Bidang Rehabilitasi sosial	Rumah Tangga		19.848	19.848		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		Persen	92,3	93	93		Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		Persen	100	100	100		Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Persen		68,73	68,73		Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Bidang Binkesmas	Persen	97,20	100	100	Meningkatkan akses air minum layak menjadi 100%, tahun dasar 2020 :90,21%	Dinas PUPRPKP dan Dinas Kesehatan
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.		Persen	97,96	65,60	65,60	Meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%, tahun dasar 2020 : 79,53%	Dinas PUPRPKP dan Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.		Persen		71,81	71,81		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.		Persen		66,17	66,17		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Data Agregat Kependudukan	Persen		100	100		Dinas Kependudukan dan Capil
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Surat rekomendasi pengajuan subsidi listrik (Bidang Rehabiitasi Sosial)	Persen		PM	PM		PLN
1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal akibat bencana per 100.000 orang.	Laporan kejadian bencana BPBD Kab. Takalar Tahun 2020	Per 100.000 Orang		PM	PM		BPBD dan Dinas Sosial PMD
	Jumlah korban hilang akibat bencana per 100.000 orang.	Laporan kejadian bencana BPBD Kab. Takalar Tahun 2020	Per 100.000 Orang		PM	PM		BPBD dan Dinas Sosial PMD

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
	Jumlah korban terluka akibat bencana per 100.000 orang.	Laporan kejadian bencana BPBD Kab. Takalar Tahun 2020	Per 100.000 Orang		PM	PM		BPBD dan Dinas Sosial PMD
	Jumlah korban mengungsi akibat bencana per 100.000 orang.	Laporan kejadian bencana BPBD Kab. Takalar Tahun 2020	Per 100.000 Orang		PM	PM		BPBD dan Dinas Sosial PMD
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Renstra BPBD 2018 - 2022	Lokasi		7	7		BPBD dan Dinas Sosial PMD
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Bidang Rehabilitasi Sosial	Persen		100	100		BPBD dan Dinas Sosial PMD
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.		Persen		PM	PM		BPBD dan Dinas Sosial PMD
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)		Daerah		7	7		BPBD dan Dinas Sosial PMD
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.				PM	PM		BPBD dan Dinas Sosial PMD
1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Bidang FAkir Miskin (KUBE)	Persen		100	100		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Laporan Realisasi APBD	Persen		37	37		BPKD
Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan								
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Bidang Ketahanan Pangan	Persen		6,53	6,53		Dinas TPHPKP
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.		Persen	4,6	18	18		Dinas Kesehatan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Bidang Ketahanan Pangan	Persen		3,75	3,75		Dinas TPHPKP
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Bidang Ketahanan Pangan	Persen		7,7	7,7		Dinas TPHPKP

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		Persen	2,67	21,57	21,57	prevalensi balita sangat pendek dibawah target nasional sebesar 14%	Dinas Kesehatan
	Prevalensi stunting (pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		Persen	6,62			prevalensi balita dengan status gizi pendek dibawah target nasional sebesar 14 %	
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		Persen	3,38	31,4	31,4	prevalensi Anak dibawah usia 2 tahun yang sangat pendek dibawah angka nasional 14%	Dinas Kesehatan
	Prevalensi stunting (pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		Persen	7,34			prevalensi anak usia dibawah 2 tahun yang pendek nilainya dibawah target nasional adalah	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
							14%	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		Persen	5,2	7,48	7,48	prevalensi berada dibawah angka nasional balita bermasalah gizi berat badan menurut tinggi badan tipe sanagat kurus yaitu7,7 %	Dinas Kesehatan
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Kurus		Persen	4,43			prevalensi berada sedikit dibawah angka nasional nasional yaitu 7,7%	

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Sangat Kurus		Persen	0,76			capaian prevalensi balita sangat kurus indikator Berat badan menurut tinggi badan berada dibawah angka nasional sebesar 7,7%	
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Gemuk		Persen	0,88			prevalensi balita gemuk di bawah angka nasional 3,5% di tahun 2022	
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Sangat Gemuk (Obesitas)		Persen	0,33			prevalensi balita overweight lebih rendah dibanding angka nasional sebesar 3,5%	
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.		Persen	1,3	26,4	26,4	angka prevalensi lebih tinggi dari target nasional yaitu 0%.	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.		Persen	76,1	80	80	Meningkatnya jumlah bayi usia kurang 6 bulan yang mendapatkan Asi eksklusif menjadi 100%	Dinas Kesehatan
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.		Kkal/Kapita/Hari		88,4	88,4		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).		Persen					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia								
3.1.Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).		Per 100.000 KH	142,3	187,38	187,38	Menurunnya angka kematian ibu	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.		Persen	92,3	100	100	Meningkatnya persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan menjadi 100%	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		Persen	92,3	93	93	Meningkatnya persalinan di fasyankes menjadi 100%	Dinas Kesehatan
3.2.Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.		Per 1000 KH	3	0,51	0,51	Menurunnya angka kematian balita	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.		Per 1000 KH	2,3	3,62	3,62	Menurunnya angka kematian neonatal	Dinas Kesehatan
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		Per 1000 KH	3	3,62	3,62	Menurunnya angka kematian bayi	Dinas Kesehatan
3.3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya								
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.		Persen	8	<0,5	<0,5	Menurunnya jumlah kasus HIV	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		Per 100.000 Penduduk	280	178	178	Meningkatnya penemuan kasus sebanyak mungkin untuk menuju eliminasi TBC Tahun 2030	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.		Per 1000 Penduduk	0,1	<1/1.000 penduduk	<1/1.000 penduduk	API/kejadian malarian <1	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis).		Persen	Tidak kasus	<5	<5	Tidak ada kasus	Dinas Kesehatan
	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta).		Persen	33	<25	<25	Menurunnya angka prevalensi penderita kusta di <1 perjumlah penduduk	
3.4.Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		Persen	2,77	7,04	7,04	Menurunnya prevalensi merokok pada usia ≤18 tahun sebanyak 9,3%	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.		Persen	48,4	18,08	18,08	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		Persen	3	9,51	9,51	Menurunnya jumlah obesitas pada usia ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.		Persen		PM	PM		Dinas Kesehatan dan Kepolisian
3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		Persen		1,89	1,89		Dinas Kesehatan dan Satpol PP Damkar dan Penyelamatan
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.		Persen					Dinas Kesehatan dan Satpol PP Damkar dan Penyelamatan
3.7.Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode		Persen		73,82	73,82		Dinas PPKBPPPA

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
	modern.							
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Persen					Dinas PPKBPPPA
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		Persen		17,78	17,78		Dinas PPKBPPPA
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Persen		2,31	2,31		Dinas PPKBPPPA
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		Persen		1,87	1,87		Dinas PPKBPPPA
3.8.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang								
3.8.1.(a)	*Unmet need pelayanan kesehatan.*		Persen	N/A	13,28	13,28	*N/A*	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		Persen	997	1.000	1.000	Tercovernya seluruh masyarakat pada program asuransi kesehatan	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		Persen	99,66	100	100	Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN menjadi 100%	Dinas Kesehatan
3.9.Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.								
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.		Persen	Tidak Ada Kasus	PM	PM	Tidak Ada Kasus	Dinas Kesehatan
3.a.Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		Persen	3,57	PM	PM	Menurunnya jumlah perokok pada usia ≥15 tahun	Dinas Kesehatan
3.b.Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.		Persen	94,12	100	100	Meningkatnya ketersdiaan obat dan vaksin di Puskesmas menjadi 100%	Dianas Kesehatan
3.c.Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		Per 1000 Penduduk					Dianas Kesehatan
Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua								
4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.		Persen		100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.		Persen		78,82	78,82		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.		Persen		65,44	65,44		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.		Persen		109,21	109,21		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.		Persen		83,34	83,34		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.		Tahun		8,99	8,99		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.2.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		Persen		47,65	47,65		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.4.Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.								
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).		Persen		PM	PM		Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		Persen		87,81	87,81		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki SD/MI/sederajat		Persen					
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki SMP/MTs/sederajat		Persen					
4.6.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.		Persen		83,75	83,75		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.		Persen		PM	PM		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.a.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		Persen		PM	PM		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.c.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP dan Kesetaraan yang bersertifikat pendidik.				53,33	53,33		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	TK		Persen					
	SD		Persen					
	SMP		Persen					
	Kesetaraan		Persen					
Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan								
5.1.Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung		Dokumen		3	3		Dinas PPKBPPPA

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
	pemberdayaan perempuan.							
5.2.Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. (Kekerasan Fisik)		Persen		0,62	0,62		Dinas PPKBPPPA
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. (Kekerasan Seksual)		Persen					
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. (Kekerasan Fisik dan/atau Seksual)		Persen					

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. (Kekerasan Emosional)		Persen					
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Persen		0,0006	0,0006		Dinas PPKBPPPA
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.		Persen		0,62	0,62		Dinas PPKBPPPA
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		Persen		100	100		Dinas PPKBPPPA
5.3.Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun.		Persen		15,06	15,06		Dinas PPKBPPPA

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.		Persen		1,19	1,19		
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.		Tahun		24	24		Dinas PPKBPPPA
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Persen		16	16		Dinas PPKBPPPA
5.5.Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		Persen		30	30		Dinas PPKBPPPA
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.		Persen		47,73	47,73		Dinas PPKBPPPA
5.6.Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		Persen		PM	PM		Dinas PPKBPPPA
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		Persen		13,29	13,29		Dinas PPKBPPPA
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.		Persen		35	35		Dinas PPKBPPPA
5.b.Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.		Persen		76	76		Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan								
6.1.Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.		Persen	97,20	100,00	100,00		Dinas Kesehatan dan Dinas PUTRPKP

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		M3	3.579.985	6.400	6.400		Dinas PUTRPKP
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.		Persen		76,95	76,95		Dinas Kesehatan dan Dinas PUTRPKP
6.2.Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. (Rumah Tangga)		Persen	85	22	22	Meningkatnya kepemilikan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Dinas Kesehatan
	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. (Penduduk)		Persen		22	22		
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		Persen	97,96	65,6	65,6		Dinas Kesehatan dan Dinas PUTRPKP
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		Desa/Kelurahan	110	100	100	Tercapainya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	Dinas Kesehatan dan Dinas PUTRPKP

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		Desa/Kelurahan	110	0	0	Tercapainya desa/kelurahan yang ODF	Dinas Kesehatan dan Dinas PUTRPKP
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.		Persen	2,06	27	27		Dinas Kesehatan dan Dinas PUTRPKP
6.3.Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		Persen	0,03	5,5	5,5		Dinas PUTRPKP
6.3.2.(a)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.		Pollution Index		70,25	70,25		Dinas PUTRPKP
6.4.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.				ada	ada		Dinas PUTRPKP
6.5.Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).		RPDAST		1	1		Dinas PUTRPKP

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.				2	2		Dinas PUTRPKP
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.		Wilayah Sungai		2	2		Dinas PUTRPKP
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		Kegiatan		2	2		Dinas PUTRPKP
Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua								
7.2.Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		Persen		22,99	22,99		Dinas LHP
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua								
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.		Persen		5,04-6,52	5,04-6,52		BPS
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.				49,52	49,52		BPS
8.2.Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.		Persen		5,04-6,52	5,04-6,52		BPS
8.3.Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.		Persen		45,93	45,93		Dinas PMPTSP
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.		Persen		41,96	41,96		Dinas PMPTSP
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.		Persen		81,53	81,53		Dinas PMPTSP
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.		Persen		30,5	30,5		Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.		Persen		PM	PM		Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.		Persen		3,11	3,11		Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.		Persen		PM	PM		Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.6.Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).		Persen		40,27	40,27		Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.9.Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.		Persen		1,04	1,04		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.		Orang		150	150		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.		Orang		1941	1941		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.		Rupiah		1030	1030		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.		Persen		10,04	10,04		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.10.Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa		Per 100.000 penduduk		7,29	7,29		Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).		KM		<5	<5		Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.		Persen		32,5	32,5		Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi								
9.1.Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.		Dermaga		1	1		Dinas Perhubungan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.		Pelabuhan		1	1		Dinas Perhubungan
9.2.Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.		Persen		PM	PM		BPS
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.		Persen		PM	PM		BPS
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.		Persen		PM	PM		Dinas PMPTSP
9.3.Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Persen		PM	PM		Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		Persen		PM	PM		Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.								
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB.		Persen		PM	PM		Bappelitbangda
9.c.Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.		Persen		80	80		Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam		Persen		88	88		Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet		Persen		67	67		Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara								
10.1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1*	Koefisien Gini.				0,35	0,35		BPS
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		Persen		6,9	6,9		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.		Desa		0	0		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.		Desa		10	10		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
10.2.Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.		Persen		9,13	9,13		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
10.3.Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.								
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.				PM	PM		Bappelitbangda dan Bagian Hukum
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.				PM	PM		Bappelitbangda dan Bagian Hukum
10.4.Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.								
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		Persen		71,65	71,65		Dinas PMPTSP

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan								
11.1.Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.								
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		Persen		PM	PM		Dinas PUTRPKP
11.3.Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.		Lembaga		PM	PM		Dinas PUTRPKP
11.5.Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal akbiat dampak bencana per 100.000 orang.		Per 100.000 Penduduk		PM	PM		BPBD
	Jumlah korban hilangakibat terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Per 100.000 Penduduk		PM	PM		
	Jumlah korban terluka akibat terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Per 100.000 Penduduk		PM	PM		
	Jumlah korban mengungsi akibat terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Per 100.000 Penduduk		PM	PM		

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Unit		2	2		BPBD
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		Indeks Risiko Bencana		PM	PM		BPBD
11.6.Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		Persen		75,15	75,15		Dinas LHP
11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.								
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		Dokumen		1	1		BPBD
Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan								
12.4.Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).				70,5	70,5		Dinas LHP

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
12.5.Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.				2,5	2,5		Dinas LHP
12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		Perusahaan		PM	PM		Dinas PMPTSP
12.7. Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.								
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Produk		PM	PM		Dinas PMPTSP dan Dinas Kesehatan
12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.								
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.				PM	PM		Bagian Ortala dan Bappelitbangda
Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya								
13.1.Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Per 100.000 Penduduk		PM	PM		BPBD

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati								
15.3.Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.								
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		Persen		PM	PM		Dinas LHP
15.9.Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.								
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.				1	1		Dinas LHP
Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan								
16.1.Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		Kasus		<5	<5		Satpol PP Damkar dan Penyelamatan dan Kepolisian
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		per 100.000 penduduk		PM	PM		Satpol PP Damkar dan Penyelamatan dan Kepolisian
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		Persen		PM	PM		Satpol PP Damkar dan Penyelamatan dan Kepolisian

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.		Persen		PM	PM		Satpol PP Damkar dan Penyelamatan dan Kepolisian
16.2.Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.								
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.		Persen		1,93	1,93		Dinas Sosial dan PMD dan Dinas PPKBPPPA
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki		Persen		0,00078	0,00078		Dinas PPKBPPPA
	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Persen		0,00078	0,00078		
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		Persen		PM	PM		Dinas PPKBPPPA
	Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		Persen		PM	PM		
16.5.Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).				PM	PM		Inspektorat

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
16.6.Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.		Persen		96	96		BPKD
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		Persen		100	100		BPKD
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		Persen		B (>60-70)	B (>60-70)		Bagian Ortala
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.		Persen		100	100		Bagian ULP
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		Persen		100	100		Bagian Ortala
16.7.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		Persen		30	30		Dinas PPKBPPPA
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		Persen		18,18	18,18		Dinas PPKBPPPA
16.9.Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		Persen		100	100		Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		Persen		100	100		Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		Persen		100	100		Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
16.10.Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.				100	100		Dinas Komuniksi, Informatika, Statistik dan Persandian
16.b.Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.								
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		Kebijakan		PM	PM		Bagian Hukum dan Bappelitbangda
Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan								
17.1.Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		Persen		0,61	0,61		BPS
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		Persen		0,55	0,55		BPS
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.		Persen		41,41	41,41		BPS

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
17.6.Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.		Persen		PM	PM		Dinas Komuniksi, Informatika, Statistik dan Persandian
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband		Persen		80	80		Dinas Komuniksi, Informatika, Statistik dan Persandian
17.8.Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.								
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.		Persen		67	67		Dinas Komuniksi, Informatika, Statistik dan Persandian
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.		Persen		100	100		Dinas Komuniksi, Informatika, Statistik dan Persandian
17.17.Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.								
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan		Proyek		PM	PM		Bappelitbangda dan BPKD

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
	Badan Usaha (KPBU).							
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).				PM	PM		Bappelitbangda dan BPKD
17.18.Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.		Persen		PM	PM		BPS
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.		Persen		PM	PM		BPS
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		Persen		PM	PM		BPS

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Target Nasional 2024	Instansi Pelaksana
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		Persen		90	90		Bappelitbangda
17.9. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)				100	100		Dinas Kependudukan dan Capil
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.				100	100		BPS
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).		Persen		100	100		BPS

Sumber Data: Bapppelitbangda Kabupaten Takalar Tahun 2023, Data Diolah

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar. Penyusunan P-RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Adapun Target Indikator Kinerja Pembangunan dan Pagu Indikatif P-RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan capaian triwulan II tahun 2024 serta target 2024.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka proses penyusunannya Perubahan RKPD berlandaskan pada prioritas pembangunan yang akan mendukung pelaksanaan RKP sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020- 2024, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2005 – 2025, serta RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional. Dokumen Perubahan RKPD sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional memuat tema, prioritas Perubahan RKPD dan arah kebijakan serta program prioritas yang sifatnya strategis dan berupa matriks rencana program dan kegiatan prioritas setiap Perangkat Daerah disertai dengan pagu anggaran yang sifatnya indikatif dan menjadi pedoman sinergitas bagi setiap pelaku pembangunan.

Perubahan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparasi informasi publik, maka Dokumen Perubahan RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan

program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sementara itu, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Takalar selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Takalar juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Takalar sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

7.2 Kesimpulan

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini menjadi instrumen utama bagi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Takalar dan Stakholder terkait dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi pemerintahan, peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada Masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Takalar tahun 2024 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergia antar Perangkat Daerah, serta pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat

nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antar Prioritas Pemeritah Daerah dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 mempunyai fungsi pokok;

1. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2024 dengan melihat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun kedepan;
3. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan; dan
4. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Kebijakan umum anggaran dan Perubahan Prioritas plafon anggaran sementara.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini diharapkan menjadi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Kabupaten Takalar untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026.

Pj. BUPATI TAKALAR

ttd

SETIAWAN ASWAD

Perencanaan, Pengendalian &
Evaluasi Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA KAB. TAKALAR
TAHUN 2024

Jl. Syech Yusuf No. 2 Kab. Takalar 92212
bappelitbangdaperencanaan@gmail.com